SOE HOK GIE

BENTANG



ORANG-ORANG DI PERSIMPANGAN KIRI JALAN

PENGANTAR: PROF. DR. AHMAD SYAFII MA'ARIF

Kata Pengantar

Ahmad Syafii Ma'arif

Karya yang ada di tangan Anda sekarang berasal dari skripsi penulisnya untuk mendapatkan gelar sarjana dari Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, Jakarta, pada 1969 dengan judul asli *Simpang Kiri dari Sebuah Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun September 1948.* Setelah naskah ini rampung saya baca, saya mendapat kesan bahwa penulisnya adalah seorang penulis dan sejarawan berbakat. Sayang, usianya tidak panjang karena mengalami kecelakaan sewaktu mendaki gunung dalam usia yang sangat muda (17 Desember 1947–16 Desember 1969). Soe Hok Gie, adik kandung Dr. Arief Budiman, tidak saja sebagai penulis prolifik, tetapi idealisme kemanusiaannya terasa amat dalam. Karya tentang pemberontakan PKI di Madiun ini dianyam sedemikian rupa seakan-akan kita membaca sebuah novel seja-

rah dramatis yang menegangkan. Akan tetapi, penulisnya cukup hati-hati untuk tetap bersikap objektif dalam analisisnya sehingga fakta sebagai "sesuatu yang suci" dalam bangunan sejarah tetap ditempatkan pada posisi terhormat. Dalam berkisah, Soe Hok Gie tidak pernah membiarkan dirinya terpasung dalam tarikan sikap pro dan kontra. Rasionalitas dan pertimbangan yang jernih merupakan acuan dalam menyusun karya ini. Di halaman akhir dijelaskan bagaimana posisi penulis dalam membaca sebab-sebab pemberontakan yang katanya tidak mungkin diberikan secara konklusif. Kita turunkan.

> Mencari sebab-sebab sejarah melalui fakta-fakta telanjang tidak mungkin. Persoalan "provokasi", "*fait accompli*", "rencana pemberontakan", dan lain-lain tidak menjawab persoalan-persoalan yang lebih fundamental. Persoalan ini hendaknya dilihat dari persoalan-persoalan ketegangan masyarakat Indonesia (di Jawa) dalam revolusi nasional. Harapan-harapan yang tidak terpenuhi dan tekanan-tekanan ekonomi membawa frustrasi-frustrasi mendalam di seluruh lapisan masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, tendensi radikalisme segala pihak akan bertambah, lebih-lebih penyaluran-penyaluran politik dan ekonomi tidak (atau kurang) diberikan waktu itu. Radikalisme seperti perlombaan mobil di lereng gunung yang makin lama makin menyempit. Pasti suatu hari roda-roda berputar ini akan bersinggungan. Dari percikan-percikan api ini, semuanya akan dibakar.

Percikan api pertarungan ideologi di Indonesia memang banyak memakan korban. Secara kasar, kita mengenal tiga ideologi besar yang pernah beroperasi sejak permulaan pergerakan nasional awal abad ini: Islamisme, nasionalisme, dan Marxisme/sosialisme. Pada waktu Pemberontakan Madiun, secara ideologis kita melihat Marxisme menurut tafsiran Musso-Amir Sjarifudin berhadapan dengan Islamisme dan nasionalisme yang berdiri di belakang pemerintah Hatta. Sebagai pihak paling bertanggung jawab terhadap jalannya roda pemerintahan pada saat-saat genting, Hatta tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menumpas dengan cepat pemerintahan FDR (Fron Demokrasi Rakyat) yang diproklamasikan di Madiun pada 18 September 1948. Keterlambatan berarti akan lebih memudahkan Belanda untuk memukul Republik yang baru berumur sekitar tiga tahun. Dalam keadaan kritis itu, Perdana Menteri Hatta menerima surat dari van Mook yang menawarkan bantuan Belanda untuk menumpas PKI. Apa jawab Hatta? Dalam *Memoir* (Jakarta: Tintamas, 1978: 527), Hatta menulis, "Kubalas surat itu dengan surat pula dengan mengatakan bahwa pemberontakan komunis itu kuanggap sebagai masalah dalam negeri." Jawaban tegas itu menunjukkan sikap anti-imperialisme Hatta tidak saja dalam teori, tetapi juga dalam praktik. Sikap ini berbeda dengan sikap beberapa tokoh komunis Indonesia yang justru pernah bekerja sama

dengan penjajah, baik sewaktu di Negeri Belanda maupun di Indonesia. Tokoh komunis Rustam Effendy pernah membongkar kedok kawan seideologinya sebagai agen penjajah. Fakta ini tidak dilupakan Soe Hok Gie untuk direkamnya.

> Dalam keadaan seperti ini, bagi tokoh-tokoh FDR tidak ada pilihan lain, kecuali mengaku terus terang. Amir mengakui bahwa ia pernah menerima uang dari van der Plass sebanyak *f* 25.000 untuk menyusun gerakan bawah tanah. Hal ini ia lakukan dalam rangka instruksi Komintern untuk melawan fasisme. Setiadjid mengakui bahwa ia bertanggung jawab terhadap ide Uni Indonesia-Belanda. ....

Hatta sebagai tokoh yang pernah memimpin Perhimpunan Indonesia (PI) di Negeri Belanda pada 1920-an sangat mengenal watak tokoh-tokoh PKI yang sok revolusioner dan antipenjajah, sedangkan dalam kenyataannya sebagian mereka memiliki karakter yang lemah sebagai pejuang. Kemudian, ketundukan mereka kepada garis Moskow sekaligus menunjukkan ketidakmandirian mereka dalam menentukan langkah politik. Jika ada yang benar-benar mandiri berpikir, tidak mau tunduk kepada Moskow, tokoh puncaknya adalah Tan Malaka (1896–1949). Tokoh yang satu ini memang lain daripada yang lain. Ia tidak pernah terlibat dalam Pemberontakan 1926 ataupun dalam Pemberontakan Madiun. Karena bentrok dengan Joseph Stalin, Tan Malaka

dipecat sebagai Komintern pada 1920-an. Tan Malaka tidak mau didikte oleh diktator Uni Soviet itu. Fakta tentang masalah ini memang tidak terekam dalam tulisan Soe Hok Gie. Begitu juga kekejaman Stalin, bos PKI, di negaranya tidak sempat terbayangkan dalam karya penulis kita ini. Mungkin dianggap kurang relevan.

Berbeda dengan Tan Malaka, Musso sepenuhnya merupakan agen Moskow. Kekagumannya yang melampaui batas kepada Uni Soviet telah membutakan matanya terhadap kekejaman dan kebrutalan Stalin, yang menyebabkan puluhan juta rakyatnya mati terbunuh dalam tahanan Siberia serta kelaparan dan penyakit selama kekuasaannya (1924–1953), seperti diceritakan Aleksander I. Solzhenitsyn, pemenang Nobel Sastra dan bekas tahanan Siberia. Solzhenitsyn dengan tajam menggambarkan bahwa komunisme tidak layak bagi kemanusiaan. Sekiranya Musso berhasil dalam pemberontakan, dapat dibayangkan bahwa ia akan menjadi Stalin Indonesia. Dr. Abu Hanifah menyebutnya sebagai seorang "Stalin keras" (lihat Taufik Abdullah, Aswab Mahasin, Daniel Dakhidae (ed.), *Manusia dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: LP3ES, 1981, hlm. 213). Banyaknya ulama dan tokoh nasionalis yang dibunuh secara kejam di Madiun dan sekitarnya selama beberapa minggu memperlihatkan serangkaian bukti bahwa komunisme di Indonesia (PKI) merupakan duplikat komunisme Uni Soviet.

Akan tetapi, orang harus jujur kepada sejarah. Gaung Pemberontakan Madiun hanya bergema di Madiun dan Pati, sementara di daerah lain PKI tetap setia kepada pemerintah Hatta, seperti PKI Bojonegoro, Banten, dan Sumatra. Ini artinya bahwa "negara Uni Soviet ala PKI" yang dibentuk di Madiun hanya didukung sejumlah anggota PKI yang sangat terbatas. Ditambah lagi bahwa sewaktu meletus pemberontakan itu, Musso dan tokoh-tokoh puncak PKI lainnya justru tidak berada di Madiun. Mereka akhirnya mendukung pemberontakan yang telah dimulai oleh komunis-komunis muda yang sudah tidak sabar. Klaim bahwa mereka telah menguasai sekitar 35% tentara tampaknya terlalu dibesar-besarkan. Sokongan buruh pun ternyata tidak seperti yang diharapkan. Rupanya PKI tidak pernah belajar dari kegagalan Pemberontakan 1926 yang tidak direncanakan secara masak. Pemberontakan dengan persiapan matang belum tentu akan berhasil, apalagi yang setengah matang. Seorang Tan Malaka jelas tidak mungkin mendukung model-model pemberontakan yang *poorly organized*, seperti disinggung sebelumnya. Sebagai perbandingan, pemberontakan G-30-S/PKI pada 1965 sebenarnya jauh lebih siap, tetapi *toh* mengalami kegagalan.

Pemimpin komunis lain yang perlu dicatat di sini adalah Mr. Amir Sjarifudin. Lahir sebagai Muslim, tetapi sekitar 1935 menjadi Kristen, dan mening-

gal sebagai seorang komunis. Amir semula bersama Sjahrir membentuk PS (Partai Sosialis). Kemudian mereka pecah. PS semakin merah sementara Sjahrir membentuk PSI (Partai Sosialis Indonesia) yang antikomunis. Hubungan Amir-Sjahrir pernah digambarkan sebagai gas dan rem. Setelah pecah, Amir kehilangan rem dan Sjahrir kehilangan gas. Dalam iklim kehilangan rem ini, Musso (dengan menyamar sebagai Soeparto) kembali ke Indonesia bersama Soeripno (Duta Besar Indonesia untuk negara-negara Eropa Timur) pada 11 Agustus 1948. Dengan kedatangan Musso, Amir dan pemimpin PKI lainnya telah makin revolusioner. Radikalisasi massa tidak dapat dibendung lagi. Hatta malah dituduh sebagai agen imperialis. Rupanya Amir lupa bahwa sewaktu ia ditangkap Jepang dan dijatuhi hukuman mati, bukankah Hatta bersama Soekarno yang berhasil membebaskannya?

Setelah Pemberontakan Madiun ditumpas dalam beberapa hari, tidak ada pilihan lain bagi Amir dan pemimpin PKI lainnya, kecuali berusaha menyelamatkan diri. Akan tetapi, karena pemberontakan itu tidak mendapat dukungan rakyat secara luas, Amir dan kawan-kawannya ditangkap oleh satuan-satuan TNI (Tentara Nasional Indonesia) di daerah Purwodadi pada akhir November 1948. Amir akhirnya menyerah kepada pasukan Kemal Idris di Desa Klambu, Purwodadi dalam keadaan kurus dan pin-

cang karena sedang menderita disentri. Amir yang pernah menjabat Menteri Pertahanan pada 1945–1948 dan Perdana Menteri pada Juli–Februari 1948, harus menghadapi masa-masa akhir hidupnya. Soe Hok Gie melukiskan drama itu sebagai berikut.

> Tawanan-tawanan penting ini dibawa ke Kudus. Dari sana diangkut dengan kereta api khusus ke Yogya. Amir meminta kepada perwira yang mengurusnya, Kapten Soeharto, untuk memberikan buku. Waktu itu, buku satu-satunya yang dimiliki Kapten Soeharto ialah *Romeo and Juliet* karangan William Shakespeare. Menurut Soeharto, Amir membaca buku ini ketika menantikan keberangkatannya ke Yogya. Amir duduk sendiri di kereta api yang sengaja dikosongkan untuknya. Ketika ia sampai di stasiun Yogya, rakyat berjejal-jejal untuk melihat wajah bekas Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia ini. Ia kelihatan tenang melihat rakyat yang berjubel-jubel di stasiun melalui jendela kereta.

Atas usul Jaksa Agung, para tawanan diserahkan kepada Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto. Mereka kemudian ditembak mati, setelah diberi kesempatan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan internasional. Kutipan-kutipan terakhir ini merefleksikan—setidak-tidaknya menurut perasaan saya—betapa dalamnya kemanusiaan Soe Hok Gie melukiskan tragedi tersebut. Kalaulah Musso tidak pulang ke tanah air pada saat itu, boleh jadi Pemberontakan Madiun tidak akan meledak dan pertum-

pahan darah sesama kita tidak perlu terjadi. Perang saudara pasti meninggalkan luka yang tidak mudah disembuhkan.

Akhirnya, terserah kepada para pembaca untuk menilai karya ini. Soe Hok Gie sebagai sejarawan muda telah merekam sebuah episode tentang konflik ideologi yang membawa banyak korban di Indonesia dalam bentuk Pemberontakan PKI di Madiun pada 1948, dengan segala luka dan memori kolektif traumatik yang ditinggalkannya. Sejarah memang bertugas untuk mengungkapkan peristiwa masa lampau yang dinilai penting oleh sejarawan. Untuk siapa? Untuk mereka yang masih hidup, bukan untuk mereka yang sudah mati. Adapun Musso yang pernah dikader oleh H.O.S Tjokroaminoto di Surabaya pada 1920-an, akhirnya mengalami nasib yang lebih buruk. Di Desa Balong, pada 31 Oktober 1948, di sebuah rumah penduduk, Musso bersembunyi di dalam kamar mandi dan menolak menyerah kepada pasukan Republik. Lalu, ia ditembak. "Mayatnya dibawa ke Ponorogo, dipertontonkan dan kemudian *dibakar*." Jadi, Musso ditembak mati sekitar sebulan sebelum Amir mengalami nasib yang sama. "Revolusi memakan anaknya sendiri," tulis Dr. Abu Hanifah, mengenang nasib tragis yang dialami sahabatnya, Amir Sjarifudin (lihat *Manusia dalam Kemelut Sejarah*, hlm. 218). Sejarah Indonesia pascaproklamasi memang tidak luput dari benturan ide-

ologi. Benturan itu telah banyak menumpahkan darah, darah anak bangsa ini. Akankah drama ini berulang dan berulang? Tidak seorang pun yang dapat menjawabnya. Paling-paling kita hanya dapat berdoa agar tragedi seperti itu tidak lagi mengunjungi kita untuk selama-lamanya.

Ahmad Syafii Ma'arif

Sejarawan, Guru Besar Sejarah pada
Universitas Negeri Yogyakarta,
meraih Ph.D. dari Chicago University,
Amerika Serikat

Daftar Isi

Kata Pengantar

Ahmad Syafii Ma'arif v

Bab Satu

Tokoh dan Panggung 1

- Kaum Komunis Revolusioner 2
- Pemberontakan dan Perpecahan 9
- Suasana Sesudah Pemberontakan di Luar Negeri 13
- Angin Baru dari Komintern 17
- Penyusun Kader-Kader di Dalam Masyarakat 25
- Grup Mahasiswa Eropa 29
- Grup Digul dan Perkembangan PKI Sibar 33

Bab Dua
Di Bawah Bayonet Jepang dan Desingan Peluru Sekutu 43
- Hancurnya Grup Amir 46
- Kelompok-Kelompok Komunis yang Lain 49
- Pemuda-Pemuda yang Dipengaruhi Komunis 50
- Partai Komunis Intelek (Sesudah Proklamasi) 56

Bab Tiga
Pemerintahan Sayap Kiri 67
- Pandangan Soetan Sjahrir 68
- Pandangan Tan Malaka 73
- Lahirnya Partai Sosialis dan Partai Buruh 78
- Penyusunan Barisan-Barisan ke Bawah 83
- *Clash* Pandangan dengan Angkatan Perang 89
- Oposisi Tan Malaka dan Masjumi-PKI 97
- Kemenangan Babak Pertama 101
- Konsolidasi Organisasi 106
- Linggajati dan Frustrasi-Frustrasi 119
- Korban Kedua, Amir Sjarifudin 124

Bab Empat
Situasi Sosial di Bawah 129
- Pemuda dan Revolusi 130
- Mukjizat Lampu Aladin 140

- Revolusi dalam Kenyataan 142
- Frustrasi Lebih Lanjut 156

Bab Lima
Mimpi-Mimpi Indah yang Telah Berakhir... 165

- Perubahan-Perubahan di Dalam 168
- Gerakan Sayap Kiri 168
- Kabinet Hatta dan Masalah-Masalahnya 179
- Usaha-Usaha Persatuan yang Tidak Berhasil 183
- Rencana-Rencana di Luar Meja Diskusi 189
- Rasionalisasi 198
- Pemogokan Delanggu 205
- Persoalan Soeripno dan Politik Luar Negeri 212
- Demam Pengakuan dan Reorganisasi PKI 217
- Kekeruhan-Kekeruhan di Solo 232

Bab Lima
Awal dan Akhirnya 239

- Pemerintah Fron Nasional di Madiun. 241
- Operasi-Operasi Militer Menumpas Pemerintahan Fron Nasional 258
- Akhirnya 266
- Beberapa Pendapat 275

Daftar Pustaka 283

- Koran dan Majalah 283
- Buku 285

Catatan 289
- Bab Satu 289
- Bab Dua 294
- Bab Tiga 297
- Bab Empat 305
- Bab Lima 308
- Bab Enam 314

Indeks 321

Bab Satu

Tokoh dan Panggung

Berbicara tentang pemberontakan PKI di Madiun pada September 1948, kita harus pula berbicara tentang latar belakang peristiwa-peristiwa yang telah membentuk tokoh-tokohnya karena sikap dan tindakan tokoh-tokoh tersebut sangat dipengaruhi oleh masa lampau mereka. Di samping pengaruh Komunis Internasional (Komintern), situasi di dalam negeri ataupun teori-teori perjuangan Marxisme-Leninisme serta individu-individu tokoh yang telah dibentuk oleh masa lampau tetap mempunyai andil yang besar.

Di samping faktor tersebut, panggung sejarah tempat mereka bermain mempunyai pengaruh pula. Jawa pada 1926, Rusia, Negeri Belanda, Australia, Cina, serta Digul, semuanya meninggalkan jejak-jejaknya dalam "Tragedi Madiun".

Kaum Komunis Revolusioner

Sejak akhir abad ke-19, teknologi Barat mulai memasuki Indonesia, khususnya Pulau Jawa—secara intensif. Rel-rel kereta api mulai merajai tanah Jawa menggantikan cikar dan kereta kuda. Pabrik-pabrik tebu mulai mengepul-ngepul dan kebun-kebun tebu merambati persawahan-persawahan tanah Jawa. Kota-kota, bukan dalam arti kota tradisional, mulai bermunculan. Bandung, Semarang, Batavia, Surabaya, Magelang, serta Madiun mulai menjadi pusat-pusat konsentrasi baru penduduk.

Penyakit-penyakit yang dahulu begitu menakutkan—seperti wabah pes, disentri, cacar, kolera, dan malaria—telah dapat dikendalikan. Kematian anak-anak pun dapat dikurangi dengan cepat. Semua itu tentu saja membawa perubahan-perubahan sosial yang besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia umumnya, masyarakat Jawa khususnya.

Bersamaan dengan perkenalan pada teknik Barat yang begitu "menakjubkan", berdiri sekolah-sekolah yang merupakan pintu "gerbang" ke arah penguasaan ilmu tersebut. Sejumlah kecil pemuda Indonesia mulai mengenal pola-pola pendidikan baru ini. Sebagian melalui sekolah-sekolah yang diusahakan oleh pihak Barat (sekolah Kristen dan pemerintah Hindia Belanda). Sebagian lagi melalui sekolah-sekolah kaum reformis Islam, seperti sekolah

yang dipelopori oleh Sukanti al-Hasari (didirikan pada 1901) dan juga pesantren-pesantren yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran kaum reformis Mesir (melalui majalah *al-Manar)*. Perkenalan dengan pendidikan Barat yang berimpit dengan perubahan serbacepat, kemudian menimbulkan "krisis pemikiran" di dalam hati banyak pemuda Indonesia. Perkenalan dengan ide-ide persamaan, kemerdekaan, hak asasi manusia, martabat bangsa, dan lain-lain menantang pemuda-pemuda ini untuk berpikir lebih maju. Apalagi di dalam kenyataan sehari-hari, mereka melihat bentuk-bentuk paling kasar penghinaan terhadap manusia dan diri mereka sendiri. Kegembiraan dan kegairahan bercampur menjadi satu dengan kemuakan dan kesedihan melihat cita-cita tersebut dan kenyataan-kenyataan yang ada.

Krisis pemikiran pemuda Indonesia pada awal abad ke-20, dengan tajam dicerminkan dalam biografi pemimpin-pemimpin pergerakan rakyat Indonesia pada tahun-tahun itu. Misalnya, Mas Marco Kartodikromo, seorang "tokoh menengah" kaum terpelajar pada zaman itu yang memulai hidupnya sebagai pelajar Sekolah Jawa—kemudian mengalami krisis pemikiran setelah mempelajari bahasa Belanda—yang merupakan "kunci emas" ke masa depan. Pengetahuannya tentang ide-ide politik dunia Barat dikonfrontasikan dengan realitas-realitas yang kejam di stasiun-stasiun (tempat Bumiputra harus

diam menerima makian dan tamparan tuan kulit putih), di pabrik-pabrik (perbedaan upah), dan banyak realitas lainnya. Pada saat-saat ini, timbul suatu sikap protes yang kuat dan kadang-kadang diwarnai oleh sikap radikal dan anarki yang berlebihan.[1] Apa yang dialami oleh Marco pasti dialami pula oleh tokoh-tokoh lainnya walaupun dengan tekanan yang berbeda-beda. Jika kita membaca tulisan "pemikir-pemikir" Indonesia sebelum 1914, kita akan melihat pencerminan atas konfrontasi mental yang mendalam. Di satu pihak ilmu-ilmu Barat diharapkan membawa pembebasan terhadap diri manusia, di lain pihak ia merupakan bahaya terhadap nilai-nilai tradisional yang masih ingin dipertahankan. Tradisi-tradisi lama masih kuat berakar, sementara tradisi-tradisi baru (ilmu-ilmu Barat) mulai tumbuh. Proses disintegrasi dan reintegrasi masyarakat ini dicerminkan dalam semboyan *Jawa untuk bangsa Jawa*, semangat anti-5M (madat, main judi, melacur, maling, dan mabuk), serta *bangsa Jawa tetap Jawa*, di samping cita-cita antifeodal (Tjipto Mangoenkoesoemo) serta ide-ide modern lainnya. Pendek kata, di lapisan teratas pemimpin-pemimpin Indonesia bertiup angin perubahan yang simpang siur.

Suasana di bawah sama tidak menentunya. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dengan cepat telah menimbulkan rasa frustrasi. Nilai-nilai lama dengan sistem komunalnya berhadapan de-

ngan sistem pajak tanah yang makin intensif. Di Blora misalnya, persoalan ini menimbulkan gerakan Samin. Gerakan ini timbul sebagai reaksi tradisional masyarakat bawah petani terhadap aturan-aturan baru yang diterapkan pemerintah.

Segala lapisan masyarakat merasakan angin yang bertiup, angin yang membawakan pembaruan-pembaruan. Setiap kelompok menafsirkan angin yang bertiup ini dengan pandangan masing-masing. Jika kita mengikuti pendapat Ruth T. McVey dan Harry J. Benda[2] bahwa pada 1926 merupakan batas tolak (*turning point)* sejarah Indonesia, kita akan melihat pergolakan-pergolakan pada 1900–1926 sebagai pergolakan-pergolakan penuh unsur yang telah kita bicarakan sebelumnya.

> What seemed to be in the air was the feeling of change. To some, mainly the beneficiaries of economic and social improvement, change was perhaps to slow, too obstructed by alter overlords, foreign capitalism and their native allies. To others, change has taken place to fast and to incomprehensibly: they desired a return to allegedly better, more orderly days, and once again, they could place the blame for all their grievance on the colonial power. The communists close to all these accumulated ill feelings, were ready to promise everything to everyone. More riches to the rich, no taxes to the poor, more mosques to the picas, more jobs to the semi-literates.[3]

Barang siapa mengibarkan bendera "revolusioner", akan memperoleh pasaran di kalangan kaum radikal, kaum yang menunggu dengan tidak sabar perubahan-perubahan yang mereka harapkan. Kaum "radikal" ini berasal dari segala golongan. Sikap radikal mereka tidak memiliki warna ideologis. Dalam periode itu, tidak jarang ditemukan seorang tokoh dengan tiga keanggotaan organisasi revolusioner sekaligus. Haji Misbach misalnya, adalah aktivis Sarekat Islam, kemudian ikut dalam gerakan *Indische Partij* dan sekaligus ikut PKI. Alimin dapat dikategorikan golongan ini bersama-sama dengan Musso dan kawan-kawannya. Di kalangan kaum komunis, dijumpai bermacam-macam tipe manusia yang secara ideologis sama sekali tidak Marxis-Leninis. Manusia mistik-kejawen, seperti Mas Marco, yang bertapa ke Gunung Lawu[4], serta haji kaya, seperti Haji Busro di Semarang, dan haji revolusioner, seperti Haji Misbach di Solo. Juga manusia yang senang "amuk-amukan",[5] seperti Musso yang ikut gerakan mistik *afdeling* B Sarekat Islam.

Sebagian dari pemimpin PKI yang kemudian muncul lagi dalam Peristiwa Madiun, dibesarkan dalam suasana "angin perubahan yang membingungkan" dan "idealisasi revolusioner" yang tidak jelas terarah. Sebelum kita tinggalkan pembicaraan ini, ada baiknya kita menyoroti tokoh-tokoh PKI waktu itu yang kemudian memiliki peran dalam Peristiwa

Madiun. Tokoh terpenting adalah Musso, yang dilahirkan di Desa Pagu (Kediri) pada 1897. Ia dididik di sekolah guru di Jakarta dan bersahabat dengan Alimin. Selama masa pendidikannya, ia menjadi kesayangan Dr. Hazeu (penasihat urusan Bumiputra) dan teosopis D. van Hinloopen Labberton. Musso pernah tinggal di rumah Tjokroaminoto bersama-sama Alimin dan Soekarno. Sebagai individu, ia seorang yang cerdas, organisatoris, serta penulis politik yang baik. Musso adalah seorang yang keras dan tegas, bahkan kadang-kadang nekat. Ketika terjadi Peristiwa SI *afd.* B, ia ikut di dalamnya sehingga membuatnya dipenjara. Selama di penjara, ia mengalami perlakuan-perlakuan yang menyakitkan hati. Dari sinilah kegetirannya kepada Belanda makin bertambah. Ia menolak memberikan keterangan apa pun mengenai Tjokroaminoto dalam hubungan dengan SI *afd.* B. Di penjara pula ia berkenalan dengan teman-teman komunisnya yang senasib. Di sini ia mendapatkan *political lesson* tentang komunisme secara intensif. Meskipun demikian, ia tidak segera pro-PKI. Dalam pertentangan Semaoen–Haji Agus Salim/ Abdul Muis, ia dianggap pro-Tjokroaminoto. Ia membagi-bagikan kesetiaan politiknya kepada ISDV (PKI), SI, dan *Insulinde.*

Sekeluar dari penjara, van Hinloopen Labberton berniat mengirimnya ke Jepang untuk mengajar dan sebagai asistennya. Akan tetapi, pemerintah Je-

pang menolaknya, dengan alasan bahasa Inggris Musso kurang memadai. Mungkin sikap politik dan *record* penjaranya merintanginya.[6]

Tokoh-tokoh lain yang mengambil peran dalam Peristiwa Madiun ialah Alimin dan Sardjono (Ketua PKI 1924–1926). Mas Alimin Prawirodirdjo dilahirkan di Surakarta pada 1889 dari keluarga miskin sekali. Kemudian, ia dipungut anak oleh Dr. G.A. Hazeu yang memberikan kesempatan bersekolah kepadanya. Ayah pungutnya bercita-cita agar Alimin dapat menjadi pegawai pemerintah. Akan tetapi, nasib menjeratnya ke dunia jurnalistik dan politik. Ia bergabung dengan Boedi Oetomo dan juga ikut Centraal Sarekat Islam (CSI). Untuk beberapa waktu, ia berdiam di rumah Tjokroaminoto dan bersahabat dengan "anak buah Tjokroaminoto". Ia juga bersahabat dengan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan ikut sebagai anggota redaksi *Mojopahit*, koran dr. Tjipto. Di samping kegiatan politik, ia aktif dalam soal-soal perburuhan.

Pada 1918, ia memimpin Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV) cabang Jakarta. Dalam kegiatan SI *afd.* B, ia terlibat dan dipenjarakan bersama-sama Musso. Setelah keluar dari penjara, ia tidak memiliki sikap politik yang tegas. Kadang-kadang ia dinilai memihak CSI dalam soal rivalitas Semaoen–Haji Agus Salim. Akhirnya, ia berdiri di barisan PKI.[7]

Sardjono adalah tokoh "kecil" pada awal PKI. Ia pemimpin SI Sukabumi yang kemudian memihak PKI. Dalam Kongres PKI di Kotagede, Yogyakarta, pada 11–15 Desember 1924, banyak pemimpin PKI berada "dalam bahaya penangkapan". Darsono yang diminta menjadi ketua tidak mau karena akan ditangkap. Demikian pula Ali Archam, tokoh partai yang terkemuka. Akhirnya, pilihan jatuh kepada Sardjono, yang memimpin PKI sampai ajalnya. Sebagai ketua PKI, ia bukan seseorang yang kuat (*strong man*).[8]

Dalam suasana seperti itu, tokoh-tokoh PKI Angkatan 26 di-"besarkan". Pandangan-pandangan mereka sering tidak "Marxis-Leninis". Lebih banyak merupakan cetusan suara kelompok-kelompok yang menginginkan datangnya pembaruan.

Pemberontakan dan Perpecahan

Pemerintah Hindia Belanda bertindak keras terhadap aksi-aksi PKI. Pemimpin-pemimpinnya ditangkap atau dibuang ke luar negeri. Dimulai dengan Sneevliet pada 1919, yang diikuti tokoh-tokoh lainnya. Semaoen dibuang pada 1923. Tokoh-tokoh lain, seperti Darsono, Ali Archam, Alimin, Musso, Haji Misbach, dan Mas Marco, setiap saat dapat dibuang dan sering keluar-masuk penjara.

Pada 1925, Darsono harus meninggalkan Indonesia karena dibuang gubernur jenderal. Ali Archam dibuang ke Irian Barat pada 1925. Tiga tahun sebelumnya, Tan Malaka dipaksa meninggalkan Indonesia. Haji Misbach meninggal pada 1926 setelah dua tahun hidup dalam pembuangan. Alimin lari dari kejaran polisi sejak Juli 1925. Demikian pula tokoh-tokoh PKI lainnya. Gerak mereka ditekan dan dirintangi. Di lapisan bawah, bergerak Sarekat Hijau yang meneror anggota-anggota PKI. Gerakan ini banyak dibantu Belanda.

Pada Desember 1925, pemimpin-pemimpin PKI—di bawah pimpinan Sardjono—mengadakan pertemuan kilat di Prambanan, Jawa Tengah. Setelah membahas situasi terakhir, pertemuan Prambanan memutuskan menerima usul Sardjono untuk ... "mengadakan aksi bersama, mulai dengan pemogokan-pemogokan dan disambung aksi senjata. Kaum tani supaya dipersenjatai dan serdadu-serdadu harus ditarik dalam pemberontakan ini ...".[9]

Menurut rencana, pemberontakan akan diadakan pada pertengahan 1926 (Mei–Juni). Rencana-rencana untuk berontak segera disiapkan di dalam negeri. Kelihatannya, rencana ini tidak begitu lancar jalannya. Sementara itu, tindakan pemerintah Belanda makin keras. Pada Januari 1926, Belanda memutuskan menangkap Musso, Boedisoetjitro, dan Soegono. Akan tetapi, mereka bertiga telah menghilang. Me-

reka lari ke Singapura. Di sana bersama Alimin dan Subakat (ditambah dengan Sanusi dan Winata) merundingkan kembali keputusan Prambanan. Alimin diutus ke Manila untuk menemui Tan Malaka yang menjadi wakil Komintern untuk Asia Tenggara. Di dalam pertemuan ini, Tan Malaka menentang keputusan Prambanan dengan alasan

a. situasi revolusioner belum ada;
b. PKI belum cukup berdisiplin;
c. seluruh rakyat belum berada di bawah PKI;
d. tuntutan/semboyan konkret belum dipikirkan;
e. imperialisme internasional bersekutu melawan komunisme.

Alimin kembali ke Singapura dan membicarakan penolakan Tan Malaka kepada pimpinan partai. Kemudian, pimpinan partai mengutus Alimin dan Musso pergi ke Moskow untuk membicarakan keputusan Prambanan (16 Maret 1926). Tan Malaka yang tidak menerima berita apa pun segera datang di Singapura (ia sakit TBC) pada 6 Mei 1926 (Alimin hanya menulis surat bahwa tesis Tan Malaka ditolak pengurus partai). Di sana, ia bertemu dengan Subakat, agen PKI di Singapura. Subakat dapat meyakinkan Tan Malaka. Kemudian, Tan Malaka memanggil pengurus partai untuk membicarakan keputusan Prambanan sekali lagi. Akhir Juni datang Suprodjo. Di sana mereka membicarakan sekali lagi keputusan Prambanan. Ketiga orang ini sepakat untuk memba-

talkan keputusan Prambanan serta menulis tambahan tesis, yang katanya dibawa Alimin dari Manila.

Awal Juli, Suprodjo kembali ke Indonesia dan menyampaikan hasil-hasil diskusi bersama Tan Malaka dan Subakat. Akan tetapi, Sardjono dan kawan-kawan tidak mau mengubah pendirian mereka. Rencana pemberontakan akan tetap diteruskan. Tentang hasil perjalanan Alimin-Musso tidaklah jelas. Mereka tiba di Singapura pada Desember 1926 sementara pemberontakan telah meletus. Hal-hal yang menjadi pertimbangan Komintern di Moskow pun tidak jelas sampai sekarang.[10]

Pemberontakan PKI meletus pada 12 November 1926 di Jawa Barat dan pada Januari 1927 di Sumatra Barat. Sebelum pemberontakan meletus, di dalam tubuh PKI terjadi perpecahan. Grup Tan Malaka-Jamaludin Tamin-Subakat-Suprodjo mengadakan kampanye atas keputusan Prambanan. Kampanye ini juga bergema di cabang-cabang PKI.[11] Akibat pemberontakan PKI 1926, amat parah. PKI kemudian dibubarkan dan semua aktivisnya dibuang.

Perpecahan dalam tubuh PKI akhirnya terjadi dalam 1926, yang berakibat jauh bagi sejarah gerakan kaum kiri di Indonesia. Perselisihan-perselisihan antara grup Alimin-Sardjono (yang kemudian dianggap sebagai garis resmi) dan grup Tan Malaka (yang kemudian diteruskan Sukarni-Adam Malik) terus berlangsung sebagai pertentangan Murba-PKI.

Komintern melihat situasi di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Sejak pertengahan 1926, M.N. Roy yang mengurus persoalan-persoalan kolonial di dalam Komintern menyatakan kekhawatirannya kepada Sneevliet, yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Partai Komunis Belanda. Roy membicarakan pula masalah ini kepada Darsono dan Semaoen. Akan tetapi, mereka tidak dapat berbuat banyak karena mereka tidak dapat kembali ke Indonesia. Roy kemudian mengutus Miller (seorang pimpinan buruh di India?) ke Negeri Belanda untuk menemui Sneevliet dan mengadakan konsultasi dengan Partai Komunis Belanda. Roy merahasiakan misi Miller kepada Darsono-Semaoen karena kedua tokoh komunis Indonesia ini tidak mau permasalahan mereka diurus oleh Belanda. Sneevliet mengusulkan agar Tan Malaka disuruh kembali ke Indonesia untuk membereskan persoalan-persoalan internal partai walaupun hanya untuk membicarakan permasalahan Indonesia.

Rencana tersebut tidak pernah terlaksana karena tiba-tiba Alimin dan Musso datang dari Singapura. Mereka menceritakan ide-ide mereka, yang mendapat sokongan dari golongan Trotsky, sedangkan Stalin menolaknya. Alimin dan Musso sempat di-"tahan" untuk di-"reindoktrinasi" dengan teori-

teori perjuangan revolusioner. Setelah tiga bulan, mereka bertemu kembali dengan Stalin, tetapi Stalin tetap melarang pemberontakan. Mereka disuruh membawa keputusan ini ke Indonesia.

Musso sebagai orang yang "keras" tidak menyerah begitu saja. Dalam rapat di Singapura telah diputuskan bahwa jika sekiranya Komintern menolak keputusan ini, mereka akan melakukan perjuangan kedua, yaitu bergerilya. Satu yang menjadi kendala adalah bagaimana cara mengirimkan keputusan ini ke Indonesia. Musso meminta Semaoen untuk memberikan nama kontak grup Komintern di Indonesia, Dr. Kwa Tjoen Sioe, tetapi ditolak. Musso tidak menyerah dan membujuk asisten Semaoen, Iwa Kusumasumantri. Setelah mendapatkan alamat kontak (Dr. Kwa Tjoen Sioe di Jakarta), Musso mengirim telegram. Tidak jelas apakah telegram ini sampai kepada Dr. Kwa Tjoen Sioe? Jika sampai, apakah diteruskan kepada pimpinan PKI di Bandung? Jika dikirim, apakah Belanda berhasil membuka kodenya, kemudian memancing PKI untuk memberontak?[12]

Ketika mendengar berita meletusnya pemberontakan PKI, Komintern dan aparat-aparatnya ternyata menyokong proyek yang mereka tentang beberapa bulan sebelumnya.

> The Communist International welcome the revolutionary struggle of the people of Indonesia and pledges

its complete support. Workers of the world do not permit the Dutch imperialists to drown the struggle for freedom of Indonesia in blood. Hasten to the aid of Indonesian fighters. Organize mass meetings. Express your sympathy of the insurrections in Java, and protest againts imperialist teror. Organize demonstrations before the Dutch embassies and Consulates and demand freedom for Indonesia people and the military evacuation of the colony. Suppressed people of the world. The insurrectionary Indonesians are your advance guard, the express the will to freedom which is your common property. Do everything in your powered support them in their struggle.
Down with imperialist teror. Long live the united anti imperialist front of the workers and the suppressed people in the world. Long live the free people of Indonesia.[13]

Dalam rapat-rapat dan resolusi-resolusi Komintern, pemberontakan PKI mendapat dukungan moral. Musso dan Alimin sekembali dari Singapura mendapatkan angin yang berbalik dan menguntungkan mereka walaupun sebenarnya Komintern telah menolak rencana pemberontakan. Di dalam badan ini, pertentangan Stalin dan Trotsky juga terasa. Stalin menganjurkan politik *common front* dari atas, seperti terjadi di Cina ketika terlihat tanda-tanda Chiang Kai Shek akan menyisihkan kaum komunis. Sementara itu, Trotsky anti terhadap kerja sama seperti itu. Stalin tidak ingin memberikan peluang kepada Trotsky menggunakan kegagalan pembe-

rontakan Jawa untuk memukulnya. Lalu, grup Stalin menggunakan dalih bahwa pemberontakan Jawa terjadi karena pengaruh semangat revolusioner yang terjadi di Cina pada waktu itu.[14]

Golongan-golongan yang tadinya antipemberontakan (Tan Malaka dan kawan-kawan), sesuai dengan garis Komintern/Stalin pada Juli 1926, tiba-tiba dipukul dari belakang. Mereka dianggap sebagai kaum Trotsky. Tan Malaka dalam "kamus" komunis ortodoks dimasukkan ke dalam kategori ini.

Kegagalan Pemberontakan 1926 menimbulkan kepanikan di kalangan tokoh PKI walaupun dalam resolusi-resolusi formal, seolah-olah kaum pekerja Indonesia tetap maju. Setelah pemberontakan gagal, Semaoen mendatangi Mohamad Hatta, yang pada waktu itu sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia (PI) di Negeri Belanda. Menurut Hatta, waktu itu Semaoen panik sekali.[15] Setelah mereka berdiskusi, akhirnya mereka membuat sebuah konvensi bersama. Isinya adalah

a. PI harus mengambil alih pimpinan dan bertanggung jawab penuh atas gerakan rakyat di Indonesia;
b. PKI harus mengakui pimpinan PI;
c. percetakan yang berada di bawah penguasaan PKI harus diserahkan kepada PI.[16]

Sikap Semaoen dipandang sebagai sikap likuidasi oleh kaum komunis. Atas tekanan-tekanan Ko-

mite Eksekutif Komintern, konvensi ini dibatalkan setahun kemudian (19 Desember 1927).[17]

Nasib tokoh-tokoh komunis Indonesia juga tidak terlalu baik. Musso kemudian sekolah lagi di Rusia sebagai "petugas" Komintern. Semaoen "dibuang" ke Asia Tengah (menurut Hatta).[18] Alimin mengembara sebagai petugas Komintern. Beberapa tahun ia ditempatkan bersama-sama kaum komunis Cina di Yenan, kemudian Chungking. Darsono setelah melihat praktik-praktik Stalinis kemudian "bertobat". Ia hidup dalam pengasingan di Jerman (sampai 1933), setelah itu di Negeri Belanda.

Angin Baru dari Komintern

Persoalan kolonial mendapatkan perhatian dari Komintern sejak 1919, terutama berkisar pada sikap kaum komunis terhadap gerakan-gerakan rakyat yang ada di negara-negara jajahan. Dari sikap ini, kemudian disusun garis besar politik kaum komunis internasional. Dalam menghadapi persoalan ini, kaum komunis terpecah karena pandangan mereka ditentukan oleh pengalaman mereka masing-masing.

Dalam masalah ini, Indonesia mendapat tempat penting karena atas dasar pengalaman-pengalaman Cina dan Indonesia, sikap resmi Komintern dilandaskan. Dalam Kongres Komintern II (1920), Sneevliet merumuskan sebuah pandangan bahwa

suatu gerakan revolusioner dapat berhasil jika memiliki dukungan massa yang luas. Berdasarkan pengalaman kerjanya dengan Sarekat Islam, Sneevliet menyetujui diadakannya kerja sama dengan kaum borjuis-nasional dalam usaha menumbangkan kekuasaan imperialis. Pandangan-pandangan Sneevliet mendapatkan sokongan dari Lenin pada Kongres Komintern II, dalam sebuah komisi yang membahas persoalan-persoalan nasional dan kolonial. Lenin menjadi Ketua komisi ini sementara Sneevliet menjadi Sekretarisnya. Lenin menekankan agar dalam kerja sama ini:

> .... To create a temporary cooperation, even an alliance, with the evolutionary of the colonies and the backward countries, it must not however, amalgamate with it but must maintain absolutely the independent character of the proletarian movement albeit only in embryo form.[19]

Pandangan-pandangan Sneevliet/Lenin mendapatkan tantangan kuat dari seorang komunis India, M.N. Roy, yang menekankan bahwa kerja sama dengan golongan borjuis-nasional amat berbahaya. Alasannya, kaum borjuis-nasional pada dasarnya antiperubahan sosial. Karena itu, kaum komunis harus waspada terhadap usaha-usaha kaum borjuis-nasional yang juga berusaha untuk menguasai gerakan-gerakan buruh dan tani. Perbedaan pandangan antara Sneevliet/Lenin dan Roy pada akhir-

nya dikompromikan. Kerja sama dengan golongan borjuis-nasional diterima, tetapi pimpinan harus tetap berada di tangan kaum komunis. Dalam tambahan tesisnya, Komintern menegaskan sekali lagi sebagai berikut.

> The revolution in the colonies is not going to be a Communist revolution in its first stage. But it form the cut set the leadership is in the hands of Communist vanguard, the revolutionary masses will not be led astray, but will go ahead through the successive periods of development of revolutionary experience. Indeed it would be extremely errorneous in many of the Oriental countries to try to solve the agrarian problem according to pure Communist principles. In its first stages the revolution in the colonies must be carried on with a program which include many petty bourgeois reform clauses, such as division of land etc. but from this it does not follow at all that the leadership of the revolution will have to be surrendered to the bourgeois democrats ....[20]

Kombinasi pandangan Sneevliet/Lenin/Roy tersebut merupakan kebijaksanaan politik kaum komunis untuk masa-masa mendatang walaupun terdapat variasi-variasi dan perkembangan-perkembangan lebih lanjut.

Sejarah kemudian membuktikan bahwa pandangan Roy lebih benar. Kaum "borjuis-nasional" Sarekat Islam menendang PKI. Pada 1927, Chiang Kai Shek "menyembelih" orang-orang komunis

setelah ia berhasil menaklukkan *warlords* di utara. Dalam keadaan terisolasi, Partai Komunis Cina melakukan pemberontakan, tetapi dapat dikalahkan. Mereka harus mengadakan *long march* beribu-ribu kilometer ke utara. Di Indonesia, setelah kaum borjuis-nasional mendepak PKI dan setelah tekanan-tekanan kuat dari pemerintah Hindia Belanda, PKI melakukan "bunuh diri" dengan Pemberontakan November 1926. Setelah proyek kerja sama antara kaum komunis dan kaum borjuis-nasional gagal, Komintern mengambil garis keras dan tidak terarah. Di Eropa diadakan pemisahan-pemisahan dari golongan-golongan sosialis. Sementara itu, Moskow memaksakan pemecahan-pemecahan pada kaum sosialis dan buruh. Pemogokan-pemogokan pun diadakan, tetapi semuanya gagal. Komintern makin terpencil karena gerakan-gerakan radikal yang keliru.

Garis keras Komintern sangat kaku dan menimbulkan kerugian-kerugian yang parah bagi partai komunis setempat. Pada waktu Hitler dengan fasisnya telah berada di ambang pintu kekuasaan, kaum komunis tetap menolak bekerja sama dengan kaum antifasis lainnya. Bahkan, setelah partai komunis dihancurkan, Stalin masih percaya bahwa Hitler hanya salah satu fase dari masyarakat borjuis. Baru setelah Jerman berkembang menjadi negara militer kelas satu, Rusia mulai berpikir untuk bekerja

sama dengan golongan-golongan nonkomunis yang antifasis. Permulaan kerja sama ini dilakukan di Prancis. Pada 6 Februari 1934, golongan-golongan fasis yang dibantu golongan "raja uang" Stavisky mengadakan demonstrasi besar di luar parlemen untuk menumbangkan Perdana Menteri Daladier. Kaum komunis ikut dalam demonstrasi ini dengan tujuan lain setelah pemerintah dapat digulingkan. Demonstrasi-demonstrasi golongan fasis dan komunis berhasil. PM Daladier dapat diturunkan. Kekuasaan fasis kini berada di muka tangga Istana Elysee. Pada saat yang kritis ini, Stalin merasa takut sendiri sebab jika Prancis menjadi negara fasis, masa depan Rusia akan lebih terancam. Dua hari kemudian, tepatnya pada 12 Februari, golongan komunis membuat demonstrasi antifasis ketika buruh-buruh sosialis melakukan pemogokan. "Aneh"-nya demonstrasi diikuti pula buruh-buruh komunis. Demonstrasi dan pemogokan ini berhasil. Golongan-golongan antifasis kemudian membentuk *Front Populaire* tempat kaum komunis, kaum sosialis, dan kaum borjuis-demokrat bergabung. Orang-orang komunis mulai menyadari bahwa bahaya fasisme hanya dapat dilawan melalui kerja sama dengan golongan-golongan antifasis, termasuk kaum liberal-demokrat. Perubahan sikap tersebut dicerminkan dengan terpilihnya Gregorij Dimitrov (Bulgaria) sebagai pemimpin baru Komintern pada 1935. Dengan garis dari Dimitrov, partai

komunis di seluruh dunia menawarkan uluran tangan yang hangat kepada golongan-golongan kapitalis serta borjuis-nasional, termasuk di negara-negara Eropa Barat dan Belanda.[21]

Setelah 1935, kaum komunis tidak lagi menjalankan perjuangan kelas serta tidak lagi menganjurkan revolusi sosial. Pendek kata, situasi dan kepentingan Rusia mengharuskan kaum komunis bekerja sama dengan golongan-golongan yang secara teoretis menjadi musuh kelas proletar. Perubahan drastis ini dengan sendirinya memerlukan penjelasan-penjelasan mendalam karena kader-kader komunis harus memahami kebijakan perputaran politik yang telah diambil Komintern. Keputusan ini juga berlaku untuk kaum komunis di Indonesia. Mahasiswa-mahasiswa komunis Indonesia di Negeri Belanda tidak lagi menuntut *kemerdekaan sekarang juga*, tetapi mengumandangkan slogan *Indonesia dan Nederland bekerja sama mempertahankan demokrasi terhadap fasisme*.[22] Karena itu, golongan-golongan nasionalis, seperti Hatta, yang menuntut kemerdekaan Indonesia dianggap musuh dan dicap sebagai Trotskys.[23] Kaum komunis Indonesia patuh sekali menjalankan garis baru Komintern ini.

Untuk aktivitas-aktivitas PKI di bawah tanah, garis baru tersebut perlu diperjelas. Seperti diketahui, sampai 1931 PKI bawah tanah terus melancarkan tuntutan-tuntutan "revolusioner". Dalam Juli

1932, PKI mengeluarkan "program 18 pasal", yang antara lain menyatakan berikut ini.

1. Kemerdekaan penuh Indonesia. Indonesia segera lepas dari Nederland. Untuk pemerintahan Buruh dan Tani.
14. Tanah untuk kaum tani dan penyitaan terhadap tanah kaum imperialis, tuan tanah feodal, serta lintah darat.
17. Penghapusan segera utang-utang sewa dan *mindring* dari kaum tani.[24]

Dalam program 18 pasal ini kelihatan dengan jelas tuntutan-tuntutan ekstrem kiri PKI sesuai dengan suasana politik Komintern, setelah penyembelihan kaum komunis oleh Chiang Kai Shek.

Orang yang harus menjelaskan garis baru Komintern ke Indonesia adalah Musso—yang menurut sumber-sumber PKI datang pada 1935. Selama di Indonesia, Musso membentuk grup-grup dan pimpinan PKI baru, yang dikenal sebagai PKI Muda atau PKI Angkatan 35.

Kedatangan Musso ke Indonesia disangsikan oleh grup Tan Malaka. Menurut mereka, Musso tidak pernah datang ke Indonesia. Seseorang yang menamakan dirinya Musso pada 1935 adalah kaki tangan van der Plass. Jamaludin Tamin menceritakan kembali pembicaraannya dengan Armunanto pada 1946 sebagai berikut.

"Armunanto terpekur sekejap dan kemudian Armunanto sendiri menceritakan/mensejarahkan kepada saya ketika itu, bagaimana pengalaman dia selama enam bulan mengikuti dan aktif membangun PKI 1935 itu, yang ketika itu ia (Armunanto) masih memakai nama asli (nama yang sejati) ialah Ngadmo. Pada suatu saat, sesudah Ngadmo (Armunanto) mendesak kepada Achmad Sumadi supaya ia (Ngadmo) diperjumpakan dengan pemimpin besarnya (Musso), maka Achmad Sumadi dan kawan-kawannya sudah membawa (menghadapkan) Ngadmo (Armunanto) kepada pimpinan besar PKI 1935 ialah Musso palsu yang bernama Sujadi, seorang pegawai tinggi di Parket, Hindia Belanda."[25]

Persoalan apakah Musso pernah datang ke Indonesia, apakah Musso yang datang adalah Musso sejati, dan lain-lain merupakan persoalan yang tidak dapat dipecahkan.[26] Penulis cenderung untuk menerima pendapat bahwa Musso memang datang ke Indonesia pada waktu itu. Hal ini melihat urgensi kedatangan wakil Komintern di Indonesia dan melihat sifat Musso yang patuh dan berani. Yang terpenting, sejak 1935 politik kaum komunis Indonesia mengalami perubahan drastis. Perubahan-perubahan ini tidak diterima begitu saja oleh kaum Marxis Indonesia. Dari perbedaan-perbedaan antara kaum nasionalis-komunis dan mereka yang lebih menekankan unsur nasional dalam perjuangan taktis, akan timbul pertentangan-pertentangan yang kemudian meletus pada waktu Peristiwa Madiun.

Penyusun Kader-Kader di Dalam Masyarakat

Ketika Musso datang kembali ke Indonesia, ia memusatkan pekerjaannya di kota Surabaya. Hal ini dapat dipahami karena ia memang berasal dari Jawa Timur dan pernah hidup di kota ini. Menurut sumber-sumber PKI di Surabaya, ia membangun kembali susunan Centraal Comite (CC) dengan teratur. CC PKI baru terdiri atas Musso, Pamudji, Azis, Sukajat, dan Djoko Soedjono.[27] Sementara itu, Achmad Sumadi ikut aktif membangun kembali jaring-jaring PKI 35. Dalam kelompok PKI 35 termasuk pula Sutrisno, Sukindar, dan Soehadi, yang kemudian duduk dalam pimpinan Partai Sosialis setelah 1945.[28]

Jika kita memercayai keterangan Amir Sjarifudin pada 1948, Amir termasuk orang yang dibina Musso ketika datang ke Surabaya. Amir bersama dengan Tan Ling Djie[29] yang pada waktu itu tinggal di Surabaya.

PKI 35 tidak berjalan dengan memuaskan karena faktor kecerobohan dan mungkin pula karena rapinya jaring-jaring PID (*Politieke Inlichtingendienst*, dinas intelijen). Akibatnya, pada 1938 konsolidasi dalam tubuh PKI ini terbongkar oleh Belanda. Djoko Soedjono (pimpinan CC) bersama dengan Achmad Sumadi, Soegono, Hardjono, dan lain-lain ditangkap dan dibuang ke Boven Digul.[30] Sisa-sisa CC yang masih ada tidak dapat bekerja secara efektif. Anggota-

anggota CC lainnya, seperti Pamudji dan Sukajat, dihukum mati oleh Jepang pada 1944 bersama dengan Abdul Azis dan Abdurrachim.[31] Sementara itu, mereka yang tertangkap pada 1938 selamat semua karena dibawa ke Australia. Hardjono kemudian ditembak mati karena terlibat Peristiwa Madiun. Dari grup PKI 35 yang bertahan hanya Achmad Sumadi dan Djoko Soedjono. Sebagai grup, PKI 35 akhirnya hilang dari dunia politik komunis di Indonesia.

Selama Musso berada di Indonesia, ia "membaptis" Tan Ling Djie, seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Leiden dan teman Moh. Hatta. Selama menjadi mahasiswa, Tan tidak menggabungkan diri dengan perkumpulan Chung Hua Hui sebagaimana biasanya mahasiswa keturunan Cina. Ia malah menjadi anggota perkumpulan kecil Chung San Hui yang "kiri". Sebelum tamat, ia pulang ke Indonesia dan menetap di Surabaya. Di kota ini ia berkenalan dengan Liem Koen Hian, seorang tokoh "ekstrem Indonesia" dan anti-Belanda yang waktu itu memimpin harian *Sin Tit Po*. Liem Koen Hian adalah "murid" dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan mengorganisasikan kelompok-kelompok masyarakat Cina peranakan yang anti-Belanda. Dalam kelompok ini—kemudian bergabung dalam Partai Cina Indonesia—muncul beberapa kader yang menjadi komunis. Liem Koen Hian sendiri terlalu "bebas" dan "humanistis" untuk dijadikan komunis. Akan tetapi, Tan

Ling Djie melalui grup *Sin Tit Po* mendapatkan teman-teman satu ide. Dari grup peranakan Cina ini muncul tokoh-tokoh, seperti Oei Gee Hwat (pemimpin Pesindo, yang ditembak mati di Ngalihan), Dr. Toa Siek Ien (dipecat oleh Hatta karena dituduh membocorkan rahasia delegasi ke tangan kaum komunis, terakhir pengurus Baperki Surabaya), serta Siauw Giok Tjhan (dari Malang).[32]

Grup lain hasil kegiatan kelompok Surabaya yang "*survive*" adalah grup pemuda komunis yang ikut PKI pada 1935–1942. Mereka hanya kader-kader biasa dan tidak memegang pimpinan penting pada waktu itu. Mungkin karena peran mereka yang kecil, mereka bisa selamat dari pengejaran PID. Dalam kelompok yang selamat ini dapat dimasukkan Tjugito dan Sudisman, yang ikut dalam PKI Ilegal.[33]

Kelompok PKI 35 memiliki peran besar dalam pemanasan situasi menjelang Peristiwa Madiun. Mereka dibesarkan secara politis dalam suasana tertekan. Dari kondisi ini, mereka menaruh sikap curiga terhadap siapa pun, sebagai sikap "kewaspadaan revolusioner". Mereka selalu mencari motif-motif di balik setiap tindakan-tindakan politik. Sikap ini yang kemudian ikut mempercepat perpecahan Partai Sosialis.[34] Apalagi ketika mentor mereka, Musso, datang kembali ke Indonesia, mereka ikut meradikalisasi suasana.

Pengaruh PKI terasa pula dalam Partai Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Partai ini berusaha

membina segenap kekuatan antifasis dan prodemokrasi. Secara umum, garis partai ini sama dengan garis progresif partai-partai kiri yang ada. Berbeda dengan Parindra (Partai Indonesia Raya) yang agak pro-Jepang, Gerindo tegas-tegas antifasisme Jepang dan Jerman.

Banyak di antara aktivis Gerindo yang menjadi pimpinan PKI. Misalnya, Ketua Barisan Pemuda Gerindo, Wikana. Tokoh-tokoh PKI lainnya, seperti Sutrisno dan Abdurrachim (dihukum mati pada 1944), juga di-"godok" dalam barisan Gerindo.[35] Aktivis-aktivis Gerindo yang kemudian berperan dalam PKI adalah D.N. Aidit,[36] Anwar Kadir,[37] Nungtjik AR,[38] Ir. Sakirman,[39] Sidik Kertapati,[40] Sudisman,[41] Sudjojono,[42] Tjugito,[43] Mr. Jusuf (pendiri PKI Jusuf),[44] dan lain-lain.

Ketua Umum Gerindo sendiri adalah anggota PKI Ilegal walaupun hal ini jangan dilihat secara ideologis. Banyak di antara anggota PKI waktu itu bergabung dengan PKI bukan karena motif ideologis, melainkan karena PKI merupakan partai yang berani terang-terangan melawan Belanda/Jepang. Anggota-anggota PKI Ilegal waktu itu sedikit sekali pengetahuan mereka tentang teoretis Marxis-Leninis. Menurut Soebadio, Ir. Sakirman adalah seorang nasionalis yang bersuka cita melihat kedatangan Jepang daripada seorang komunis yang antifasis.[45] Walaupun demikian, Gerindo merupakan tempat kontak bagi

pemuda-pemuda revolusioner waktu itu yang pada saatnya tepat untuk disatukan dalam barisan kaum komunis. Dalam segi ini, kita dapat menyatakan bahwa "proyek" PKI dengan Gerindo berhasil dengan baik. Kemudian, pembinaan kader-kader ideologis dilakukan dalam kursus-kursus politik.

Grup Mahasiswa Eropa

Di samping kelompok-kelompok PKI 35, terdapat kader-kader PKI yang bergerak di kalangan mahasiswa Indonesia yang berada di Negeri Belanda. Perhatian kaum komunis terhadap mahasiswa-mahasiswa Indonesia baru dimulai setelah Perhimpunan Indonesia menjadi besar dan memiliki pengaruh politik di Indonesia. Setelah proses penangkapan dan pengadilan PI, CPN menjadi serius memperhatikan dan memengaruhi PI. Dalam kelompok mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda, orang pertama yang "ditahbiskan" adalah Abdulmadjid, seorang aristokrat dari Rembang (lahir 1904) dan anak tiri R.A. Kartini. Orangnya kaku, tingkah lakunya aristokratis, dan sikapnya dogmatis.[46] Setelah Hatta, ia merupakan salah seorang pimpinan Perhimpunan Indonesia yang berhasil dipergunakan PI untuk kepentingan komunisme.

Abdulmadjid kemudian memengaruhi Setiadjid, seorang mahasiswa yang periang dan mudah

sekali bergaul.[47] Di sisi lain, Setiadjid adalah seorang mahasiswa yang malas dan kesenangannya pergi ke *night club* (sampai 1935). Kalau ia sedang menghadapi kesulitan keuangan, ia ditolong oleh teman-teman komunisnya (Abdulmadjid dan kawan-kawan). Ia dikirim ke Jerman dan bekerja di Berlin pada kantor Liga Anti Imperialis. Sebagai kader komunis, ia adalah seorang *talent scout* yang baik–mampu memengaruhi mahasiswa Indonesia dan buruh-buruh kapal Indonesia. Proses pengkomunisan Setiadjid berjalan lama dan perlahan-lahan.[48]

Di samping kedua tokoh tersebut, terdapat Rustam Effendy. Pada awal karier politiknya, ia adalah seorang kooperator anggota *Gemeente Raad* Padang dan takut berpolitik. Akan tetapi, akhirnya ia ikut CPN dan terpilih menjadi anggota Tweede Kamer sebagai wakil Partai Komunis Belanda.[49] Dalam angkatan komunis tua, termasuk pula Sunito dan Sidartawan.[50]

Dalam 1935, datang sejumlah mahasiswa Indonesia yang kemudian memiliki peranan dalam gerakan komunis Indonesia. Salah satunya Maruto Darusman, seorang mahasiswa Indonesia yang belajar ideologi dan mendapatkan beasiswa. Ayahnya adalah Dr. Darusman, seorang yang tidak terlalu kaya dan hidup di lingkungan sosial yang biasa. Sikap Maruto "kultural sentris" dan sangat gemar kebudayaan Jawa. Tidak jelas motif apa yang mendorong-

nya untuk menjadi komunis. Sewaktu ia masih menjadi pelajar di Solo, ia mencintai seorang gadis–Utami (Ny. Surjadarma). Akan tetapi, cintanya gagal karena ayah Utami tidak setuju. "Apa yang kaupunya untuk melamar anakku," kata ayah Utami. Maruto sangat tertekan. Dari sinilah barangkali ia memiliki perasaan tidak senang kepada orang berada.[51]

Tokoh mahasiswa Indonesia lain yang kemudian menjadi komunis adalah Soeripno, seorang yang brilian, aktif, sopan, dan simpatik. Ia adalah seorang idealis dan berasal dari keluarga ningrat. Di Negeri Belanda, ia dipengaruhi oleh Setiadjid.[52] Tokoh lain yang juga penting adalah Djajengpratomo—"otak" generasi muda mahasiswa Indonesia di Belanda, Gondopratomo (saudaranya), dan Jusuf Muda Dalam, seorang mahasiswa ekonomi.[53]

Ketika Jerman menduduki Belanda, banyak mahasiswa Belanda yang ikut bergerak dalam gerakan bawah tanah. Dalam gerakan ini, mahasiswa-mahasiswa Indonesia juga ikut aktif. Jumlah mahasiswa Indonesia yang aktif diperkirakan 40–50 orang. Termasuk kelompok ini, antara lain Sumitro, Zaharin Zain, dan Ibrahim Taher. Sementara itu, Maruto dan kawan-kawannya tidak aktif dan ikut dalam garis komunis. Baru setelah Jerman menyerbu Rusia, mereka bergabung dalam gerakan bawah tanah.[54] Dalam gerakan ini, mereka diberikan tiga bidang tugas, yaitu tugas-tugas *gestelijk verzet* (antara lain Soe-

ripno), sabotase, dan spionase. PI menerbitkan sebuah publikasi ilegal *Bevrijding* di bawah Soeripno dan Pamuncak yang kemudian berganti nama menjadi *Indonesia* di bawah Djajengpratomo.[55] Dalam gerakan-gerakan ini, beberapa mahasiswa Indonesia jatuh sebagai korban. Sudartawan meninggal dalam konsentrasi Kamp Dachau. Sundari Irawan Sundoro tertembak waktu razia karena mencoba lari, sedangkan Parmono meninggal karena kecelakaan.[56] Menurut Soeripno, mahasiswa Indonesia yang tewas berjumlah 5 orang sementara 25 orang masuk dalam kamp konsentrasi.[57] Hubungan yang tercipta di antara mahasiswa-mahasiswa/sarjana-sarjana Indonesia yang ikut dalam gerakan bawah tanah memiliki arti politis yang penting untuk masa-masa mendatang. Persahabatan mereka akan "melicinkan" perundingan-perundingan yang dilakukan antara delegasi Indonesia dan Belanda pada 1946–1948 karena pimpinan delegasi Belanda banyak yang berasal dari gerakan bawah tanah. Menurut Benedict Anderson, sikap "co Abdulmadjid dan kawan-kawan"-nya sedikit banyak disebabkan oleh kerja sama melawan Nazi dahulu. "It was therefore natural that he is in his groups should generally urgent a cooperative line in dealing with the Dutch, and be inclined to rely more on the benevolence of Dutch public opinion than an armed struggle againts the Allies. For the Indonesians who had fought underground aga-

ints the Nazis, there had been a real sense of camaraderies with the Dutch conference, and it was to be many months before this feeling evaporated under the stresses of the developing political antagonism."[58]

Grup Digul dan Perkembangan PKI Sibar

Setelah Pemberontakan 1926 ditumpas, di kalangan kaum komunis yang tertangkap timbul suasana saling menyalahkan. Suasana "meminta pertanggungjawaban" ini sampai juga ke Digul. Muh. Sanusi, salah seorang pimpinan PKI di Jawa Barat, meminta pertanggungjawaban *hoofdbestuur* (HB) PKI atas terjadinya pembuangan massal. Karena tekanan yang kuat, Sardjono sebagai Ketua Umum PKI memberikan pertanggungjawaban. Berdasarkan penyelidikan-penyelidikan, ternyata pembuangan massal terjadi karena pengakuan HB PKI yang ditandatangani Sardjono dan Kusno Gunoko (Sekjen). Penelitian lebih lanjut menyatakan bahwa sebelumnya Sanusi membujuk Sardjono dan Kusno untuk menandatangani pernyataan bahwa HB PKI yang menyuruh melakukan pemberontakan, dengan harapan agar orang-orang yang dibuang hanya HB PKI. Saran ini tentu saja ditolak Sardjono. Sanusi kemudian mengusulkan kepada polisi agar menyiksa Sardjono. Karena siksaan, Sardjono menyerah. Akibatnya, tidak hanya HB PKI yang dibuang, tetapi semua aktivis yang terlibat.

Setelah persoalan ini selesai, Sanusi malah dibenci dan dipukuli ramai-ramai. Lebih-lebih setelah Kapten Becking memberikan keterangan bahwa Sanusi pernah melamar untuk menjadi mata-mata. Perpecahan pertama telah timbul di Digul.

Untuk mencegah perpecahan lebih lanjut, para tawanan kemudian *central haad*. Akan tetapi, beberapa orang di bawah pimpinan Gondojuwono menentangnya dan menunjukkan tanda-tanda mau bekerja sama (antara lain Suprodjo dan Mardjohan) serta patuh kepada Belanda. Golongan-golongan yang tetap mengambil sikap keras lalu diasingkan dari Tanah Merah ke Gudang Arang, suatu tempat beberapa puluh kilometer di hulu Sungai Digul. Dari Gudang Arang, kelompok ini dibawa lagi ke Tanah Tinggi, yang juga terletak di tepi Sungai Digul. Penderitaan yang berat, kesepian, serta keragu-raguan di kalangan orang-orang buangan ini pada akhirnya menimbulkan sikap menyerah. Di Tanah Tinggi, Boedisoetjitro tanpa disangka-sangka "menyerah " dan pulang ke Tanah Merah. Begitu pula dengan Najoan dan Marco. Padahal, Boedisoetjitro, Najoan, dan Marco termasuk pimpinan PKI yang keras.

Selama berada di Tanah Tinggi, Sardjono sebagai Ketua HB PKI mencoba mempertinggi pengetahuan dan teori rekan-rekannya. Ia mengadakan kursus-kursus dengan "menerbitkan" garis baru— *Pedoman Kita* (PeKi). Sebagai guru kursus adalah Nga-

dikan dan Sardjono sendiri. Pada 1935 datang tiga orang buangan baru dari Munting, yaitu J. Waworuntu, Daniel Kamo, serta Glomen Wentuk. Mereka kader-kader PKI yang dididik di Rusia. Mereka yang digelari "haji-haji Moskow" ini juga mengadakan kursus-kursus tandingan—di samping grup Sardjono dan kelompok yang melihat kegiatan ini dengan apatis (kelompok Ali Archam).

Dalam kursus-kursus itu, Sardjono mengajarkan bahwa di dalam politik tujuan dapat dicapai dengan menghalalkan segala cara. Juga digariskan bahwa untuk mencari pembebasan, cara "menyerah" tidak apa-apa. Grup Waworuntu yang merasa diri mereka "lebih pandai" mencemooh kawan-kawan komunis lainnya. Untuk mengatasi perang dingin, dibentuk sebuah panitia guna merumuskan tujuan-tujuan perjuangan lebih lanjut. Panitia ini beranggotakan tujuh orang, yang dipilih dari grup Sardjono-Waworuntu dan Ali Archam (meninggal dunia beberapa tahun sebelumnya). Sebelum panitia bekerja, Sardjono telah "menyerah" dan kembali ke Tanah Merah. Menyusul kemudian grup Waworuntu sehingga keadaan di Tanah Tinggi makin sepi.[59] Suasana tempat pembuangan di Digul begitu rusak, dengan terjadinya apatisme, saling ejek, dan perpecahan yang mendalam. Sampai-sampai terjadi saling bacok yang mengambil korban jiwa beberapa orang komunis.[60]

Pada 1937, Kamp konsentrasi Digul menerima lagi pendatang baru, yaitu grup PKI Muda (PKI 35) yang telah digembleng oleh Musso. Mereka adalah Hardjono, Djoko Soedjono, Achmad Sumadi, dan kawan-kawannya. Grup ini memiliki arti penting bagi kaum komunis di Digul karena membawa angin baru Komintern. Mereka memberitahukan tentang adanya perubahan garis Moskow dan garis fron kerja sama (kaum komunis-borjuis–kolonialis dalam melawan fasisme) serta adanya fron persatuan Dimitrov.

Angin baru dari Grup 35 diwujudkan dalam pembentukan sebuah *Komite Antifasis*, di bawah Djoko Soedjono.[61] Komite ini menyatakan bahwa mereka loyal terhadap Hindia Belanda dan bersedia dipersenjatai untuk melawan fasisme. Golongan lain yang tidak setuju terhadap kebijakan tersebut menyebut Komite Djoko Soedjono sebagai Komite Penjilat yang tidak tahan lagi hidup menderita di tanah pembuangan.[62] Belanda menerima tawaran itu dan meminta agar komite secara individual mengirimkan telegram yang menyatakan bahwa ... "telah sekian tahun di pembuangan, kini bersedia memanggul senapan untuk melawan Jepang." Permintaan Belanda tentu saja ditolak karena tidak dikaitkan dengan cita-cita politik grup komite. Di pihak Belanda sendiri terpecah dua dalam menghadapi garis baru ini. Grup van der Plass setuju agar mereka dipersen-

jatai karena jika tidak, mereka akan dipakai oleh Jepang. Sementara itu, grup Spoor menolaknya karena bagi mereka, orang-orang komunis suatu saat akan menentang pemerintah. Akhirnya, semua tawanan (kecuali beberapa orang) diangkut ke Australia karena serbuan Jepang telah sampai di pintu gerbang Digul.

Di Australia telah bermukim sekitar 2.000 orang masyarakat Indonesia. Seperempat dari mereka bekerja sebagai babu, jongos, tentara, dan lain-lain. Sisanya, mereka adalah anak buah kapal yang mogok berlayar karena takut akan bahaya perang. Mereka kemudian ditangkap dan dimasukkan ke kamp konsentrasi dan disuruh bekerja (paksa). Uang kerja mereka diambil Belanda (2 sh) dan Australia (1 sh). Walaupun demikian, terdapat orang Indonesia yang menolak bekerja di kamp-kamp di Australia.

Keadaan ini dipergunakan Belanda untuk menjauhkan orang-orang Indonesia dari pihak Australia. Mereka menyatakan bahwa orang Indonesia suka mencuri serta mengidap penyakit menular (sehingga dilarang masuk restoran). Propaganda ini sangat berhasil. Memang ada orang-orang Indonesia yang mencuri dan menggranat. Karena itu, orang-orang Australia sangat tidak menyenangi orang Indonesia. Sebaliknya, orang-orang Indonesia yang mau bekerja sama diberi kedudukan tinggi, misalnya Boerhanoedin (PNI-Pendidikan) menjadi pena-

sihat van der Plass dan bekerja di Malay Department.

Setelah para tawanan (dari Digul) sampai di Australia, melalui jongos-jongos dan juru rawat-juru rawat Indonesia, mereka mencoba mencari kontak dengan Partai Komunis Australia (selanjutnya disingkat PKA). PKA mengirimkan lektur-lektur terpenting dan terbaru kepada mereka—keputusan Komintern 1935 tentang siasat menghadapi Perang Dunia II—sementara PKI mengirimkan laporan tentang kondisi mereka.

Atas usaha orang-orang Australia yang simpati kepada orang Indonesia, akhirnya ada perbaikan gaji, dari 3 sh menjadi 7 sh sehari (disamakan dengan gaji Australia), meskipun mereka tetap ditawan. Pihak PKA menyatakan bahwa nama Indonesia menjadi buruk karena sikap pelaut-pelaut Indonesia yang mogok berlayar. Belanda juga tidak disenangi karena dianggap penakut dan melarikan diri dari Jepang. Kepada PKI, PKA menganjurkan agar semboyan *Indonesia Merdeka* jangan didengungkan dahulu karena "kita" masih berperang menghadapi pihak fasis. Satu yang perlu dilakukan adalah menunjukkan bahwa "Indonesia" memiliki andil dalam perang melawan fasisme.

Berdasarkan informasi-informasi PKA, kemudian PKI mengambil beberapa keputusan. Pertama, menyusun lagi PKI Ilegal seksi Luar Negeri. Secara

legal, PKI akan keluar dengan semboyan *volks-front*. Kedua, membentuk CC baru, terdiri atas Ngadiman, Djoko Soedjono, dan Sabarin, yang berpusat di Brisbane. Sardjono sendiri berada di Melbourne. Dalam melakukan gerakan, mereka di-"awasi" oleh Jack Henry (Sekretaris PKA Queensland).

PKI menerbitkan surat kabar (?) ilegal dengan nama *Red Front*, yang setelah diketahui Belanda namanya berubah menjadi *Kontak*. CC PKI seksi Luar Negeri kemudian memerintahkan Sardjono yang berada di Melbourne untuk membentuk Sibar (Sarekat Indonesia Baru). CC menginstruksikan agar Ketua Sibar dipegang oleh grup van der Plass, yaitu Boerhanoedin. Akhirnya, orang yang menjadi Ketua Sibar adalah Sardjono sendiri. Bagi Sardjono, kerja sama dengan Belanda merupakan alat untuk tujuan-tujuan yang lebih besar. Berbeda dengan orang-orang yang "*co*", seperti Djalaludin, kerja sama dengan Belanda merupakan media untuk mendapatkan kemerdekaan sesudah perang. Seperti rekan-rekan mereka di Negeri Belanda, PKI mengobarkan tuntutan-tuntutan radikal, misalnya *Indonesia Merdeka Sekarang Juga*, serta ikut melarang pemogokan.

Kepada sel-sel PKI yang masih setia, diinstruksikan agar dibentuk cabang-cabang Sibar di Melbourne, Sydney, Casino, Brisbane, dan Mackey. Dengan demikian, Sibar berjalan dalam rangka taktik Komintern dan PKI. Akan tetapi, tiga bulan sebelum

Jepang menyerah, Sabariman mengadakan konferensi rahasia dan memutuskan untuk membubarkan Sibar setelah Jepang kalah serta muncul di muka umum. Sabariman dan Ngadiman mendapat tugas mempersiapkan pemogokan di Casino, Hardjono dan Achmad Sumadi menyiapkan pamflet-pamflet, serta Djoko Soedjono mempersiapkan kerja sama dengan PKA. Sardjono sendiri dibawa ke Morotai karena ketahuan terlibat dalam kegiatan. Keputusan ini memang dijalankan setelah Jepang menyerah. Saat pusat Sibar membubarkan diri, cabang Mackey juga membubarkan diri karena merasa kewajibannya telah selesai. Di Casino, yang merupakan sebuah daerah militer, proses pembubaran Sibar agak berbeda. Semua anggotanya menyatakan diri keluar. Pemogokan di Casino juga berlangsung setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Dari grup antikeputusan Komintern 35 timbul reaksi lain. Mereka mendirikan Parki (Partai Kebangsaan Indonesia) yang memiliki slogan *Indonesia Merdeka Sekarang Juga.* Parki merupakan lawan PKI Sibar. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, golongan non-*co* ini meminta nasihat PI kiri. Alangkah kecewa hati mereka ketika mereka menerima jawaban dari PI kiri bahwa Indonesia tidak bisa merdeka tanpa bantuan Belanda. Kemudian, mereka mendirikan Komite Indonesia Merdeka untuk meneruskan cita-cita mereka di Australia[63] sampai mereka kembali ke Indonesia setelah kurun 1946.

Pada saat Jepang menyerah telah tumbuh bermacam-macam grup di dalam PKI—grup Alimin/Musso yang hijrah ke Rusia, grup PKI 35, grup Digul di bawah Sardjono, grup mahasiswa di Negeri Belanda, serta grup-grup yang tidak tertangkap selama pendudukan Belanda dan Jepang. Mereka memiliki tradisi kerja yang berlainan, memiliki pengalaman yang berbeda-beda, serta membawa emosi yang beraneka warna. Mereka semua mengaku tunduk kepada Komintern serta berkiblat ke Moskow. Mereka merasa bahwa di atas bahu mereka terletak tugas untuk menyelamatkan "kaum yang terhina dan tertindas". Semua tekad itu dibakar oleh bunyi "pesan" di atas nisan Ali Archam yang meninggal dunia pada 1933.

> Bagi kami kau tak hilang tanpa bekas, tidak
> Hari ini tumbuh dari masamu
> Tangan kami yang meneruskan
> Kerja agung jauh hidupmu
> Kami tancapkan kata mulia hidup penuh harapan
> Suluh dinyalakan dalam malammu
> Kami yang meneruskan kepada pelanjut angkatan[64]

Bab Dua

Di Bawah Bayonet Jepang dan Desingan Peluru Sekutu

Beberapa minggu sebelum Jepang mendarat, pemerintah Hindia Belanda mulai berpikir tentang perlunya membangun sebuah aparat gerakan bawah tanah untuk melawan Jepang. Orang yang diserahi tugas untuk membangun aparat ini adalah Charles van der Plass. Karena hubungannya dengan tokoh-tokoh rakyat Indonesia amat kurang, Dr. Idenburg mengusulkan agar orang yang diserahi tugas tersebut adalah Mr. Amir Sjarifudin, seorang pegawai Departemen Ekonomi di Batavia. Pada waktu itu, Amir adalah Ketua Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), sebuah partai kiri yang antifasis.

Tidak jelas apakah pemerintah Hindia Belanda mengetahui adanya hubungan antara Amir Sjarifudin[1] dan organisasi PKI Ilegal. Jika kita melihat secara kritis hal ini, mungkin saja pemerintah telah

mengetahuinya. Pada 1940, Amir ditangkap dan disuruh memilih, dibuang ke Digul atau bekerja sama dengan pemerintah. Setelah berkonsultasi dengan pimpinan Gerindo, Amir memilih pilihan kedua.[2] Pemerintah lalu memberikan uang sebanyak 25.000 rupiah Belanda (gulden) kepada Amir untuk menyusun jaring-jaring bawah tanahnya. Selain dengan Amir, pemerintah menjalin kerja sama dengan pihak pimpinan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) yang juga antifasis. Akan tetapi, pembicaraan-pembicaraan antara van der Plass dengan Soebadio mengalami jalan buntu. Pihak PNI menuntut agar pemerintah Hindia Belanda menghapuskan Kamp Digul dan melepaskan tawanan-tawanan politik.[3]

Modal kerja Amir mungkin hanya dua. Pertama, hubungan yang luas dengan pemimpin-pemimpin rakyat Indonesia. Kedua, sejumlah pengikut setia Gerindo, partainya sendiri. Pertama-tama Amir mencoba menemui tokoh-tokoh yang menurut anggapannya satu ide. Ia menemui Sjahrir dan mencoba meyakinkan Sjahrir agar mau bergabung dengan gerakan bawah tanahnya. Sjahrir yang pada waktu itu memiliki rencana lain tidak memberikan jawaban pasti.[4]

Sementara itu, telah dilakukan pertemuan-pertemuan tidak resmi sejumlah tokoh Indonesia untuk membicarakan rencana-rencana perjuangan pada masa datang. Pertemuan-pertemuan yang diadakan

sesaat sebelum Belanda menyerah kepada Jepang bertempat di Rawamangun, Jakarta. Pertemuan itu membicarakan rumusan-rumusan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia saja yang mampu melawan fasisme Jepang. Hadir dalam pertemuan, antara lain Pamudji (tokoh PKI Ilegal), Subekti dan Atmadji (Gerindo), Sujoko (Barisan Rakyat Solo), Armunanto (Persatuan Sopir Indonesia, pernah kontak dengan PKI 35), Widarta (Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia, seorang komunis), Kiai Mustofa, serta Liem Koen Hian (Surabaya, dekat dengan grup Tan Ling Djie dan Oei Gee Hwat yang merupakan sel PKI di kalangan keturunan Cina). Pertemuan ini kemudian memunculkan organisasi Gerakan Rakyat Antifasis (Geraf).

Pertemuan kedua diadakan di Sukabumi, di rumah dr. Tjipto Mangoenkoesoemo. Pertemuan ini dihadiri Djoko Soedjono (seorang komunis), Dr. Iskak (tidak jelas), Mr. Hendromartono (seorang pemimpin buruh yang kemudian ikut Amir), dr. Tjipto Mangoenkoesoemo sendiri, serta Mr. Amir Sjarifudin. Pertemuan kedua berhasil membentuk pimpinan Geraf yang terdiri dari Mr. Amir Sjarifudin, Pamudji, Sukajat (keduanya dari PKI Ilegal Angkatan 35), serta Armunanto dan Widarta (sekretariat). Dr. Tjipto sendiri diangkat sebagai penasihat.[5]

Di samping gerakan bawah tanah Amir, terdapat gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh

Sjahrir. Akan tetapi, penulis tidak membicarakan gerakan-gerakan bawah tanah lainnya, kecuali yang berhubungan dengan gerakan kaum komunis.

Hancurnya Grup Amir

Ketika Jepang menduduki Indonesia, aparat kepolisian Hindia Belanda diambil alih oleh Jepang, termasuk PID-nya. Dalam waktu tidak terlalu lama, Jepang telah memiliki gambaran yang jelas tentang aliran-aliran yang ada di Indonesia dan bagaimana sikap mereka terhadap pemerintah Jepang. Juga gerakan-gerakan komunis ilegal dan sikap Gerindo telah diketahui Jepang. Hal ini yang membuat gerakan bawah tanah yang mengadakan kontak dengan pemerintah Hindia Belanda mudah terbongkar.[6] Sejak September 1942, penangkapan dimulai. Dengan menyiksa dan membujuk, jaringan-jaringan Amir mulai terbuka. Fokus pada akhirnya menuju diri Amir.

Pada Februari 1943, Amir bersama dengan 300 orangnya ditangkap.[7] Amir Sjarifudin, Pamudji, Sukajat (ketiganya pimpinan Geraf), Abdurrachim, serta Abdul Azis dijatuhi hukuman mati.[8] Sutrisno (PKI Ilegal) dihukum seumur hidup, demikian pula Abdul Fatah. Sementara itu, Amir dapat diselamatkan berkat intervensi Bung Karno dan Bung Hatta. Sebenarnya, pada 29 Februari 1944 Amir dijatuhi hu-

kuman mati. Keputusan ini didengar oleh Gunung Mulia, salah seorang saudaranya. Gunung Mulia kemudian meminta tolong Hatta dan berpesan agar namanya jangan disebut sebagai sumber berita.

Hatta menemui Soekarno dan bersama-sama pergi ke Letnan Jenderal Nagano, Panglima tertinggi Jepang di Jawa. Mereka mengatakan bahwa Amir adalah seorang tokoh yang populer. Jika ia sampai dibunuh, akan timbul suasana kurang baik di kalangan rakyat Indonesia. Akhirnya, Amir hanya dijatuhi hukuman seumur hidup. Hatta telah mengetahui jika Amir pada waktu itu memimpin gerakan bawah tanah karena sebelum Jepang mendarat, Amir pernah meminta Hatta dan Sjahrir pergi ke luar negeri. Kalau telah ada perdamaian, Hatta-Sjahrir dapat berbicara atas nama Indonesia. Ketika mengetahui pihak yang membiayai perjalanan mereka ke luar negeri adalah pemerintah Hindia Belanda dan bukan rakyat Indonesia, Hatta menolaknya. Dari sini, ia mengetahui Amir adalah pemimpin gerakan bawah tanah yang memiliki hubungan dengan pemerintah Hindia Belanda.[9]

Dari grup Geraf (atau mereka yang pernah hadir pada waktu pembentukannya), aktivitas-aktivitas melawan Jepang masih diteruskan. Salah satu sel Geraf yang masih bekerja adalah sel yang dipimpin Widarta. Sebagai sekretaris Geraf, ia tidak menonjol di kalangan pemuda waktu itu. Mungkin

karena sifatnya yang tidak menonjolkan diri, ia selamat ketika terjadi penangkapan massal tokoh-tokoh antifasis. Pada 1943, Widarta berhasil menjalin komunikasi dengan Achmad Aidit, seorang tokoh pemuda Gerindo.[10] Kelompok Widarta bergerak dan tidak pernah tertangkap. Kelompok lain yang bekerja melawan Jepang adalah kelompok Mr. Hendromartono. Ia adalah seorang pemimpin buruh yang bercita-cita mendirikan partai buruh di Indonesia. Kehidupan politik dan organisasinya dilalui dalam dunia perburuhan. Tidak jelas apakah ia termasuk grup "PKI Ilegal" karena setelah proklamasi, ia mengikuti grup Amir Sjarifudin.[11] Dalam zaman Jepang, ia mempertemukan tokoh-tokoh buruh kereta api dengan grup-grup transportasi lainnya. Di antara tokoh-tokoh buruh yang di-"komunis"-kan waktu zaman Jepang adalah mereka yang kemudian menjadi salah seorang ketua SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia).[12]

Grup Geraf lain nasibnya tidak baik. Kiai Mustofa tewas dalam perlawanan bersenjata di Singaparna, Jawa Barat. Subekti tewas di dalam *clash* dengan Jepang di Indramayu, Jawa Barat.[13] Grup Amir yang ada di Geraf praktis tergulung dan hanya beberapa sel yang masih berjalan efektif. Itu pun terbatas pada aksi-aksi propaganda anti-Jepang.

Kelompok-Kelompok Komunis yang Lain

Di samping kelompok Geraf, di Jakarta dan Bandung terdapat sebuah kelompok yang dikenal sebagai kelompok Joyoboyo, di bawah pimpinan Mr. Jusuf. Di antara kader-kadernya yang kemudian memainkan peran adalah Azis dan Mr. Suprapto. Mr. Jusuf adalah seorang aktivis Gerindo. Pada waktu pendudukan Jepang, ia bekerja di Departemen Dalam Negeri. Ia mendapatkan ijazah sarjana hukum di Leiden pada 1937. Sebagai seorang "revolusioner tua", pengaruhnya besar, antara lain memengaruhi D.N. Aidit.[14] Di kalangan pemuda, ia dikenal sebagai seorang "*mister gendeng*" sebab ia berani melawan Jepang dan memaki-maki Jepang di muka umum. Karena itu, banyak pemuda yang kagum dengan keberaniannya. Ia juga mengorganisasikan sopir-sopir taksi/kendaraan bermotor lainnya di wilayah Cirebon–Bandung–Tasikmalaya.

Kita tidak dapat menilai daya gerak dan aktivitas Joyoboyo-nya. Walaupun Sidik Kertapati menyatakan bahwa mereka pernah menyabot kereta api,[15] sebagai grup bawah tanah hasil terbesarnya terbatas pada aksi-aksi propaganda anti-Jepang. Di Jawa Timur bergerak kelompok-kelompok komunis yang berpusat di kota Surabaya. Mereka terutama dipimpin oleh pemuda-pemuda komunis yang "direkrut" dalam rangka kedatangan Musso. Ketika

Angkatan 35 disapu oleh Belanda, kelompok pemuda ini dapat meloloskan diri. Ke dalam kelompok ini dapat dimasukkan Tjugito dan Sudisman—pada zaman Jepang keduanya ditangkap dan dipenjarakan di Surabaya. Penulis tidak banyak mengetahui tentang grup Surabaya. Akan tetapi, jika melihat bahwa inti PKI Jusuf berada di daerah Jawa Timur, khususnya Besuki, dapat dikatakan bahwa di Jawa Timur pembinaan kelompok-kelompok komunis telah berjalan dengan jauh.

Pemuda-Pemuda yang Dipengaruhi Komunis

Seperti diketahui, di Jakarta terdapat beberapa kelompok pemuda yang memiliki perhatian besar terhadap politik. Pengelompokan-pengelompokan ini di samping pengelompokan manusia atas dasar ikatan yang sama (pandangan politik yang sama—misalnya grup Sjahrir), juga disebabkan oleh rivalitas dalam aparat sipil/militer Jepang sendiri.

Salah satu yang penting adalah kelompok Menteng 31—berpusat di sekitar asrama Angkatan Baru Indonesia. Grup ini mengorganisasikan Barisan Banteng, yang merupakan organisasi pemuda semimiliter dan memiliki anggota pemuda-pemuda berusia sekitar 15 tahun. Mereka dilatih baris-berbaris serta bermain dengan senjata kayu. Intinya semacam gemblengan untuk menanamkan semangat "militan" di

dalam kalbu para pemuda. Di antara aktivis yang mengorganisasikan Barisan Banteng adalah D.N. Aidit, seorang pemuda komunis sejak 1943. Dari grup yang sama lahir Barisan Pelopor. Inti barisan ini kemudian dijadikan Barisan Pelopor Istimewa dan hanya beranggotakan beberapa puluh orang. Fungsinya sebagai pengawal pribadi Ir. Soekarno, Ketua Poetera (Poesat Tenaga Rakyat).[16] Anggota Barisan Pelopor Istimewa, antara lain D.N. Aidit, Ir. Sakirman, Lukman, dan Sidik Kertapati—kemudian menjadi tokoh-tokoh yang memegang peran dalam fase sejarah berikutnya.

Grup Menteng 31 mencoba mengorganisasikan tukang-tukang becak dan mendirikan Persatuan Buruh Kendaraan. Di antara aktivisnya adalah D.N. Aidit dan kawan-kawannya. Baik Barisan Banteng maupun Persatuan Buruh Kendaraan akhirnya dibubarkan Jepang karena dianggap berbahaya.[17]

Ketika Poetera dibubarkan Jepang dan *Jawa Hokokai* dibentuk pada 1944, sejumlah pemuda Menteng 31 mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan persoalan politik waktu itu. Pemuda-pemuda ini kemudian membentuk Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindom), dalam usaha memperkuat gerakan bawah tanah. Sebagai ketua dewan politik dipilih D.N. Aidit. Di samping itu, duduk pula M.H. Lukman dan Sidik Kertapati dalam kepengurusan. Mereka membuat kelompok-kelompok kerja dan

mengadakan kontak dengan grup-grup pemuda lainnya. Tugas-tugas yang diemban Gerindom diterjemahkan dari brosur *The Peasant Movement in Indonesia*, keputusan-keputusan Kongres Komintern 1935, serta tulisan Dimitrov, "Ofensif Fasis dan Tugas-Tugas Komintern dalam Perjuangan untuk Persatuan Kelas Buruh Menentang Fasisme". Manifes Komunis juga diterjemahkan, tetapi baru selesai pada 1946. Penerjemahnya adalah Suwarko.[18]

Di samping grup tersebut, terdapat grup yang berkisar pada Angkatan Laut Jepang. Grup ini berpusat di asrama Indonesia Merdeka, di bawah "naungan" Mr. Soebardjo. Sementara itu, pengawasannya di bawah pimpinan Wikana. Menurut Mr. Soebardjo, ia sama sekali tidak menduga dan tidak mengetahui jika Wikana seorang komunis.[19] Asrama Indonesia Merdeka mengadakan kursus-kursus politik untuk mendidik kader-kader pemimpin Indonesia di kemudian hari. Menurut sumber-sumber komunis, Wikana selalu mendiskusikan persoalan-persoalan yang ada dengan D.N. Aidit. Ia juga memiliki hubungan dengan perwira Peta (Pembela Tanah Air) dan *Heiho*.[20]

Terdapat sesuatu yang tidak jelas ketika persiapan-persiapan proklamasi berlangsung. Tidak dapat dimungkiri bahwa ada sejumlah kader komunis yang bekerja keras untuk melicinkan jalannya proklamasi. Aidit merupakan salah satu utusan pemuda

yang mendesak Ir. Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bersama-sama dengan grup Menteng 31. Pada waktu itu, Aidit bertindak atas dorongan semangat revolusionernya dan tidak mengadakan konsultasi dengan "pembina"-nya, Widarta.[21] Demikian pula Wikana, salah seorang yang menjadi kurir antara grup Angkatan Laut (Maeda) dan grup pemuda penculik Soekarno-Hatta di Rengasdengklok. Tanpa Wikana dan juga Mr. Soebardjo, jalannya proklamasi kemerdekaan tidak akan begitu lancar.[22] Dalam hal ini, sejumlah kader komunis terdorong oleh motif idealisme-revolusioner dengan ikut membentuk hari-hari pertama Republik Indonesia.

Ada dua hal yang barangkali menarik untuk disoroti. Pertama, persoalan sampai seberapa jauh gerakan bawah tanah melawan Jepang efektif. Kedua, apakah mereka (terutama kader-kader komunis) bertindak atas kesadaran ideologis atau lebih merupakan tindakan-tindakan nonideologis (tidak sebagai komunis). Untuk menjawab persoalan pertama, ada baiknya mengutip pandangan seorang nasionalis tua yang aktif pada masa Jepang dan tanpa ragu-ragu mempertaruhkan diri untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka. Tokoh tersebut adalah Gatot Mangoenpradja. Ia menuliskan dalam memorinya, antara lain "I doubt that during the period of Japanese rule in Indonesia a real underground or-

ganization existed. If such a movement had actually taken place ...."[23]

Walaupun kaum komunis meng-"klaim" sebagai perencana sabotase-sabotase kereta api[24]—juga pemberontakan-pemberontakan di Singaparna dan Indramayu yang ikut "dipimpin" orang-orang Geraf[25]—kebenarannya masih disangsikan. Demikian pula pernyataan-pernyataan grup lain bahwa "kelompok mereka merupakan otak gerakan-gerakan melawan Jepang. Padahal, pekerjaan konkret yang dilakukan pada waktu itu terbatas pada aksi-aksi kampanye untuk tetap memelihara semangat kemerdekaan dan tetap memelihara sikap anti-Jepang (*airing his view*). Sekali-sekali mereka membuat pamflet gelap, tetapi lebih sering menulis protes-protes mereka dalam bentuk naskah.[26]

Jika kita membandingkan pekerjaan bawah tanah pemuda-pemuda Indonesia yang ada di Negeri Belanda dan pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, kita dapat mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan di Indonesia terbatas pada pemeliharaan teritorial dan "*counter* propaganda" terhadap penguasa Jepang. Kita tidak dapat menyejajarkan seorang Jusuf Muda Dalam yang menghadang senapan mesin dan mencegat konvoi Jerman di jalan raya[27] atau pekerjaan percetakan gelap bersama Soeripno dengan pekerjaan seorang Aidit atau Ir. Sakirman yang membagikan pamflet gelap antarteman seasrama

atau memaki-maki Jepang dalam ruang terbatas. Apalagi efektivitas pekerjaan bawah tanah mereka terbatas. Begitu pula motif ideologis anggota-anggota gerakan bawah tanah komunis Indonesia (dan grup-grup lainnya) dibandingkan komunis-komunis Indonesia yang ada di Australia, misalnya. Motif bergerak mereka lebih didorong oleh protes sosial atas tindakan-tindakan tidak adil pendudukan Jepang. Ir. Sakirman misalnya, adalah seseorang yang menyambut Jepang dengan sukacita pada saat-saat pertama. Padahal, sejak 1935 kaum komunis telah menggariskan sikap antifasis. Demikian pula Wikana yang tidak jauh berbeda. Bagi perkembangan politik Indonesia kemudian, pengelompokan-pengelompokan pemuda lebih banyak merupakan suatu "pembinaan" politik serta tempat ide-ide mereka lebih di-"standardisasi", seperti fungsi Stovia pada awal abad ke-20 bagi pergerakan nasional.

Tanpa adanya pengelompokan-pengelompokan Menteng 31, grup Angkatan Laut Jepang, grup mahasiswa, dan lain-lain, sulit dibayangkan timbulnya persatuan pemuda setelah 1945. Untuk PKI sendiri, kelompok-kelompok ini digunakan sebagai sumber "rekrutmen" kader-kadernya. Mula-mula tidak berdasarkan ideologi, tetapi kemudian ditempa menjadi kader-kader PKI.

Partai Komunis Intelek (Sesudah Proklamasi)

Minggu-minggu pertama setelah proklamasi merupakan minggu-minggu yang "melarutkan" ideologi-ideologi yang menjurangi persatuan. Berpuluh-puluh tahun cita-cita kemerdekaan Indonesia merupakan mimpi-mimpi yang indah dan jauh. Sekarang ia datang dengan segala keterbatasannya. Kemerdekaan merupakan sebuah mimpi yang menjadi kenyataan, tetapi juga merupakan sebuah gedung besar yang kosong. Menjadi tugas pendukung-pendukungnya untuk mengisi kemerdekaan.

Para pemuda cepat bertindak. Instansi-instansi penting, seperti Jawatan Kereta Api, stasiun radio, dan kantor pos diambil alih. Demikian pula "perburuan" senjata dimulai. Patroli-patroli Jepang dilucuti untuk mendapatkan senjata. Sementara itu, polisi-polisi Indonesia yang memiliki senjata bergabung dengan pihak Republik. Semangat rakyat harus diisi dengan demonstrasi-demonstrasi raksasa untuk membakar idealisme baru. Puncak kegiatan-kegiatan tersebut adalah "rapat raksasa" yang diadakan di Lapangan Ikada, Jakarta, tempat berpuluh ribu rakyat dan pemuda menghadirinya. Dalam rapat raksasa ini dibagi-bagikan pamflet berisikan lagu *Darah Rakyat*, yang dalam beberapa jam telah beredar.[28]

Pemuda-pemuda komunis yang ada waktu itu tidak berpikir dan bertindak sebagai seorang kader

komunis karena mereka harus segera membangunkan organisasi-organisasi komunis dan mengarahkan semangat rakyat yang sedang mendidih. Grup Menteng 31 (tempat "pemuda-pemuda komunis") bersama-sama dengan grup pemuda lain membangun Angkatan Pemuda Indonesia (API). Ketuanya adalah Wikana (dari grup Kaigun-komunis), dengan Chairul Saleh (Menteng 31) sebagai Wakil Ketua merangkap Sekretaris serta Darwis (Prapatan 10) sebagai Bendahara. Di jajaran pimpinan terdapat D.N. Aidit (komunis), Pardjono, A.M. Hanafi, Kusnandar, Djohan Nur, dan Chalid Rasjidi.[29] Grup Menteng 31 kemudian mendirikan Barisan Buruh Indonesia pada 15 September[30] dan Barisan Rakyat (untuk kaum tani). Aidit dan Lukman melalui gerakan-gerakan pemuda/buruh di Jakarta ikut aktif memimpin pengisian kemerdekaan Indonesia bersama-sama gerakan pemuda lainnya. Pada akhir September, Aidit, Lukman, dan Sidik Kertapati (juga A.M. Hanafi, Wahidin Nasution, Manaf Roni, dan lain-lain) ditangkap Kempetai Jepang karena ikut mengorganisasikan rapat umum Ikada (19 September). Mereka dimasukkan ke penjara Jatinegara (Bukit Duri?—*SHG*). Seminggu kemudian, mereka berhasil melarikan diri dengan bantuan kepala penjara. Dalam November, Aidit ditangkap oleh tentara Inggris dan ditahan di penjara Glodok. Mereka diserahkan kepada tentara Belanda, yang membuang mereka ke

Pulau Onrust selama tujuh bulan. Lukman sendiri pergi ke pedalaman dan ikut mengorganisasikan Peristiwa Tiga Daerah—juga ditangkap untuk beberapa saat.[31] Kader PKI yang lain, Wikana, aktif dalam Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) dan menjadi "fungsionaris pemuda". Ir. Sakirman aktif membangun laskar dan membangun TNI Masyarakat. Untuk itu, ia mendapatkan pangkat jenderal mayor.

Demikian kelompok-kelompok PKI yang ada di Indonesia juga mengikuti arus revolusi. Mereka lebih berpikir sebagai seorang patriot Indonesia daripada sebagai seorang fungsionaris PKI. Hal ini dapat dipahami karena aparat organisasi PKI waktu itu praktis tidak memiliki garis komando. Hanya satu kelompok yang memikirkan pembangunan kembali partai, yaitu dari sel Mr. Jusuf. Ketika pemerintah Republik Indonesia menganjurkan pendirian partai-partai, Mr. Jusuf menggunakan kesempatan ini untuk membangun PKI secara legal. Pada 21 Oktober, PKI secara resmi didirikan kembali dengan komposisi pengurus sebagai berikut.

Ketua	:	Mr. Jusuf
Sekretaris	:	Mr. Suprapto
Sek. II/Bendahara	:	Likasi Ali Kasim
Komisaris	:	Moh. Sain, Hamid Papatih, Jalil, Hamid Soetan, E. Coerdian, D. Totong, dan Mr. Moh. Sjah.

Badan Pendidikan	:	Mr. Soetan, Mr. Moh. Sjah
Pers/Penyiaran	:	Hamid Papatih (Ketua), Boejoeng Saleh, dan E. Coerdian

Dalam siaran pertamanya, pengurus PKI mengatakan bahwa UUD RI harus menjamin hal-hal berikut.

1. Kedaulatan satu-satunya dan semata-mata ada di tangan rakyat.
2. Seluruh kekuasaan tertinggi dalam negara baru berada di tangan wakil-wakil rakyat.
3. Wakil-wakil rakyat membentuk satu badan perwakilan.
4. Mereka dipilih oleh rakyat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh rakyat.
5. Pemilihan wakil-wakil rakyat seluruhnya berada di tangan warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dari umur 20 tahun ke atas *yang dapat membaca dan menulis* (dicetak miring dari penulis).
6. Pemilihan diselenggarakan secara langsung dengan jalan rahasia dan berdasarkan ev. vert (*evenrelge vertegenvoordiging*).
7. Tiap-tiap yang bakal memilih berhak pula untuk dipilih.
8. Pemilihan untuk badan-badan perwakilan diadakan tiap-tiap tahun.

9. Pemilih-pemilih setiap waktu dengan suara terbanyak dapat menghentikan anggotanya yang mereka telah pilih untuk badan perwakilan (*recall*).
10. Daerah-daerah mempunyai hak mengurus rumah tangga mereka dalam arti yang seleranya.
11. Tiap-tiap daerah mempunyai badan perwakilan sendiri.
12. Cara-cara dan syarat-syarat pemilihan untuk badan perwakilan daerah ini tidak berbeda dengan pemilihan untuk badan perwakilan pusat.[32]

PKI Legal Mr. Jusuf ternyata mendapatkan sambutan di daerah-daerah. Sampai akhir 1945, cabang-cabang PKI Legal telah berdiri di Sukabumi, Cirebon, Solo, Pekalongan, Madiun, Malang, dan Surabaya. Mereka menerbitkan majalah *Bintang Merah* dengan oplah 3.000 eksemplar. Pada 11 Desember 1945, PKI Legal mendirikan Laskar Merah di bawah pimpinan E. Coerdian.[33] Mereka memulai pendaftaran anggota-anggota laskar di Jombang pada 31 Desember. Kemudian, pendaftaran dilakukan di Madiun, Purwokerto, Ambarawa, Yogyakarta, Magelang, dan Salatiga. Dalam Januari 1946, Laskar Merah mengadakan pelatihan politik dan militer di Solo.

Pada waktu itu, Besuki merupakan pusat kekuatan PKI. Menurut Nyoto kepada Ruth T. McVey dalam 1967, daerah Jawa Timur pada umumnya me-

rupakan basis PKI (pada waktu itu Tjugito dan Sudisman bergerak di Jawa Timur setelah dilepas dari penjara Surabaya). Pada 6–10 Februari 1946, PKI mengadakan kongres di Cirebon. Kongres pertama setelah proklamasi ini dihadiri 3.000 orang peserta. Dalam kongres ini, Lauw King Hoo dari Besuki berpidato tentang situasi Yenan. Mr. Suprapto menyatakan bahwa Soekarno dahulu adalah pembela rakyat jembel, tetapi pada zaman Jepang hanya berjanji muluk-muluk dan ikut dalam propaganda *romusha*. Sosialisme dengan slogan-slogan anti-imperialis/kapitalis, tetapi dengan politik diplomasi yang akhirnya melemahkan perjuangan kaum miskin. Mereka berhenti berjuang setelah menjadi menteri. Kemerdekaan yang diperoleh sekarang baru untuk kaum borjuis dan belum untuk si jembel. Padahal, PKI tidak antiagama. Sebaliknya, Mr. Jusuf memuji-muji sikap Rusia dalam Dewan PBB. Ia berslogan Soviet.

Keputusan-keputusan Kongres PKI di Cirebon, antara lain berikut ini.

1. KNIP harus mencakup aliran politik/partai.
2. Kebebasan penuh dalam politik dan mengakui hak ini untuk anggota-anggota TKR.
3. Menghentikan pelucutan senjata.
4. Hak mendirikan organisasi-organisasi buruh dan tani.
5. Pemerintah harus berkonsultasi dengan rakyat sebelum berunding dengan van Mook.

6. Menerbitkan harian *Nyala* (Sukabumi) dan menerbitkan kembali *Bintang Merah* di Solo sebagai mingguan.

Di bidang organisasi juga diadakan perluasan. Fadikoen (redaksi *Bintang Merah*) dijadikan Kepala Bagian Penerangan PKI. Sementara itu, Soetopo Wonoboyo sebagai Ketua bagian tani, Sastrosoewirjo sebagai Ketua bagian buruh, serta Mr. Moh. Sjah dan Lauw King Hoo sebagai pengurus bagian politik.

Pertemuan PKI ini berimpit dengan pertemuan laskar lain. Tiap-tiap elemen datang dengan "laskar-laskarnya". Soeprapto juga datang ke Cirebon dengan membawa "anak buah". Dalam suasana seperti itu, meletus *clash* bersenjata dengan TRI Cirebon. Menurut intel Belanda, pada waktu itu terdapat 200 anak buah Jusuf dan 1.750 TKR. Pada 12 Februari 1946, Jusuf merebut kekuasaan di Cirebon. Residen dan kepala polisi ditangkap. Enam hari kemudian datang bantuan TRI. Jusuf dan Soeprapto ditangkap. Karena TRI melakukan "tindakan-tindakan revolusioner" —*putch* Jusuf— mengalami kegagalan total.[34]

Peristiwa Cirebon dalam pola-pola tertentu memiliki persamaan dengan Peristiwa Tiga Daerah pada Desember 1945. Saat itu sejumlah pemimpin komunis ilegal dan pemuda komunis dari Jakarta (termasuk Lukman) mencoba mengadakan *putch* di Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Jalannya peristiwa dan sikap pemerintah/TKR terhadap kedua *putch* terse-

but bukan tujuan penulisan ini. Akan tetapi, keduanya berakar dari sumber yang sama. Semangat meluap-luap dan kekecewaan terhadap pamong praja yang tetap duduk dalam pimpinan— merupakan orang-orang lama yang ikut menindas rakyat bersama-sama Jepang dan Belanda. Penyaluran-penyaluran amarah massa nonideologis ini dilakukan oleh PKI (tidak sebagai organisasi) dan merupakan perwujudan semangat revolusioner yang tidak terarah.

Ada beberapa hal menarik dalam PKI Jusuf. Salah satunya adalah tuntutan penyelenggaraan pemilihan umum, tetapi hanya bagi mereka yang dapat membaca dan menulis yang boleh ikut. Padahal, waktu itu tidak sampai sepuluh persen rakyat Indonesia melek huruf. Karena itu, hak demokrasi ini hanya diberikan kepada kaum intelektual (kaum intelektual dalam arti kata yang dapat membaca dan menulis). Dari tuntutan ini, kita dapat melihat betapa "tidak Marxis-Leninis"-nya PKI waktu itu.

Di pihak lain, PKI Jusuf membawakan emosi pemuda yang waktu itu sangat anti-imperialis/kapitalis. Mengkritik Soekarno dengan politik diplomasinya, padahal politik ini jelas berbeda dengan garis Komintern yang menganjurkan kerja sama dengan "kaum penjajah" demi kemerdekaan (garis Dimitrov setelah Perang Dunia II). Mereka adalah komunis-komunis lokal yang berpikir secara "praktis" tidak ideologis dengan teori-teori yang didiktekan dari

Moskow. Mr. Jusuf adalah "*home grown communist*", yang biasanya "the best communist are obviously nobody's puppets, but powerfull, intelligent, energetic, ambitious and usually power-hunger individuals who have creatively adapted Marxism to their needs and environments."

Jusuf bukan boneka Komintern. Ia giat, ambisius, serta "*power hunger's individualis*" (yang mencoba *putch* di Cirebon), tetapi sayangnya ia ngawur. Walaupun demikian, ia adalah prototipe *home grown communist* yang ikut membina "*the other home grown*", seperti Aidit, Nyoto (bergabung sebagai sekretaris cabang Besuki), serta Lukman (ikut dalam Peristiwa Tiga Daerah) yang pada 1951 menjatuhkan "*Russian trained* Alimin" dan "boneka Tan Ling Djie yang lemah".[35]

Pada 1946, PKI yang dikuasai grup "Moskow *trained*" menyalahkan Jusuf. Akan tetapi, ketika Aidit menjadi pimpinan PKI, ia menyatakan, "Jusuf was a good Communist who was dubious about PKI policy during the August Revolution. He could not comprehend why the PKI must not appear to lead the revolution. He organized his party in defiance of the party leadership. The party had no alternative but to condemn him."[36]

Sementara itu, tokoh-tokoh PKI yang dibawa ke Australia mulai berdatangan di Jakarta pada awal 1946. Organ yang mereka temui adalah PKI Jusuf dengan "semangat *hyper*-revolusioner" dan tidak

sesuai dengan garis Komunis Internasional. Pimpinan-pimpinan PKI muda (yang dibina selama 1935–1945) berada di penjara atau sedang sibuk bekerja di kalangan pemuda (Wikana) dan tentara (Sakirman). Lagi pula mereka tidak mengenal secara pribadi tokoh-tokoh yang amat muda dibandingkan mereka. Maruto Darusman menemui pimpinan PKI (waktu itu Mr. Moh. Sjah) dan berdiskusi. Maruto menarik kesimpulan bahwa PKI yang ada *ngawur* dan harus ditumbuhkan.[37]

Dalam Maret 1946, kelompok-kelompok ini mengadakan rapat di Jakarta. Mereka memutuskan untuk mengadakan pembersihan di kalangan PKI dan memutuskan akan mengadakan konferensi partai di Solo pada akhir April.[38] Menghadapi konferensi ini timbul persoalan lama, seperti kita lihat selama masa pembuangan Digul, PKI terpecah dua. Perpecahan makin menajam selama masa pengasingan para aktivis komunis di Australia, yaitu antara kelompok pro-Sibar dan kelompok anti-Sibar. Inisiatif pertemuan "PKI" ini berada di tangan Mardjohan. Akan tetapi, ketika konferensi berlangsung, inisiatif telah berada di tangan Sardjono dan kawan-kawannya. Grup anti-Sibar tidak diundang (70 orang) sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan sesuai dengan garis lama Sardjono.[39]

Pertemuan tersebut dihadiri 22 seksi PKI. Setiap seksi diwakili tiga orang dan datang dengan biaya sendiri. Dalam pertemuan muncul usul agar

Laskar Merah dibubarkan dan membangun Pemuda Komunis. Ada pula usul melebur Partai Sosialis dan PKI. Akhirnya, konferensi memutuskan untuk menyusun pengurus baru, terdiri atas berikut ini.

Ketua	:	Sardjono (grup Sibar, Ketua 24–26)
Wakil	:	Alibasah Winata (Ketua Juni 24, grup Sardjono)
Sekretaris I	:	Soekiman (PKI Tegal pada 20-an)
Sek. II/Bendahara	:	Likasi Ali Kasim (PKI Jusuf)
Pembantu	:	H. Datuk Batuah (grup 26)[40]

Setelah pertemuan selesai, PKI di bawah Sardjono mengeluarkan pernyataan yang menyokong Sjahrir. Setelah memberikan alasan-alasan ideologis, PKI menyatakan bahwa mereka menganjurkan untuk membentuk Fron Nasional guna memperkuat Republik Indonesia.[41]

Bab Tiga

Pemerintahan Sayap Kiri

Untuk sebagian besar rakyat dan pemuda Indonesia, revolusi dan kemerdekaan lebih merupakan suatu perwujudan daripada suatu cita-cita yang "indah". Akan tetapi, bagi sebagian kecil pemimpin, revolusi dan kemerdekaan merupakan masalah strategi dan taktik yang harus dihitung dengan hati-hati. Sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang, terdapat sejumlah pemikir politik Indonesia yang mencoba memahami lebih mendalam makna kemerdekaan. Karena itu, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan kesempatan bagi mereka untuk melaksanakan cita-cita agar kemerdekaan lebih indah terwujudkan. Seperti seorang dekorator yang mengisi sebuah gedung kosong, mereka be-"rebut"-an menghias gedung negara Republik Indonesia sesuai dengan ambisi, pan-

dangan, dan ideologi masing-masing. Untuk memahami liku-liku tahun-tahun pertama Republik Indonesia, sebaiknya konsepsi-konsepsi tersebut dibicarakan.

Pandangan Soetan Sjahrir

Soetan Sjahrir adalah seorang tokoh politik Indonesia yang "pandangan-pandangan" politiknya ditempa dalam lingkungan masyarakat sosialis (sosial-demokrat) Negeri Belanda ketika ia masih menjadi mahasiswa. Sebagai mahasiswa Indonesia, di samping aktif dalam PI bersama Hatta, ia aktif dalam Gerakan Mahasiswa Sosial Belanda. Sedikit banyak pandangan humanistis-demokrat (model sosialis Eropa) ikut mewarnai politiknya.[1] Pada 1934–1942, ia dibuang ke Boven Digul lalu ke Bandaneira. Pada masa pendudukan Jepang, ia menolak bekerja sama dengan tentara/pemerintah pendudukan dan katanya ia akan memimpin gerakan bawah tanah. Pengaruhnya di kalangan pemuda Jakarta di sekitar proklamasi memang besar. Sikap nonkolaborasi menambah wibawanya setelah Jepang menyerah kepada Sekutu dan pendaratan tentara Sekutu berada di ambang pintu.

Pada akhir Oktober 1945, Sjahrir menulis sebuah brosur *Perjuangan Kita*, yang merupakan pokok-pokok pandangannya terhadap masalah-masalah revolusi Indonesia. Sjahrir tergugah melihat keka-

cauan-kekacauan yang timbul setelah proklamasi tercetuskan. Sjahrir melihat tindakan-tindakan kejam, seperti perampokan, pembunuhan terhadap bangsa asing, serta kebencian terhadap orang Cina, Indo, Ambon, dan Manado, sebagai usaha Jepang untuk mengalihkan perasaan benci rakyat kepada mereka. "Kesadaran revolusioner yang harus berdasar pada pengetahuan kemasyarakatan, tipis benar." Karena itu, kemungkinan untuk menggunakan "momentum" yang ada juga sangat kecil. Dari kenyataan-kenyataan praktis tersebut, Sjahrir mencoba membuat analisis terhadap masyarakat Indonesia dihubungkan dengan tugas-tugas revolusi yang sedang berjalan.

Menurut Sjahrir, pada hakikatnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat feodal. Belanda dahulu berpegang pada sisa-sisa feodalisme untuk melangsungkan penjajahannya. Mereka mengawinkan rasio modern dengan feodalisme yang menjadi contoh pertama fasisme di dunia. Sebelum ada Buchen Wald dan Belzen, pemerintah Hindia Belanda telah membuat Boven Digul. Sebelum Mussolini dan Hitler muncul, Hindia Belanda telah menjalankan tindakan-tindakan fasistis. Revolusi Indonesia harus merupakan revolusi rakyat, yang dalam perjuangannya menuntut hak-hak sebagai bangsa untuk jaminan kemanusiaan dan jaminan bahwa ia tidak akan diperlakukan lagi sebagai budak belian. Karena itu, revolu-

si Indonesia bagi Sjahrir adalah revolusi nasional (sebab menuntut kemerdekaan sebagai bangsa), sekaligus revolusi kerakyatan (sosial) karena bertujuan mengubah struktur sosial yang ada secara revolusioner (menghancurkan feodalisme). Jaminan ke arah ini hanya terletak pada sikap demokratis aparat-aparat pemerintah dan kemasyarakatan. Misalnya, pembentukan perwakilan rakyat dari desa sampai pusat agar aspirasi-aspirasi rakyat dapat tersalurkan. Sjahrir melihat cara ini dapat mengurangi ekstremisme dan fanatisme di kalangan rakyat. Dengan cara ini, rakyat diajak melihat kenyataan-kenyataan yang ada bahwa dunia sekarang dipengaruhi dua kekuatan raksasa, komunis Rusia serta kapitalis Amerika dan sekutunya. Sementara itu, Indonesia berada dalam "lingkungan" dan *intrese* blok kapitalis.

Sjahrir mengecam chauvinisme dan memperingatkan bahwa ... "hanya semangat kebangsaan yang dipikul oleh perasaan keadilan dan kemanusiaan yang dapat mengantar kita maju di dalam sejarah dunia. Sebab pada akhirnya semua kebangsaan harus menemui ajalnya di dalam suatu kemanusiaan yang meliputi seluruh dunia menjadi satu bangsa, yaitu bangsa manusia yang hidup dalam pergaulan berdasarkan keadilan dan kebenaran, tidak lagi terbatas oleh perasaan-perasaan sempit memecah sesama manusia oleh karena kulitnya berlain warna atau oleh karena turunan darahnya berlainan."

Sjahrir melihat pimpinan revolusi waktu itu, Soekarno, tidak memiliki kemampuan dan berjiwa kuat untuk melaksanakan cita-cita revolusi. "Kebanyakan dari mereka telah terlalu biasa membungkuk serta berlari untuk Jepang atau Belanda, jiwanya bimbang dan nyata tidak sanggup bertindak dan bertanggung jawab." Sjahrir menamakan mereka "anjing kaki tangan Jepang".[2]

Kepada pemuda-pemuda, Sjahrir juga tidak menaruh "kepercayaan". Pemuda kita umumnya hanya memiliki kecakapan untuk menjadi serdadu, yaitu berbaris, menerima perintah menyerang, menyerbu, dan berjibaku serta tidak pernah diajari memimpin. "Nyatalah bahwa anggapan bila angkatan muda harus memimpin perjuangan kemerdekaan kita, suatu kekeliruan yang dapat merusakkan perjuangan kita." Bagi Sjahrir, pihak yang harus memimpin revolusi adalah partai kerakyatan yang revolusioner.

Pandangan-pandangannya kemudian diterapkan secara konkret setelah ia menjadi perdana menteri. Misalnya, mengubah KNIP dari sebuah badan penasihat menjadi badan legislatif dengan menambahkan kekuatan-kekuatan demokratis lainnya. Juga melakukan pembentukan dewan rakyat di daerah-daerah. Partai-partai dan organisasi-organisasi diizinkan berdiri agar semua aspirasi rakyat dapat disalurkan (untuk mengurangi fanatisme dan eks-

tremisme). Bahkan, Sjahrir membangun sebuah partai kerakyatan-revolusioner. Demikian pula tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi sikap "fasis-militeristis" di kalangan tentara, yang akan menjadi sumber ketegangan di kemudian hari.

Ide-ide Sjahrir mendapatkan tentangan kuat ketika ia menerapkannya dalam bersikap menghadapi Belanda. Bagi Sjahrir dan kawan-kawannya, Indonesia terletak dalam lingkungan pengaruh kapitalis-imperialis Amerika-Inggris dan nasib Indonesia bergantung padanya. Dalam ilmu "perang", kita harus membuat lawan selemah mungkin. Dalam hal ini, memisahkan kepentingan-kepentingan yang ada di luar Indonesia untuk tidak melakukan intervensi. Kaum kapitalis akan mengambil sikap netral jika kita tidak merugikannya, akan pro kalau kita menguntungkannya, serta akan anti kalau kita merugikannya. Bagi Sjahrir, dalam fase perjuangan "sekarang", modal asing jangan diganggu dan hanya modal musuh yang akan disita (lihat *Manifes Pemerintah 1 November*, yang senada dengan tulisan Sjahrir).

Bagi Sjahrir dan kawan-kawannya, modal Republik Indonesia secara material belum ada. Oleh sebab itu, perlu waktu untuk mengulur bagi penyempurnaan Republik Indonesia. Bukankah kemenangan tidak dapat dicapai dengan semangat melulu, tetapi juga dengan pengorganisasian yang rapi.[3] Sjahrir ingin menunjukkan bahwa Republik Indonesia

merupakan suatu negara. Misalnya, dengan mengirimkan beras ke India. Untuk *goodwill* internasional, Indonesia harus menunjukkan kesediaannya berunding secara damai dengan Belanda, yang secara hukum mewarisi Hindia Belanda dari Jepang. Kekuatan nyata yang dimiliki Republik Indonesia hanya Jawa-Madura dan Sumatra sehingga harus dipakai sebagai modal perjuangan untuk mendapatkan daerah-daerah lainnya. Sjahrir dan kawan-kawannya tidak berkeberatan atas pengakuan *de facto* untuk Jawa-Sumatra sebab daerah-daerah lainnya akan didapatkan dalam RIS (Republik Indonesia Serikat). Bagi mereka, perjanjian Linggajati merupakan likuidasi Hindia Belanda dan kemungkinan mengadakan hubungan internasional lebih lanjut untuk memecahkan politik isolasi terhadap Republik Indonesia.

Demikian pandangan pokok Sjahrir dan kawan-kawannya terhadap soal-soal revolusi.

Pandangan Tan Malaka[4]

Tan Malaka merupakan tipe lain Sjahrir. Ia adalah seorang guru yang belajar di Negeri Belanda dan hidup dalam lingkungan keluarga-keluarga buruh yang miskin di sana. Setelah kembali ke Indonesia, ia menjadi guru di Deli. Di sana ia melihat banyak ketidakadilan.

Pengalaman-pengalamannya yang pahit men-

dapatkan penyaluran di Semarang ketika ia bertemu dengan Semaoen dan kawan-kawannya pada 1920-an. Waktu itu ia sakit TBC dan memerlukan perawatan. Semaoen yang menjamin makanan sehat (susu) baginya dan ia aktif di PKI.[5] Pada 1924, ia diusir ke luar negeri. Ia pergi ke Rusia dan bekerja sebagai agen Komintern untuk Timur Jauh (Asia Timur). Dalam Komintern, ia tidak cocok dengan garis Stalin. Karena itu, ia mengambil sikap "independen". Ia menjadi "pacar merah" Indonesia. Ia mengembara dari satu negeri ke negeri lain sambil bersembunyi karena dicari oleh polisi Belanda-Inggris-Amerika-Kuomintang dan Prancis. Dengan teman-teman komunis Indonesia, ia berselisih paham tentang soal Pemberontakan 26. Komunis-komunis Indonesia yang patuh kepada Moskow mengecapnya sebagai Trotskys, pemecah belah.

Pada 1942 ia kembali ke Indonesia. Kemudian, ia bekerja sebagai mandor di pertambangan batu bara di Bayah, Banten Selatan. Di sini, ia mengorganisasikan buruh-buruh, mengorganisasikan permainan drama, dan lain-lain. Salah seorang "atasannya", Suharto, menyatakan bahwa Tan Malaka memang merupakan orang misterius. Ia tidak pernah mandi sebagaimana orang Indonesia umumnya (2 kali sehari) dan sering melamun di tempat-tempat sepi. Ia juga berbicara "intelek". Menurut Tan Malaka sendiri, menjelang dan di sekitar proklamasi ia berke-

nalan dengan Chairul Saleh, Sukarni, dan lain-lain. Suharto kemudian melihat Tan Malaka sering mondar-mandir ke Jakarta bersama beberapa orang Jepang yang memakai peci. Rupa-rupanya mereka adalah perwira-perwira Jepang yang pro dan bekerja sama dalam rangka kemerdekaan Indonesia.[6]

Sebagaimana Sjahrir, Tan Malaka tidak memiliki kepercayaan kepada Soekarno. Pada September ia mengadakan pertemuan dengan Sjahrir di Serang. Di sana ia menawarkan agar Sjahrir dan grupnya bekerja sama "menggulingkan Soekarno". Sjahrir bertanya tentang rencana-rencananya pada masa depan. Tan Malaka menjelaskannya, antara lain ia akan menjadi Presiden Republik Indonesia dan Sjahrir akan menjadi Perdana Menteri. Soal pandangan terhadap bangsa asing dan soal pokok-pokok revolusi, Sjahrir merasakan bahwa antara dia dan Tan Malaka terdapat perbedaan-perbedaan pokok pikiran yang mendalam. Karena itu, kombinasi kekuatan Sjahrir-Tan Malaka tidak pernah terwujudkan.[7]

Rencana kedua Tan Malaka adalah mendatangi Soekarno pada September 1945. Di sana ia meyakinkan Soekarno bahwa sewaktu-waktu Soekarno dapat ditangkap oleh Inggris (bersama Hatta) karena bekerja sama dengan Jepang. Jika hal ini sampai terjadi, pimpinan revolusi harus segera digantikan. Menurut Hatta, ... "Suatu hari Soekarno datang ke rumah dan menyatakan bahwa ia telah telanjur men-

janjikan kepada Tan Malaka bahwa ia akan menjadi pengganti pimpinan revolusi kalau kita ditangkap. Saya katakan bahwa tindakan itu salah. Untuk menetralisasi kemudian beberapa nama ditambahkan, yaitu Sjahrir, Wongsonegoro sebagai wakil pamong praja, serta Iwa Kusumasumantri." Ternyata, *testamer* ini dibawa oleh Tan Malaka dan tokoh-tokoh lainnya tidak tahu-menahu. Hatta memberitahu Sjahrir, yang kemudian mencari dan membicarakan hal ini dengan Tan Malaka di Bogor. Tan Malaka sekali lagi menawari Sjahrir untuk menjadi Perdana Menteri. Sjahrir menolak dan menyuruh Tan Malaka berkeliling Jawa untuk melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Sjahrir datang lagi kepada Hatta. Ia menyatakan bahwa ide-ide Tan Malaka sangat berbahaya karena dalam rangka "perang", akan membakar semuanya sehingga Belanda tidak akan mendapat apa-apa lagi.[8]

Dalam menghadapi kaum kolonialis/imperialis, menurut Tan Malaka terdapat dua pola. Di beberapa negara, seperti India, Filipina, Cina, dan lain-lain, kolonialisme telah melahirkan kelas borjuis-nasional. Kepentingan mereka sering kali berimpitan. Karena itu, mereka dapat bekerja sama menghadapi rakyat jelata (Murba). "*Amban demarkasi* (istilah Tan Malaka) ini lebar ... di mana borjuis-imperialis bisa berjabat tangan dengan borjuis-jajahan, buat kerja sama memeras dan menindas si Murba di Indonesia,

kepentingan bersama ini membuat mereka bekerja sama dalam lapangan politik. Kekuasaan formal diserahkan oleh sang imperialis kepada borjuis-jajahan, tetapi kepentingan-kepentingan yang mendasari kehidupan lama (perlindungan kapital) tetap dipertahankan."

Di Indonesia, borjuis besar dan menengah tidak ada (tidak kuat) sehingga kaum imperialis tidak memiliki amban yang lebar. Hanya golongan *ambtenaar* yang memiliki kepentingan sama dengan kaum penjajah. "Borjuis alat" (istilahnya agak membingungkan—*SHG*) bersama dengan kaum imperialis berdiri berseberangan di antara garis demarkasi dengan kaum Murba yang terperas dan tertindas. Mereka kemudian digalang dalam Fron Murba untuk menghadapi pihak lawan (imperialis/kelas borjuis alat). Bagi Tan Malaka, kemerdekaan politik tanpa penguasaan alat-alat ekonomi kaum kapitalis tidak ada artinya. "Kemerdekaan seratus persen yang diproklamasikan oleh rakyat Indonesia pada 17 Agustus 1945, dengan pengambilan semua milik asing (negara sahabat ataupun negara musuh) segera kelak akan merosot entah sampai berapa persen."

Tan Malaka tidak setuju perundingan apa pun tanpa dasar pengakuan kemerdekaan Indonesia seratus persen. Sebagai jaminan untuk memaksa pihak lawan melakukan perundingan adalah menyita milik asing dan menggalang Fron Murba. Cara-cara par-

lementarisme dan *putch* tidak akan berhasil. Cara satu-satunya hanya aksi massa.[9] Dari titik tolak ini, Tan Malaka kemudian mengorganisasikan Persatuan Perjuangan dan Peristiwa 3 Juli.

Di samping pandangan Sjahrir dan Tan Malaka, terdapat pandangan PKI Jusuf yang telah kita lihat sebelumnya. Sementara itu, partai-partai lain belum memiliki ide-ide yang jelas dalam mencapai tujuan revolusi Indonesia. Baru setelah 1947, partai-partai lain mencoba untuk merumuskannya.

Lahirnya Partai Sosialis dan Partai Buruh

Pada September, empat orang pemuda Indonesia yang memakai seragam NICA (Netherlands Indies Civil Administration) ditangkap pemuda-pemuda di Jakarta. Keempat pemuda itu menyatakan bahwa mereka ingin bertemu dengan menteri luar negeri Indonesia. Mereka adalah Abdulmadjid, Tamzil, M.S. Moewaladi, dan Asmaun—kemudian dibawa ke rumah Soebardjo. Di hadapan Soebardjo, Tamzil menyatakan bahwa mereka diutus oleh van Mook untuk membicarakan hubungan Indonesia-Belanda atas dasar pidato Ratu Wilhelmina pada 7 Desember 1942 (dasar *status dominion*). Soebardjo marah dan menyatakan bahwa lonceng tidak bisa berjalan mundur. Kemudian, Soebardjo menyuruh keempat pemuda ini berdiam di rumahnya selama tiga hari un-

tuk orientasi. Mereka lebih antifasis daripada antikolonialis. Abdulmadjid lalu mencari Sjahrir, seorang temannya semasa mahasiswa pada awal 1930-an.[10]

Antara Sjahrir dan Abdulmadjid terdapat persamaan sikap waktu itu. Keduanya sangat antifasis walaupun pengalaman-pengalaman dan pandangan-pandangan mereka berbeda untuk masa-masa selanjutnya. Kelompok lain yang sangat anti-Jepang (secara politis) adalah Amir Sjarifudin, yang baru dilepas dari penjara Jepang. Amir dan Sjahrir memiliki rencana menyusun barisan-barisan politik guna mencapai cita-cita ideologis mereka. Pada 20 November, Soetan Sjahrir mendirikan Partai Rakyat Sosialis (Paras), sedangkan Amir Sjarifudin beberapa minggu sebelumnya mendirikan Partai Sosialis Indonesia (Parsi).[11] Keduanya sedang mencoba mendapatkan kader-kader di kalangan pemuda revolusioner waktu itu, yang banyak di antaranya telah didekati pihak lain. Karena antara Sjahrir dan Amir waktu itu tidak ada perbedaan-perbedaan prinsipal, para aktivis pemuda mengusulkan agar keduanya bergabung. Keduanya setuju, terlebih Sjahrir yang sangat sibuk sebagai Perdana Menteri baru. Ia hampir tidak memiliki waktu untuk mengurus organisasi. Atas usaha beberapa aktivis pemuda, diadakan fusi antara Parsi dan Paras dengan nama baru Partai Sosialis (selanjutnya disingkat PS).[12] Komposisi kepengurusan PS tersusun sebagai berikut.[13]

Dewan Pimpinan Pusat	:	Amir Sjarifudin, Hendromartono, Soedarsono, Oei Gee Hwat, Soepeno
Politik	:	Abdulmadjid, Soemitro Reksodiputro, Soegondo, M.S. Moewaladi, Tamzil, Soebadio
Eksekutif:		
a. Organisasi/sek.	:	Abdulmadjid, Goenara, Soetrisno, Sitorus, Oemar Sastroamidjojo, Wijono, Sumartoyo
b. Penerangan	:	Djohan Sjahroesah, Soebagio, Wangsawidjaja, Soewanda, Soediono, Tan Ling Djie, Soemarno
c. Pendidikan	:	Soekandar, Soekemi, Soehadi, Koeswari, Soegra, Djawoto
d. Keuangan	:	Moedono, Soekandar, Djoenaidi
e. Perhubungan	:	Soebianto Koesoemo, Pramono, Abdul Fatah,

Soedjoed, Roeslan,
Noeroelah, Tauchid,
Soehadi, Sardjono

Di dalam PS terdapat empat kelompok yang bergabung menjadi satu. Akan tetapi, mayoritas terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu grup Amir dan grup Sjahrir. Termasuk grup Amir Sjarifudin (Gerindo, PKI Ilegal, dan grup Surabaya) adalah Mr. Hendromartono, Oei Gee Hwat, Soetrisno, Oemar Sastroamidjojo, Tan Ling Djie (pernah menjadi mahasiswa di Leiden, juga Abdulmadjid), Soekandar, H. Djunaidi, Soebianto Koesoemo, Abdul Fatah, Rusalam (awalnya kader Djohan Sjahroesah), serta Soehadi (dekat dengan Sjahrir). Orang yang dekat Sjahrir adalah Dr. Soedarsono, Soepeno, Soebadio Sastrosatomo, Soegondo Djojopoespito, Sitorus, Djohan Sjahroesah, Soebagio, Wangsa Widjaja, Soemarno, Soekemi, Kusnaeni, Soegra, Noeroelah, Sardjono (dekat dengan grup Yogya), serta Tauchid (Yogya). Grup Eropa adalah Abdulmadjid, Mr. Tamzil, M.S. Moewaladi, dan Goenara (akhirnya ikut Sjahrir). Dari grup Yogya adalah Wijono dan Soemartojo.[14]

Walaupun pertentangan internal waktu itu tidak muncul di dalam PS, sejak pendiriannya baik grup Amir maupun grup Sjahrir memiliki rencana-rencana sendiri untuk mencapai tujuan masing-masing. Persatuan mereka hanya berdasarkan sikap an-

tifasis dan kepentingan bersama dalam menghadapi Tan Malaka dengan Persatuan Perjuangannya. Setelah bahaya ini hilang, persatuan yang terbentuk akan meretak.

Partai Buruh Indonesia (PBI) memiliki sejarah berbeda. Pada 15 September 1945, grup Menteng 31 mendirikan Barisan Buruh Indonesia (BBI), yang merupakan organisasi buruh pertama untuk tugas-tugas perjuangan. Di kota-kota lain muncul pula BBI, yang menjadi pelaksana dalam pengambilalihan instansi-instansi dari Jepang. BBI makin kuat karena Iwa Kusumasumantri selaku Menteri Sosial hanya mengakui BBI sebagai satu-satunya organisasi buruh di Indonesia.[15]

Pada November 1945, BBI mengadakan kongres di Solo. Selama kongres tersiar kabar bahwa dalam Januari 1946 akan diadakan pemilihan umum. Kongres menjadi "resah" karena terdapat sejumlah pimpinan yang ingin agar BBI diubah menjadi partai dan ikut pemilihan umum. Timbul perdebatan sengit dalam kongres. Akhirnya, dengan kemenangan tipis BBI berubah menjadi Partai Buruh Indonesia (PBI). Syamsu Harya Udaya dipilih sebagai Ketua dan *Senjata Boeroeh* sebagai organ resminya. Akan tetapi, sejumlah cabang BBI tidak mau peduli dengan keputusan tersebut sehingga keputusan sebelumnya dikoreksi. PBI didirikan oleh BBI sementara BBI tetap berdiri.[16]

Pada masa ini, di Indonesia terdapat tiga partai yang berdasarkan Marxisme, yaitu PKI, PS, dan PBI. Dalam ketiga partai itu, elemen-elemen komunis sangat kuat dan ikut menentukan jalannya organisasi, dengan garis kebijakan yang diambil kira-kira sama. Pihak PKI menyatakan bahwa berdirinya ketiga partai Marxis disengaja karena kesalahan pimpinan PKI waktu itu. Saya sendiri melihat kemungkinan lain. Secara historis, PKI tidak pernah terkoordinasi. Banyak grup dalam PKI yang tiap-tiap grup merasa bahwa mereka tidak usah tunduk kepada grup yang lain. Dalam pimpinan PKI resmi sendiri terlihat adanya tiga kombinasi grup, yaitu grup Digul, grup Eropa, dan grup dalam negeri (*home grown*).

Penyusunan Barisan-Barisan ke Bawah

Di samping ketiga partai yang didirikan orang-orang komunis, mereka mulai mendirikan organisasi-organisasi pemuda, buruh, tani, laskar, dan gerakan-gerakan massa lain yang dapat mendukung cita-cita kaum komunis ke masyarakat.

Pada 10 November 1945, di Yogyakarta dilangsungkan kongres organisasi-organisasi pemuda yang ada waktu itu. Selama kongres berlangsung, tujuh organisasi pemuda menggabungkan diri menjadi satu organisasi Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Ketujuh organisasi itu adalah Angkatan Pe-

muda Indonesia (Jakarta), Gerakan Pemuda Republik Indonesia (Yogyakarta), Angkatan Muda Republik Indonesia (Semarang), Angkatan Muda Kereta Api, Angkatan Muda Gas dan Listrik, Angkatan Muda Pos dan Telegram, serta Pemuda Republik Indonesia.[17] Sebagai pengurus pertamanya terpilih Kris Subanu (GPRI Yogyakarta), Wikana (API Jakarta), dan Ibnu Parna (AMRI Semarang). Sebagai penasihat Pesindo, duduk antara lain Amir Sjarifudin, Djoko Soedjono, Chairul Saleh, S.K. Trimurti, Sitorus, Martono Tirtonegoro, Soegijono, dan S. Widagdo.[18] Walaupun dalam badan pengurusnya orang-orang PKI tidak terlalu kuat terwakili, di antara aktivis-aktivis intinya terdapat tokoh-tokoh, seperti Ruslan Widjajadisastra, Tjugito, Sudisman, dan Djalaludin Jusuf Nasution (Ketua PKI Sumatra Utara, 1965).[19]

Pesindo dapat berkembang dengan pesat, antara lain karena bantuan Amir Sjarifudin dan Sjahrir. Karena sistem anak emas terhadap organisasi pemuda ini, akhirnya para pemuda terpecah belah. Andil pertamanya dibuat oleh pemerintah waktu itu.[20] Di Yogyakarta, Pesindo memiliki majalah *Revolusioner* yang aktif mendukung politik Sjahrir-Amir. Di Magelang, Pesindo menerbitkan koran *Penghela Rakyat*. Dalam waktu relatif singkat, Pesindo menjadi organisasi pemuda terkuat di daerah Republik. Jika dipandang perlu, Pesindo dapat digunakan untuk "intimidasi" terhadap lawan-lawan politik.

Di samping pemuda, petani dijadikan "objek" oleh tokoh-tokoh kiri. Orang yang mengemukakan inisiatif ini terutama orang-orangnya Sjahrir. Pada awal Desember 1945, BTI (Barisan Tani Indonesia) didirikan di bawah pimpinan Wijono (Ketua grup Sjahrir), Sardjono (Ketua II), A. Soedibyo (Organisasi), Sajogo (Sekretaris), dan Tauchid (Penerangan, grup Sjahrir).[21] Akan tetapi, BTI tidak dianggap terlalu penting. Perkembangan organisasinya pun tidak meluas seperti Pesindo. Pemimpin-pemimpinnya tidak menguasai persoalan-persoalan pokok agraria. Mereka lebih banyak berslogan industrialisasi pertanian[22] sebagai *plan* dua tahun untuk mekanisasi pertanian, tanpa melihat masalah-masalah yang melibatkan persoalan agraria di Indonesia.[23]

Pembinaan buruh tidak berjalan lancar. Kita telah melihat sebelumnya bahwa sejak 15 September 1945, di kota-kota besar di Jawa berdiri BBI (Barisan Buruh Indonesia), yang kemudian berubah menjadi Partai Buruh Indonesia (PBI). Akan tetapi, banyak cabang BBI tidak mau bubar karena tidak mau menjadi partai. Akhirnya, BBI tetap dipertahankan di samping PBI. Pada 21 Mei 1946, BBI berganti nama menjadi Gasbi (Gabungan Sarekat Buruh Indonesia). Meskipun begitu, persoalan organisasi ke dalam masih kacau balau. Di dalamnya terdapat golongan petualang, membicarakan persoalan-persoalan koalisi dalam kabinet yang bukan bidang per-

buruhan, dan lain-lain. Untuk itu, dibentuk sebuah panitia pembersihan di Malang (21 Juli 1946) untuk membersihkan tukang-tukang catut ini. Dalam keadaan ini, Gasbi pecah lagi karena golongan *vaksentral* keluar dan mendirikan GSBV (Gabungan Sarekat Buruh Vaksentral). Dengan susah payah, akhirnya kedua golongan ini dapat disatukan kembali dan pada 29 November 1946, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dilahirkan.[24]

Golongan-golongan kiri memiliki perhatian besar terhadap gerakan buruh (aneh sekali petani-petani dilalaikan dan terlalu berorientasi ke Rusia?—*SHG*). Kader-kader terbaik golongan kiri dikirim ke daerah pendudukan untuk memimpin buruh-buruh. Dalam 1947, empat orang kader mudanya dikirim ke Jakarta untuk mempersiapkan basis-basis buruh di kota ini. Mereka adalah Munir, Suwardi, Hartojo, dan Sjam.[25] Sementara itu, tokoh-tokoh komunis Indonesia dari Eropa ada juga yang dimasukkan ke dalam organisasi buruh. Setiadjid setelah kembali dari Eropa masuk PBI, kemudian menjadi Ketua Kongres I SOBSI pada 1947. Demikian pula tokoh-tokoh, seperti Maruto Darusman dan Moewaladi.[26]

Di dalam rubrik *Boeroeh* terdapat artikel-artikel yang ditulis untuk konsumsi khusus buruh, semacam indoktrinasi yang intensif. SOBSI membangun kembali laskar, seperti Laskar Minyak untuk pabrik minyak di Cepu. Jika kita melihat tokoh-tokoh berat

komunis yang ada di SOBSI (Achmad Sumadi, Oei Gee Hwat, Hardjono, Setiadjid, Maruto Darusman, Sabariman, dan lain-lain), dapat diduga bahwa kaum komunis secara serius mencoba membina buruh-buruh Indonesia.

Semua pekerjaan ini memerlukan pelaksana-pelaksana yang terlatih karena pada waktu itu pihak kiri merasakan kekurangan yang besar terhadap kader-kadernya. Secara kecil-kecilan, pendidikan kader-kader Marxis dimulai di Madiun, di bawah pimpinan Moewaladi dan Abdurrachman (eks. Nefis dan eks. Letnan Laut AL Belanda). Pendidikan kader-kader Marxis ini kemudian direorganisasi secara sistematis dengan memberikan pondokan. Di antara tenaga-tenaga pengadernya terdapat Jusuf Muda Dalam, Tan Ling Djie, dan Soebadio. Kader-kader ini dididik selama beberapa bulan. Setelah itu, dengan pengetahuan teori sekadarnya, mereka dilepas ke tengah masyarakat. Peserta-peserta *Marx House* tidak ada yang menjadi tokoh utama, tetapi banyak di antara mereka menjadi pekerja-pekerja yang gigih dan praktis. Sebagian besar mereka ikut PKI bekerja di SEKA, SOBSI, dan lain-lain. Sedikit sekali yang ikut PSI setelah perpecahan. Hal ini mungkin merupakan salah satu sebab "kecil"-nya PSI karena tidak memiliki kader-kader lapangan.[27]

Sampai April 1947, *Marx House* telah mencetak 400 kader.[28] Dua bulan kemudian, dihasilkan lagi

140 kader baru, di antaranya 20 orang wanita serta peserta yang datang dari Sumatra dan Sulawesi.[29] Bagaimana perkembangan *Marx House* setelah Juni 1947, penulis tidak mengetahuinya karena tidak ada lagi berita-beritanya. Melalui *Marx House*, kaum komunis dapat menyuplai sebagian kebutuhan kader untuk pekerjaan-pekerjaan lapangan.

Selama proses pelebaran jaring-jaring komunis ini, tokoh-tokoh "berat" PKI mulai berdatangan. Pada Maret 1946, tiba kembali di Indonesia Maruto Darusman, Setiadjid, dan Soeripno, disusul dengan tokoh-tokoh mahasiswa komunis lainnya. Pada Agustus datang Alimin, tokoh kawakan yang telah "hilang" selama 20 tahun dari Indonesia. Sejak 1926, ia mengembara ke mana-mana. Pada waktu Peristiwa Hangohow (pembersihan Partai Komunis Tjina oleh Chiang Kai Shek), ia lari ke Vladivostok dan bekerja di Profintern (Sarekat Buruh Merah-Internasional). Ia ikut dalam Kongres Komintern ke-4 (1928). Lalu, ia belajar di Universitas Lenin selama 5,5 tahun. Tokoh-tokoh komunis internasional, seperti Chou En Lai, Thalman, dan Harry Politt merupakan teman-teman sejawatnya. Selama itu ia sering melawat ke Eropa, Asia, dan Palestina. Kemudian, ia ke Cina dan ikut dalam gerakan gerilya di sana (di Yenan). Ia juga pernah ke Kuala Lumpur. Pada waktu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Alimin sedang berada di Chungking—berita ini didengarnya jam 9.00

malam. Ia terkejut, termasuk rekan-rekannya, seperti Chou En Lai yang juga ada di sana.[30]

Pimpinan-pimpinan komunis kelas berat ini kemudian dibagi-bagi. Maruto Darusman di-"drop" di PKI bersama-sama Alimin, Setiadjid masuk PBI dan SOBSI, Abdurrachman di Pesindo (ia bekas Nefis), dan Soeripno dipekerjakan di lingkungan mahasiswa. Pada 1947, usaha-usaha Soeripno berhasil karena ia adalah Ketua Umum pertama Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia.[31] Demikian PKI bekerja sama dengan golongan kiri lainnya, tetapi diam-diam menyebarkan orang-orangnya di sektor vital dalam Republik Indonesia.

Clash Pandangan dengan Angkatan Perang

Dalam usaha untuk memasukkan orang-orangnya ke pos-pos vital, golongan kiri mendapatkan banyak halangan dari TRI (Tentara Rakyat Indonesia, kemudian TNI). Di samping soal-soal rivalitas pribadi, pertentangan tentara melawan PKI/Sayap Kiri bersumber pada pandangan-pandangan pokok orang komunis terhadap soal-soal pertahanan.

Seperti halnya konsepsi-konsepsi kaum komunis di mana-mama, kaum komunis Indonesia melihat bahwa arah perkembangan sejarah manusia merupakan arah menuju masyarakat tidak berkelas, suatu masyarakat komunis. Untuk memimpin arah se-

jarah ini, hanya partai komunis sebagai manifestasi kekuatan-kekuatan paling maju dalam masyarakat yang memimpinnya. Kekuatan-kekuatan lain hanyalah alat. Negara adalah alat yang dikuasai partai komunis. Demikian juga unsur-unsur lainnya di dalam masyarakat. Begitu pula tentara merupakan alat partai. Gerak serta langkah tentara ditentukan oleh ideologi revolusioner, seperti digariskan partai komunis. Satu-satunya cara adalah dengan memelihara ideologi revolusioner di kalangan tentara. Di negara-negara komunis, dalam setiap kesatuan tentara terdapat opsir politik atau fungsionaris partai yang bertugas memelihara "ideologi" tentara. Pandangan umum ini juga dianut orang-orang komunis Indonesia. Menurut S. Soegijono, salah seorang teoretisi golongan Marxis waktu itu, dalam suatu perang modern seluruh rakyat akan terlibat. Perang tidak semata-mata urusan tentara.[32] Suatu tentara hanya efektif kalau ia bersemangat. Semangat di sini berarti kesadaran, kerelaan, dan kesediaan berkorban yang akan melengkapi disiplin. Tentara sewaan dan berjiwa budak tidak lagi dapat diharapkan. Di dalam memelihara semangat ini, seorang komandan tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Ia harus dibantu seorang perwira yang tugasnya hanya memberikan penjelasan-penjelasan serta mendengarkan keluhan-keluhan prajurit. Dengan berdiri di antara komandan dan prajurit, ia akan meringan-

kan pekerjaan seorang komandan. Karena itu, para perwira harus didampingi perwira-perwira staf berpendidikan politik.[33]

Di samping persoalan ideologis yang meresapi pandangan hidup kaum komunis Indonesia, terdapat ketidakpercayaan mereka terhadap TRI. Tokoh-tokoh senior PKI waktu itu berasal dari Negeri Belanda dan Australia yang sangat antifasis. Mereka lebih takut fasisme daripada kolonialisme. Bahkan, pada minggu-minggu pertama, mereka masih menganggap Republik Indonesia merupakan negara boneka Jepang yang fasistis. Pimpinan-pimpinan TRI waktu itu berasal dari dua grup. Grup pertama dari eks-KNIL yang menurut Martono Tirtonegoro (penasihat Pesindo) berjiwa ... "buruh kolonial, kurang kesadaran nasional, dan lebih mementingkan organisasi daripada semangat."[34] Jadi, perwira-perwira teras, seperti Jenderal Mayor (lalu Kolonel) Nasution, Kolonel Simatupang, dan Kolonel Surjadarma amat tidak menguntungkan PKI. Lagi pula secara konsepsional mereka berbeda pendapat. Grup kedua adalah tentara didikan Jepang yang walaupun tidak dikatakan secara terang-terangan dianggap berjiwa fasistis sehingga grup kedua juga tidak disenangi PKI (seperti Jenderal Sudirman). Di dalam lingkungan TRI dicoba untuk dibina suatu tentara profesional yang tidak terpengaruh ideologi golongan. Golongan kiri agak tersinggung ketika sedikit tentara

ikut arak-arakan 1 Mei 1947. Sistem kepemimpinan tentara juga tidak memberikan peluang bagi PKI karena memakai sistem ijazah. Mereka yang memiliki ijazah hanya golongan kaya. Karena itu, Amir Sjarifudin sebagai Menteri Pertahanan tidak segan-segan menyinggung tentara. Ia menyatakan bahwa pada 17 Agustus 1945 bukan tentara yang berjuang, melainkan seluruh rakyat.[35] Dalam mosi penjelasannya terhadap persoalan tentara, Sayap Kiri terang-terangan menyatakan berikut ini.

> "Tentara penjajahan Belanda dan Jepang karena berjiwa kolonial gampang bertindak fasistis, sewenang-wenang dan kejam terhadap rakyat. Ini dipermudahkan karena untuk menjadi opsir mesti dipenuhi syarat-syarat ijazah yang hanya dapat dipunyai orang-orang mampu artinya orang yang biasanya berkepentingan banyak dengan si penjajah alias orang-orang yang biasanya tidak bergaul dengan rakyat biasa. Keadaan di zaman penjajahan itu, pasti membawa bekas di zaman Republik. Oleh karena itu tentara perlu didemokratiskan. Ikhtiar ini sekarang dapat dilihat di negara-negara lain di mana pemerintah dapat dipengaruhi oleh organisasi massa, yaitu organisasi buruh, tani, dan pemuda yang progresif.
> Jalan supaya dapat didemokratisasi.
> 1. Memperbesar upaya tentara menjadi *volks-lager* (tentara rakyat). Artinya, tentara bagi rakyat biasa dengan
>   a. mendidik tentara menurut asas-asas demokrasi supaya tentara dicintai oleh rakyat dan menjauhkan diri dari sifat membenci bangsa lain; yang

dibenci ialah imperialismenya bangsa-bangsa lain;

b. menghilangkan tingkah laku kolonial dan fasis di kalangan tentara;
c. memperbaiki dan memperbanyak pendidikan umum dan pemberantasan buta huruf di kalangan tentara.

2. Cara promosi (naik pangkat) harus didemokratiskan. Artinya, supaya di kalangan opsir juga ditahan (dicadangkan?—*SHG*) dengan orang-orang yang asalnya dari buruh dan tani, supaya promosi dimudahkan, yaitu mempermudah promosi pangkat-pangkat rendahan dengan tidak terutama menekankan ijazah dan sudah berapa tahun lamanya di tentara penjajahan Belanda kemudian tentara Jepang dan lalu di tentara Republik, tetapi didasarkan atas jasa dalam pertempuran.
3. Tentara tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, tetapi menjalankan politik pemerintah.
4. Mempererat hubungan antara tentara laskar dan rakyat dengan mewajibkan tentara dan laskar bekerja guna keperluan umum untuk rakyat di waktu lapang (membantu panen, menanam, membantu di pabrik, memperbaiki jalan, dan sebagainya).
5. Menjamin tentara dan laskar secukupnya dalam hal kesejahteraan, perlengkapan lainnya, dan juga alat pengangkutan.
6. Menghargai jasa pahlawan-pahlawan di garis depan dengan sepenuhnya sebagai berikut.
   a. Keluarga mereka harus dicukupi akan hal jaminan dan keluarga pahlawan yang gugur mendapat jaminan luar biasa.

b. Mereka harus dicukupi dalam hal makanan dan pakaian.
c. Mengubah cara kerja supaya langsung memberi manfaat bagi prajurit.

7. Memberi hukuman yang patut kepada prajurit dan opsir yang terbukti
   a. tidak memenuhi kewajibannya dalam mempertahankan garis depan;
   b. melakukan korupsi;
   c. dengan sengaja menganjurkan cara-cara fasis dan kolonial dalam tentara.[36]

Walaupun tidak disebutkan secara konkret siapa fasis dan berjiwa kolonial, jika kita meletakkannya dalam suasana politik waktu itu, yang dimaksud adalah pimpinan TRI. Nasution merasakan bahwa ia dianggap "agen NICA"[37] yang ingin melumpuhkan pertahanan rakyat. Selama 1945–1948 terjadi ketegangan terus-menerus antara golongan kiri dan pimpinan TRI/TNI.

Di pihak lain, pimpinan TRI/TNI memiliki konsepsi bahwa tentara Indonesia merupakan tentara revolusi yang harus berpolitik secara luas dan bukan alat yang mati dari pemerintah. Tentara memiliki konsepsi bahwa persoalan pertahanan negara bukan semata-mata persoalan politik karena dalam hal ini aspek militer harus diperhitungkan. Dalam penyusunan pertahanan negara, harus ikut pula disusun suatu organisasi tentara yang efisien dan memiliki garis komando yang ketat. Soal bertempur bukan

semata-mata soal keberanian, melainkan soal perhitungan yang teliti. Tentara melihat bahwa dengan mendirikan laskar-laskar bersenjata di samping tentara, akan menjadi hambatan dalam perjuangan bersenjata. Mereka, laskar-laskar bersenjata, bertempur tidak atas komando sentral, tetapi dengan garis dari induknya. Biasanya, perwira-perwira yang gagal dalam tentara, kemudian menjadi orang-orang politik atau menjadi pemimpin-pemimpin laskar. Tindakan selanjutnya adalah menyusun organisasi dan personalia yang "melambung". Pembentukan divisi-divisi tentara, armada-armada (yang tidak memiliki kapal), serta obral pangkat, seperti laksamana, jenderal, komodor udara, dan lain-lain. Padahal, faktor yang diperlukan hanya suatu tentara yang teratur dan disusun di tengah organisasi perlawanan rakyat yang tersusun di daerah.[38]

Kedua konsepsi tersebut dilaksanakan. Grup kiri menguasai Kementerian Pertahanan, sedangkan Jenderal Sudirman dan Oerip Soemohardjo memegang komando atas Markas Besar Umum (MBU). Selama tahun-tahun itu terjadi perang dingin yang makin panas karena "dibakar" pihak ketiga.

Grup kiri memulai usahanya untuk mengorganisasikan laskar-laskar yang ada dan menguasainya. Laskar-laskar tersebut dikoordinasikan dalam biro perjuangan yang dipimpin Jenderal Mayor (kemudian Kolonel) Djoko Soedjono dan berkembang men-

jadi TNI Masyarakat. Di tiap-tiap daerah diangkat koordinator-koordinator lokal. Di Jawa Barat diangkat Kolonel Sutoko, di Jawa Tengah Jenderal Mayor Ir. Sakirman, dan di Jawa Timur Jenderal (Mayor?) Kusnandar.[39] Ketiganya berasal dari grup kiri (Pesindo), yang kemudian menyusun laskar-laskar dalam tingkat resimen. Laskar-laskar yang dipelihara oleh Kementerian Pertahanan ini (Amir dan kawan-kawan) mendapatkan pembiayaan dari negara sehingga anggaran belanja pemeliharaan tentara menjadi berlipat. Senjata-senjata terbaik diberikan kepada laskar-laskar (TNI Masyarakat), yang kesetiaan pribadi mereka kepada Amir dan kawan-kawan. Hal ini dengan sendirinya menjengkelkan Jenderal Sudirman dan orang-orang di MBU pada umumnya.[40]

Tindakan lain Kementerian Pertahanan adalah pembinaan opsir-opsir politik agar "pemerintah" (partai) memiliki pengaruh langsung di kalangan prajurit. Dalam 1946, diadakan staf khusus dengan tugas utama mendidik opsir-opsir politik. Duduk sebagai koordinator adalah Letjen Soengkono Djojopratiknja, Jenderal Mayor Wijono, dan Soemarno. Semuanya berasal dari grup kiri (sosialis). Di samping itu, duduk wakil-wakil dari Masjumi (H.F. Ma'ruf dan H. Mukti), PSII (Anwar Tjokronegoro), serta Dr. Moestopo. Pada 30 Mei, dilantik 55 opsir politik yang disebarkan ke kesatuan-kesatuan tentara. Banyak di antara komandan tentara protes. Bahkan,

beberapa komandan, misalnya Jenderal Mayor Gatot Soebroto, tidak mau mengakui mereka. Setiap divisi mendapatkan lima opsir politik yang memiliki kedudukan otonom di samping pimpinan divisi. Dalam pelantikan ini, Menteri Pertahanan menyatakan bahwa tugas mereka adalah merapatkan kerja sama antara tentara dan rakyat, mengupas tentang UUD RI, serta menjelaskan arti penting negara kesatuan bagi rakyat, tentara dalam negara, tentara dengan rakyat, dan kedaulatan rakyat yang berdisiplin. Di tangan opsir-opsir politik ini terletak pelaksanaan TRI yang berideologi, yang sanggup berjuang atas dasar cita-cita dan keikhlasan hati.

Pembentukan Pepolit (Pendidikan Politik Tentara) tersebut di luar pengetahuan Markas Besar Tentara (MBT).[41]

Oposisi Tan Malaka dan Masjumi-PKI

Di samping menghadapi tentara, grup kiri harus menghadapi oposisi yang kuat dari grup Tan Malaka. Tan Malaka disokong sejumlah lawan PKI/Sibar yang memang secara "tradisional" tidak senang dengan garis Sardjono dan kawan-kawannya. Di samping itu, Tan Malaka mendapatkan sokongan dari tokoh-tokoh tua, seperti Iwa Kusumasumantri, Mr. Soebardjo, dan kawan-kawan. Dukungan terkuat terhadap Tan Malaka berasal dari sejumlah tokoh

pemuda 45, seperti Sukarni, Chairul Saleh, dan Adam Malik. Dukungan mereka merupakan identifikasi diri grup Tan Malaka bahwa mereka merupakan penerus cita-cita revolusioner pemuda.

Dalam menghadapi golongan Tan Malaka, inti pertentangannya adalah mengenai sikap Indonesia terhadap Belanda. Pandangan kaum komunis Indonesia terhadap Belanda tidak dapat dilepaskan dari pandangan resmi Komintern terhadap masalah-masalah kolonial, seperti kita lihat sebelumnya. Apalagi pada tahun-tahun pendudukan Nazi di Negeri Belanda, terdapat sejumlah pemuda/mahasiswa komunis Indonesia yang aktif dalam gerakan bawah tanah. Mereka bekerja sama dengan grup-grup antifasis Belanda sendiri. Dari kerja sama yang erat ini, timbul persahabatan pribadi karena mereka sama-sama dalam suasana kesulitan. Lagi pula Komintern menggariskan politik kerja sama dengan kekuatan-kekuatan lain yang antifasis. Setelah Perang Dunia I selesai, pandangan resmi Komintern tidak direvisi secara drastis. Pimpinan-pimpinan komunis Rusia percaya bahwa proses pengkomunisan Eropa akan berlangsung setelah Perang Dunia II. Di Eropa Timur, proses ini memang terjadi. Karena itu, mereka melihat bahwa Negeri Belanda yang komunis lebih menguntungkan dalam membina situasi di Indonesia untuk masa kemudian. Prinsip tuntutan kemerdekaan Indonesia lebih bijaksana jika disalurkan da-

lam hubungan Uni-Belanda (yang komunis) dengan Indonesia (yang diharapkan juga ikut Belanda). Politik ini dijalankan pula di Vietnam karena adanya ilusi Prancis (komunis) yang akan memberikan kemerdekaan kepada Vietnam (akan diserahkan kepada komunis).[42] Keterangan Rustam Effendy dalam rapat di Alun-Alun Yogyakarta pada 5 September 1948 benar adanya. Karena itu, sebelum Maruto Darusman dan Setiadjid pulang ke Indonesia pada awal 1946, mereka telah mengadakan persetujuan tentang pokok-pokok dasar bagi persetujuan Belanda-Indonesia dalam status uni. Persetujuan ini dilakukan dengan Prof. Schermerhorn dan Prof. Logeman, yang kemudian melahirkan perundingan Linggajati.[43] Dalam analisis PKI (juga PS dan PBI), dinyatakan bahwa di Negeri Belanda golongan-golongan "progresif" sedang berkembang dan Linggajati merupakan kemenangan kaum progresif. Golongan fasis Belanda bersama kaum kapitalisnya anti-Linggajati karena dalam waktu ? tahun Hindia Belanda akan bubar. Akibatnya, mereka akan kehilangan jabatan. Kaum fasis NSB ini telah dimerdekakan (40.000 orang) dan dibawa ke Indonesia. Merekalah yang memprovokasi agar persetujuan batal. Dalam hal ini, mereka segaris dengan kaum Tan Malaka. "Dan kita harus menjaga hubungan luar negeri Indonesia (dengan kaum "progresif" Belanda)." Demikian penjelasan Sayap Kiri dalam membela politik

lunak/diplomasi terhadap Belanda.[44] Pandangan ini juga dibawakan oleh SOBSI, yang melihat Linggajati sebagai konsolidasi kemenangan.[45] Menteri Pertahanan Amir Sjarifudin menyatakan, "Kita tak takut kehilangan daerah."[46] Mereka melihat bahwa kemerdekaan Indonesia terletak dalam jalan diplomasi.

Sikap kaum komunis (dan kiri pada umumnya) dengan sendirinya bertentangan dengan sikap golongan-golongan pemuda, seperti Chairul Saleh dan kawan-kawannya. Juga bertentangan dengan sikap Tan Malaka. Mereka menjadi suatu kekuatan yang mencoba melawan garis kebijaksanaan lunak/diplomasi pemerintah. Di samping itu, PKI mendapatkan tantangan dari "fron kanan", yang diwakili Masjumi dan PNI (Partai Nasional Indonesia). Pertentangan PKI dan golongan Islam merupakan pertentangan tradisional sejak 1917, pada waktu Kongres Sarekat Islam. Sikap ini ditambah dengan "kesan ateis" pada kaum komunis. Tentang sikap antikompromi/diplomasi, Masjumi lebih banyak bertitik tolak pada alasan-alasan oportunis. Setelah Amir Sjarifudin jatuh dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, Masjumi (bersama PNI) termasuk pendukung garis lunak/kompromi terhadap Belanda (kecuali grup Kartosuwirjo).

PNI yang merupakan partai besar waktu itu, terutama berakar di kalangan pamong praja[47] dan keluarganya. Sikap antipamong praja yang kuat di

kalangan komunis (terutama Pesindo), membuat golongan-golongan PNI tidak ramah terhadap kaum komunis. Setiap ada isu antikomunis/pemerintah, PNI menggunakannya.

Pada 1946–1947, kaum komunis Indonesia karena sikapnya sendiri diserang dari segala arah, baik oleh tentara (MBT), golongan Islam, golongan pamong praja, dan juga oleh sejumlah tokoh pemuda[45] bersama-sama lawan lamanya, Tan Malaka.

Kemenangan Babak Pertama

Tan Malaka memulai serangan pertamanya dengan memanfaatkan suasana psikologis yang menyalanyala untuk melawan Belanda. Ia menghimpun 138 organisasi massa, politik, laskar, dan pimpinan TRI dalam sebuah fron bernama Persatuan Perjuangan (PP). Pertemuan pertama diadakan di Purwokerto pada 3–5 Januari 1946. Sepuluh hari kemudian, diadakan pertemuan kedua di Solo (15–16 Januari 1946). Pesertanya menjadi 141 organisasi. Praktis semua organisasi besar bergabung dalam PP, antara lain PKI Jusuf.[48] Dalam pertemuan kedua, Panglima Besar Jenderal Sudirman hadir dan memberikan sambutan serta memberikan sokongan yang tegas.[49] Akhirnya, sebuah panitia dibentuk untuk menyusun minimum program PP, yang terdiri dari Pesindo (Ibnu Parna), Masjumi (Wali al-Fatah), Dewan Pusat

Perjuangan Jawa Tengah (Ir. Sakirman), Serindo (kemudian menjadi PNI-Mangunsarkoro), Partai Sosialis (Abdulmadjid), Markas Besar TRI (Jenderal Sudirman), TLRI (Atmadji), Perwari (Ny. Mangunsarkoro), Tan Malaka, dan seorang dari Panitia Musyawarah Solo.[50]

Panitia ini menyusun program minimum yang terdiri dari

1. berunding atas pengakuan kemerdekaan seratus persen;
2. pemerintah rakyat (dalam arti haluan pemerintah sesuai dengan kemauan rakyat);
3. tentara rakyat (dalam arti haluan tentara sesuai dengan kemauan rakyat);
4. melucuti tentara Jepang;
5. mengurus tawanan bangsa Eropa;
6. menyita dan menyelenggarakan pertanian musuh (kebun);
7. menyita dan menyelenggarakan perindustrian musuh (pabrik, bengkel, tambang, dan lain-lain).[51]

Satu hal yang menarik perhatian adalah Menteri Pertahanan dan Presiden tidak hadir serta tidak mengirimkan wakil.[52] Partai Sosialis sendiri menyadari bahwa set Tan Malaka merupakan set yang akan menyulitkan mereka—golongan yang menginginkan perundingan. Sehari setelah pertemuan Purwokerto, Partai Sosialis menulis surat terbuka dan meng-

ajak masyarakat mendirikan Barisan Nasional guna menyusun program perjuangan bersama. Dalam surat itu ditawarkan pula sebuah program "moderat".[53] Akan tetapi, ajakan Partai Sosialis hilang di tengah derap pendirian Persatuan Perjuangan. Bagi Partai Sosialis, sulit sekali untuk tidak mengikuti arus yang ada. Mereka siap memukul Tan Malaka, tetapi tidak dalam kondisi psikologis yang menguntungkannya sekarang. Semua organisasi besar, kecuali pemerintah, telah bergabung dalam Persatuan Perjuangan. Sajuti Melik dalam *Kedaulatan Rakyat* mengundang pemerintah untuk ikut Persatuan Perjuangan dan memimpin minimum programnya.[54] Tekanan-tekanan dari luar maupun dari dalam makin berat. Menurut Tan Malaka, Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) setuju pada program minimum Persatuan Perjuangan. Dalam keadaan ini, Sjahrir meletakkan jabatannya[55]—sebagai satu-satunya pilihan karena grupnya tidak setuju dengan garis Persatuan Perjuangan—pada 28 Februari 1946.

Ketika Soekarno meminta pimpinan Persatuan Perjuangan membentuk kabinet baru, Persatuan "Perjuangan" ini bubar, dalam arti terpecah-pecah. Golongan-golongan antikomunis (Masjumi), golongan-golongan komunis (Tan Malaka), serta laskar-laskar yang ada di TRI tidak dapat menyusun dasar-dasar persatuan dengan lebih dewasa karena kelom-

pok-kelompok yang ada memiliki ambisi sendiri-sendiri. Sesudah kegagalan ini, Presiden Soekarno meminta lagi Sjahrir membentuk kabinetnya yang kedua. Posisi Sjahrir menjadi kuat dan kini ia yang mengambil inisiatif.

Tan Malaka dalam usaha untuk *come back*, mengorganisasikan pertemuan Persatuan Perjuangan di Madiun pada 15 Maret 1946. Sementara itu, golongan-golongan kiri mulai keluar dari Persatuan Perjuangan. Pesindo dan PS keluar diikuti grup-grup kiri lain[56] karena imej masyarakat terhadap PP tidak sebaik hari-hari pertamanya. Setelah pertemuan PP berakhir, Pesindo mulai unjuk gigi. Mereka membuat manuver di Alun-Alun Madiun sehingga laskar Hizbullah yang pro-Tan Malaka berada dalam posisi terjepit.[57] Pada waktu itu, Jenderal Sudirman segera mengirimkan pasukan istimewa untuk menjaga keamanan karena takut terhadap intimidasi Pesindo.[58]

Tan Malaka sendiri menyadari hal ini. Pada saat itu datang Wali al-Fatah yang menawarkan diri untuk membawanya kepada Residen Madiun, Susanto Tirtoprodjo. Residen mengatakan kepada Tan Malaka bahwa ia akan membawa Tan Malaka ke Yogyakarta untuk berunding dengan Presiden. Tan Malaka setuju, tetapi sejak itu ia malah ditangkap. Ternyata ia tidak dibawa ke istana, tetapi dibawa ke penjara.[59]

Jenderal Sudirman tidak tinggal diam. Ia berusaha menunjukkan bahwa ia tidak setuju dengan

politik kompromi. Dalam April 1946, ia menginstruksikan agar tentara berpuasa selama tiga hari (14–16 April 1946) demi kemerdekaan seratus persen.[60] Hal ini merupakan demonstrasi pro tuntutan pertama atas program minimum PP. Apalagi hubungan Jenderal Sudirman dengan pihak pemerintah agak tegang sehubungan dengan penangkapan Tan Malaka, Chairul Saleh, Sukarni, Yamin, dan lain-lain.[61]

Sebagai pendahuluan usaha grup Tan Malaka berikutnya untuk *coup d' etat* adalah menculik Sjahrir pada 3 Juli 1946. Namun, usaha ini mengalami kegagalan. Sejak itu, Tan Malaka tidak lagi merupakan bahaya "maut" bagi grup komunis. Walaupun demikian, setiap ada kesempatan untuk mengambinghitamkan grup, Tan Malaka selalu digunakan. Misalnya, resolusi Program Pembelaan dan Pembangunan Nasional (disponsori grup kiri) yang menuntut oknum-oknum 3 Juli dibersihkan dari masyarakat.[62]

Dalam rapat-rapat Pesindo, PS, dan lain-lain serta dalam pengumuman-pengumuman resmi, Tan Malaka selalu didiskreditkan. Seolah-olah ada rencana *coup d' etat*, Trotskys, grup amuk-amukan, dan lain-lain. Sesungguhnya, penangkapan Tan Malaka dilakukan dalam rangka diplomasi kaum komunis/ Sjahrir bahwa Republik Indonesia serius untuk berunding secara damai dan tidak segan-segan menindak golongan-golongan ekstrem anti-Belanda.

Dalam peristiwa penangkapan di Madiun, lahir sebuah grup baru kaum komunis. Mereka menyadari bahwa dalam tindakan-tindakan terhadap lawan politik, tindakan-tindakan bersama yang terarah akan sangat efektif. Dalam menghadapi Tan Malaka di Madiun, grup-grup tersebut "mengikat diri" dalam sebuah kelompok yang mereka namakan Blok Sosialis. Dalam Juni 1946, Blok Sosialis berganti nama menjadi Fron Sosialis. Kemudian, berganti nama menjadi "Sayap Kiri" pada September 1946 di Madiun.[63] Dalam Sayap Kiri bergabung Partai Sosialis (Amir Sjarifudin), Partai Buruh Indonesia, PKI, dan Pesindo.

Konsolidasi Organisasi

Sebagai upaya menjaga keutuhan organisasi, PKI mengadakan konsolidasi ke dalam. Seperti kita lihat pada Maret 1946, tokoh-tokoh komunis dari Negeri Belanda mulai datang setelah Sardjono dan kawan-kawan kembali dari Australia. Aidit datang ke Solo selepas dari penjara Onrust pada pertengahan 1946. Di sana ia bertemu dengan Nyoto dari PKI Besuki. Lukman ditemui lagi setelah lepas dari penjara (dalam rangka Peristiwa Tiga Daerah). Alimin datang ke Indonesia pada Agustus 1946. Semua ini merupakan tambahan-tambahan tenaga yang "berat" untuk PKI. Setelah itu, PKI mengadakan kongres ke-4, yaitu kongres pertama setelah proklamasi.

Pada waktu itu, suasana politik mulai panas. Sjahrir dan van Mook telah bersepakat untuk sebuah persetujuan bersama antara Indonesia dan Belanda. Pada pokoknya, persetujuan itu mengakui adanya hubungan Indonesia–Belanda dalam sebuah uni pada masa yang akan datang. Indonesia mengakui kedaulatan *de jure* Belanda untuk masa peralihan dua tahun. Sebaliknya, Belanda mengakui kekuasaan *de facto* Republik Indonesia atas Jawa-Madura. Belanda dan Republik Indonesia akan membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) di kemudian hari. Sementara itu, persoalan-persoalan lain diatur secara terperinci, antara lain pengembalian modal-modal Belanda (kebun-kebun) yang ada di daerah Republik Indonesia.

Persetujuan itu tidak populer di kalangan banyak partai politik dan tentara. Kelompok-kelompok ini kemudian membentuk Benteng Republik, yang merupakan koalisi partai-partai dan organisasi-organisasi oposisi. Di kalangan para pemuda timbul sikap sinis terhadap keadaan. Oei Gee Hwat, tokoh Pesindo, melihat dengan penuh tanda tanya kepada menteri-menteri "Sjahrir" yang tidak keruan macamnya (Mr. Tan Poo Gwan). Suasana seperti ini tecerminkan juga dalam kalangan Sayap Kiri. Mereka bertanya-tanya apakah politik Sayap Kiri sudah tepat?

Kongres ke-4 PKI dilangsungkan dalam suasana yang kabur bagi PKI sendiri. Sebagian orang PKI menuntut agar PKI masuk kabinet.[64] Sebagian lain-

nya bertanya-tanya apakah garis diplomasi yang disokong PKI tepat. Akhirnya, kongres mengeluarkan pernyataan yang "samar". PKI menyatakan bahwa PKI tidak akan masuk kabinet. Masuknya PKI akan memperlemah Republik Indonesia yang akan dicap sebagai kelompok Moskow sebab PKI ada di dalam pemerintahan. Di lain sisi, PKI menuntut tanah untuk petani miskin dan sedang (tetapi tidak menyebut-nyebut soal penyitaan tanah milik tuan tanah dan tindakan-tindakan terhadap tukang ijon). PKI juga menyokong pemerintah yang tidak populer pada waktu itu.[65]

Kongres berhasil menyusun kepengurusan dengan memilih kembali Sardjono sebagai Ketua. Susunan lengkap pengurus hasil kongres ke-4 adalah sebagai berikut.[66]

Dewan	:	Sardjono (Ketua I), Maruto Darusman (Ketua II), Djoko Soedjono (Ketua III), Ngadiman Hardjosuprapto (Sekretaris Umum I), Soetrisno (Sekretaris Umum II)
Politbiro	:	Alimin, Sardjono, Maruto Darusman, Soetrisno, Ngadiman Hardjosuprapto
Biro Organisasi	:	Djoko Soedjono, D.N. Aidit (Agitprop), Soekisman

	(Agitprop), Roeskak (Bendahara), Koesnadi (penghubung)
Pembantu Sekum:	Sabariman (ketentaraan/ kelaskaran), Boejoeng Saleh (buruh), Koebes (tani), Karsali (pemuda), Soepardiatmi (wanita)
Komisaris Daerah:	Moh. Ali, Moh. Toha, Hamid Soetan (Jawa Barat), Moh. Senan, ... (Jawa Tengah), Lauw King Hoo, Trijosoenjoto (Jawa Timur), Abdulkarim M.S. (Sumatra)

Dari komposisi tersebut terlihat bahwa grup Digul merupakan mayoritas terbesar pimpinan utama PKI. Grup Eropa yang jumlahnya kecil juga ikut memegang andil dalam CC baru. Sementara itu, Lauw King Hoo (Jawa Timur) memang benteng PKI sejak lama. Tokoh muda yang masuk hanya Aidit.

Sikap progaris Linggajati mahal bayarannya untuk PKI. Pada Januari 1947, terjadi peristiwa penyerbuan Mojokerto oleh Belanda, yang kemudian membentuk NIT (Negara Indonesia Timur). Blokade Belanda yang diharapkan akan dicabut tidak kunjung datang. Pembebasan tawanan-tawanan politik juga tidak lancar. S.M. Ali menulis dalam harian *Boe-*

roeh (sangat pro-Sayap Kiri) bahwa penangkapan-penangkapan tetap berjalan (Ratulangi, Poedjo, Sangadji, dan pemuda-pemuda) dan mereka tidak dilepas. Kalaupun ada yang dilepas, mereka hanya tukang sayur dan tukang bakul. Pemuda-pemuda pejuang tetap meringkuk[67] di penjara. Semua seolah-olah bertanya apa gunanya Linggajati? Tajuk rencana serta surat-surat kiriman memenuhi halaman-halaman koran dengan nada-nada sangsi. Hanya kadang-kadang muncul pidato tokoh-tokoh Sayap Kiri untuk menetralkan massa. Buruh harus membela naskah,[68] SOBSI menyokong naskah.[69] Alimin menganalisis bahwa "republik kita" kuat karena makanan cukup, sesuai dengan asas *Atlantic Charter* yang dibantu dunia progresif, perekonomian Belanda lemah, serta bantuan uang Amerika kepada Belanda belum datang.[70]

Dalam tubuh PKI, suasana ini meletus pada pertengahan 1947. Beberapa tokoh menengah PKI, seperti M. Djoni, Amir Hoesin, dan L.A. Kasim,[71] pada 8–9 Maret 1947 mengadakan pertemuan-pertemuan. Sebagai hasil pertemuan, mereka mendirikan Partai Komunis Indonesia (merah) dengan Ketua: M. Djoni, Sekretaris: A. Tompna, dan Bendahara: L.A. Kasim.[72] PKI pun segera mengadakan tindakan. Dalam sebuah siaran kilat dinyatakan bahwa sebagai Marxis-Leninis "kita" memegang teguh prinsip hanya ada satu partai komunis. Dalam anggaran Komintern, ti-

dak ada keharusan untuk menambahkan predikat merah, biru, dan sebagainya. Dinyatakan bahwa asas PKI Merah ... "tidak setuju adanya Saudara Sardjono duduk dalam puncak pimpinan PKI" bukan asas karena Sardjono hanya sebuah atom kecil di dalam Komunis Internasional (? — *SHG*). Dinyatakan pula bahwa L.A. Kasim hadir dalam Kongres ke-4 PKI. Sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi sentralistis, ia "tidak boleh menyimpang dari asas ini". Akhirnya, dinyatakan bahwa PKI Merah merupakan reaksi anti-Marxis dan antikomunis.[73] Dari polemik-polemik pendek antara CC PKI dan PKI Merah, terlihat bahwa dasar-dasar utama perpecahan mereka adalah sejumlah kader komunis berontak melawan kepemimpinan Sardjono. Polemik-polemik itu tidak memiliki landasan teori Marxis yang kuat. Akan tetapi, secara terbuka PKI Merah menyatakan ... "Banyaklah buruh dan rakyat jelata yang skeptis dan waswas melihat sepak terjangnya PKI sekarang, dan dengan sebab itu berdiri di luar lingkungan PKI, adalah tanda bahwa politik dan taktik yang dijalankan oleh pimpinan Sardjono cs, tidak selaras dengan kemauan dan cita-cita rakyat yang berpaham komunis."[74]

PKI Merah bertindak cepat. Mereka mengirimkan delegasi menemui Presiden untuk memantapkan asas-asas mereka.[75] Dengan adanya PKI Merah, masyarakat melihat bahwa PKI tidak bersatu. Kalaupun mereka diam, itu hanya karena disiplin par-

tai. Karena itu, PKI menghadapinya secara serius. Di Magelang, sampai diadakan rapat umum khusus untuk menyerang PKI Merah.[76] Karena kemampuan organisasi dan pengetahuan teori yang rendah, PKI Merah tidak dapat berkembang. Akan tetapi, dalam kegiatan-kegiatan kepartaian sampai kelas kedua, PKI Merah selalu diajak serta.

Sikap kompromi ini menimbulkan banyak perpecahan. Di samping PKI Merah, grup-grup yang keluar dari PKI adalah Acoma (dari Ibnu Parna), Partai Comunis Indonesia, dan Partai Buruh dari SOBSI.[77] Grup-grup yang masih bertahan dalam PKI Sardjono adalah grup-grup yang sebenarnya antipolitik kompromi. Akan tetapi, karena disiplin yang kuat, masih tetap bertahan di dalamnya.

Dalam usaha untuk menduduki pos-pos penting, PKI (golongan kiri umumnya) menolehkan matanya ke lembaga-lembaga perwakilan. Pada waktu itu, pimpinan PKI percaya bahwa parlemen merupakan salah satu lembaga yang efektif untuk memperjuangkan tuntutan mereka. Hardjono, Ketua SOBSI, menyatakan bahwa parlemen memang dapat mengalihkan perjuangan revolusioner menjadi perjuangan reformis. Akan tetapi, di Indonesia berhubung masih lemah (golongan borjuis), perjuangan ini dapat efektif.[78]

Ketika KNIP diperluas dengan PP No. 6, PKI mempergunakan kesempatan ini. Pada waktu itu

terjadi oposisi yang kuat dari PNI/Masjumi terhadap niat pemerintah (presiden) untuk menambah anggota-anggotanya dan menyesuaikannya dengan komposisi masyarakat yang ada. BP KNIP dengan perbandingan suara 10:5 menolak rencana penambahan seperti diusulkan presiden/pemerintah karena pihak yang akan memperoleh keuntungan terbesar dari penambahan ini hanya partai-partai kiri. Penambahan ini juga dimaksudkan agar garis politik Linggajati dapat digolongkan dalam sidang-sidang KNIP di Malang yang akan datang.

Ketika sidang KNIP dibuka pada 24 Februari 1947, tampak suasana tegang sekali karena penolakan BP KNIP terhadap PP No. 6. Sekiranya sidang tidak dapat menyelesaikan krisis konstitusional ini, kelangsungan Republik Indonesia sebagai negara akan kacau balau. Pihak komunis sendiri mulai bermain intimidasi dalam menggalang opini publik. Suara pertama diperdengarkan oleh PS, yang menyatakan bahwa penambahan anggota KNIP tidak dapat ditunda-tunda. PS menuntut agar wakil-wakil mereka ditambah karena KNIP sekarang terlalu banyak PNI-nya.[79] Suara-suara seperti ini juga didengungkan "anak-anak" organisasi Sayap Kiri lainnya. Posisi Sayap Kiri relatif kuat karena Presiden dan Wakil Presiden berada di pihak mereka. Apalagi mereka menggunakan nama Presiden. Dalam pidato di muka KNIP lama, Ir. Sakirman (Laskar Rakyat—

resmi ia bukan PKI) menyatakan bahwa siapa yang menghalang-halangi peraturan presiden, berarti menghalang-halangi jalannya revolusi Indonesia karena Presiden Indonesia adalah Presiden Revolusi. Demikian pula Kris Subanu (Ketua Pesindo) menyatakan bahwa BP KNIP merupakan Badan Pekerja Birokratis dan harus bubar. Kerjanya hanya mementingkan soal-soal *juridis staatrecht lijk*—dan tidak memperhatikan revolusi primer. Sumarsono (Badan Kongres Pemuda) menyatakan bahwa BP KNIP tidak dapat mengambil inisiatif yang menguntungkan perjuangan bangsa.[80]

Suasana tegang dipecahkan dengan pidato Wakil Presiden Hatta pada 27 Februari 1947. Hatta setelah menjelaskan keadaan di sekitar PP No. 6 memberikan beberapa alternatif.

a. Membubarkan PNI Pusat (presiden tidak berhak).
b. Presiden mengundurkan diri karena presiden tidak dapat bekerja terus jika kecurigaan atas diri presiden dan wakil presiden.[81]

PNI/Masjumi akhirnya menyerah dan tidak menentang lagi PP No. 6. Sebagai hasil tekanan-tekanan Sayap Kiri/organisasi-organisasi massa serta presiden-wakil presiden—komposisi KNIP berubah. Komposisi KNIP berubah secara drastis. PKI mendapatkan 35 kursi (sebelumnya dua), PBI menda-

patkan 29 kursi dari 40 wakil-wakil buruh dan tidak termasuk kaum komunis yang masuk dari luar PBI, kaum tani 40 kursi (sebelumnya 0), Sumatra 50 kursi (sebelumnya 1), Kalimantan 8 kursi (sebelumnya 5), Sulawesi 10 kursi (sebelumnya 5), Maluku 5 kursi (sebelumnya 2), serta Sunda Kecil 5 kursi (sebelumnya 2).

Jika melihat strategi PKI waktu itu yang memberikan "arti besar" terhadap parlemen, keputusan KNIP menerima PP No. 6 merupakan kemenangan yang sangat besar bagi kaum komunis. Wakil-wakil komunis yang masuk dalam KNIP baru adalah

1. D.N. Aidit (Solo)
2. Baharoedin (Solo)
3. Alimin (Solo)
4. Basiran (Jombang)
5. Basuki (Sukabumi)
6. Datuk Batuah (Solo)
7. Dirdjo Soeprapto (Cepu)
8. Djamaludin (Jember)
9. Jumiran (Jombang)
10. Hoetomo Soepardan (Pacitan)
11. Koebes (Cirebon)
12. Lauw King Hoo (Jember)
13. Maruto Darusman (Yogya)
14. Moh. Ali (Serang)
15. Moh. Toha (Tasikmalaya)

16. Nahar (Kediri)
17. Nyoto (Jember)
18. Prawiroasmoro (Malang)
19. Prijosoenjoto (Bojonegoro)
20. Dr. Roestam (Kediri)
21. Sardjono (Solo)
22. Slamet (Cepu)
23. Soedikiat (Yogya)
24. Soedjadi (Magelang)
25. Soejitno (Malang)
26. Soejitno (Madiun)—*sic*
27. Soekadir (Sukabumi)
28. Ny. Sukiman (Kediri)
29. Soemarno (Malang)
30. Soerip (Yogya)
31. Soerojo (Jombang)
32. Tarsono (Bojonegoro)
33. Ngadiman Hardjosuprapto (Solo)

Orang-orang komunis juga masuk melalui berbagai saluran. Dari daftar nama PBI, termasuk antara lain Tjugito (PKI Ilegal bersama Sudisman), Ny. Sardjono (kemudian Ketua Gerwani), Nyono (kemudian Ketua SOBSI), serta Asmoe (kemudian Ketua STI). Dalam wakil-wakil fungsional buruh, terdapat nama Boejoeng Saleh, Djojoprajitno, Djoko Soedjono, Sumarsono, K. Werdojo, dan Djadi Wirosoebroto (anggota CC 1967—1968), sedangkan dari laskar-

laskar masuk pula orang-orang komunis.[82] Dengan demikian, PKI yang secara formal memiliki 35 anggota, dalam kenyataannya memiliki anggota sekitar 50 orang ditambah grup-grup sosialis dan buruh, yang pada waktu itu belum pecah.

Kegiatan lain kaum komunis waktu itu adalah kegiatan internasional. Hubungan-hubungan internasional bagi PKI memiliki arti psikologis yang penting untuk Indonesia karena waktu itu Republik Indonesia diisolasi Belanda. Kalaupun ada hubungan luar, hanya terbatas pada negara-negara Asia tertentu yang masih lemah. Harus diakui pada saat itu hanya negara-negara Blok Rusia yang membantu Indonesia dalam forum internasional bersama-sama beberapa negara Asia-Arab yang masih lemah.

Pada waktu diadakan Pertemuan Pemuda Internasional di London pada November 1945, Indonesia diwakili oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Negeri Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Soeripno.[83] Kontak pemuda-pemuda dengan luar negeri diulangi pada Maret 1947 ketika delegasi pemuda Indonesia pergi ke Konferensi Antar Asia di New Delhi. Pemuda Indonesia yang berbicara dalam konferensi, antara lain Mochtar Lubis dan sahabatnya, Soeripno. Mereka berbicara tentang gerakan nasional dan kebudayaan Indonesia.[84]

SOBSI memiliki saluran internasional sendiri. Kongres I SOBSI di Malang pada Mei 1947 memu-

tuskan bahwa SOBSI akan bergabung dengan World Federation of Trade Union (WFTU) di Praha. SOBSI mengirimkan utusannya yang menjelaskan persoalan-persoalan Indonesia dari visi SOBSI (komunis). Sebagai wakil SOBSI, antara lain Oei Gee Hwat yang setelah kembali menuliskan kenangan-kenangannya di harian *Boeroeh*. Jika kaum komunis merasa perlu untuk menunjukkan adanya solidaritas internasional terhadap kaum progresif Indonesia, SOBSI mengirimkan surat atau telegram kepada rekan-rekan mereka di seluruh dunia. Surat dan telegram ini kemudian dipublikasikan dan memberikan "rasa lega" kepada rakyat bahwa Republik Indonesia tidak berdiri sendiri. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang baru memiliki *National Union of Students* juga mempunyai "saluran" internasional, yaitu melalui Soeripno, seorang pemuda yang aktif dan simpatik. Pada 30 Juni, Soeripno dan Francisca Fangidae pergi ke Praha untuk menghadiri Kongres *International Union of Students* (IUS).[85] Seperti dalam konferensi-konferensi pemuda dan buruh, wakil mahasiswa Indonesia membawakan suara grup komunis. Partai-partai komunis di luar negeri aktif mengirimkan kawat ucapan selamat serta sokongan-sokongan terhadap perjuangan Indonesia. Semua ini di-"pamer"-kan oleh PKI untuk tujuan-tujuannya dalam setiap publikasi.

Kelompok-kelompok lain tidak memiliki *trade mark* internasional seperti PKI. Partai Katolik yang

sebenarnya memiliki relasi internasional, harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kaum Katolik internasional tidak menaruh perhatian terhadap Indonesia—ataupun pro-Belanda (Partai Katolik Belanda antikemerdekaan Indonesia).

Linggajati dan Frustrasi-Frustrasi

Dengan pengorbanan-pengorbanan yang besar, PKI bersama dengan kader-kader yang ada di partai-partai lain berhasil mengendalikan Republik Indonesia sesuai dengan arah cita-cita mereka. Usaha ini memerlukan pengorbanan besar di kalangan PKI sendiri. Grup-grup muda (Aidit dan kawan-kawan, grup Surabaya) walaupun tetap tinggal di dalam PKI, melihat dengan penuh tanda tanya terhadap sikap resmi PKI. Sejumlah kader yang kurang disiplin mendirikan grup-grup komunis lain—PKI Merah, Permai, PCI, Acoma, serta Partai Buruh Merdeka. Hanya karena kekurangpandaian grup-grup "revisionis" ini, PKI tidak mendapatkan saingan berarti. Tentara juga anti-PKI. Karena sikap ini, sejumlah pemimpin pemuda, seperti Ibnu Parna, akhirnya menjadi musuh PKI. Grup-grup tersebut kemudian "bersatu taktik" dengan musuh-musuh tradisional PKI, yaitu golongan Islam dan kaum Tan Malaka.

Semua itu mereka lakukan karena percaya terhadap situasi internasional yang menguntungkan

PKI dan percaya bahwa kaum progresif kiri akan dapat menuntut pemerintah Belanda dalam menghadapi pertikaian Indonesia-Belanda. Sesudah rintangan-rintangan besar dapat diatasi (menyingkirkan Tan Malaka—menguasai KNIP dan menetralisasikan tentara), Sayap Kiri menandatangani persetujuan Linggajati pada 27 Maret 1947. Bertindak sebagai wakil Indonesia Soetan Sjahrir (Partai Sosialis) dan sebagai wakil Belanda Prof. W. Schermerhorn (Partai Buruh Belanda) sesama rekan sosialis. Di belakang mereka berdiri PKI dan CPN, sesama rekan komunis dan sesama rekan Komintern (dulu).

Setelah persetujuan ditandatangani dan setelah diadakan pertukaran nota, terlihat dengan jelas bahwa antara RI dan Belanda terdapat perbedaan-perbedaan besar. Pada 27 Mei 1947, wakil Belanda menyerahkan sebuah "ultimatum" tempat Belanda menuntut

a. kedaulatan *de jure* Belanda sampai 1 Januari 1949;
b. selama masa peralihan, Indonesia diperintah oleh pemerintah sementara (*interim*) dan wakil mahkota Belanda memiliki kata akhir dalam memutuskan persoalan;
c. pemerintah ini mengendalikan soal-soal ekspor-impor dan hubungan luar; selama itu juga dibentuk pasukan bersama (dalam jumlah yang sama) untuk menjaga keamanan di daerah Republik.

Dengan ultimatum itu berarti RI melepaskan kedaulatannya sebagai negara karena kata terakhir persoalan-persoalan yang ada diputuskan oleh wakil mahkota Belanda. Dalam nota penjelasan ini (ultimatum), dinyatakan samar-samar bahwa penolakannya berarti perang.

Sjahrir terjepit oleh situasi yang baru ini ... "Tanggal 8 Juni ia terima prinsip *interim government* dan tanggal 20 menerima staf khusus wakil mahkota Belanda secara *de jure*. Hanya soal pasukan bersama ditolak". Konsesi Sjahrir dilakukan setelah ia mengadakan konsultasi dengan A.K. Gani (PNI), Natsir (Masjumi), dan Abdulmadjid (PS). Amir Sjarifudin menyokong konsesi Sjahrir ini.

Abdulmadjid kemudian dikirim ke Yogyakarta untuk menjelaskan konsesi Sjahrir. Di sana, Abdulmadjid bukannya menyokong Sjahrir, melainkan malah menentangnya. Besoknya Amir datang ke Yogya. Di sana ia menjumpai sejumlah tokoh Sayap Kiri yang anti kepada konsesi Sjahrir, termasuk Tan Ling Djie dan Wikana. Akhirnya, ia ikut menentang konsesi Sjahrir. Pada 26 Juni, Sjahrir datang ke Yogya dan menjelaskan situasinya di sana. Amir, Tan Ling Djie, dan Abdulmadjid menyerangnya dan dalam suatu pemungutan suara Sjahrir kalah. Besoknya, Sjahrir menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno karena ia melihat partainya sendiri tidak menyokong politiknya.[86] Kebetulan hari itu Setiadjid

(bersama Oei Gee Hwat) yang baru pulang dari Praha tiba di Jakarta. Di sana ia mendengar bahwa Sjahrir jatuh. Ia segera naik kereta api ke Yogya dan memanggil pimpinan Sayap Kiri untuk memberikan penjelasan. Setiadjid yang baru "menghirup udara" luar memberikan penjelasan bahwa garis Sjahrir benar. Ia uraikan pengalaman-pengalamannya di Praha dalam Kongres WFTU dan situasi di Eropa.

Pimpinan Sayap Kiri sadar bahwa mereka "salah" dan meminta Sjahrir agar mau kembali memimpin kabinet. Akan tetapi, Sjahrir telah merasa kecewa atas tindakan teman-teman dekatnya (Amir-Abdulmadjid) yang belum beberapa hari berjanji menyokongnya, kemudian malah menentangnya. Ia pun menolak permintaan itu.

Pada hari yang sama, Sayap Kiri yang telah menikam Sjahrir dari belakang membuat pengumuman.

1. Tidak menyetujui kompromi yang terkandung dalam surat-surat tersebut karena tidak menjamin persatuan antara pemerintah dan rakyat.
2. Mempertahankan nota balasan pemerintah Republik Indonesia yang mengandung cukup bahan untuk menyelesaikan soal Indonesia dengan damai.
3. Mengajak seluruh rakyat membulatkan tekad terhadap segala kemungkinan.
4. Menyesuaikan dan mempertahankan susunan pemerintah pusat dengan keadaan sedemikian

rupa agar persatuan antara rakyat dan pemerintah senantiasa terjamin.

5. Mengajak rakyat dunia umumnya dan rakyat Belanda khususnya untuk tetap berusaha supaya soal Indonesia diselesaikan secara damai.[87]

Sesudah itu, Sayap Kiri mulai menyelamatkan "kehormatannya" atas kesalahan perhitungan politik kompromi. Aidit yang memulai serangan pertama terhadap Sjahrir secara tidak langsung melalui salah sebuah artikelnya. Ia menyebut "Tuan Sjahrir",[88] padahal biasanya Bung Sjahrir. Kemudian seorang kolumnis Sayap Kiri, Hasnan, menyatakan bahwa Sjahrir jatuh karena kesalahan sendiri. Sayap Kiri menunjukkan kedewasaannya dengan mengkritik Sjahrir (Sayap Kiri juga) karena dia salah.[89]

Tuduhan Hasnan kepada Sjahrir diulangi lagi seminggu kemudian.[90] Nyoto lalu membuat sebuah artikel keras tempat ia menyatakan bahwa kita menolak langkah mundur. Kita harus berani memperjuangkan perdamaian kalau perlu melalui jalan perang[91]—catatan dari Stalin. Alimin, seorang tokoh tua yang dihormati, juga menyerang Sjahrir. Ia menulis sebuah surat terbuka menyerang bekas perdana menteri yang dikosongkan beberapa minggu sebelumnya. "Saya berpendapat bahwa sikap Sjahrir yang misterius sangat merugikan pergerakan rakyat

seluruhnya. Ia memecah-belah dan mencincang isi dari naskah Linggajati dan mempersembahkan nasib revolusi dan rakyatnya bagi keperluan *groot* kapital. Kapitulasi Sjahrir mem-*brombreg* (tidak jelas artinya—*SHG*) dan menyokong kaum *intervensionist* menjadi lebih congkak lagi. Imperialis Amerika-Belanda ingin menelan Indonesia sebulat-bulatnya."[92] Demikian golongan komunis dalam Sayap Kiri memaki-maki Sjahrir dan mengorbankannya untuk kepentingan "wajah" revolusioner kaum kiri umumnya dan kaum komunis khususnya.

Korban Kedua, Amir Sjarifudin

Kejatuhan Sjahrir diikuti dengan penyerbuan Belanda. Brigade-brigade tentara Belanda di bawah Jenderal Spoor memasuki RI dengan bantuan Angkatan Udara. Akibatnya, pertahanan RI yang terdiri dari beberapa divisi harus mundur. Pertempuran-pertempuran hebat praktis tidak ada. Dalam waktu singkat, kota-kota besar di daerah-daerah surplus (Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian barat) dan Jawa Timur (bagian timur) jatuh. Sisa wilayah RI adalah daerah Banten, Jawa Tengah sebelah tengah dan timur, serta Jawa Timur sebelah barat. Umumnya, daerah-daerah ini padat dan miskin. Sasaran strategi Belanda adalah untuk membuka daerah-daerah ekonomis sebagai "pangkalan dongkrak".

Presiden Soekarno segera berusaha untuk membentuk kabinet dan mengusahakan agar tercipta kabinet koalisi antara PS, PNI, Masjumi, dan PBI. Akan tetapi, usaha ini gagal. Akhirnya, Amir Sjarifudin berhasil membentuk kabinet baru pada 3 Juli 1947. Kabinetnya merupakan kabinet "kiri jauh". Setiadjid (PBI-kader komunis di Negeri Belanda) menjadi Wakil PK, Mr. Abdulmadjid sebagai Menteri Muda Dalam Negeri, Mr. Tamzil (PS) sebagai Menteri Muda Luar Negeri, Dr. A. Tjokronegoro (sosialis) sebagai Menteri Muda Urusan Ekonomi, Dr. Ong Eng Djie sebagai Menteri Muda Keuangan, Dr. Satrio (PBI) sebagai Menteri Muda Kesehatan, Suprodjo (eks. Digulis) sebagai Menteri Sosial, S.K. Trimurti (YPSI) sebagai Menteri Perburuhan, Wikana (komunis) sebagai Menteri Pemuda, Sojas (BTI) sebagai Menteri Negara bersama dengan Siauw Giek Tjhan (eks. BTI) dan Maruto Darusman (PKI). Menteri Pertahanan tetap dipegang Amir dan penempatan pejabat-pejabat tinggi dan penting tetap dimonopoli pihak komunis. Sementara itu, Soeripno dijadikan duta keliling Indonesia di luar negeri.

Sebagaimana biasa, untuk mendapatkan kesan ke-"revolusioner"-an Amir, media massa PKI mulai memberikan dukungan dua hari setelah Amir berhasil membentuk kabinet. SOBSI memberikan sokongannya[93] dan Sayap Kiri (PKI, PS, PBI, Pesindo) dengan sendirinya memberikan dukungan. Orang-

orang kiri menyatakan bahwa kekuatan Kabinet Amir terletak pada menteri-menterinya yang baru.[94] Puji-pujian pun dilimpahkan kepada Amir, Setiadjid, Maruto, dan lain-lain. Biografi Amir muncul di koran *Boeroeh*.[95]

Sementara itu, sebagai akibat campur tangan Dewan Keamanan PBB, Belanda dan Indonesia mencapai persetujuan gencatan senjata. Presiden Soekarno menginstruksikan penghentian tembak-menembak pada 4 Agustus dan pasukan Indonesia bertahan di posisinya pada pukul 24.00. Walaupun demikian, pertempuran-pertempuran masih berlangsung terus.[96] Sebagai hasil Perang Kolonial I, RI kehilangan daerah-daerah terbaik, menerima 700.000 pengungsi,[97] dan suasana psikologis yang buruk.

PBB campur tangan lagi dan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN), yang beranggotakan Belgia, Australia, dan Amerika Serikat sebagai wakil PBB. KTN kemudian meratakan perundingan-perundingan lanjutan antara RI dan Belanda. Perundingan-perundingan berjalan seret sekali. Kedudukan delegasi Indonesia melemah. Para pimpinan Sayap Kiri sesuai dengan hasil evaluasi tetap berpendapat bahwa perundingan merupakan jalan terbaik. Pada 7 November 1947, perundingan resmi dibuka di atas kapal angkut pasukan Renville.

Belanda berusaha agar garis "van Mook" diakui oleh RI, sedangkan pihak Indonesia meminta

agar tentara Belanda ditarik ke kedudukan semula sebelum Belanda menyerah. Persoalan lain yang juga menjadi pertikaian adalah persoalan pembentukan RIS di kemudian hari. Dalam usul Belanda, RI merupakan salah satu negara bagian yang sederajat dengan negara-negara bagian lain (Negara Sumatra, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dan lain-lain). Padahal, dalam persetujuan Linggajati dinyatakan bahwa RI dan Belanda bersama-sama membentuk RIS.

Belanda dalam perundingan-perundingan menyatakan secara halus bahwa jika perundingan ini gagal, konsekuensinya terjadi perang lagi. Jika RI menolak usul Belanda, Amerika Serikat tidak akan membantu RI sehingga RI akan sendirian. Di bawah tekanan yang berat dan dengan janji akan adanya pemilihan umum yang bebas (seperti dalam persetujuan-persetujuan sebelumnya)—*from the bullet to the ballot*—akhirnya Amir menyerah.[98] Pada 17 Januari 1948, persetujuan ditandatangani oleh Mr. Amir Sjarifudin (RI) dan Raden Abdulkadir Widjojoatmojo (wakil Belanda). Amir hanya melihat bahwa persetujuan Renville akan dilaksanakan karena adanya wakil-wakil KTN sebagai wakil-wakil PBB. Ia percaya bahwa dalam beberapa bulan, bahkan dalam beberapa minggu, penyelesaian politik akan tercapai.[99] Kepercayaan Amir ini dibayar mahal oleh Sayap Kiri.

Setelah persetujuan ditandatangani, Dr. Graham, wakil Amerika Serikat, yang merupakan "harapan" dan "jaminan" Amir bahwa Amerika Serikat berada di belakang persetujuan Renville, ditarik kembali ke negerinya—secara moral AS seolah-olah tidak setuju dengan garis Dr. Graham. Apa yang dialami Sjahrir juga dialami Amir, yaitu ditikam dari belakang oleh rekan-rekannya sendiri.

Pada waktu Amir berada di Jakarta (16 Januari), Masjumi menarik diri dari kabinet. Tindakan ini kemudian diikuti PNI sehingga Amir kehilangan dukungan utama. Pada 23 Januari 1948, Amir meletakkan jabatan. Dengan demikian, berakhirlah pemerintahan Sayap Kiri di Indonesia yang berlangsung pada 14 November 1945–23 Januari 1948. Politik diplomasi dan harapan-harapan atas analisis perkembangan dunia yang diterapkan dalam politik Sjahrir-Amir telah berakhir dengan kekacauan.

Bab Empat

Situasi Sosial di Bawah

Revolusi Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 memiliki arti dan makna berbeda-beda untuk setiap golongan penduduk. Sampai saat ini, lebih banyak penulis sejarah yang mencoba melihat revolusi dari atas. Padahal, revolusi memiliki pengertian yang "berbeda" di luar gedung KNIP dan istana.

Bagi pimpinan-pimpinan tertinggi Republik, revolusi lebih merupakan soal rasio dan perhitungan pragmatis walaupun geraknya merupakan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Posisi dan tanggung jawabnya "memaksa" pimpinan-pimpinan Republik berpikir dengan fakta-fakta yang ada. Seorang pemimpin Masjumi atau PNI yang dalam 1946–1947 begitu "idealistis" menyerang politik kompromi Linggajati dan Renville dalam posisi tertinggi, pada 1948 harus

"merevisi" idealismenya. Sjahrir melukiskan revolusi sebagai "soal perjuangan mengenai kehidupan dan nasib rakyat kita yang berjuta-juta tak dapat dan tak boleh diperlakukan sebagai soal diri sendiri. Soal menunjukkan jalan pada rakyat semata-mata *soal perhitungan* (dicetak miring dari penulis) dan bukan soal kehendak diri kita sendiri."[1] Mungkin tidak semua pemimpin Republik pada 1945–1948 se-"rasional" Sjahrir. Namun, warna revolusi bagi mereka berbeda dengan warna yang "turun" ke tengah-tengah rakyat biasa, terlebih ke tengah pemuda-pemuda yang bergumul dengan revolusi itu sendiri.

Pemuda dan Revolusi

Bagi pemuda-pemuda Indonesia umumnya, revolusi memiliki arti lebih luas daripada kemerdekaan bangsa, kedaulatan negara, dan kemerdekaan ekonomi. Kemerdekaan merupakan pembaruan atas segala nilai hidup. Guna mewujudkan segala cita-cita yang mereka anggap tepat dan berguna untuk mengisi "wadah kemerdekaan", kemerdekaan merupakan kebebasan dan pembebasan dari segala nilai lama. Nilai-nilai baru, yang juga tidak jelas artinya, merupakan suatu harapan dan suatu "mimpi indah", tempat di atasnya akan dibangun suatu masyarakat baru yang akan membawa "sorga di atas dunia". Di mana tidak ada kemelaratan dan penderitaan lagi.

Jika kita membaca majalah-majalah pemuda waktu itu secara kritis, kita akan melihat betapa tidak jelas cita-cita masyarakat baru yang akan dibentuk. Istilah-istilah antifeodalisme, anti-imperialisme, sosialisme, revolusioner, dan lain-lain bertebaran di mana-mana. Revolusi lebih merupakan "lampu Aladin" dengan segala ketidakjelasannya bagi masyarakat di luar gedung KNIP, istana, dan rumah-rumah pemikir politik. Pramoedya Ananta Toer, yang pada waktu itu belum berasosiasi dengan PKI, melukiskan dengan halus suasana revolusi yang datang pada suatu keluarga di sebuah kota kecil Blora. Lukisannya dengan tajam "memotret" makna revolusi pada suatu keluarga sebagai unsur baru yang menyerapi kehidupan.

> "Di waktu seperti itu gelombang gila politik mengamuk pula. Tiap orang rasa-rasanya tak bisa hidup bila tak berpolitik, tak debat tentang politik. Ya, seakan-akan mereka bisa hidup dengan tiada beras lagi. Guru-guru yang selama itu hidup netral, pun kejangkitan penyakit gila politik dan seboleh-boleh mempengaruhi murid-muridnya dengan politik yang dianutnya. Masing-masing berjuang mencari anggota baru buat partai. Dan sekolah adalah medan perjuangan yang empuk sekali. Politik. Politik. Politik tak ubahnya dengan beras di zaman Jepang. Kursus-kursusnya pun timbullah. Dan mereka yang baru saja mendapat pengertian tentang kapitalisme-sosialisme-komunisme berebutan memberi ceramah di warung-warung, pinggir-ping-

gir jalan dan di gedung-gedung yang mengarang dalam benak masing-masing.
Dan Pesindo pun tumbuhlah di tanah kampung kami yang kering mengandung kapur itu.
Ia (seorang pemudi—*SHG*) telah mengenal masyarakat yang dimasukinya. Ia telah mendapatkan pergaulan yang jauh lebih luas daripada yang didapatnya dengan semua adik-kakak-orangtuanya. Ia sudah menduduki tempat yang pasti dalam masyarakat itu: sebagai wanita, sebagai juru ketik kantor pemerintah, sebagai pribadi bebas. Kemudian ia pun masuk Pesindo.
Bila ia pulang ke rumah, banyak yang dapat diceritakannya pada adik-adik tentang harapan di hari depan bila negara bercorak sosialistis. Ia telah menjadi manusia baru sekarang, dengan pengetahuan baru, dengan dongeng baru, dengan pandangan baru, dengan sikap baru, dengan perhatian baru—kebaruan yang dapat dipungut dan dikumpulkannya dari pergaulan. Dan semuanya ini berjalan dengan amannya di antara kesukaran hidup sehari-hari."[2]

Di dalam revolusi, semuanya menjadi baru. Nilai-nilai lama harus ditolak dan harus diciptakan nilai-nilai baru. Pemuda-pemuda yang memiliki perasaan tanggung jawab besar, merasa dihadapkan pada suatu tantangan untuk menyelamatkan "mimpi" indah yang baru tiba. Lebih banyak yang tidak mengerti dan merasakan tercampakkan dalam situasi yang terlalu berat untuk dipikul.

Setiap golongan masyarakat (terutama lapisan mudanya) merasa terpanggil untuk menyelamatkan

negara. Mereka harus mengorganisasikan diri agar kuat. Dalam suasana ini, timbul "satire-satire" politik revolusi. Di Garut muncul Partai Kusir Indonesia,[3] di samping munculnya partai-partai dan organisasi-organisasi nasionalis, agama, sosialis, buruh, tani, wanita, kelaskaran, kekaryaan, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain. Mereka, terlepas dari kekurang pengetahuan dan kesadaran, merupakan pemuda-pemuda yang sungguh-sungguh terpanggil untuk menyelamatkan revolusi. Revolusi merupakan segala-galanya. Kesadaran (walaupun kadang-kadang tragis) mahabesar ini yang menimbulkan *over acting* pemuda-pemuda. Mereka takut revolusi (yang bagi mereka merupakan segala-galanya) akan kalah dan timbul gelombang histeris dari situasi psikologis seperti ini. "Demam" mata-mata Belanda, pembunuhan-pembunuhan terhadap siapa saja yang dicurigai sebagai mata-mata,[4] aksi-aksi razia penelanjangan terhadap mata-mata,[5] ataupun aksi-aksi herois lainnya mencerminkan suasana "kesadaran terhadap kebesaran makna revolusi" bagi pemuda-pemuda biasa.

Terdapat suatu dorongan intuisi yang kuat pada pemuda bahwa mereka merupakan pembebas penderitaan rakyat. Dalam suasana psikologis ini, kita dapat memahami mengapa lagu *Darah Rakyat* begitu cepat tersebar setelah dinyanyikan pada September 1945 di Lapangan Ikada.[6] Seolah-olah ada identifikasi diri antara lagu tersebut dan cita-cita mereka.

Darah rakyat masih berjalan
Menderita sakit dan miskin
Pada datangnya pembalasan
Kita yang menjadi hakim.
Hayo. Hayo bergerak sekarang
Kemerdekaan 'tlah datang
Merahlah panji-panji kita
Merah warna darah rakyat (2x)
Kita bersumpah pada rakyat
Kemiskinan pasti hilang
Kaum kerja akan memerintah
Dunia baru tentu datang.[7]

Pemuda-pemuda revolusi seolah-olah "bersumpah kepada rakyat" bahwa mereka akan menghilangkan kemiskinan dengan kemerdekaan. Secara tidak sadar, mereka dikejar-kejar oleh "sumpah" tersebut.

Suasana psikologis ini juga menjalar pada wanita, terutama pada pemudi-pemudi. Mereka terpanggil menjadi anggota laskar untuk menghilangkan kemiskinan dan mengusir kolonialisme Belanda. Tingkah laku mereka tidak kalah "tegas" dibandingkan rekan-rekan pemuda. Penamparan-penamparan terhadap penumpang-penumpang terjadi karena para pemudi mengganggap mereka "tidak patuh" kepada peraturan-peraturan revolusioner. Seorang ibu tua dari desa dipukuli oleh gadis-gadis laskar karena takut digeledah dan lari. Ibu tua ini adalah seorang bodoh dari desa. Pemudi-pemudi laskar

menganggap bahwa hal itu merupakan "tugas mulia" (menjaga dan menggeledah penumpang-penumpang untuk mencegah mata-mata dan pencoleng ekonomi) dari hidup dan cita-cita yang mereka lampaui. Sikap keterlaluan ini pernah dikecam oleh majalah pemuda sendiri.[8]

Dari suasana psikologis seperti dilukiskan sebelumnya, lahir konsepsi-konsepsi radikal. Hanya dengan tindakan-tindakan tegas, revolusi (dalam pengertian religio-magis untuk pemuda-pemuda) dapat diselamatkan.

Tidak hanya dalam hubungan interpersonal nilai-nilai lama ditolak. Dalam hubungan-hubungan norma-norma dasar, sekelompok pemuda (yang merupakan minoritas tentunya) merombaknya pula. Misalnya, pandangan mereka terhadap perkawinan dan ayah-ibu. Dalam novel *Keluarga Gerilya* karangan Pramoedya Ananta Toer dilukiskan bagaimana ayah yang tidak dapat mengubah nilai-nilai lama (tetap setia kepada Hindia Belanda), dibunuh oleh putra-putranya.

Revolusi memang tidak hanya menuntut korban jiwa dan harta benda, tetapi juga menuntut korban nilai-nilai lama yang ada di antara ayah dan anak. Dalam bentuk yang tidak ekstrem, seperti cerita *Keluarga Gerilya*, dalam revolusi memang terdapat pengorbanan dasar-dasar hubungan keluarga seperti ini. Ketika R.A. Wiranatakusumah menjadi

Kepala Negara Pasundan, anak-anaknya mengirimkan protes, antara lain Mayor Wiranatakusumah dari Yogyakarta. Demikian pula sikap Mayor S. Parman terhadap saudaranya sendiri, Ir. Sakirman, pada Peristiwa Madiun.

Dalam tata kesopanan masyarakat tradisional, hal ini sulit dibayangkan. Akan tetapi, revolusi telah membuat semuanya menjadi baru. Juga dalam nilai-nilai dasar manusia.

Keinginan yang kuat untuk merombak nilai-nilai dasar hubungan manusia tersebut diperlihatkan dalam sikap pemuda-pemuda terhadap hakikat perkawinan. Harus diberikan catatan di sini sebelumnya bahwa di dalam masyarakat umum, pandangan yang ada tentu tidak seradikal yang penulis lukiskan. Pemuda-pemuda menganggap bahwa perkawinan merupakan adat feodal dan merupakan ciri egoistis manusia untuk mengejar kebahagiaan pribadi. Revolusi menuntut pengorbanan segala-galanya, termasuk perkawinan sebagai "kenikmatan" pribadi.[9] Ucapan-ucapan seperti ... "ya, Allah masak di waktu yang segenting-runcing ini masih saja ada orang yang berkawin."[10] Melihat iklan-iklan perkawinan dan pertunangan di surat-surat kabar menimbulkan perasaan jengkel. Mereka berpendapat bahwa perkawinan dan pertunangan bertentangan dengan sifat revolusi yang menjadi-jadi.[11] Sampai-sampai Bung Tomo, tokoh kharismatik pemuda-pemu-

da, memiliki perasaan "bersalah" karena menikah pada waktu revolusi. Untuk itu, ia meminta izin dan persetujuan dari kelompok pemuda yang dipimpinnya. Iklan perkawinannya jika ditelaah mencerminkan suasana yang hidup di lingkungan pemuda-pemuda waktu itu.

MENIKAH

Mengingat gentingnya masa, maka perkawinan kawan kami SOETOMO (Bung Tomo) dengan PI SOELISTINA, yang akan berlangsung bertemunya nanti pada tanggal 19 Juni 1947 jam 19.00 tidak kami kehendaki akan dirayakan dengan cara bagaimanapun juga. Pucuk Pimpinan Pemberontakan menyetujui perkawinan kedua kawan seperjuangan itu, berdasarkan perjanjian mereka.

1. Setelah ikatan persahabatan mereka diresmikan itu, mereka akan lebih memperhebat perjuangan untuk Rakyat dan Revolusi.
2. Meskipun perkawinan telah dilangsungkan, mereka tidak menjalankan kewajiban dan hak sebagai suami-istri sebelum ancaman terhadap kedaulatan Negara dan Rakyat dapat dihalaukan.

Kami akan berterima kasih, bila kawan-kawan seperjuangan dari jauh berkenan memberikan berkah pangestu kepada kedua mempelai itu.

TETAP MERDEKA
Dewan Pimpinan Harian Pucuk Pimpinan
Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia
Jl. Rampal 75, Malang.[12]

Iklan tersebut memperlihatkan seolah-olah Bung Tomo merasa berdosa karena perkawinannya dilangsungkan di tengah-tengah suasana revolusi. Seolah-olah ia hanya mencari kenikmatan pribadi. Mereka kemudian berjanji tidak akan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-istri sampai ancaman terhadap kedaulatan berakhir. Izin perkawinan tersebut didapat dari pimpinan BPRI (Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia).

Jika reaksi antiperkawinan (dalam arti egoisme) seperti sebelumnya dapat disebut sebagai reaksi puritan, terdapat pula reaksi sebaliknya. Ikatan-ikatan perkawinan sebagai legalisasi hubungan seks merupakan ikatan-ikatan feodal dan tidak perlu dipedulikan. Kebebasan berarti juga kebebasan dalam hubungan seks. Emansipasi wanita juga berarti emansipasi dari ikatan-ikatan seksual yang kuno. Kelompok yang berpandangan seperti ini (merupakan minoritas) menjalankan *free love*, dalam arti perombakan terhadap nilai-nilai lama. Suasana *free love* tidak banyak dilukiskan dalam novel-novel Indonesia. Hanya S. Rukiah pernah melukiskan sedikit dalam buku *Kejatuhan dan Hati* yang ditulisnya pada 1949 dan melukiskan suasana 1947–1948. Mochtar Lubis menceritakan bagaimana teman-temannya merasa diri mereka revolusioner karena berani melanggar norma-norma lama dengan *free love*.

Mode tersebut (walaupun terbatas) menjalar kepada pemimpin-pemimpin politik tinggi.[13] Dalam

1946, tersiar berita-berita bagaimana di fron telah dipraktikkan *free love*. Disiarkan pula bahwa terdapat 35 gadis Pesindo yang dilelang. Berita itu tentu saja dibantah oleh Pesindo walaupun diakui memang ada gadis yang "kecelakaan", tetapi bukan dari Pesindo.[14]

Gejala-gejala *free love* dapat dinilai sebagai suatu gejala yang biasa terjadi dalam setiap zaman kacau. Khusus pada revolusi Indonesia, dia memiliki arti lebih daripada sekadar hubungan pria dan wanita yang mencari kepuasan seksual.[15]

Jika pada nilai-nilai dasar yang esensial, seperti perkawinan serta hubungan ayah dan keluarga telah "dilanggar" oleh revolusi, nilai-nilai lain yang lebih formal dengan mudah dilepaskan pula. Sikap terhadap pamong praja, terhadap bangsawan-bangsawan feodal, ataupun terhadap hubungan-hubungan lainnya lebih mudah dilanggar. Dalam suasana psikologis dan demam revolusi terjadi Peristiwa Tiga Daerah, revolusi sosial di Sumatra Timur, revolusi sosial di Solo, serta pembunuhan orang-orang Cina di Tangerang, Bumiayu, dan lain-lain. Semua itu bersumber pada pemberontakan nilai-nilai baru (yang sangat tidak jelas untuk kebanyakan pemuda) terhadap nilai-nilai lama. Bagi pemuda umumnya, revolusi berarti tantangan untuk mencari nilai-nilai baru. Dari pencarian ini, kita akan memahami frustrasi-frustrasi yang timbul kemudian.

Mukjizat Lampu Aladin

Di alam kemerdekaan, setiap orang dapat mengkhayalkan apa saja yang ingin dicapainya. Di samping kebebasan dan pembebasan revolusi, juga berarti kreasi-kreasi baru. Kreasi-kreasi berdasarkan fantasi-fantasi terdapat pula selama revolusi.

Masyarakat bercita-cita agar pamong praja yang dahulu menjadi alat penjajah Jepang dan Belanda supaya berubah setelah kemerdekaan. Sepatutnya mereka menjadi pamong rakyat.[16] Diharapkan pula agar nyonya bupati menjadi lebih revolusioner dan tidak feodal. Harapan-harapan ini banyak terdapat dalam majalah-majalah pemuda waktu itu.

Kepercayaan bahwa revolusi merupakan lampu Aladin yang ajaib tidak hanya terdapat di kalangan pemuda biasa yang terseret oleh idealisme arus revolusi, tetapi juga menjerat pemuda-pemuda yang lebih "intelektual". Bahkan, Aidit, seorang pemuda yang banyak memperdalam teori Marxis, terseret oleh arus ini. Pada 1947, di kalangan BTI muncul pandangan bahwa teknik dapat menyelesaikan segala persoalan. Kemudian, mereka membuat *plan* dua tahun untuk memodernisasi pertanian Indonesia dengan mesin-mesin. Mereka percaya bahwa setelah dua tahun, semuanya akan menjadi beres dan baik. Mesin merupakan "anak Allah" yang turun ke dunia untuk membebaskan manusia dari perbudak-

an. Dalam periode itu, Aidit (dalam hal ini penulis menilainya sebagai tipe pemikir Indonesia yang masih muda) menulis artikel-artikel bernada mesianistis. Menurut Aidit, dalam masyarakat setengah feodal, penguasa pembangunan harus dimulai dari desa-desa (bandingkan dengan ide-ide kaum populis Rusia pada 1870-an). Teknik menentukan segalagalanya bagi kaum tani. Tanpa mesin-mesin, kader-kader (?) akan *kluyuran* tidak memiliki pekerjaan. "Hanya tekniklah yang bisa mengangkat derajat manusia dari alam kebinatangan, bekerja setengah mati dan hasil tidak mencukupi, ke alam kemanusiaan tempat manusia hidup menderita, tetapi bergembira." Kemudian, Aidit mempropagandakan *plan* dua tahun BTI untuk menteknikkan pertanian.

Aidit melihat dengan sedih ketika Kanjeng Gusti Kiai Tunggul Wulung diarak keliling kota Yogya untuk mengusir wabah pes pada 13 Maret 1947. Baginya, arak-arakan ini merupakan tanda bahwa takhayul masih melekat dengan tebal di kepala rakyat Indonesia. Semua ini disebabkan oleh alat-alat produksi belum berubah sejak zaman Majapahit/ Brawijaya. Takhayul hanya dapat diberantas kalau alat-alat produksi diubah dan tekniklah yang dapat mengubahnya.[17] Dalam suasana ini, kita dapat melihat titik-titik persamaan antara ide muluk-muluk yang tidak realistis (teknik sebagai penyelamat, misalnya) dan ide-ide tentang penyusunan tentara

yang "super" modern. Tentara terdiri dari berpuluh-puluh jenderal serta berlusin-lusin laksamana laut dan udara dengan divisi-divisi yang lengkap di atas kertas.[18] Menurut pendapat penulis, konsepsi-konsepsi ini tidak semata-mata lahir dari kebodohan ataupun *sok* nampang konseptor-konseptornya. Di samping semua itu, pandangan-pandangan ini lahir dari idealisasi revolusi sebagai lampu Aladin, suatu pandangan "religio-magis" suasana pemuda waktu itu.[19]

Revolusi dalam Kenyataan

Idealisme pemuda-pemuda tecermin dengan kuat pada waktu pertempuran di Surabaya, November 1945. Segenap heroisme dan romantisme pemuda tercurah di sana. Suatu ikrar bahwa mereka tidak akan memotong rambut sebelum Indonesia merdeka tercetus selama perang di Surabaya. Akan tetapi, pihak Indonesia kalah karena heroisme dan romantisme tidak dapat bertahan terhadap organisasi dan senjata-senjata modern.

Demikian pula kenyataan-kenyataan pahit revolusi pada akhirnya mencairkan "lampu Aladin" para pemuda. Kenyataan-kenyataan pahit menimbulkan frustrasi di kalangan pemuda sendiri. Sjahrir mendapatkan dukungan dari pemuda, bahkan menjadi tokoh identifikasi pemuda karena sikapnya anti-Jepang. Ketika pemimpin-pemimpin Indonesia ber-

mesra-mesraan dengan Jepang, ia berada di luar "koor" saudara tua. Karena itu, Sjahrir memiliki nilai tinggi di mata para pemuda. Dalam brosur *Perjuangan Kita,* ia membawakan siaran-siaran pemuda yang ada. Sikap antikompromi terhadap golongan-golongan tua yang telah bekerja sama dengan Jepang.

> "Perjuangan demokrasi revolusioner itu dimulai dengan membersihkan diri dari noda-noda fasis Jepang, mengekang penglihatan orang-orang yang masih jiwanya terpengaruh propaganda Jepang dan didikan Jepang. Orang-orang yang sudah menjual jiwa dan kehormatannya kepada fasis Jepang disingkirkan dari pimpinan revolusi kita (orang-orang yang pernah bekerja di dalam propaganda, polisi rahasia Jepang, umumnya di dalam usaha koloni ke-5 Jepang). Orang-orang ini harus dianggap sebagai pengkhianat perjuangan ....[20]

Gema cita-cita Sjahrir yang ditulis dalam brosur kecil tersebut cepat terasa. Dalam waktu singkat, muncul tekanan-tekanan kuat dari para pemuda yang mendukung Sjahrir untuk membersihkan kabinet dari kolaborator dan pengkhianat Jepang.[21] Tekanan ini mampu menjatuhkan Kabinet *"Bucho"*[22] Soekarno dan menaikkan Sjahrir. Dengan dibentuknya Kabinet Sjahrir I, pemuda-pemuda mendapatkan kemenangan. Idealisme dan "rasa percaya" diri pun makin kuat tumbuh. Akan tetapi, dalam posisi eksekutif tertinggi, Sjahrir tidak dapat bergerak de-

ngan mudah, seperti waktu ia menuliskan brosurnya. Ia tidak memiliki apa-apa untuk menjalankan pemerintahan jika tidak didukung birokrasi lama. Tanpa bantuan pamong praja Republik Indonesia, ia tidak dapat berjalan. Padahal, pamong praja hanya mau membantu Republik Indonesia jika "kerja sama" mereka dahulu tidak digugat dan posisi mereka dijamin. Karena Soekarno telah menjamin pamong praja,[23] Sjahrir mau tidak mau meneruskan politik tersebut.

Tindakan seperti itu merupakan "pukulan" pertama terhadap cita-cita pemuda "revolusioner". Dalam gambaran mereka, revolusi merupakan pembaruan terhadap nilai-nilai lama. Namun, tiba-tiba datang suatu kenyataan pahit yang harus mereka kunyah dan telan. Apa yang mereka anggap sebagai orde lama dan harus diganyang, ternyata tetap bertahan dalam posisi semula. Di beberapa tempat, kekecewaan berubah menjadi ekses-ekses antipamong praja, misalnya dalam Peristiwa Tiga Daerah. Pihak yang menggerakkan demonstrasi-demonstrasi rakyat, yang mengarak bangsawan-bangsawan (antara lain Kardinah, saudara Kartini), dan menyusun pemerintahan rakyat adalah tenaga-tenaga paling antikolonial dan feodal. Tenaga-tenaga yang "ingin" membersihkan kolaborator-kolaborator Jepang malah yang kemudian ditangkap. Mereka dituduh sebagai kaki tangan Belanda, mata-mata van der Plass.

Padahal, pemimpin Peristiwa Tiga Daerah adalah Sardjio, seorang pemuda yang pada zaman Hindia Belanda masuk PKI Ilegal, dari grup Djoko Soedjono. Dalam 1944, ia dihukum 13 tahun penjara karena kegiatan anti-Jepang. Sebelum itu, ia telah lama menderita.[24]

Tipe-tipe pimpinan lain, seperti Moh. Nuh (eks. Digulis) dan puluhan kawannya, juga ditangkap. Mereka diperlakukan dengan buruk. Selama ditahan, keluarga mereka telantar, misalnya anak Kartohargo meninggal dunia ketika ia dipenjara.[25] Baru setelah hampir dua tahun, perkara mereka diperiksa.[26] Peristiwa Tiga Daerah merupakan letusan semangat revolusioner pemuda-pemuda secara spontan (dan tidak dipikir, sebagai pencerminan idealisme-revolusioner). Kasus ini memperlihatkan betapa jatuhnya cita-cita perombakan (nilai-nilai lama) dengan kenyataan pahit yang ada. Di samping peristiwa tersebut, masih terdapat kasus-kasus kecil lainnya. Di beberapa daerah, lagu revolusioner *Darah Rakyat* dilarang[27] karena dianggap menghasut. Pada akhirnya, pihak yang berkuasa adalah pamong praja, yang menjadi simbol orde lama di mata para pemuda. Frustrasi-frustrasi pun mulai timbul di kalangan pemuda.

Sikap lain yang merupakan siraman air dingin di kepala pemuda-pemuda adalah sikap Sjahrir yang tidak mengikutkan pemuda-pemuda di dalam

kabinetnya. Seperti diketahui, Sjahrir adalah penganut politik diplomasi sementara pemuda-pemuda adalah "ekstremis" yang keras. Dalam rangka politik ini, Sjahrir mengorbankan pemuda-pemuda sebagai konsesi untuk perundingan dengan Sekutu.[28] Pada waktu darah pemuda "mendidih" dan siap untuk menyerbu lawan mereka, Sjahrir mencegahnya. Sikap itu bukan sikap karena kurang revolusioner. Akan tetapi, siapa saja yang memimpin di atas akan berhitung dengan realitas-realitas yang ada.

Kekecewaan dan frustrasi mulai menyelimuti pemuda dan masyarakat pada umumnya. Perasaan itu makin lama makin menjadi besar. Kalaupun pemuda-pemuda masih bertahan pada waktu itu, hal tersebut disebabkan oleh disiplin organisasi mereka atau karena mereka masih percaya dan membuat rasionalisasi (*to excuse themselves*) tentang situasi yang mereka hadapi.

Barangkali hal paling pahit yang dialami pemuda-pemuda ialah timbulnya golongan-golongan yang telah kehilangan idealisme dan mengambil keuntungan dari suasana yang ada. Bagaimana seorang dokter perjuangan menolak datang ke rumah pasien karena pasiennya bukan orang kaya.[29] Pemuda-pemuda di fron tidak memiliki makanan karena tidak ada mobil yang mengangkutnya sementara di kota mobil-mobil berseliweran. Untuk membeli rokok saja, orang memakai mobil.[30] Di Yogya-Solo, jenderal-

jenderal staf yang tidak pernah konfron mondar-mandir dengan megahnya. Mobil-mobil mereka dengan bendera bintang kejenderalan terlihat di mana-mana. Perwira-perwira yang tidak memiliki tugas hanya menghabiskan uang negara, sedangkan pemuda-pemuda hidup dengan menderita.[31] Korupsi merajalela di daerah Republik setelah 1946. Makin redup idealisme dan heroisme pemuda, makin banyak korupsi. Apalagi blokade Belanda menambah kesulitan-kesulitan ini. Di Yogya, pada 1946 mulai timbul sistem uang kunci. Sebuah rumah yang sewanya hanya ƒ 6 harus "ditembus" dengan ƒ 1.000.[32] Hal itu dengan sendirinya memberatkan orang-orang yang mau hidup jujur. Terlebih pada waktu itu, manusia-manusia Republik dikonfrontasikan dengan kejujuran yang berarti "kekonyolan" atau mulai belajar korupsi. Harga-harga beras melambung dengan cepat sekali. Demikian pula harga kebutuhan lainnya (dalam rupiah).[33]

	Agustus 1947	April 1948	Juni 1948	Agustus 1948
Beras	1.66	6.76	7.44	17.50
Gula	1.58			7.30
Garam	3.48			14.30
Daging	4.50–13.60			76–187.50
Kedelai	2.00			12.00
Minyak kelapa (600 cc)	5.09			36.20

Dari harga kebutuhan tersebut, dapat dilihat betapa sulit penghidupan di daerah Republik selama setahun (naik 1.059%). Dalam kesulitan ini, setiap orang berusaha mencari penghasilan tambahan, termasuk di sekolah. Kemudian timbul bermacam-macam iuran (termasuk organisasi). Dalam 1947, tersiar berita bahwa ada seorang murid sekolah dikeluarkan karena tidak mampu membayar uang iuran IPI (Ikatan Pelajar Indonesia). Pakaiannya hanya dua helai.[34] Berita seperti ini dengan sendirinya "memahitkan" kehidupan pemuda-pemuda idealis yang merasa telah mengorbankan segala-galanya untuk revolusi, termasuk nilai-nilai dasar kemanusiaan dan masa depan mereka. Kini semuanya tampak sia-sia.

Oei Gee Hwat, pemuda tipe idealis, melihat gejala "derevolusionalisasi" dengan skeptis. Dalam Kabinet Sjahrir III terdapat seorang menteri negara, Mr. Tan Poo Gwan. Dahulu ia menjadi anggota Chung Hua Hui, sebuah organisasi konservatif Cina yang sangat pro-Belanda. Kesenangan menteri ini ialah menyabung ayam.[35] Timbul kesan pada diri Oei mengapa Sjahrir (waktu itu ia masih pro-Sjahrir sebagai pimpinan Pesindo) tidak menghargai pejuang-pejuang yang membela Republik, tetapi malah "asal-asalan" mengangkat tukang adu ayam menjadi menterinya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu muncul di banyak hati para pemuda. Tidak hanya pada Tan Poo Gwan, tetapi juga pada tipe-tipe seperti menteri negara ini.

Walaupun demikian, pemuda-pemuda menahan diri karena percaya (atau mencoba untuk percaya) bahwa tidak lama lagi kemerdekaan penuh akan datang sebagai hasil politik diplomasi (yang secara emosional ditentang banyak pemuda). Suasana ini tecermin dalam puisi-puisi pada zaman tersebut, misalnya ditulis oleh Sri Sugiarti.

Nyalakan lagi
Lilin ini
Empat pagi
Jangan mati
Jangan padam
Nyalakan terus
Dengarlah, dengarlah
Ayam jantan berkokok nyaring
Hari menjelang pagi
Fajar harapan
Jangan mati
Jangan mati[36]

Seolah-olah idealisme pemuda akan mati, padahal hari sudah jam empat. Alangkah sayang karena "kemerdekaan" akan segera datang. Juga dalam salah satu lagu Cornel Simanjuntak, tipe seniman pemuda revolusioner, suasana ini terbayang—*Kulihat Terang* (diciptakan dalam 1946). Seolah-olah Cornel meratap ....

"Balikkan kembali imanku yang sudah hilang. Datanglah cahaya di hati ..." dan seterusnya.

Cornel meninggal dunia karena TBC (juga karena tidak mau menjaga badan). Pemuda-pemuda tipe Cornel, yang rela mengorbankan segala-galanya untuk revolusi, cukup banyak pada waktu itu. Sikap puritanisme juga terdapat di kalangan generasi lebih tua, misalnya pada Ketua Mahkamah Agung pertama yang menelantarkan keluarganya (anaknya sakit akibat kurang makan) karena tidak mau korupsi.

Dalam suasana yang berat menekan ini, terdapat dua reaksi. Reaksi pertama merupakan reaksi puritanisme dan nonideologis. Kasus dr. Wiroreno dan Overste (Letkol) Sudiarto dapat sedikit mencerminkan reaksi seperti ini. Wiroreno adalah seorang dokter yang dibesarkan dalam kepahitan.[37] Pada waktu kuliah, ia harus berhenti dua tahun untuk mencari uang terlebih dahulu. Setelah lulus, ia bekerja sebagai dokter pemerintah dan ditempatkan di mana-mana. Dalam kariernya, ia "muak" terhadap para pamong praja karena ia berpendapat bahwa bupati-bupati adalah pemeras-pemeras. Sikap ini makin kuat selama zaman Jepang karena sebagai dokter, ia berhadapan langsung dengan rakyat yang kelaparan. Sikapnya terhadap politik juga apatis. Baginya, politikus merupakan badut-badut sekaligus tukang sulap yang selalu menang. Blokade Belanda, kemelaratan, dan sulitnya obat-obatan membuatnya menjadi seorang "populis". Ia tidak ke Yogya karena baginya Yogya merupakan sarang "dekadensi" cita-

cita revolusi. Ia menetap di Kudus, sebuah kota dekat garis demarkasi. Di sana ia sering konfron mengobati prajurit-prajurit. Sebagai ahli bedah yang briliian, dr. Wiroreno bekerja di tengah-tengah rakyat dan hidup menderita bersama-sama. Dalam sikap puritan ini, ia mendapatkan dirinya dan menyatukan dirinya terhadap revolusi. Akan tetapi, tragedi lain tidak disadarinya karena perlahan-lahan ia ditelan oleh ideologi komunis tanpa ia sendiri menjadi seorang komunis. Menurut Soebadio Sastrosatomo, keluarga-keluarga komunis dari daerah pesisir (Mudigdo Abdulmadjid, dan lain-lain telah menyeretnya dalam fron mereka).[38]

Letnan Kolonel Sudiarto merupakan tipe lain dr. Wiroreno. Ia adalah seorang Komandan Resimen 24 di daerah pertempuran Semarang (Demak-Purwodadi).[39] Sikap anti-Belandanya begitu kuat sehingga siapa saja yang paling anti-Belanda mendapatkan simpatinya. Rupanya ia mengalami frustrasi karena sikap kompromi Sjahrir dan kemudian Amir Sjarifudin. Pada waktu Peristiwa Madiun meletus, ia ikut Musso. Pasukannya termasuk pasukan yang teratur karena ia didukung dan memiliki pengaruh yang besar di daerah fron Semarang. Pada waktu Musso kalah, ia ditawan. Akan tetapi, waktu terjadi Agresi Militer II, ia lari dari kamp dan mengorganisasikan kelompok-kelompok gerilya di daerah Semarang sehingga pasukannya begitu kuat. Kemu-

dian ia diakui kembali oleh Kolonel Gatot Subroto. Overste Sudiarto tewas (bersama Overste Slamet Riyadi) pada waktu penumpasan RMS (Republik Maluku Selatan).[40]

Dalam slogan-slogan anti-Belanda, banyak pemuda menemukan dirinya kembali, seperti pemuda Sudiarto. Setiap aliran politik yang radikal anti-Belanda mendapatkan banyak pasaran karena di tengah-tengah kemelaratan, ketidakpastian, korupsi, dan anti-Belanda, merupakan cahaya yang memancarkan lagi cita-cita revolusioner.

Reaksi kedua adalah reaksi kemuakan yang diberi warna ideologis. Sasaran pemuda-pemuda revolusioner ialah golongan-golongan yang dahulu mau bekerja sama dengan Belanda dan Jepang, sekarang mau memegang kendali Republik. Pikiran yang hidup tidak banyak berbeda dengan pikiran-pikiran yang ada dalam brosur *Perjuangan Kita*. Hanya cara menyatakannya lebih pahit dan keras.

D.N. Aidit secara sinis bercerita tentang bubarnya Kabinet Sjahrir, yang dalam gambaran pemuda-pemuda merupakan simbol kompromi dengan kekuatan-kekuatan tata masyarakat lama. "Pada 27 Juni 1947, tepat setahun sesudah penculikan Soetan Sjahrir, Kabinet Sjahrir jatuh. Rupanya hari ini adalah hari naas buat Tuan Sjahrir. Tetapi justru hari ini, hari jatuhnya pemerintahan Sjahrir sudah lama ditunggu-tunggu oleh berbagai golongan. Biarpun

bubarnya kabinet adalah soal biasa, tetapi sejak hari itu, rumah presiden kebanjiran tamu. Bukankah ada kans baik?" Menurut Aidit, "Kalau kita nongkrong di tangga istana, kita akan melihat orang yang mondar-mandir itu. Kita akan kenal semua mereka. Mereka yang juga dahulu ada di *Volksraad* dan *Chuo Sangi In*. Mereka adalah tengkulak-tengkulak rakyat. Dalam portabel yang mereka jinjing ada catatan berapa jumlah rakyat yang mereka wakili. Rakyat tidak pernah melihat, rakyat yang tidak pernah kenal padanya."

Tengkulak-tengkulak tersebut berebutan kursi. Padahal, pada waktu proklamasi kemerdekaan, mereka "kita" cari-cari mau diajak bertempur, sekurang-kurangnya mengurus dapur umum. Mereka takut dan lari ke kampung-kampung tempat famili mereka, yang mereka lupakan pada saat sandiwara Pejambon (*Volksraad*). Akan tetapi, Aidit masih memiliki sedikit harapan kepada mereka, asalkan mereka mau mawas diri. Sementara itu, pertahanan negara tidak boleh dipegang tengkulak-tengkulak ini.[41] Orang yang dimaksud Aidit (dan pemuda-pemuda)[42] ialah politikus-politikus tua yang pada waktu itu berada di PNI dan Masjumi. Bagi Aidit, mereka (kaum kolaborator) membesarkan bahaya imperialis dan membuat Indonesia tidak berdaya sehingga harus meminta pembelaan/simpati Amerika Serikat (dalam golongan ini dimasukkan kaum sosialis lunak,

maksudnya Sjahrir—*SHG*).[43] Kecemasan melihat tampuk pimpinan negara kembali ke pihak mereka, dicerminkan dalam karangan-karangan Aidit pada waktu itu, yang merupakan sumber kekecewaan generasi muda.

> Maka itu, buruh dan tani serta tentara Indonesia awaslah. Kamu yang memeras tenaga, kamulah yang bekerja, kamulah yang sewaktu-waktu dituntut jiwanya, awaslah *opkomde bourgeois* yang banyak bicara tentang diri kamu. Yang ada di laskar, di tentara, di pabrik, di sawah dan ladang tapi tidak dengan dan untuk kamu. *Opkomde bourgeois* yang dalam menghebatnya api revolusi tidak berani buka mulut, tetapi sekarang kedudukan Republik terancam dan pemuda-pemuda revolusi jauh di daerah aman, sedang berada di fron Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di fron Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan sebagainya, meladeni agresi Belanda, mereka membuka kembali mulutnya sebesar-besarnya yang dulu di jaman penjajahan Belanda sudah pernah terbuka. Ketahuilah kasta kerja, buruh tani dan tentara kamu adalah *match factor* dalam revolusi sekarang dan revolusi nanti.

Selanjutnya, Aidit menulis ...

> Ketahuilah, bahwa selama 18 bulan revolusi kita, golongan pekerja inilah yang paling berat penderitaannya. Kaum buruh menderita di mana-mana, kaum buruh tidak mampu berpakaian sederhana, tidak cukup makan, tidak dapat kesenangan sekadarnya. Lihatlah kaum tani kita yang sejak jajahan sudah diisap secara mutlak,

> mereka itu masih tetap hidup di dalam lumpur dengan serba kekurangan dalam segala-galanya dan di samping itu semur (emur-*SHG*)-nya revolusi. Terus-menerus mengongkosi revolusi, memberi makan prajurit, menyediakan beras untuk India guna mengikuti diplomasi pemerintah dan memberi makan seluruh masyarakat. Siapakah yang senang, siapakah yang mewah hidupnya, siapakah yang berpangkat? Yang senang, yang mewah dan yang berpangkat ialah *opkomde bourgeois* yang memegang jabatan-jabatan tinggi di dalam civil maupun militer.[44]

Menarik sekali tulisan-tulisan Aidit waktu itu sebagai *the angry young man* dan tidak sebagai pemikir Marxis-Leninis. Tidak ada satu pun tulisan-tulisannya yang masuk dalam buku *Pilihan Tulisan D.N. Aidit*, yang disusun setelah ia menjadi pemimpin besar PKI. Revolusi dalam cita-cita pemuda ternyata berbeda dengan kenyataan-kenyataan yang ada selama revolusi. Bahkan, setelah fase "emosional" dari revolusi dengan pertempuran Surabaya, Ambarawa, Tangerang, Bandung, dan lain-lain, kelihatannya golongan-golongan tualah yang tetap berkuasa. Untuk banyak pemuda, kemerdekaan tidak terasa lagi membawa nikmat.[45] Apalagi Agresi Militer I Belanda membawa banyak pukulan moral kepada para pemuda. Ternyata Belanda lebih cerdik dan dalam waktu singkat dapat menduduki daerah-daerah pedalaman yang strategis.

Dalam suasana seperti itu, persoalan-persoalan kecil menjadi bahan pertentangan dan mulai timbul suasana saling menyalahkan. Karena itu, radikalisme kiri maupun kanan mulai tumbuh di kalbu pemuda-pemuda pada 1947.

Frustrasi Lebih Lanjut

Dijatuhkannya Kabinet Sjahrir oleh Sayap Kiri dapat dinilai sebagai lepasnya "rem" dari ideologi. Pada saat rem tadi lepas, kata hati yang berbicara. Jatuhnya Kabinet Sjahrir disambut dengan lega oleh generasi muda dari grup Sayap Kiri. Bahkan, mereka merasakan bahwa Amir Sjarifudin dengan pembantu-pembantunya yang lebih radikal, seperti Setiadjid, Maruto Darusman, dan Wikana, akan membawa sukses lebih besar. Timbul perasaan bangga pada diri "pemuda-pemuda" karena sanggup menjatuhkan Sjahrir walaupun Sjahrir berasal dari kalangan sendiri. Mereka rela menjatuhkan kawan sendiri karena Sjahrir memang salah. Prinsip "patriotisme" dan bukan golonganisme yang dipakai.

Harapan-harapan yang diletakkan pada diri Amir ternyata sia-sia. Bahkan, dalam kompromi, Amir lebih banyak memberikan konsesi. Dalam perundingan Renville, Amir memberikan konsesi-konsesi politis dan teritorial yang banyak sekali. Daerah Republik diperkecil hanya tinggal Jawa Tengah Se-

latan, Jawa Timur Selatan, dan Banten. Republik harus menerima kira-kira 1.000.000 pengungsi.[46] Di samping itu, Republik Indonesia terpaksa menarik 35.000 pasukannya dari daerah Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara psikologis (di samping politis), tindakan ini benar-benar memedihkan hati pemuda-pemuda umumnya dan Divisi Siliwangi khususnya. Dr. Hutagalung, Sekretaris Panitia Hijrah yang dibentuk untuk menampung pengungsi, secara jujur menyatakan bahwa mereka "sakit" lahir dan batin.[47] Optimisme dan idealisme yang setahun sebelumnya masih menyala-nyala di hati para pemuda/laskar tentara, kini seperti disiram air dingin. Seperti seseorang yang dibangunkan dari mimpi-mimpi indah dan kemudian dipaksa untuk melihat realitas yang keras dan menjijikkan. "Luka hati" itu disadari oleh tokoh-tokoh Republik Indonesia. Timbul usul-usul agar dibentuk sebuah "divisi kehormatan"[48] dari tentara hijrah, tentara yang tidak memiliki teritorial dan terpaksa menumpang di wilayah orang lain.

Tentara hijrah ini hidupnya telantar, tidak memiliki asrama, dan jauh dari keluarga yang dengan sendirinya menumbuhkan kompleks psikologis yang peka. Merasa dianaktirikan, cepat bereaksi, dan merasa diasingkan oleh lingkungan sekeliling. Dalam keadaan ini, mereka kemudian diagitasi (lihat bab berikutnya) yang dijawab secara keras. Perasaan seperti anak ayam yang tidak diperhatikan induknya

terlihat pada Peristiwa Srambatan. Pada waktu Panglima Besar Sudirman meminta agar anak buah Brigadir Sadikin mengembalikan perwira-perwira Panembahan Senopati yang "diduga" diculik, Brigadir Sadikin yang merasa tidak berbuat apa-apa menolak.

"Jangan pikir apa-apa dulu, kecuali satu saat. Bagaimana perasaan sebagai tentara jika ada perwiranya yang hilang?"

Brigadir Sadikin menjawab "tidak senang" dan dengan (dalam naskah tertulis jangan) itu Panglima Besar terus mendesak agar para perwira dilepaskan. Akan tetapi, Brigadir Sadikin tetap menyatakan tidak mengetahui apa-apa tentang penculikan atau kehilangan. Ia merasa dituduh untuk bertanggung jawab atas peristiwa kehilangan itu. Karena buntunya pembicaraan, Panglima Besar membayangkan bahaya pertumpahan darah. "Slamet Riyadi anak saya," kata Beliau, yang menimbulkan reaksi pada Brigadir Sadikin, "Saya anak siapa?"[49]

Kenyataan-kenyataan pahit itu tidak hanya dialami tentara. Juga pegawai-pegawai negeri yang setia kepada Republik merasa ditinggalkan dan merasa bahwa revolusi ternyata merupakan batu-batu dan duri-duri yang memedihkan idealisme mereka. Seperti diketahui, setelah ibu kota Republik dipindahkan ke Yogyakarta, pegawai-pegawai negeri yang setia kepada Republik tetap menolak bekerja

dengan Belanda. Padahal, Belanda memerlukan banyak pekerja dan mencoba mendapatkannya dengan memberikan jaminan kerja lebih baik. Sejumlah "patriot" menolak "susu, keju, dan uang merah" yang disodorkan Belanda. Bagi mereka, lebih baik bekerja dengan Republik Indonesia walaupun makan tempe dan ikan asin. Demikian pula guru-guru dan dokter-dokter bertahan di tengah-tengah kesulitan. Dengan sikap nonkooperatif berarti membantu perjuangan dan mempercepat "kemerdekaan". Dalam rangka pemboikotan ini, mereka berjualan rokok atau nasi. Pendeknya, semua cara untuk hidup asalkan tidak bekerja sama dengan Belanda.

Setelah persetujuan Renville, Republik Indonesia "tidak melarang" lagi mereka bekerja dengan Belanda. Republik juga " mengesahkan" pegawai-pegawai Republik Indonesia yang sekarang bekerja dengan Belanda. Untuk pegawai-pegawai yang setia kepada Republik Indonesia dan rekan-rekannya di daerah Republik Indonesia, hal ini merupakan "tamparan". Semua "kesengsaraan" mereka lihat sebagai tidak berdayanya pemerintah bertindak terhadap pelanggaran yang dilakukan Belanda.

Tugu proklamasi yang memiliki arti "religio-magis" dicoret-coret dengan kata-kata *Nederlandsche Oost Indie-rot-wit-blauw*.[50] Gerakan Plebisit Republik Indonesia yang didirikan Mr. Ali Budiarjo dirintangi semuanya oleh Belanda, pandu-pandu Republik yang

merayakan 17 Agustus 1948 ditembaki, peristiwa penembakan lebaran, dan lain-lain.

Rasionalisasi tentara juga memiliki aspek psikologis yang dalam. Walaupun persiapan-persiapan dan pemikiran-pemikirannya telah ada sejak Kabinet Sjahrir,[51] pelaksanaannya baru datang di tengah-tengah kekecewaan dan frustrasi yang makin menghebat. Di lingkungan pemuda-pemuda, semangat revolusioner dan heroisme dicerminkan dengan *uniform-uniform*, pistol-pistol, karaben-karaben, dan lain-lain. Semua orang muda ingin menjadi pejuang, tentara, atau laskar. Gadis-gadis menjatuhkan pilihan hati mereka kepada *uniform*. Seolah-olah tentara merupakan standar dan derajat kemanusiaan Indonesia hingga tindakan-tindakan rasionalisasi Hatta mengubah semuanya. Bagi Hatta, soal perjuangan merupakan soal mempertinggi kemampuan kerja dan keefektifan membangun. Persoalan rasionalisasi merupakan cara bagaimana memindahkan tenaga-tenaga tidak produktif dari satu bidang ke bidang lain agar efektivitas tenaga revolusi bertambah.[52] Sebagai akibat tindakan ini, sampai Juni 1948, 60.000 orang terkena rasionalisasi dan 40.000 laskar akan menyusul.[53]

Suatu hal yang berat apabila sebelumnya para pemuda berjalan-jalan dengan pistol dan karaben, tiba-tiba harus menyandang pacul dan arit karena dipindahkan dari sektor "industri revolusi" ke sek-

tor pertanian. Mereka merasakan bahwa mereka tidak berhak lagi untuk memakai predikat revolusioner.

Suasana sosial psikologis ini kemudian dieksploitasi oleh suasana politik yang menambah kacau situasi (dibicarakan dalam bab berikutnya). Apabila dalam 1946 suasana frustrasi hanya meliputi selapisan kecil masyarakat Indonesia yang terkejut melihat "radikalisme" pemuda, misalnya Dr. Nainggolan,[54] pada 1948 frustrasi telah meliputi hampir sebagian besar masyarakat Republik. Di kalangan tentara, pegawai negeri, pelajar, bahkan di kalangan pucuk pimpinan revolusi sendiri. Pada akhirnya, cita-cita kemerdekaan hanya sebuah titik terang yang makin menjauh di tengah laut gelap. Yang ada hanya kompromi-kompromi, kemelaratan, pertikaian politik yang tidak menentu, serta kemelut-kemelut masyarakat lainnya.

Di dalam masyarakat timbul desas-desus bahwa pemimpin-pemimpin Republik Indonesia memiliki emas berkilo-kilo di luar negeri. Pada saat yang tepat, mereka akan angkat kaki dari Indonesia dan hidup bersenang-senang di luar negeri.[55] Bahkan, di kalangan mahasiswa dan pelajar yang merupakan benteng Republik, timbul kesangsian-kesangsian. Makin lama makin banyak pelajar dan mahasiswa Republik yang menyeberangi garis demarkasi untuk "sekolah" di Semarang, Surabaya, Jakarta, dan lain-

lain. Belanda sendiri mendirikan Universitas Indonesia di Jakarta dan menawarkan beasiswa Malino, *Malino Beurs*, kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia.

Menerima tawaran Belanda tersebut merupakan tindakan pengkhianatan di mata pemuda-pemuda Republik karena hal itu menunjukkan bahwa di Republik Indonesia tidak terdapat lagi masa depan dalam bidang pendidikan. Walaupun demikian, kita masih membaca sejumlah mahasiswa Republiken. Bahkan, PPMI (Persatuan Pelajar-Mahasiswa Indonesia) menganjurkan agar ormas-ormas memecat anggota-anggotanya yang menerima beasiswa Belanda atau masuk universitas yang disponsori Belanda. Ancaman ini tidak terlalu berhasil. Dalam Juni, empat orang mahasiswa Republik (tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Jakarta) menerima tawaran Belanda. Pada September disusul oleh tujuh rekan mereka dari Bogor. Semua mahasiswa ini kemudian dipecat oleh organisasi massa Republik.[56]

Prof. Mr. Soetan Takdir Alisjahbana juga menerima tawaran ke Negeri Belanda pada Agustus 1948 untuk kongres filsafat. Akibatnya, ia dipecat oleh Menteri Pendidikan Mr. Ali Sastroamidjojo.[57] Kemudian, Prof. Dr. Rosseno ... "Merasa penderitaan di Yogya dan kemudian pindah ke kota pendudukan, akhirnya menjadi mahaguru luar biasa tentang pelajaran *gewapend* beton di Fakultas Teknik." Juga Jen-

deral Mayor Didi Kartasasmita meninggalkan Republik Indonesia. Ia dijemput di Gombong dan menemui pembesar-pembesar KNIL (*Koninklijke Nederlands-Indische Leger*) di Jakarta, tempat ia dimintai keterangan-keterangan tentang TNI dan lain-lain yang penting. Lalu ia berdinas di Negara Pasundan. Dalam suasana frustrasi ini, terdapat kelompok-kelompok yang terseret oleh radikalisme kanan dan kiri. Kesediaan untuk diperintah oleh orang kuat yang dapat "melepaskan" mereka dari suasana yang menekan. Dalam Pemogokan Delanggu, suasana ini jelas terlihat. Golongan kiri dengan radikalisme FDR (Fron Demokrasi Rakyat, yang dipimpin Amir Sjarifudin) serta golongan kanan dengan Sarekat Tani Islam Indonesia (STII, sebagai organ Masjumi). Semua unsurnya terdiri dari pemuda, tentara, buruh, dan politikus yang telah jenuh dan siap untuk bertempur. Dalam suasana sosial-psikologis inilah Peristiwa Madiun meletus.

Bab Lima

Mimpi-Mimpi Indah yang Telah Berakhir

> Kawan Stalin mengatakan bahwa tidak ada satu benteng pun juga yang tidak dapat direbut oleh kaum Bolsjewik. Maka itu yakinlah bahwa kaum Bolsjewik Indonesia akan dapat merebut benteng yang terancam bahaya di hadapan mereka, yaitu benteng Indonesia merdeka.
>
> (Musso)

Bubarnya Kabinet Amir pada saat akan dilaksanakan persetujuan Renville menimbulkan krisis kepemimpinan yang berbahaya untuk Republik Indonesia. Posisi militer, ekonomi, politik, dan diplomasi Indonesia berada dalam titik-titik terendah sejak proklamasi kemerdekaan. Di Yogyakarta, kaum politik bertanya-tanya siapakah yang akan menggantikan Amir? Sejak saat itu, masyarakat politik Republik Indonesia mulai berbicara tentang

"orang kuat" karena mereka menyadari kelemahan diri sendiri dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan tokoh-tokoh politik "biasa".

Jatuhnya Kabinet Amir tidak terlalu mengejutkan. Sebelum kabinet jatuh, "pengamat politik" sudah aktif mencari-cari siapakah yang akan menjadi perdana menteri baru. Mereka menyadari bahwa Amir tidak dapat bertahan lama. Salah seorang tokoh yang didekati ialah Hatta. Ketika Hatta baru pulang dari Sumatra, Sjahrir, dr. Leimena, dan beberapa tokoh lainnya datang kepada Hatta. Mereka menyatakan bahwa hanya dia yang dapat menyelamatkan keadaan. Karena itu, mereka meminta kesediaannya untuk menjadi calon perdana menteri. Hatta menyetujuinya dengan syarat PNI dan Masjumi mendukungnya.[1]

Di luar, Hatta disebut-sebut sebagai calon terkuat sebelum Amir meletakkan jabatan.[2] Di sini terlihat bahwa Amir sebenarnya dijatuhkan oleh rekan-rekannya sendiri (seperti ia menjatuhkan Sjahrir dahulu). Sebaliknya, golongan kiri mengadakan demonstrasi menuntut agar Amir ditunjuk kembali sebagai formatur kabinet,[3] sehari setelah kabinetnya bubar.

Pada 23 Januari 1948, Amir menyerahkan mandatnya. Setelah itu, Presiden Soekarno menunjuk Mohamad Hatta sebagai formatur kabinet baru. Hatta yang sebelumnya mendapat dukungan Masjumi dan PNI mencoba mendekati Sayap Kiri karena ia

ingin membentuk kabinet yang mendapatkan dukungan nasional. Usahanya untuk mengajak golongan ini berjalan seret. Mereka meminta pos-pos inti, seperti kementerian pertahanan dan kalau mungkin kementerian dalam negeri. Hatta menawarkan empat pos kepada mereka (seperti juga kepada PNI-Masjumi), tetapi Sayap Kiri meminta sepuluh (*sic*) kursi. Hatta tidak mungkin memberikannya karena Masjumi-PNI tidak ingin melihat kabinet didominasi Sayap Kiri. Akhirnya, Hatta memberikan "ultimatum", apakah ikut kabinet dengan perwakilan yang wajar atau tidak sama sekali. Hatta memberikan kesempatan kepada Sayap Kiri untuk memberikan jawaban hingga 28 Januari pukul 22.00. Pukul 22.00 kurir mereka datang dan meminta waktu diperpanjang sampai pukul 24.00. Tidak jelas apa yang terjadi di Sayap Kiri, yang waktu itu terus mengadakan rapat. Padahal, ada grup-grup (Sjahrir-Soebadio) yang ingin agar Sayap Kiri menyokong Hatta, sedangkan grup-grup lain menolaknya. Pada pukul 24.00 datang jawaban bahwa Sayap Kiri menolak ikut Kabinet Hatta.[4]

Keesokan harinya, Kabinet Presidensial Hatta diumumkan tanpa wakil-wakil Sayap Kiri. Adanya Soepeno dan Kusnan (SOBSI) di dalam kabinet hanya mewakili pribadi-pribadi. Program Kabinet Hatta jelas dan sederhana.[5]

1. Menyelenggarakan persetujuan Renville.

2. Mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS).
3. Rasionalisme.
4. Pembangunan.

Program tersebut akan mendatangkan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaannya, yang dalam hal ini telah disadari sebelumnya. Sayap Kiri Nasional sebelum kabinet terbentuk mengajak masyarakat agar tidak lagi saling menyalahkan tentang penerimaan persetujuan Renville. Soal sekarang ialah bagaimana menggunakannya secara maksimal. Dalam keadaan krisis ini, diperlukan orang yang tidak melihat realitas setengah-setengah.[6] Kemudian, Sayap Kiri menamakan Kabinet Hatta sebagai "kabinet pisau cukur".[7]

Perubahan-Perubahan di Dalam Gerakan Sayap Kiri

Sementara itu, di dunia komunis terjadi perubahan-perubahan drastis. Sejak 1935, kaum Komunis Internasional menggunakan garis Dimitrov dalam taktik perjuangan. Mereka melihat bahwa fasisme merupakan bahaya yang lebih besar terhadap kaum komunis. Sejak itu, mereka dianjurkan untuk melakukan kerja sama antara kekuatan-kekuatan komunis dan kekuatan-kekuatan liberal-kapitalis. Dalam kerja sama ini, kaum komunis bersedia memberikan

konsesi-konsesi prinsipal, seperti tuntutan penyitaan tanah di Cina, kemerdekaan di Indonesia, bahkan pemogokan umum di negara-negara liberal-kapitalis Eropa.

Sejak kerja sama ini berubah, dalam arti kemenangan untuk blok komunis/liberal, politik tersebut terus dilanjutkan. Mereka percaya bahwa Eropa akan jatuh ke tangan komunis sebagai akibat keguncangan-keguncangan ekonomi, politik, dan sosial setelah Perang Dunia II. Apalagi hasil pemilihan umum setelah Perang Dunia II di Eropa menunjukkan kemajuan-kemajuan pesat untuk partai komunis setempat. Di Prancis, Partai Komunis keluar sebagai partai terbesar setelah pemilihan umum 1946, sedangkan di Italia sebagai partai nomor dua yang menakutkan kekuatan-kekuatan antikomunis. Eropa Barat yang komunis sekaligus akan mengkomuniskan tanah-tanah jajahannya. Atas dasar ini, Partai Komunis Vietnam dan Indonesia sampai awal 1948 mengikuti garis lunak induknya di Eropa.

Sejak pertengahan 1947, golongan-golongan nonkomunis mulai sadar akan bahaya komunis dan mengambil tindakan-tindakan drastis. Amerika Serikat mengorganisasikan Rencana Marshall pada Juli 1947. Di Italia dan Prancis, kaum sosialis dan liberal (Kristen-Demokrat) bersekutu membendung komunisme. Sementara itu, perang dingin mulai menyelimuti dunia. Satu demi satu harapan kaum komunis

untuk mengkomuniskan Eropa hilang. Dalam keadaan ini, teoretisi-teoretisi komunis mulai memutar kemudi ke kiri kembali. Kominform dihidupkan kembali pada 22 September 1947. Zhdanov melancarkan teori dua kubu, yaitu imperialis dipimpin Amerika Serikat dan anti-imperialis dipimpin Rusia. "It also includes countries that have with imperialist dan have firmly set foot on the path of democratic development such as Rumania, Hungary and Finland, Indonesia and Vietnam are associated with it ...."[8]

Pada pokoknya, teori Zhdanov menyatakan bahwa kerja sama dengan kaum imperialis tidak usah dilanjutkan. Selain itu, partai-partai komunis harus mengambil garis keras dan memimpin perjuangan di negara masing-masing (soal-soal detail tentang teori ini dalam "terjemahan" Indonesia akan dibicarakan dalam analisis Musso terhadap Revolusi Indonesia).

Perubahan garis itu dengan sendirinya memerlukan penjelasan-penjelasan mendetail, baik dari segi taktis maupun dari segi ideologis. Penjelasan pertama perubahan garis itu untuk Asia Tenggara diberikan dalam Konferensi Pemuda se-Asia Tenggara yang dilangsungkan di Calcuta, India, pada 19–26 Februari 1948.[9] Di dalam konferensi ini dinyatakan bahwa negara imperialis Barat sedang mengalami kehancuran di Asia. Untuk menyelamatkan diri, me-

reka melakukan kompromi-kompromi dengan kaum kanan di koloni tersebut. Kemudian, mereka membentuk negara baru yang dalam kenyataannya hanya pembagian kekuasaan dengan kaum reaksi dan kaum kompromis. Karena itu, tugas kekuatan-kekuatan progresif ialah menentangnya. "Neither reform nor so-called reconstruction within the frame work of colonial exploitation would be enough it was asserted, what was necessary was the total defeat of imperialism and its allies."[10]

Indonesia tidak dimasukkan ke dalam kelompok ini, tempat kaum imperialis dan kaum reaksi Bumiputra bekerja sama (karena waktu delegasi Indonesia berangkat, kabinet masih dikuasai komunis). Indonesia dianggap sebagai contoh baik, tempat perjuangan bersenjata telah dikobarkan (seperti Vietnam). Sementara itu, Filipina, Myanmar, Malaysia, India, dan Srilangka dianggap sebagai negara tempat kaum reaksi bekerja sama dengan kaum imperialis.

Delegasi Indonesia menyatakan bahwa mereka menentang persetujuan antara Indonesia dan Belanda yang dihasilkan berkat bantuan Komisi Tiga Negara (PBB). Penentangan ini sesuai dengan nada "keras" konferensi. Konferensi Calcuta begitu penting untuk Indonesia karena pertama kali kaum komunis Indonesia "mendiskusikan" garis baru yang keras dari dunia komunis internasional.

Ide-ide kritis terhadap politik kompromi komunis telah lama terdengar di kalangan PKI, yang menimbulkan perpecahan-perpecahan kecil (Acoma, PKI Merah, PCI, dan lain-lain). Kembalinya wakil-wakil Indonesia dari Calcuta, sebenarnya melegalisasi ide-ide radikal generasi muda, yang juga menjadi pemikiran di dalam PKI sendiri. Jadi, kurang tepat jika melihat garis umum komunis Indonesia berubah karena adanya perubahan garis politik Stalin. Tentang apakah konferensi ini merupakan brifing instruksi kepada partai komunis setempat (Malaysia, Indonesia, Myanmar, Filipina) untuk berontak, barangkali tidak pernah akan dijawab dan akan menjadi persoalan akademis. Akan tetapi, jika mencoba melihat persoalan pemberontakan komunis di Asia Tenggara pada 1948 hanya dari sudut "instruksi" Calcuta, hal itu merupakan suatu kecerobohan yang menakutkan.

Di samping perkembangan-perkembangan dari luar negeri, di dalam negeri proses radikalisasi terjadi setelah Amir meletakkan jabatan. Seperti kita lihat, inti Sayap Kiri terutama Partai Sosialis, yang terdiri dari pengikut-pengikut Amir Sjarifudin. Pada mulanya, kerja sama di antara kedua kelompok ini berjalan baik. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan-perkembangan yang cepat dan sulit, mulai tampak perbedaan-perbedaan di antara kedua kelompok dalam cara berpolitik maupun dalam dasar-

dasar analisis mereka. Apalagi jatuhnya Sjahrir terutama disebabkan oleh "pengkhianatan" Sayap Kiri sendiri. Sejak itu, hubungan di antara kedua kelompok makin memburuk. Konsesi-konsesi politik Sjahrir yang dikecam oleh grup "radikal", ternyata diulangi dalam kadar lebih tinggi oleh Amir.

Di antara kelompok-kelompok Sjahrir terjadi diskusi-diskusi mendalam mengenai situasi negara/masyarakat pada waktu itu (Sjahrir, Djohan Sjahroesah, Wijono, dan Soebandrio). Akhirnya, mereka merumuskan ide-ide mereka kepada pimpinan PS dalam 14 pasal. Diskusi-diskusi tersebut menunjukkan bahwa telah ada "persatuan" di antara sesama elemen komunis di dalam PS. Terlebih Sjahrir dan kawan-kawannya menyadari bahwa mereka telah menjadi "*outsider*". Jika mereka meneruskan perjuangan di dalam, mereka pasti akan dipecat. Karena itu, sebelum dipecat, mereka keluar dan mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI).[11]

Sebenarnya, persoalan pokok yang memecah kedua kelompok ialah *Penjelasan Keadaan Politik Dewan Harian Bersama Menteri Sayap Kiri*. Penjelasan tersebut dianggap memecah persatuan dan kekuatan nasional,[12] serta sikap Sayap Kiri terhadap Kabinet Hatta. Sjahrir dan kawan-kawannya melihat bahwa oposisi terhadap Kabinet Hatta dalam situasi sulit lebih merugikan daripada menguntungkan. Hatta sebagai "eksponen" yang berpengaruh di Sumatra

justru sangat diperlukan dewasa ini. Oposisi yang tidak terarah pada akhirnya akan membangkitkan persoalan Jawa dan luar Jawa, yang merupakan kekuatan tersembunyi dalam arus revolusi. Juga hubungan baik dan kepercayaan Sjahrir dan Hatta membuat grup Sjahrir segan beroposisi terhadap kabinet. Akhirnya, Sjahrir, Djohan Sjahroesah, Wijono, Sumartoyo, Soebadio, Sitorus, Soepeno, Tedjokoesoemo, Tobing, Soedjono, Darad, Wangsawidjaja, Itji, Suhadi, Noeroelah, Kusnaeni, Kartamuhari, Soegondo, Soenarto, Sukanda, Rusni, dan Sastra keluar dari PS dan mendirikan PSI.[13]

Bagi PS, berdirinya PSI berarti kerugian besar. Tiga orang pimpinan PS di BP KNIP, Sugondo, Soebadio, dan Djohan Sjahroesah, memihak Sjahrir dan PS tidak berhasil "me-*recall*" mereka.[14] Amir sendiri mengakui bahwa kaum intelektual memihak Sjahrir, tetapi massa tetap ada padanya.[15] Pecahnya PS memiliki arti lebih dalam daripada sekitar persoalan KNIP dan pembagian kekuasaan. Selama ini PS memiliki dua unsur yang saling bantu satu sama lain. Amir merupakan gas sementara Sjahrir merupakan rem. PS kini berjalan tanpa rem, yang makin lama makin radikal. Akhirnya, PS terbawa arus yang mereka bangkitkan sendiri. Sementara itu, PSI yang tidak (kurang) memiliki gas dalam perjuangan politik, akhirnya mandek serta kehilangan vitalitas dan keberanian dalam merintis pemikiran-pemikiran po-

litik baru. Tujuh tahun setelah berdiri, PSI ternyata telah memfosil dan dikalahkan secara besar-besaran dalam pemilihan umum. Kelompok-kelompok radikal pun sedikit demi sedikit meninggalkan partai.[16]

Sebelum melanjutkan pembicaraan tentang akibat-akibat yang timbul dengan jatuhnya Kabinet Amir, ada baiknya kita melihat pola-pola kepemimpinan politik orang-orang Sayap Kiri. Dalam sebuah laporan dan analisis kepada kabinet, seorang penulis menyatakan bahwa politik di Indonesia tidak rasional, tetapi emosional (menurut sistem nilai-nilai politik di negara-negara Barat). Partai-partai di Indonesia, dari Masjumi (yang kanan) sampai PKI (yang kiri), pada dasarnya anti-imperialis dan antikapitalis. Akan tetapi, persatuan dan pengelompokannya berdasarkan loyalitas pribadi, pro-kontra, serta sahabat dan keluarga. "Maka sebenarnya apa saja pendirian politiknya, asal tidak bertentangan dengan perasaan umum yang berpatok pada anti-imperialis, antikapitalis dan progotong-royong, ia akan disetujui juga oleh umum. Demikian kiranya kedudukan Presiden Soekarno." Selanjutnya, dinyatakan bahwa kaum intelektual yang memegang kendali politik pada umumnya tidak berpengalaman dan "yuridis formal". Mereka tidak galak asalkan di-*saving face*. Pimpinan-pimpinan buruh terombang-ambing dengan politik gagah-gagahan serta nasionalistis yang sok "bakar-bakaran". Demikian pula pemuda-pemuda-

nya picik, senang menipu diri sendiri, serta berlomba-lomba dengan kaum intelektualnya dalam demagogi. Berbeda dengan kaum intelektual yang aktif serta berani memegang senjata. Karena itu, mereka merasakan diri mereka lebih hebat. Keadaan seperti ini terdapat pula di dalam PKI (dan grup-grupnya di partai lain). Bahkan, Alimin, pemimpin paling dihormati, ... "rupanya belum pernah meninggi lebih dari seorang Islam revolusioner yang murtad menjadi demokrat dan nasionalis-revolusioner." Tokoh-tokoh PI Eropa sedikit sekali belajar Marxis-Leninis dan lari ke slogan-slogan. Jiwa mereka ialah borjuis kecil dan feodal. Kaum mudanya dipengaruhi semangat-semangatan ala Jepang. Di Pesindo sedikit sekali yang benar-benar pelajar walaupun pimpinannya eks-*Senenbu* dan *Shusintai*. Kader-kadernya tidak kreatif. *Marx House* tidak memuaskan sehingga dibubarkan. Persoalan-persoalan keuangan organisasi akhirnya memaksa Pesindo menjadi merosot dan berfungsi sebagai partai biasa.[17]

Suasana yuridis formal pimpinan Sayap Kiri dengan pola-pola politik konvensional pada akhirnya memukul mereka sendiri. Jika kita mempelajari pernyataan-pernyataan mereka sejak 1945 dan keterangan politik mereka yang percaya terhadap *rule of the game* politik Belanda, kita dapat merasakan betapa mereka kecewa melihat arah politik yang tidak sesuai dengan teori-teori di atas kertas dan meja dis-

kusi. Mereka merasa dikhianati dan ditipu mentah-mentah. Reaksi mereka merupakan reaksi seorang amatir yang *ngambek* dan kacau balau.

Keadaan ini melanda pimpinan Sayap Kiri setelah Amir meletakkan jabatannya. Dari segi perjuangan Leninis, sikap Amir merupakan suatu kesalahan besar. Kekuasaan negara merupakan alat terpenting dalam perjuangan dan tidak boleh diserahkan kepada siapa pun. Bahkan, kalau perlu direbut dari tangan orang lain.[18] Akan tetapi, hal lebih menyakitkan ialah pimpinan-pimpinan Masjumi (dan PNI) yang sejak 1945 berslogan revolusioner (perundingan atas dasar kedaulatan seratus persen, lebih baik dibom atom daripada merdeka tidak seratus persen, serta menolak kapitulasi Linggajati dan Renville), setelah diberikan kesempatan, ternyata tidak lebih revolusioner daripada kaum yang mereka cerca di muka umum. Slogan mereka berganti ... nasi telah menjadi bubur, *take the best of it*, dan lain-lain. Perasaan bahwa mereka mempermainkan emosi rakyat dahulu, hanya untuk merebut kekuasaan dari tangan Sayap Kiri. Kenyataan bahwa mereka tidak satria menjadi duri di mata tokoh-tokoh Sayap Kiri.[19]

Segera setelah kabinet diumumkan, Sayap Kiri (waktu itu sering dicampur dengan istilah Fron Demokrasi Rakyat) menyatakan bahwa mereka tidak dapat menyetujui formasi kabinet yang tidak memenuhi syarat sebagai *zaken* kabinet. Adanya Masjumi

di dalam kabinet tidak menjamin suksesnya program pemerintah.[20] Akan tetapi, dalam rangka politik *saving face* (seperti disinyalir penulis brosur dalam catatan No. 17, Bab Satu), Amir dan partainya tetap akan menyokong kabinet dalam pelaksanaan Renville.[21] Juga Konferensi PS pada akhir Februari masih menyatakan bahwa mereka menyetujui dan bersedia membantu pelaksanaan Renville.[22] Sikap ini terlihat dalam rapat umum di Alun-Alun Yogya, tempat secara resmi pengumuman penggantian nama Sayap Kiri menjadi Fron Demokrasi Rakyat. Program FDR lebih ditekankan pada kepentingan buruh dan tani. Saat itu, Amir berpidato agar revolusi Indonesia jangan dibelokkan ke kiri dan ke kanan karena dasar persatuannya ialah buruh, tani, dan golongan—golongan menengah bagi perjuangan anti-imperialis.[23] Tidak jelas apa yang dimaksudkan kiri. Akan tetapi, jika kita hubungkan dengan situasi waktu itu, pasti yang dimaksudkan kiri ialah grup-grup radikal pengikut Tan Malaka yang dalam waktu singkat akan diadili.

Dengan sendirinya, hal ini berubah dengan cepat dalam waktu beberapa minggu setelah kebutuhan *saving face* menghilang, kekecewaan terhadap Masjumi-PNI makin merambat, serta kembalinya Soepeno/Francisca Fangidae dari Calcuta, yang membawakan pesan-pesan baru dari gerakan Komunis Internasional (Komintern).

Kabinet Hatta dan Masalah-Masalahnya

Pada 16 Februari 1948, Perdana Menteri Hatta berpidato di muka sidang BP KNIP untuk menjelaskan pokok-pokok kebijaksanaan politiknya sebagai Perdana Menteri dalam kabinet presidensial. Pertama, ia mengecam pengertian yang salah terhadap "kedaulatan rakyat". Ada perbedaan antara kedaulatan rakyat dan anarki. Secara halus, ia mengecam FDR yang selalu membenarkan aksi-aksinya atas nama kedaulatan rakyat. Rakyat taat kepada pemerintah, tetapi pendidikan politik mereka masih kurang. Rapat-rapat dan protes massal merupakan sesuatu yang asli dalam kehidupan politik Indonesia. Semuanya berjalan dengan tertib dan jangan dijadikan alat untuk mempertajam pertentangan. Dewasa ini perlu persatuan karena tahap perjuangan masih bersifat nasional. Apalagi politik parlemen Indonesia belum sehat. Kabinet-kabinet jatuh tidak karena di BP KNIP, tetapi karena tekanan-tekanan kekuatan dari luar. Demokrasi ini lama-kelamaan dapat melumpuhkan dirinya dan akan digantikan oleh anarki dan diktator. Karena itu, dalam keadaan genting sekarang, perlu sebuah kabinet presidensial.

Hatta kemudian merumuskan tugas-tugas kabinet sebagai berikut.

1. Penyelesaian krisis Indonesia-Belanda atas dasar Renville.

2. Usaha mempertahankan RI diubah menjadi usaha membentuk NIS (Negara Indonesia Serikat). Kita akan memberikan beberapa hak kita kepada pemerintah sementara.
3. Rasionalisasi ke dalam karena perlunya penyaluran tenaga-tenaga produktif ke bidang masing-masing.
4. Rasionalisasi Angkatan Perang karena di bidang ini banyak tenaga tidak produktif. Mosi Baharoedin yang telah diterima akan dijalankan dan sistem komando tentara akan dibina. Mereka yang terkena rasionalisasi akan dijamin dan disalurkan oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda.

Hatta juga melihat daerah surplus Republik Indonesia yang diduduki Belanda akan membawa akibat-akibat gawat pada persediaan bahan makanan. Karena itu, Kementerian Urusan Bahan Makanan akan mencoba memecahkan persoalan ini.[24]

Masalah yang dihadapi Hatta pada dasarnya berkaitan satu dengan lainnya. Ia melihat bahwa dalam keadaan sulit, tenaga-tenaga produktif yang ada di daerah Republik Indonesia harus dimanfaatkan secara maksimal. Terlebih tenaga-tenaga ini banyak yang dibekukan dalam struktur politik waktu itu. Untuk pembangunan, diperlukan pemuda-pemuda yang dinamis dan gigih. Akan tetapi, mereka banyak terbelenggu di tentara (jumlahnya sekitar 500.000

orang). Lagi pula, daerah-daerah terbaik Republik Indonesia di Jawa diduduki Belanda sehingga Republik Indonesia harus *survive* dengan kondisi-kondisi kurang menguntungkan. Makanan kurang, pengungsi kira-kira 1.000.000 orang, dan tenaga-tenaga produktif berlebihan.[25] Hanya dengan menyalurkan mereka ke bidang-bidang produktif, Republik Indonesia dapat diselamatkan. Ke bidang pertanian untuk menambah produksi serta ke bidang unit-unit produksi kecil untuk mencukupi kebutuhan Republik Indonesia. Jika ini berhasil, tekanan anggaran belanja untuk tentara dapat dikurangi, yang berarti penghematan.

Keadaan itu berkaitan dengan tidak sehatnya udara politik di Indonesia. Hatta melihat kekuatan-kekuatan politik tertentu (golongan FDR) mempermainkan perasaan tidak puas yang ada untuk kepentingan-kepentingan politik mereka. Sinyalemen Hatta bahwa cara-cara demokrasi parlemen di luar parlemen pada akhirnya akan melumpuhkan demokrasi sendiri, ditujukan kepada grup ini. Jika programnya berhasil, sekaligus Hatta dapat memotong kekuatan-kekuatan politik yang menurut pendapatnya membahayakan Republik Indonesia. Lagi pula, tentara yang efisien dan satu komando (dari Presiden/Panglima Tertinggi ke Panglima Besar), merupakan alat negara yang ampuh dan "kebal" terhadap agitasi kekuatan-kekuatan politik di luar tenta-

ra. Republik Indonesia yang kuat pasti lebih menguntungkan dalam menghadapi tekanan-tekanan Belanda. Walaupun masalah dasarnya ialah masalah perbaikan ekonomi dan penyehatan struktur tenaga produksi RI, perkembangan pelaksanaan rencana ini menjurus pada soal-soal politik. Pada akhirnya, hal ini menimbulkan *clash* antara kaum komunis dan pemerintah di Madiun tujuh bulan sesudahnya.

Ada hal-hal menguntungkan untuk Hatta waktu itu. Pertama, tuntutan rasionalisasi tentara datang dari pihak komunis pada masa pemerintahan Amir Sjarifudin. Mosi Baharoedin pun diterima pada waktu Sayap Kiri masih berkuasa. Tujuan Sayap Kiri waktu itu ialah untuk lebih mengontrol tentara. Akan tetapi, mereka keburu digantikan Hatta sebelum mereka dapat menikmati hasilnya.

Grup pro-pemerintah selalu menangkis serangan-serangan FDR dengan menunjukkan fakta bahwa mereka hanya meneruskan pelaksanaan pemerintah sebelumnya. Keuntungan lainnya ialah grup profesional tentara mendukung Hatta karena mereka melihat akan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ide-ide militer teknis tanpa terlalu banyak dikacaukan partai-partai. Mereka merasakan bahwa senjata-senjata dan fasilitas-fasilitas yang baik harus diberikan kepada TNI, bukan kepada masyarakat pro-Amir.[26] Tanpa sokongan tentara profesional, Hatta akan menghadapi kesulitan-kesulitan luar biasa.

PNI-Masjumi dan Presiden Soekarno menyokong Hatta. Keadaan ini memungkinkan Hatta untuk melaksanakan ide-ide kabinet "pisau cukurnya". Kondisi politik juga menguntungkan Hatta karena Renville yang tidak populer dibuat oleh lawan politiknya. Serangan-serangan terhadap politik diplomasi akan dijawab dengan menunjukkan fakta bahwa FDR-lah yang membuat semuanya menjadi begini.

Walaupun FDR tidak sekuat setahun sebelumnya, posisi dan pengaruh mereka cukup kuat. Kita akan melihatnya kemudian, bagaimana "hebat" mereka menentang rencana-rencana pisau cukur Kabinet Hatta.

Usaha-Usaha Persatuan yang Tidak Berhasil

Sejak pelantikan Kabinet Hatta pada 3 Februari 1948, masyarakat politik telah meramalkan bahwa pertentangan-pertentangan antara partai-partai pemerintah dan oposisi akan menghebat. Pidato Hatta di muka sidang BP KNIP memperjelas ke mana RI akan diarahkan. Dari pidato itu terlihat dengan jelas perbedaan politik Hatta dan grup FDR. Hatta menekankan aspek-aspek pragmatis, sedangkan Amir menekankan aspek-aspek ideologis.

Pada Maret dan April relatif tenang untuk RI. Secara formal, Amir sebagai Ketua FDR menyatakan kesediaannya untuk membantu pelaksanaan Renvil-

le. Usaha-usaha diarahkan pada penerimaan pasukan-pasukan yang di-"hijrah"-kan. Kritik-kritik terhadap program rasionalisasi belum menggila walaupun ada. Jenderal (kemudian turun pangkat secara sukarela—Letnan Jenderal) Sudirman mencoba menenangkan situasi dan membela kabinet. Ia menyatakan bahwa TNI telah siap dengan rasionalisasi karena telah direncanakan sejak Kabinet Sjahrir,[27] sebuah kabinet yang didukung Sayap Kiri.

Di sana-sini terjadi insiden, misalnya terjadi waktu delegasi Belanda tiba di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Semangat rakyat dibakar oleh pihak-pihak yang ingin agar perundingan dibatalkan (dan membuat pemerintah malu). Penghinaan-penghinaan terutama ditujukan kepada Ketua delegasi Belanda, Abdulkadir Widjojoatmodjo. Keadaan menjadi begitu tidak enak untuk pemerintah sehingga pemerintah secara resmi meminta maaf kepada Belanda.[28]

Kesadaran terhadap perlunya persatuan sangat kuat karena semua pihak menyadari bahwa tanpa persatuan, posisi Republik Indonesia akan sangat lemah. Juga etika persatuan diperlukan untuk propaganda memuji-muji diri ke bawah. Hal ini untuk memperlihatkan bahwa mereka sungguh-sungguh ingin membina persatuan. Lawan politiknyalah yang antipersatuan.

Pada 20 Mei 1948, ulang tahun ke-40 bangkitnya pergerakan nasional akan dirayakan secara "me-

riah". Tanggal tersebut dianggap sebagai waktu yang tepat untuk melahirkan ikrar persatuan bahwa nasib rakyat dan negara harus berada di atas kepentingan siapa pun. FDR yang mengadakan rapat seminggu sebelumnya (14 Mei 1948), kemudian mencoba menyodorkan program yang ditujukan kepada partai-partai lain. Isinya cukup moderat, antara lain FDR meminta agar penghasilan petani dan buruh diperbaiki dan rakyat diikutkan dalam usaha-usaha perbaikan. Kepada pengungsi, korban perang, dan tentara hijrah supaya diberikan perawatan lebih baik. Selain itu, ide-ide dasar FDR tetap diperjuangkan, antara lain pertahanan rakyat dengan mempersenjatai rakyat di samping tentara. Juga diadakan pembersihan-pembersihan agar terbina negara merdeka yang bebas dari pengaruh kekuasaan raksasa asing, termasuk politik luar negeri yang bebas dari pengaruh yang sama.[29] Maksudnya, bersih dari pengaruh Blok Barat.

Memang pada 20 Mei 1948, FDR bersama PNI dan Masjumi mengeluarkan pernyataan bersama. Dalam pernyataan bersama itu, diserukan persatuan sikap, program, dan aksi agar pembinaan Indonesia merdeka dan demokratis dapat tercapai. Juga dianjurkan untuk menghindari perbedaan-perbedaan antara organisasi-organisasi dan perlunya kerja sama yang erat.[30] Pendeknya, secara formal dan terbuka, partai-partai yang ada bersedia untuk bekerja sama

demi kepentingan kemerdekaan. Akhir Mei, Perdana Menteri Hatta mengadakan kontak dengan pimpinan-pimpinan partai serta mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan perubahan kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer kembali. Setidak-tidaknya suatu *reshuffle* kabinet. Setelah diadakan pembicaraan-pembicaraan mendalam, ternyata terdapat perbedaan cara dalam usaha mencapai Indonesia merdeka dan demokratis. Pihak FDR menginginkan agar kabinet membubarkan diri dan Amir kembali. Sekurang-kurangnya, Amir tetap menjabat sebagai Menteri Pertahanan (yang dijabat sejak akhir 1945). Pihak Masjumi tentu saja menolak.[31]

Pada 31 Mei diadakan pertemuan antara Perdana Menteri Hatta dan Masjumi, PNI, PS, PSI, PKI, PBI, GPII, BKRI, Parkindo, serta Partai Katolik. Mereka membicarakan susunan kabinet dan situasi politik dalam dan luar negeri. Setelah semua wakil berbicara selama enam jam, mereka sepakat untuk menyusun Program Nasional dan membentuk sebuah panitia kecil di bawah pimpinan Mr. Tambunan dari Parkindo (Partai Kristen Indonesia). Semua partai bertanggung jawab terhadap penyusunan Program Nasional ini. Dari hasil pertemuan, akan ditentukan bagaimana bentuk kabinet akan diselesaikan. Program ini kemudian akan diserahkan kepada pemerintah. Pada 16 Juni, Panitia Penyusunan Program Nasional yang terdiri dari Mr. Amir Sjarifudin (PS),

Aidit (PKI), Setiadjid (PBI), Mr. Suyono Hadinoto (PNI), Maruto Nitimiharjo (Partai Rakyat), Saleh Suaidy (Masjumi), dan Mr. Tambunan (Parkindo) dapat mengumumkan hasil-hasilnya.[32] Sebagaimana sifat Program Nasional, program yang diumumkan ialah program kompromi. Dalam program ini, FDR mendapatkan konsesi-konsesi, antara lain pernyataan bahwa pemerintah seharusnya menerima pengakuan dari negara-negara lain terhadap RI tanpa memandang ideologinya (dalam hal ini dihubungkan dengan persoalan Soeripno). Dalam soal pertahanan, diakui pula prinsip pertahanan rakyat (*people's defence*) tempat tentara dan rakyat bersama-sama menyelenggarakannya. Dalam rangka penyempurnaan pertahanan rakyat, pelatihan-pelatihan dan pengetahuan pertahanan bagi rakyat diselenggarakan pula. Hanya ide mempersenjatai rakyat (lihat usul FDR, 14 Mei) tidak berhasil dimasukkan oleh FDR. Dalam bidang ekonomi, antara lain ekonomi nasional, diwujudkan dan bebas dari kekuasaan asing, sedangkan FDR memakai modal asing raksasa (Amerika Serikat). Jadi, prinsip membersihkan ekonomi dari modal asing secara umum tanpa menyangkutkannya dalam kancah perang dingin, dapat diterima. Mengenai tuntutan tanah untuk petani, Program Nasional menyatakan bahwa akan diusahakan agar petani mendapatkan tanah yang diambil dari *erfpacht* dan konsesi-konsesi tanah yang tidak

terpakai (kemudian bagian ini ditambah dengan tanah-tanah dari tanah partikelir). Prinsip penghapusan *mindring*, ijon, dan lain-lain juga diterima dalam Program Nasional.[33] Sebenarnya, secara teoretis program perjuangan FDR banyak yang berhasil di dalam Program Nasional.

Pada 5 Juli diadakan lagi rapat partai-partai yang diperluas dengan Permai, Gerakan Revolusi Rakyat, Wanita Rakyat, Acoma, dan PKI Merah. Pada 14 Juli Program Nasional selesai. Kemudian, 20 partai, yaitu PKI, Partai Buruh Merdeka, Partai Rakyat Jelata, Acoma, PSII, BKPRI, Gerindo, Wanita Rakyat, PBI, PKI (Merah), Parkindo, Permai, Partai Rakyat, PNI, BPRI, Masjumi, PKRI, Partai Sosialis, GPII, dan PSI mengeluarkan pernyataan bersama bahwa mereka menyetujui Program Nasional.

Pemerintah membicarakan Program Nasional dan kabinet menerimanya pada 26 Juli. Keesokan harinya, Perdana Menteri Hatta berbicara dengan wakil-wakil dari 20 partai. Di sana dinyatakan bahwa pemerintah menerima dan menyetujui Program Nasional. Hanya, Program Nasional ada yang dapat dilaksanakan segera, ada pula yang baru dilaksanakan kemudian hari. Akan tetapi, terdapat hal-hal yang seharusnya dapat dikerjakan sekarang karena suatu hal, baru dapat dilakukan kemudian hari.[34]

Secara teoretis (akhir Juli 1948), telah terjadi kata sepakat di antara partai-partai tentang Program Nasional. Perbedaan-perbedaan interpretasi tentang

bagaimana pelaksanaannya membuat program ini menjadi satu di antara beratus-ratus rencana—bertujuan memperbaiki nasib negara dan bangsa—yang tidak pernah dilaksanakan. Dia menjadi dokumen sejarah yang dihasilkan melalui pembicaraan beratus-ratus jam pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Sementara itu, kekacauan berjalan terus di luar meja diskusi. Masjumi ingin agar kabinet presidensial dipertahankan. PNI ingin agar Kabinet Hatta bertahan dan hanya diperlukan *reshuffle* kabinet. Di lain sisi, pemuda-pemuda makin kacau balau dan frustrasi ketika pemimpin-pemimpin ini berdiskusi.

Rencana-Rencana di Luar Meja Diskusi

Sejak Kabinet Amir jatuh, pihak FDR menyadari bahwa mimpi-mimpi mereka tentang kekuasaan dan politik telah berakhir. Sekarang mereka harus menghadapi realitas pahit dalam usaha-usaha memperjuangkan politik mereka. Pada akhir Februari, FDR mengadakan sidang lengkap dan merumuskan rencana-rencana sebagai berikut.

1. Kabinet presidensial harus dibubarkan dan diganti selekas-lekasnya menjadi kabinet parlementer sebagaimana dijanjikan wakil presiden pada pertemuan dengan FDR pada 24–26 Januari 1948 (jika mungkin dalam waktu sebulan), kabinet parlementer harus dibentuk oleh FDR.

2. Kabinet sekarang bukan kabinet ahli, melainkan kabinet Masjumi yang ditutupi oleh Wakil Presiden Hatta. Dengan dalih apa pun, FDR tidak dapat menerima kabinet Masjumi karena pemerintah berbau agama dan pemimpin agama Islam dapat bertindak .... Jelas bahwa prinsip sosialisme dan komunisme bertentangan dengan agama.
3. Kabinet pasti tidak mampu melaksanakan empat programnya, seperti juga ia tidak memenuhi syarat (lihat statemen Sayap Kiri).
4. FDR tidak mengizinkan Amir Sjarifudin menjadi Ketua delegasi dan Amir harus mengundurkan diri. Amir harus kembali ke dalam kabinet sekurang-kurangnya sebagai Menteri Pertahanan. Dari sana, kita mempertahankan posisi-posisi kunci dan dapat membiayai partai kita. Amir telah bekerja amat baik untuk partai.
5. Kita harus menjelaskan
   a. siapakah yang sebenarnya memecah belah rakyat?
   b. mengapa Kabinet Amir bubar?
   c. Mengapa FDR tidak turut serta dalam Kabinet Hatta?
   d. dalam soal persatuan nasional, kita tetap berusaha untuk mewujudkannya dengan syarat yang menguntungkan persatuan tadi serta juga sejarah dan ideologi kita;

e. syarat mutlak untuk mempertahankan kemerdekaan nasional ialah dengan aksi-aksi konkret buruh, tani, dan pemuda; kita harus mempergunakan pernyataan FDR sebagai pegangan kita.

6. Cara-cara melaksanakan kampanye untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam tingkat pertama adalah
   a. aksi-aksi di daerah harus disesuaikan dengan situasi;
   b. aksi-aksi di kota (buruh dan pemuda) harus sesuai dengan aksi-aksi yang dijalankan di desa-desa;
   c. dalam keadaan sekarang dan pertimbangan *punt* ayat a, waktunya belum tiba untuk melancarkan pemogokan dan boikot, apabila waktunya telah tiba instruksi akan diumumkan;
   d. aksi-aksi sekarang diarahkan pada propaganda dengan cara pertemuan-pertemuan umum; pertemuan tertutup; pertemuan bersama dengan partai-partai dan organisasi-organisasi lain—seperti PNI, PSII, Masjumi, Parkindo, BPRI; pertemuan dengan pejabat pemerintah, polisi, dan tentara terutama dengan bawahan; kampanye pers, pamflet, poster, dan radio; serta cara-cara propaganda lain;

e. penerimaan anggota-anggota baru secara besar, terutama setelah pertemuan-pertemuan;
f. dalam propaganda, agama jangan dihina; sebaliknya, harus ditekankan kepada pemeluk agama bahwa mereka harus menjaga kesucian agamanya; kita harus waspada agar agama jangan digunakan oleh pimpinan-pimpinannya untuk kepentingan mereka sendiri; hal ini berarti bahwa FDR setuju dengan ajaran agama dengan ... *delicate teaching*; akan tetapi, tujuan sosialis-komunis merupakan tujuan ideal kita; jika kekuasaan telah ada di tangan kita, semuanya akan beres.

7. Semua pertemuan dalam *punt* 6 ayat d (a–d) harus diselenggarakan untuk keuntungan FDR dan bukan untuk kepentingan partai lain walaupun pertemuannya tidak diselenggarakan oleh semua partai dari FDR.
8. Kelompok-kelompok yang memecahkan persatuan aksi buruh, petani, dan pemuda harus diserang dalam berbagai segi, pemerintahan, parlemen, organisasi massa, sarekat buruh, BTI, dan lain-lain.
9. Menurut pasal 28 UUD, anggota tentara tidak dilarang untuk ikut demonstrasi sebagai warga negara biasa.

10. Kita harus waspada dengan kaum radikal kiri (kelompok yang mencoba untuk menggulingkan pemerintah pada 1946) supaya mereka tidak mengambil keuntungan dengan membuka kedok dan usaha-usaha kita.
11. Di samping hal-hal yang telah dinyatakan sebelumnya, seperti dalam poin 6, aksi-aksi ilegal dan positif harus diambil.
    a. Menimbulkan kekacauan di mana-mana, selama kabinet Masjumi masih memerintah dengan mengerahkan gerombolan-gerombolan kriminal untuk *plunder* serta merampok secara intensif siang dan malam. Polisi tidak cukup kuat untuk menumpasnya. Jika hal ini dapat dilaksanakan dengan efisien dan tepat, seluruh rakyat akan hidup dalam ketakutan yang tepat. Akibatnya, rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah.
    b. Tindakan-tindakan keras harus dijalankan, seperti menculik, kalau perlu terhadap orang-orang (termasuk mereka yang keluar dari FDR) yang menentang rencana FDR, Partai Buruh Merdeka, Sarekat Buruh Gula, dan lain-lain.

Keputusan sidang *ad interim* 5 Februari 1948 (kelanjutan sidang pleno 26–27 Januari 1948)

Sekretaris Umum
FDR (Sayap Kiri)
Partai Buruh
Partai Sosialis
Partai Komunis Indonesia
Pesindo

Perkembangan-perkembangan politik di dalam negeri memperlihatkan bahwa pemerintahan Hatta cukup kuat dan tidak roboh karena agitasi-agitasi FDR yang mulai dijalankan. Pertengahan Juli, mereka membuat rencana baru — "Menginjak Tingkat Perjuangan Militer Baru" — walaupun pembicaraan-pembicaraan di antara partai-partai tentang Program Nasional masih berjalan. Dalam rencana perjuangan mereka yang baru, ditegaskan bahwa mereka akan menempuh dua cara perjuangan. Cara pertama ialah cara-cara terbuka sebagai berikut.

Mengegolkan Program Nasional dalam sidang BP KNIP menjadi program pemerintah. Karena itu, pemerintahan presidensial harus mundur dan digantikan pemerintahan parlementer. Ikut membina pembentukan Fron Nasional (FN), terutama di daerah-daerah. Kemudian, FN membuat kampanye untuk membubarkan kabinet sekarang. Jika usaha-usaha ini gagal, diadakan demonstrasi-demonstrasi besar buruh, petani, tentara, dan kelompok-kelompok lain yang akan dipengaruhi. Setelah itu, akan diadakan pemogokan umum dan kalau perlu de-

ngan kekerasan. Mereka juga menekankan disiplin dan pendampingan pimpinan-pimpinan tentara dengan kader-kader politik. Aksi-aksi ini hanya akan dijalankan sekiranya di suatu daerah mereka memiliki kekuatan militer yang cukup."

Jika usaha-usaha tersebut belum berhasil, FDR mempunyai pilihan kedua, yaitu menggunakan kekuatan militer. Menurut estimasi, 35% tentara berada di bawah pengaruh mereka. Jika bermain kartu dengan baik, ada kemungkinan kelompok-kelompok lain akan menyokong mereka, sekurang-kurangnya bersikap netral dalam setiap *clash* bersenjata.

Rencana-rencana mereka di bidang militer adalah sebagai berikut.

1. Menarik sebagian *our troops* dari daerah fron (daerah *status quo*).
    a. Brigade Martono dan Jadau akan diperintahkan untuk memperkuat internal kami.
    b. Jika kita dipaksa untuk mengirimkan tentara ke fron, pasukan-pasukan yang belum kita percayai sepenuhnya yang akan dikirim.
2. Memindahkan pasukan-pasukan kita ke daerah yang kita pandang strategis dan menarik daerah-daerah yang tidak dapat dipertahankan.
    a. Daerah Madiun akan dijadikan basis gerilya untuk perjuangan jangka panjang.

b. Kita harus menempatkan paling sedikit lima batalion di Madiun, yang harus sudah dilaksanakan bulan ini atau pada Agustus.
c. Kita harus membuat Solo sebagai *wild west* untuk menarik perhatian ke sana. Akan tetapi, kita harus mempunyai pasukan terkuat di sana sehingga *de facto* selalu di tangan kita.
d. Kedu, Yogyakarta, Pati, Semarang, Bojonegoro, Surabaya, dan Kediri (daerah-daerah Republik Indonesia) akan dijadikan daerah netral. Dalam pengertian, kalau mungkin kita akan memperkuatnya atau meninggalkannya. Pasukan di daerah-daerah ini tidak boleh melebihi dua batalion.
e. Kita akan meninggalkan seluruhnya daerah Malang, Banyumas, dan Pekalongan.

3. Di samping pasukan resmi sekarang, kita harus mulai membangun Pasukan Rakyat dalam pengertian seluas-luasnya. Umumnya, kita akan membangun pasukan-pasukan ini secara ilegal.
   a. Dalam setiap kecamatan yang kita anggap strategis letaknya, tempat pengaruh kita telah berakar, kelompok 60 orang prajurit di bawah pimpinan seorang komandan akan ditempatkan.
   b. Keenam puluh orang ini akan dipecah menjadi 6 atau 10 orang, kemudian dikirim ke desa-desa.

c. Pimpinan umum di kecamatan berada di bawah komando yang mewakili buruh, tani, dan komandan ke-60 prajurit.

4. Program tingkat kedua akan ditentukan lebih lanjut sesuai dengan keadaan. Kita harus menyadari sebelumnya atas Program Nasional kita, terutama berhubungan dengan *agrarian reform*, pertahanan rakyat, dan perjuangan buruh.[35]

Menurut keterangan Hatta,[36] pemerintah mengetahui rencana PKI sebelumnya karena seorang perwira yang setia kepada pemerintah telah membocorkan rencana tersebut kepada atasannya. Menurut sumber-sumber intelijen tentara, PKI akan melancarkan rencana militer pada 1 November 1948. Hatta membiarkannya dan hanya menginstruksikan kepada tentara untuk bersiap-siap. Sementara itu, program rasionalisasi untuk memotong pengaruh komunis di kalangan laskar berjalan terus.

Seiring dengan itu, pertentangan antara FDR dan lawan-lawannya makin menghebat. FDR menyebarkan propaganda-propagandanya memakai mobil unit keliling[37] yang amat hebat dan mengesankan pada waktu itu. Di suatu tempat diadakan rapat umum oleh kedua belah pihak, di situ dikacaukan oleh lawan-lawannya. Akibatnya, FDR dicap sebagai Fron Demoralisasi Rakyat atau sebagai kelompok yang menginginkan *for the Dutch return*.[38] Situasi

tambah lama tambah kacau dan panas. Beberapa isu pokok yang menjadi medan sengketa antara FDR dan lawan-lawannya akan kita lihat berikutnya.

Rasionalisasi

Kesadaran perlunya perbaikan dalam sistem organisasi tentara dirasakan sejak permulaan berdirinya Republik Indonesia. Dalam Kabinet Amir, rencana ini dicetuskan dalam Mosi Baharoedin yang diterima oleh BP KNIP. Akan tetapi, Hatta merupakan orang yang harus melaksanakan rencana rasionalisasi, suatu hal yang tidak populer.

Pisau cukur Hatta mulai bekerja pada akhir Februari dengan keluarnya Penetapan Presiden No. 9, 27 Februari 1948. Berdasarkan ketetapan ini, reorganisasi tentara dilakukan pada Kementerian Pertahanan maupun pada Markas Besar Angkatan Perang. Dalam Kementerian Pertahanan dibentuk Staf Umum Angkatan Perang dengan pimpinan Komodor Surjadarma dan Kolonel Simatupang (Wakil). Sementara itu, Jenderal Sudirman ditunjuk sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Mobil dan Jenderal Mayor Nasution sebagai Wakilnya. Jenderal Sudirman dan stafnya bertugas memimpin secara taktis dan operasional rencana-rencana lebih lanjut. Dengan perubahan tersebut, pucuk pimpinan TNI dan Gabungan Kepala Staf dibubarkan.[39]

Tindakan berikutnya datang dua bulan kemudian, dengan keluarnya Penetapan Presiden No. 14 (4 Mei 1948), yang menegaskan pelaksanaan teknis rasionalisasi di kalangan tentara. Penpres menyatakan bahwa di Republik Indonesia dibentuk dua komando tentara—Komando Sumatra dan Jawa—yang mulai berlaku pada 15 Mei 1948. Ditegaskan pula bahwa pangkat-pangkat di dalam ketentaraan diatur kembali. Sebagai pedoman, pangkat-pangkat diturunkan setingkat[40] agar antara pangkat jabatan dan pangkat sebenarnya seimbang. Sejumlah perwira diberhentikan dari jabatannya dan diangkat sebagai perwira cadangan (*opsir reserve*).

Penpres menetapkan pula bahwa di Pulau Jawa diadakan reorganisasi tentara. Ketujuh divisi yang ada di Jawa dilebur menjadi dua divisi dengan diadakan penetapan-penetapan baru. Divisi I baru terdiri dari peleburan Divisi (lama) I-II-III, sedangkan Divisi II (baru) dibentuk atas peleburan Divisi (lama) V-VI-VII. Sementara itu, Divisi I dan V menjadi Kesatuan Reserve Umum. Dalam hal ini, sejak 15 Mei 1948 TNI Masyarakat dibubarkan. Tidak lama kemudian, pada 29 Mei 1948, Gubernur Militer Daerah Militer Surakarta di bawah pimpinan Wikana ditiadakan. Tugas-tugasnya diambil alih Dewan Pertahanan Daerah Surakarta.[41]

Di samping reorganisasi ketentaraan, rasionalisasi bertujuan untuk mengalihkan tenaga-tenaga

produktif di sektor pertahanan ke sektor-sektor produksi. Menurut Hatta, ada tiga cara untuk melakukan hal tersebut.

1. Melepaskan mereka yang ingin kembali kepada pekerjaan semula (guru, swasta).
2. Menyerahkan eks tentara kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda untuk dimanfaatkan lebih lanjut.
3. Mengembalikan seratus ribu orang ke dalam masyarakat desa.

Hatta melihat bahwa di Indonesia terdapat beribu-ribu desa. Jika setiap desa menampung mereka sebanyak sepuluh orang pemuda (yang kemudian dimanfaatkan sebagai penjaga keamanan dan lain-lain), persoalan ini dapat diselesaikan. Untuk itu, mereka akan mendapatkan uang ganti jabatan sebanyak tiga bulan gaji.

Pada waktu itu, anggota Angkatan Perang Indonesia sebanyak 463.000 orang dan tidak dapat dibelanjai oleh negara. Dengan memperkecil Angkatan Perang, kemudian menyusunnya (melalui reorganisasi tentara), Hatta percaya bahwa efektivitas mereka akan bertambah. Prinsip *people's defence* tetap dijalankan. Akan tetapi, pertahanan ini tidak menarik orang dari sumber-sumber kerjanya sehingga memperkecil tenaga produksi.[42]

Jika rencana rasionalisasi berjalan sesuai dengan rencana, FDR merupakan golongan yang pa-

ling dirugikan. Dengan sistem tentara komando yang tidak dipecah-pecah oleh politik merupakan suatu *set back* bagi FDR karena sejak 1945 mereka telah membina dan memasukkan opsir-opsir pro-FDR ke dalam pucuk pimpinan. Menurut taksiran mereka, 35% tentara berada di pihak mereka. Apalagi di beberapa kesatuan, mereka merupakan faktor dominan.

Pukulan pertama ketika TNI Masyarakat dibubarkan praktis datang dari FDR. TNI Masyarakat merupakan kelanjutan Biro Perjuangan yang didominasi Jenderal Mayor Djoko Soedjono dan Jenderal Mayor Ir. Sakirman. Senjata-senjata terbaik diberikan kepada TNI Masyarakat, dengan harapan pada akhirnya kelompok-kelompok bersenjata yang telah dipengaruhi, dapat mereka kuasai.

Pengaruh FDR juga amat kuat di kalangan Divisi IV Senopati, yang berjumlah kira-kira 5.000 orang. Setengah pasukan ini berasal dari Pesindo.[43] Daerah Divisi IV terutama berada di Solo, yang strategis waktu itu. Dalam program rasionalisasi, Divisi IV dijadikan Kesatuan Reserve Umum bersama-sama dengan Divisi I (Siliwangi). Panglimanya, Jenderal Mayor Sutarto, dijadikan perwira cadangan (*opsir reserve*).

Apa pun latar belakang dan penjelasan pemerintah tentang rasionalisasi, pihak FDR selalu merasakan bahwa rasionalisasi terutama ditujukan ke-

pada mereka dan mereka dirugikan. Hal ini disadari oleh pemerintahan Hatta. Karena itu, "pisau cukur" pertama tidak ditujukan kepada kelompok-kelompok di mana pengaruh FDR sangat kuat. Rasionalisasi terutama ditujukan kepada pasukan-pasukan di mana pengaruh FDR paling lemah. Laskar pertama yang terkena rasionalisasi ialah Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia di bawah Bung Tomo. Grup ini anti-Amir dan bergabung ke dalam PP Tan Malaka. Laskar yang bergerak di Solo ini menolak menyerah, yang menjadi tantangan program rasionalisasi Hatta. Jika pemerintah tidak berhasil "membubarkannya", seluruh program akan berantakan. Pada 27 Maret 1948, detasemen tentara paling berdisiplin dan dihormati—Tentara Pelajar—dengan bantuan satuan-satuan polisi bergerak ke barak barisan penentang ini. Mereka memakai baju putih sebagai lambang kemurnian mereka. Pertempuran mengepung barak-barak mereka terjadi di Solo. Setelah dua hari, Tentara Pelajar berhasil melucuti mereka.[44]

Pembersihan juga ditujukan kepada Letkol Mardjuki yang menyalahgunakan statusnya untuk melakukan tindakan sewenang-wenang. Dengan persetujuan Panglima Divisi IV, Achmadi dan Letkol Suadi menumpas grup-grup laskar yang merusak nama baik tentara. Mardjuki kemudian dihukum mati oleh Mayor Slamet Riyadi.[45]

Setelah pemerintah berhasil dalam *test case* ini, kesatuan-kesatuan lain yang lebih kecil patuh kepada program rasionalisasi dan reorganisasi tentara. Dalam kesatuan resmi, program ini dijalankan pada Divisi IV yang besar dan pengaruh FDR kurang. Kemudian, disusul dengan kesatuan-kesatuan lainnya. Hatta ingin menunjukkan bahwa kesatuan-kesatuan yang anti/non-FDR juga terkena programnya. Ketika Divisi Senopati diminta untuk menjalankan rasionalisasi, mereka menolak. Kolonel (dahulu Jenderal Mayor) Sutarto dengan dukungan sentimen massa yang terkena/antirasionalisasi dan FDR, tidak bersedia menjalankan program kabinet. Akhirnya, diadakan kompromi antara pemerintah pusat dan Divisi IV. Divisi IV dihapuskan dan bekas kesatuan ini dijadikan Komando Pertempuran Panembahan Senopati dengan Panglimanya Kolonel Sutarto.[46] Komando pertempuran ini terdiri dari lima brigade, dipimpin Letkol Suadi Suromiharjo, Sudiarto, A. Jadau, Iskandar, dan Suyoto (kecuali Iskandar, semua terlibat *Madiun Affair*), dengan 20 batalion.

Keadaan menegangkan makin menghebat setelah Juli (saat pertentangan politik menghebat sekali). Pada 2 Juli, pukul 19.30, Kolonel Sutarto ditembak dari belakang ketika ia memasuki rumahnya. Sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa yang membunuhnya. Akan tetapi, bagi mereka yang anti-

rasionalisasi, pembunuhan Kolonel Sutarto dianggap sebagai bagian dari program rasionalisasi Hatta.[47]

Ada beberapa motif kelompok-kelompok yang antirasionalisasi. Kelompok pertama secara jujur menganggap bahwa rasionalisasi akan memperlemah Republik Indonesia. Karena itu, mereka menentangnya. Kelompok kedua adalah mereka yang terkena rasionalisasi. Mereka tidak siap kembali ke masyarakat karena mereka merasa tidak lagi diperlukan oleh negara. Kembali ke masyarakat menjadi petani, buruh, ataupun orang swasta dianggap "hina" karena menjadi "prajurit" yang "gagah dan berbakti kepada nusa dan bangsa" merupakan puncak pengabdian. Kelompok ini merupakan golongan paling kecewa terhadap program rasionalisasi.[48] Kelompok ketiga adalah kelompok yang menampung keuntungan politik dari pelaksanaan rasionalisasi. Kelompok pertama dan kedua mencari kepemimpinan politik pada FDR, satu-satunya golongan politik yang militan menentang program pemerintah.

Menurut Hatta, pada Juni 60.000 anggota tentara telah didemobilisasi dan akan menyusul 40.000 lagi. Ia mengakui bahwa persoalan terbesar ialah rintangan psikologis karena kembali ke desa-desa menanam singkong serta membuat saluran-saluran dan tiang-tiang listrik dianggap sebagai romusha.[49] Satu hal lebih menyulitkan adalah korban rasionalisasi nasibnya terkatung-katung dan badan penampungnya menjadi badan-badan sosial.[50]

FDR dengan mudah mempermainkan perasaan korban rasionalisasi. Kisah-kisah tentang "habis manis sepah dibuang" tersebar dan cerita-cerita burung bahwa rasionalisasi bertujuan untuk memperlemah tentara dan rakyat beredar. Sekiranya pertahanan rakyat telah dilemahkan, Republik Indonesia akan diserahkan kepada Belanda.[51] Keluar, pihak FDR menyatakan antirasionalisasi dan mengusulkan untuk memperbesar tenaga perang dengan jalan memperbaiki organisasi, mempersenjatai rakyat, dan membina tentara revolusi.[52]

Pemogokan Delanggu[53]

Di samping di bidang kelaskaran, di bidang perburuhan dan pertanian, PKI/FDR memiliki pengaruh yang kuat. Pengaruh ini terutama berakar pada organisasi BTI dan SOBSI. Waktu itu, SOBSI mempunyai anggota kira-kira 200.000–300.000 orang. Dalam perjuangan politik FDR, kekuatan-kekuatan ini akan digunakan. Salah satu konfrontasi FDR melawan pemerintah terjadi di Delanggu, sebuah daerah tempat negara mengusahakan penanaman kapas dan pabrik goni (karung). Daerah ini termasuk "lumayan" dan tidak terlalu miskin.

Dengan didudukinya daerah-daerah Republik Indonesia oleh Belanda—terutama daerah-daerah subur dan daerah-daerah industri kecil—persoalan

makanan menjadi gawat. Blokade Belanda, mengalirnya pengungsi, serta tekanan penduduk yang kuat membawa persoalan-persoalan baru. Penduduk ingin mengambil tanah-tanah konversi (milik asing maupun milik kerajaan Solo dan Yogya). Padahal, Republik Indonesia menjamin tanah milik perkebunan-perkebunan asing dalam Manifes 1 November 1945. Pemerintah menyadari bahwa persoalan ini perlu ditinjau karena kurang sesuai dengan alam kemerdekaan. Tekanan terhadap persoalan tanah atau tuntutan upah yang lebih baik serta kekurangan di bidang sandang dan pangan, akhirnya berkecamuk dalam Pemogokan Delanggu.

Persoalan-persoalan perselisihan buruh dan tuntutannya telah mulai pada Februari 1948. Pihak buruh di Delanggu dipimpin oleh Lembaga Buruh Tani (LBT), yang bernaung di bawah SOBSI. Pada 1947, mereka menuntut agar buruh tetap dan buruh lepas (musiman) diberikan gaji *in natura* (di samping uang) sebanyak 3 meter kain dan 20 kilogram (maksimum 35 kilogram) beras sekeluarga per bulan. Pemerintah pada prinsipnya setuju untuk meluluskan permintaan tersebut, tetapi timbulnya berbagai persoalan praktis menghalanginya. Misalnya, tidak adanya persediaan tekstil yang cukup serta kerugian-kerugian yang timbul dan membahayakan nasib perusahaan. Akibatnya, pertentangan makin meruncing. Pihak LBT kemudian memberikan ultimatum,

sekiranya tuntutan buruh tidak dipenuhi sampai 19 Juni, akan diadakan pemogokan. Pada 19 Juni, pukul 19.00, persoalan ini diambil alih SOBSI karena mereka tidak puas terhadap jawaban pemerintah. Padahal, pemerintah menyatakan bahwa Biro Tekstil Negara bersedia memberikan 30.000 meter bahan pakaian kepada kaum buruh (yang dituntut seluruhnya berjumlah 42.000 meter).

Pada 23 Juni, 15.567 buruh melakukan mogok di pabrik karung dan 7 perkebunan kapas. Meskipun begitu, mereka tetap harus apel setiap pagi. Barang siapa tidak apel pagi, tidak akan diberikan apa-apa sekiranya tuntutan buruh menang. Hari-hari pertama pemogokan diwarnai dengan perang pengumuman antara Menteri Kemakmuran, Sjafruddin Prawiranegara, melawan pihak SOBSI. Menurut menteri, pabrik goni di Delanggu tidak menguntungkan. Hasil per hektare kapas hanya 200 kilogram sementara BTN hanya menerima 37,9 kilogram sebagai hasil jadi. Apalagi harganya Rp 22,31 sehingga hasil per hektare hanya 37,9 x 22,31 = Rp 845,55. Biaya eksploitasi sejumlah Rp 1.186,35. Jadi, pemerintah rugi Rp 440,80 per hektare dan dari luas 450 hektare, pemerintah merugi Rp 201.004,80. Sebaliknya, buruh menyatakan bahwa produksi per hektare 200 kilogram dan BTN mendapat 100 kilogram. Harga per kilogram Rp 150,00. Jadi, tiap tahun hasil 1 hektare ialah 2 kali panen x 100 (kg) x Rp 150,00 = Rp 30.000,00 (versi pemerintah hanya Rp 845,55).

Angka-angka yang diajukan saling berbeda, bagaikan langit dan bumi. Pihak Sarbupri (Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia) memberikan angka-angka yang besar sebagai hasil perusahaan, tetapi karena korupsi, tidak diketahui ke mana hasilnya.[54] Tentang jumlah buruh, juga terdapat perbedaan mencolok antara pengumuman resmi pemerintah dan buruh. Pemerintah menyatakan bahwa jumlah buruh BTN sekitar 80.000 orang, sedangkan buruh menyatakan hanya 13.000 orang.

Sengketa persoalan beras dan tekstil bagi buruh merembet menjadi persoalan politik di kabinet dan KNIP. Pihak FDR membenarkan pemogokan ini karena mogok merupakan senjata buruh yang terakhir. Mereka menyangkal bahwa FDR merupakan "aktor intelektual" pemogokan tersebut, seperti dinyatakan Mr. Luat Siregar (PKI). SOBSI dengan lantang menyatakan bahwa tugas buruh untuk menambah produksi nasional dan pertahanan dapat dipenuhi jika hak-hak buruh di lapangan sosial dan ekonomi terjamin. SOBSI mengecam, ... "Dibiarkan mengalirkan bahan makanan yang penting bagi rakyat ke daerah pendudukan, seperti beras, gula, tembakau, dan lain-lain, penukaran barang-barang yang tidak dibutuhkan rakyat dan harganya mahal, dibiarkannya catut dan korupsi besar, sedangkan buruh yang dianggap mencuri sepotong kayu bakar dipukuli dan dilepas, dipersukarnya perdagangan-per-

dagangan kecil, dijalankannya aturan distribusi pemerintah di beberapa tempat dan adanya tindakan-tindakan yang melemahkan persiapan pertahanan rakyat dan menimbulkan pengertian seakan-akan tidak ada bahaya lagi bagi negara." SOBSI juga dengan gigih membela hak-hak buruh. Dalam situasi inflasi serta kenaikan harga-harga dan kekecewaan-kekecewaan massal, mereka berhasil menjadi "pahlawan" rakyat.

Tindakan pemogokan atas nama hak-hak buruh dikecam dengan hebat oleh golongan-golongan lain. Mereka bertanya, mengapa dalam keadaan begini sulit ketika persoalan *to be or not to be* bagi Republik, SOBSI masih mencoba menarik keuntungan politik. Orang-orang bertanya, ... "Lupakah kita wejangan Pak Alimin waktu kaum buruh bergelora menghadapi pasal 14 persetujuan Linggajati, 'jangan mogok, negara dalam bahaya,' katanya. Sekarang, setelah Sayap Kiri tidak lagi mengemudikan negara, setelah SOBSI tidak lagi menjadi tulang punggung pemerintah Sayap Kiri, pemimpin-pemimpin buruh FDR malah menganjurkan pemogokan saat negara dalam bahaya."

Di Badan Pekerja KNIP, perdebatan-perdebatan berjalan sengit. Pemerintah membentuk panitia *anquete* untuk mempelajari persoalan ini. Resolusi demi resolusi dilontarkan, yang satu atas nama hak-hak sementara yang lain atas nama kepentingan na-

sional bahwa negara dalam bahaya. Menteri sendiri mengakui bahwa korupsi mungkin saja ada, tetapi ia tetap meminta pengertian yang realistis.

Pada 10 Juli, keadaan makin gawat. Petani-petani yang bergabung dalam Sarekat Tani Islam Indonesia (STII) tetap bekerja dengan alasan untuk menyelamatkan tanaman-tanaman kapas yang masih muda. Menurut sumber-sumber STII, suatu hari 500 orang buruh SOBSI mengeroyok petani-petani STII yang sedang bekerja. Insiden-insiden timbul karena pihak Hizbullah yang bersenjata melawan pemogok-pemogok ini. Sembilan orang luka-luka (dua dari pihak pemogok). Seruan-seruan untuk melokalisasi pemogokan dan menyelesaikannya datang dari pihak-pihak "netral".[55] Suara-suara agar TNI turun tangan kerap terdengar (karena adanya pasukan-pasukan yang terlibat dalam pro dan anti). Pembakaran rumah, penculikan, dan pemukulan terjadi selama pemogokan. Suasana pun menjadi gawat sekali. Letjen Sudirman sebagai Panglima Besar Tentara yang berwibawa menjelaskan secara gamblang sikap APRI dalam persoalan ini. Letjen Sudirman menjelaskan bahwa wakil presiden telah memerintahkan APRI untuk menjaga keamanan, dengan mengirimkan satuan-satuan tentara. Meskipun demikian, APRI berada di luar soal-soal pemogokan. "Jika di sana masih terjadi perselisihan senjata, penculikan, pembakaran rumah, dan lain-lain, pihak

tentara mempunyai hak sepenuhnya untuk bertindak. Malahan jika keamanan itu tidak juga dapat dipelihara akan terpaksa diumumkannya—pemerintahan militer. Sekarang kepada barisan-barisan bersenjata, seperti Pesindo, Hizbullah, dan sebagainya dilarang mengadakan penjagaan." Beliau juga menjelaskan bahwa pelarangan demonstrasi pemeliharaan tanaman kapas di ladang, pemogokan, dan lain-lain, dijalankan sampai ada keputusan pemerintah. Letjen Sudirman dalam suasana gawat ini menegaskan kembali bahwa APRI merupakan kesatuan yang tidak ikut campur dalam persoalan-persoalan politik praktis.[56]

Posisi pemerintah kuat dengan sikap yang tegas dan wajar. Di satu pihak, pemerintah menyatakan bersedia menerima tuntutan-tuntutan buruh. Di lain pihak, pemerintah menegaskan adanya realitas-realitas yang harus dipahami. Akhirnya, tokoh-tokoh buruh datang menemui Hatta dan dengan cara *saving face* penyelesaian tercapai. Hatta meminta kepada mereka untuk terus bekerja. Sementara itu, pihak FDR setuju dan meminta agar tuntutan mereka diakui sebagai "kebenaran dan keadilan". Pokok-pokok persetujuan tersebut adalah berikut ini.

1. Pemerintah memberikan 2 meter tekstil kepada buruh tetap (bulanan), buruh harian tetap, pekerja borongan tetap, dan pekerja musiman yang bersifat tetap di perkebunan yang dikerja-

kan 100% oleh BTN. Kepada pemaruh akan dipelajari oleh Komisi Angket BP KNIP dan panitia penyelidik yang dibentuk oleh PN buruh.

2. Pembagian beras segera dilakukan kepada pekerja bulanan. Kepada pemborong dan buruh harian akan diberikan 400 gram dan 200 gram buat keluarga selama mereka masuk kerja dengan harga Rp 1,00 per kilogram. Kepada buruh-buruh lain, akan dibayar sesuai dengan upah di perusahaan swasta. Sebagian akan dibayarkan berupa uang dan lainnya berupa beras. Jika beras tidak mencukupi, akan dibayar dengan uang.

Mulai 18 Juli, pukul 7.00, Pemogokan Delanggu berakhir. Perdana Menteri Hatta percaya bahwa pemerintah menang, seperti juga FDR percaya mereka yang menang. Menurut Hatta, FDR melancarkan pemogokan pada waktu yang tidak tepat, yaitu menjelang lebaran dan bulan puasa. Padahal, rakyat pada waktu itu justru memerlukan uang.[57] Senjata mogok FDR rupa-rupanya tidak menumbangkan Kabinet "pisau cukur" Hatta.

Persoalan Soeripno dan Politik Luar Negeri

Juni–Juli–Agustus merupakan bulan-bulan panas bagi Republik Indonesia. Persoalan rasionalisasi masih belum beres. Pembunuhan politik (terhadap Ko-

lonel Sutarto), pembakaran rumah dan pengeroyokan-pengeroyokan (dalam soal Pemogokan Delanggu), perang pers/poster, pembakaran stan pertambangan di pasar malam dalam menyambut ulang tahun ke-3 Republik Indonesia, serta culik-menculik (Barisan Banteng versus Pesindo) menghantui suasana Republik Indonesia. Belum lagi tekanan-tekanan Belanda, inflasi, dan demoralisasi.

Dalam keadaan ini timbul persoalan baru—persoalan Soeripno. Soeripno adalah seorang tokoh muda komunis yang meninggalkan Indonesia pada pertengahan 1947 sebagai utusan Indonesia ke Kongres World Federation of Democratic Youth di Praha. Atas izin Menteri Luar Negeri Agus Salim, ia tetap tinggal di sana dan membuka kantor penerangan Indonesia. Ia juga bertindak sebagai wakil Indonesia untuk negara-negara Eropa Timur. Pada 25 Desember 1947, ia mendapatkan kuasa untuk mengadakan kontak dengan Uni Soviet di sana. Ia menerimanya pada Januari 1948 (masih Kabinet Amir). Pada 13 Januari, ia mengadakan kontak dengan Duta Besar Silin tentang kemungkinan-kemungkinan mengadakan hubungan konsuler antara Indonesia dan Rusia. Pembicaraan-pembicaraan berjalan lancar dan pada bulan itu disepakati pembukaan hubungan konsuler di antara kedua negara. Waktu itu pembicaraan-pembicaraan mengenai persoalan Renville sedang berlangsung. Pihak Amir me-

rasakan jika hubungan dengan Rusia diumumkan, sikap Amerika Serikat mungkin dapat dipengaruhi. Hatta yang menggantikan Amir mengambil sikap sama—mempetieskan persoalan hubungan Rusia–Indonesia yang telah disetujui pada Januari 1948[58] (waktu itu Perang Dingin sedang menghebat). Tiba-tiba pada 22 Mei 1948, Duta Besar Silin memberi tahu Soeripno bahwa Rusia telah meratifikasi persetujuan mereka. Persoalan ini tentu saja menempatkan pemerintahan Hatta pada suatu posisi yang sulit karena secara teoretis, Republik Indonesia merupakan negara merdeka (dalam pandangan Republik Indonesia) dan mempunyai politik bebas aktif. Akan tetapi, pada saat itu Indonesia sangat bergantung pada sokongan Amerika Serikat dalam menghadapi Belanda.[59] Sementara itu, hubungan Amerika Serikat–Rusia sedang memburuk, yang diikuti dengan blokade Berlin.

Belanda kemudian menggunakan permasalahan ini untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia dipengaruhi komunis (yang amat dibenci Amerika Serikat). Sementara itu, pers kiri menunjukkan bahwa pemerintahan Hatta merupakan "antek" imperialis Amerika Serikat serta tidak konsekuen menentang imperialisme. Untuk menanggapi hal ini, pernyataan pemerintah Indonesia simpang siur, mulai dari "tidak mengetahui" persoalan Soeripno hingga jawaban yang berbelit-belit. Sebaliknya, pihak

FDR mengadakan agitasi agar Indonesia menerima dan merealisasikan persetujuan Soeripno–Silin. Dalam batas-batas tertentu, pihak FDR berhasil mengegolkan ide-ide mereka. Misalnya, dalam Program Nasional Antarpartai yang diumumkan pada 23 Juni 1948. ... "Menerima tiap-tiap pengakuan atas Republik Indonesia yang sudah dinyatakan oleh negara-negara merdeka mana pun dengan tiada memandang ideologinya."

Pemerintah akhirnya memanggil pulang Duta Besar Soeripno untuk dimintai keterangan. Ia pun tiba di Bukittinggi. Setelah berdiam beberapa hari, ia pergi ke Yogyakarta dan tiba pada 11 Agustus 1948 bersama seorang sekretarisnya, Soeparto. Setelah memberikan laporan kepada Menteri Luar Negeri Agus Salim, Soeripno sebagai "orangnya" memberikan penjelasan-penjelasan. Pada 13 Agustus 1948 (baru tiba tiga hari), ia memberikan ceramah di hadapan pemuda-pemuda Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BKPRI) tentang persetujuannya. Dalam ceramahnya, ia memuji-muji Rusia dan mengakui Republik Indonesia serta tidak pernah mengakui kedaulatan Belanda di Indonesia.[60] Soeparto, yang ternyata Musso, juga membakar persoalan Rusia–Indonesia ini secara emosional. Ia menyatakan bahwa ia ikut melicinkan jalan bagi pengakuan tersebut. Hal ini penting karena Rusia merupakan satu-satunya negara yang ditakuti Amerika Serikat.[61] Ke-

mudian, timbul resolusi demi resolusi dari FDR yang meminta agar persetujuan dengan Rusia dilaksanakan. Mereka menyatakan bahwa Indonesia harus bergabung dengan Blok Rusia yang memimpin perjuangan anti-imperialis jika terjadi perang.[62]

Pemerintah yang diwakili Menteri Luar Negeri Agus Salim memberikan penjelasan. Ia menyatakan bahwa pengakuan unilateral dari negara mana pun akan disambut dengan gembira oleh Republik Indonesia. Jika pengakuan itu direalisasikan dengan pengiriman kapal dagang Rusia yang menembus blokade Belanda, akan diterima dengan senang hati. Indonesia tidak akan membubarkan persetujuan dengan luar negeri yang diadakan pada waktu-waktu sebelumnya. Pengakuan kedaulatan Belanda hanya simbolis belaka dalam rangka Renville. Demikian keterangan Agus Salim di muka sidang BP KNIP pada 16 September 1948.[63]

Perdana Menteri Hatta dalam sidang yang sama menjawab kecaman-kecaman golongan FDR tentang politik luar negeri Indonesia. Ia menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi subjek dalam politik pertentangan internasional dan bukannya menjadi objek. Kita berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri serta menentukan sikap sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya. Tentang kompromi-kompromi, ia mengatakan bahwa Rusia juga menjalankan kompromi dan kerja sama dengan negara-ne-

gara kapitalis ketika kaum fasis bangkit di Eropa. Bahkan, Rusia tidak segan-segan membuat pakta nonagresi dengan fasis Jerman.[64]

Demam Pengakuan dan Reorganisasi PKI

Soeripno kembali ke Indonesia pada 11 Agustus 1948 dengan seorang sekretarisnya, yang bernama Soeparto. Kedatangan mereka menimbulkan desas-desus, terutama tentang sekretaris Soeripno yang misterius. Dua hari kemudian, misteri ini terjawab. Pada 13 Agustus 1948, Soeripno bersama sekretarisnya menemui Presiden Soekarno. Begitu mereka bertemu, mereka berpelukan karena sebenarnya mereka telah saling mengenal berpuluh tahun lalu. Ternyata, Soeparto adalah Musso, senior politik Soekarno di Surabaya dahulu. Mereka telah saling kenal sejak Soekarno kos di rumah Tjokroaminoto. Musso sebagai pemimpin Sarekat Islam mengenal "pelajar" Soekarno yang masih muda. Seorang wartawan yang menyaksikan pertemuan itu menulis sebagai berikut. "Bung Karno memeluk Musso dan Musso memeluk Soekarno. Mata berlinang. Kegembiraan ketika itu rupanya tidak dapat mereka keluarkan dengan kata-kata. Hanya pandangan mata dan roman muka mereka menggambarkan kegembiraan itu. Sesudah penyambutan selesai, barulah Bung Karno berkata: Lho, kok masih awet muda? Jawab

Pak Musso: O, ya. Tentu saja. Ini memang semangat Moskow, semangat Moskow selamanya muda."

Sesudah upacara pendek itu, para tamu dipersilakan masuk ke kamar Bung Karno. Musso hendak duduk di sebuah kursi tidak diperkenankan. Ia ditarik duduk di kursi panjang di samping Soekarno. Pembicaraan pun mulai berjalan lancar. Dengan bangga Bung Karno menceritakan kepada Soeripno tentang pergaulannya dengan Musso pada masa lampau. Ia di antaranya menuturkan, "Musso ini dari dulu memang jago. Ia yang paling suka berkelahi. Ia memang jago pencak. Juga orang yang suka main musik. Kalau pidato ia akan *nyincing* lengan bajunya." Agak panjang lebar Bung Karno mengutarakan riwayat pergaulannya dengan Musso. Sebelum berpisah, Bung Karno meminta Musso untuk membantu memperkuat negara dan melancarkan revolusi. Musso menjawabnya tidak panjang, "Itu memang kewajiban saya. *Ik kom hier om orde te scheppen*."[65]

Sejarah memang lucu. Musso akhirnya melancarkan revolusi di dalam revolusi Indonesia. Sesudah berpeluk-pelukan dengan bercucuran air mata di istana presiden, 37 hari kemudian Musso berpidato tentang *quisling-quisling* dan penjual-penjual romusha Soekarno-Hatta. Sementara itu, Soekarno beragitasi tentang pilihan rakyat kepada Musso dan Soekarno-Hatta. *Ik kom hier om orde te scheppen* (saya kemari untuk membereskan).

Kedatangan Musso memiliki arti politis yang penting bagi gerakan komunis di Indonesia. Ia datang pertama kali ke Indonesia pada 1935 (jika kita menerima pendapat-pendapat resmi PKI) ketika Komintern mengubah garis politiknya secara drastis. Garis *co* dengan kapitalis karena bahaya fasisme. Pada 1947, Komintern (sekarang bernama Kominform) meninggalkan garis lunak dan kembali kepada garis keras. Orang yang "diutus" kembali ke Indonesia untuk menjelaskan kebijakan itu ialah Musso.

Suasana di Indonesia sedang kritis bagi kaum komunis. Garis lunak dan kerja sama dengan Belanda telah membawa PKI/FDR ke sudut berbahaya. Usaha-usaha untuk *come back* setelah Amir jatuh tidak berhasil. Kekuatan politik mereka perlahan-lahan dipreteli. Program rasionalisasi tetap berjalan walaupun di sana sini mereka berhasil menghambat perkembangannya. Pemogokan Delanggu tidak berhasil seperti yang mereka cita-citakan (walaupun tidak gagal total). Angkatan Perang di bawah Letjen Sudirman tetap berdiri di garis pemerintahan dan tidak mau dijadikan mangsa politik PKI.

Musso yang datang bagaikan "juru selamat" diterima dengan tangan terbuka. Dalam suasana frustrasi dan keputusasaan, pimpinan komunis Indonesia mencari pemimpin baru. Musso adalah orangnya. Ia datang sebagai seorang peniup suling dalam cerita Grimms dan tokoh-tokoh lain (Amir, Se-

tiadjid, Soeripno, Maruto Darusman, dan lain-lain) mengikutinya sebagai anak-anak yang patuh.

Jika kita melihat aktivitas-aktivitas Musso setelah kembali dari luar negeri, kita akan melihat acara-acaranya yang padat. Pada 11 Agustus 1948 ia tiba; 13 Agustus menemui Presiden Soekarno; 14 Agustus tulisannya dimuat di harian *Revolusioner*; 16 Agustus ia mengeluarkan "pesan-pesannya" dalam menyambut 17 Agustus dan sekitar tanggal tersebut berdiskusi dengan Masjumi, PNI, PS, dan GRR; 22 Agustus berpidato di Alun-Alun Yogya; 26–27 Agustus mengikuti Konferensi PKI tempat ia mengajukan tesis tentang *Jalan Baru untuk Republik Indonesia.*

Pasti di antara tanggal-tanggal tersebut ia mengadakan pembicaraan-pembicaraan internal dengan sesama komunis. Melihat hal ini, penulis menarik kesimpulan bahwa ia menuliskan rencana-rencananya (termasuk pidato *Jalan Baru*-nya) tidak di Indonesia, tetapi di luar negeri. Ia datang dengan sebuah konsep yang tegas dan tanpa penyesuaian dengan hasil orientasinya. Sikap "tukang berkelahinya" yang terlalu kaku, barangkali ikut menggagalkan rencana-rencananya.

Setelah kembali, seharusnya ia mengadakan pembicaraan-pembicaraan mendalam dengan tokoh-tokoh PKI/FDR untuk memberitahukan garis politik Komintern yang telah berubah. Kemudian, ia mengajukan rencana-rencana baru yang drastis.

Ide-ide Musso dituangkan dalam tesis *Jalan Baru untuk Republik Indonesia.*[66] Menurut Musso, PKI melakukan kesalahan-kesalahan prinsipal dalam perkembangannya, yang membuat situasi amat sulit bagi PKI. Di lapangan organisasi, kesalahan prinsipal PKI ialah PKI tidak dapat dengan cepat menangkap perubahan situasi yang terjadi setelah proklamasi.

Orang-orang komunis ilegal, setelah proklamasi, bukan mendirikan partai komunis yang memimpin revolusi, melainkan mendirikan tiga partai Marxis, yaitu Partai Sosialis Indonesia (Parsi—Amir Sjarifudin), Partai Buruh, dan PKI. Pekerjaan-pekerjaan di bidang pemerintahan/BP KNIP dan ketiga partai itu membuat kader-kader PKI tidak dapat mencurahkan konsentrasi mereka secara penuh. Akibatnya, timbul banyak kelemahan organisasi. PKI diposisikan di tempat tidak semestinya sehingga tradisi baik dan popularitas PKI berkurang. Kaum komunis amat membesar-besarkan kekuatan imperialisme dan mengecilkan kekuatan tenaga anti-imperialisme yang dipimpin Uni Soviet. Akhirnya, "kita" terlalu banyak memberikan konsesi kepada kaum imperialis dan borjuis. Akibat kesalahan-kesalahan ini, pengaruh PKI di kalangan kaum buruh dan tani menjadi lemah. Di kalangan pemuda, PKI memang kuat. Akan tetapi, karena Pesindo bukan organisasi fron PKI, pengaruh propaganda PKI di kalangan pemuda (juga wanita) terhalang. Hal yang

sama terjadi di kalangan prajurit karena adanya tiga partai Marxis.

Musso mengusulkan agar diadakan fusi antara PKI, Partai Buruh, dan Partai Sosialis menjadi PKI sehingga keruwetan-keruwetan dapat dihindarkan. Hal ini dilakukan untuk menampung mereka yang simpati kepada PKI, tetapi masih segan masuk (dan ditampung) dalam Lembaga Indonesia-Uni Soviet.

Di dalam lapangan politik luar negeri, Musso menyalahkan Partai Komunis Eropa yang masih menganjurkan kerja sama dengan kaum kapitalis setelah kaum fasis dikalahkan. Kesalahan ini dijalankan oleh Partai Komunis Inggris, Prancis, dan Belanda. Akibatnya, di Indonesia muncul kaum reformis Sjahrir dengan semboyan ... "bukan kemenangan militer yang dimaksudkan, tetapi kemenangan politik". Kaum komunis membiarkan berkembangnya ideologi yang sesat ini. "Kita" lupa bahwa revolusi nasional Indonesia sudah menjadi bagian dari revolusi proletar dunia yang dipimpin Uni Soviet. Karena itu, bagi revolusi nasional Indonesia tidak ada tempat, kecuali berpihak pada kekuatan anti-imperialis. Kesalahan lain ialah ketidakpahaman kaum komunis Indonesia terhadap perubahan kekuatan politik di Asia. Seiring dengan pendudukan Uni Soviet atas Manchuria, kekuatan imperialis Amerika, Inggris, dan Australia menjadi terikat. Pada saat itu, sebenarnya rakyat Indonesia memiliki banyak

kesempatan, tetapi malah memberikan konsesi-konsesi kepada kaum imperialis dengan Linggajati dan Renville (puncak kesalahan reaksioner). Kesalahan lainnya ialah Amir meletakkan jabatan sehingga membuka kesempatan bagi elemen-elemen borjuis dan komprador. Pemerintahan borjuis dan komprador selama enam bulan telah menjalankan penghapusan hak-hak demokrasi (mogok, misalnya), hak demonstrasi, politik agraria yang reaksioner, serta politik ekonomi yang antinasional. Dalam keadaan seperti ini, kaum komunis harus mengorganisasikan rakyat dan mengubah haluan politik pemerintah. Untuk lebih menjernihkan situasi, PKI harus membatalkan persetujuan Renville/Linggajati yang menjadi sumber keruwetan di antara pemimpin-pemimpin rakyat jelata.

> "Kaum komunis menolak persetujuan Linggajati dan Renville, bukannya karena Belanda terbukti tidak setia dan telah menginjak-injak persetujuan itu. Sekali-kali tidak. Komunis prinsipal menolak persetujuan Linggajati/dan Renville, karena persetujuan-persetujuan itu kalau dipraktikkan, akan mewujudkan negara yang pada hakikatnya sama saja dengan jajahan, yang berbeda dengan India, Myanmar, Filipina, dan jajahan-jajahan lain hanyalah kulitnya saja. Sebab itu PKI tetap bersemboyan 'Merdeka' sepenuh-penuhnya. Penolakan persetujuan Linggajati dan Renville berarti juga *self-critic* yang keras di kalangan PKI. Dan pengakuan salah ini harus dipopulerkan juga kepada rakyat banyak."

PKI juga menuntut terus hubungan dengan Uni Soviet. Satu hal terpenting ialah keberanian untuk meninggalkan ide politik *uni verband*. "INDONESIA MERDEKA SEPENUH-PENUHNYA."

Dalam persoalan politik dalam negeri, PKI harus menekankan perubahan personalia karena dengan personalia sekarang yang masih berbau penjajahan, tidak mungkin untuk menyusun aparat baru. Hal ini terutama ditujukan pada bidang-bidang pemerintahan dalam negeri, kepolisian, pengadilan, ketentaraan, dan alat-alat vital lainnya. Sebaliknya, kepada kaum buruh dan tani serta pekerja intelektual, diberikan penghargaan-penghargaan dan hak-hak demokrasi. Kepada kaum tani, hendaknya ditolong dengan membagi-bagikan tanah di desa, kemudian dikerjakan secara kolektif. Semboyan *Tanah untuk Kaum Tani* tidak mungkin dilaksanakan. Selain itu, sepuluh kelemahan dan kelalaian pemerintah harus segera diperbaiki.

Ide terpenting Musso dalam rangka "*grand* strategi" PKI ialah ide tentang Fron Nasional. Telah tiga tahun ide tentang Fron Nasional hanya ide di atas kertas. PKI memiliki keyakinan bahwa kelas buruh saja tidak dapat menyelesaikan revolusi nasional. Karena itu, diperlukan kerja sama dengan kelompok-kelompok lain. Kaum komunis sudah semestinya bersatu dengan anggota-anggota partai dan organisasi-organisasi lain dalam wadah Fron

Nasional. PKI harus dapat meyakinkan anggota-anggota lain terhadap kebenaran persatuan Fron Nasional.

Adanya Program Nasional yang telah disetujui partai-partai dapat dijadikan langkah pertama. Berbeda dengan ide-ide sebelumnya, keanggotaan Fron Nasional terbuka untuk pribadi-pribadi yang tidak berpartai. Fron Nasional dipilih dari bawah. Dalam situasi sekarang, PKI harus berdaya agar pemerintahan Fron Nasional segera menggantikan pemerintahan sekarang. Hanya pemerintahan semacam ini yang sanggup mengatasi kesukaran-kesukaran di dalam negeri serta menyusun perlawanan anti-imperialis dengan konsekuen.

Secara singkat, ide Musso terbagi tiga. Pertama, ia ingin membentuk sebuah Fron Nasional (yang dipimpin PKI). Kedua, ia ingin mengubah organisasi PKI menjadi partai Marxis-Leninis yang tunggal. Ketiga, ia ingin menyesuaikan garis partai dengan garis keras Komintern.

Ide pertama Musso tentang Fron Nasional dilontarkan dalam bentuk diskusi dengan partai-partai beberapa hari setiba ia di Yogyakarta. Tokoh-tokoh yang berbicara dalam diskusi partai-partai ini ialah Musso (PKI), Amir (PS), Maruto (GRR), Ali Sastroamidjojo (PNI), serta Sjamsudin (Masjumi). Dalam diskusi ini, Musso menyatakan bahwa kesalahan revolusi kita ialah karena kita bersifat defensif.

Ia mengutip Engels yang menyatakan bahwa revolusi akan gagal jika tidak diadakan perubahan radikal. Sementara itu, revolusi Indonesia tidak mengadakan perubahan seperti ini. Kesalahan kedua ialah pimpinan revolusi tidak berada di tengah kelas yang paling revolusioner, yaitu kelas buruh. Rakyat tidak selamanya salah dan tidak boleh disalahkan. Pihak yang harus disalahkan adalah pemimpin. Karena itu, kesalahan strategi ini harus segera diperbaiki.

Tentang Fron Nasional, Musso mengatakan bahwa tahap pertama ialah pemimpin semua partai harus mengadu otak dan membentuk komite untuk mendirikan Fron Nasional dan harus mempropagandakannya. Lalu, anggota-anggota partai secara individu memasuki Fron Nasional. Dengan demikian, Fron Nasional berakar dari bawah. Dengan dasar sokongan yang luas ini, perselisihan-perselisihan dapat dikurangi, demikian pula oposisi. Musso melihat perlunya mengubah kabinet serta mengupas kemelaratan dan korupsi. Apalagi kaum tani dan prajurit hampir telanjang di Jawa saat ini. Ia juga mengecam Renville dan meramalkan kemungkinan adanya aksi militer Belanda.

Pada diskusi itu, Amir berbicara dalam rangka ide-ide baru yang dibawa Musso tentang ketidakkonsekuenan pimpinan revolusi, tidak tepatnya kelas yang memimpin, serta tidak radikalnya dalam pembaruan aparatur negara dan politik kompromi.

Sementara itu, partai-partai lain berbicara dengan nada berbeda.[67]

Sementara Musso dan PKI berbicara tentang Fron Nasional, di bawah pergulatan-pergulatan terus terjadi. Di kalangan orang-orang FDR, tersiar kabar angin bahwa akan ada Instruksi Menteri Dalam Negeri untuk membasmi mereka dalam lapangan agraria, tentang dokumen palsu FDR[68] yang membuat pengikut-pengikut FDR panik. Di Solo, pertempuran-pertempuran antara grup pro-FDR dan anti-FDR masih berkobar dan penculikan-penculikan terus berjalan. Kecurigaan di antara sesama partai pemerintah terhadap partai oposisi tidak bisa dijembatani oleh suara-suara manis tentang Fron Nasional. Karena itu, Masjumi pada 10 September menolak ide "persatuan nasional". Walaupun Masjumi anti-imperialis, mengingat seluruh rakyat dan Masjumi, partai ini menolak untuk mengambil bagian.[69] Esoknya diadakan rapat gabungan Masjumi-PNI, yang meminta agar Hatta mengambil sikap tangan besi terhadap pengacau. "Kita tak berkiblat ke Washington dan ke Moskow" serta "Bung Hatta tunjukkan tangan besimu", beberapa isi poster demonstran Masjumi-PNI ketika berarak-arak ke gedung BP KNIP. Enam hari setelah Masjumi, PNI menolak ajakan PKI.[70] Dengan demikian, Musso tidak berhasil meyakinkan pembentukan Fron Nasional.

Usaha Musso untuk mengadakan reorganisasi

PKI relatif mudah. Faktor senioritas, kepribadiannya yang keras, dan suasana *dead lock* PKI membantu usaha ini. Seperti diketahui, pada 27–28 Agustus diadakan Konferensi PKI dan pada 1 September diumumkan komposisi kepengurusan baru PKI berikut.[71]

Sekretariat Jenderal	:	Musso, Maruto Darusman, Tan Ling Djie, Ngadiman
Sekretariat Buruh	:	A. Tjokronegoro, Aidit, Sutrisno
Sekretariat Pemuda	:	Wikana, Soeripno
Sekretariat Wanita	:	(sementara di bawah Sekjen)
Sekretariat Pertahanan	:	Amir Sjarifudin
Propaganda Agitasi	:	Lukman, Alimin, Sardjono
Sek. Organisasi	:	Sudisman
Sek. Hub. Luar Negeri	:	Soeripno
Sek. Urusan Perwakilan	:	Nyoto
Sek. Urusan Kader	:	(sementara di bawah Sekjen)
Urs. Daerah Pendudukan	:	(sementara di bawah Sekjen)
Sekretariat Keuangan	:	Roeskak

Atas hal ini, pemerintah mulai mengadakan gerakan ofensif terhadap PKI. Tindakan pertama

ialah pelepasan Tan Malaka dan tawanan-tawanan politik Sayap Kiri pada 17 Agustus. Soebardjo, Iwa Kusumasumantri, Pandu, dan dr. Buntaran dilepas pada akhir Agustus. Pada pertengahan September, Tan Malaka, Sukarni, dan Abikusno dibebaskan. Tenaga-tenaga anti-FDR makin bertambah kuat walaupun FDR dengan pimpinan Musso telah menempuh garis politik radikal, seperti dicita-citakan Tan Malaka. Dalam beberapa hal, ide-ide grup yang tergabung dalam GRR (Gerakan Revolusi Rakyat) dengan FDR sama. Akan tetapi, karena persoalan-persoalan prinsipal (Stalinis versus komunis nasional) dan emosional (perlakuan Amir terhadap Tan Malaka dahulu), mereka saling bermusuhan.

Ketika PKI sedang mengambil haluan berputar, tiba-tiba grup GRR berbicara. Dalam sebuah rapat umum di Yogyakarta pada 5 September, Rustam Effendy berbicara tentang rahasia Setiadjid dan Maruto Darusman sebagai orang-orang yang bersepakat di belakang layar menyiapkan Uni Indonesia-Belanda. Semua persoalan hubungan tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia ini dengan grup sosialis Belanda serta cita-cita ikatan lainnya. Serangan ini disusul dengan serangkaian seri artikel yang membuka rahasia lima serangkai: Abdulmadjid, Setiadjid, Tamzil, Moewaladi, dan Maruto Darusman, yang didatangkan Belanda untuk mengimbangi grup "radikal" di Indonesia.

Rahasia-dalam yang hanya diketahui orang-orang komunis (Rustam Effendy adalah anggota CPN dan wakil PKI di parlemen sampai ia dipecat), terbuka sudah. Rahasia-dalam ini tentu saja mengejutkan banyak politisi Indonesia. Perasaan adanya musuh dalam selimut (FDR sendiri) dan pengkhianatan terhadap cita-cita proklamasi membuat posisi FDR lebih terjepit. Dalam keadaan seperti ini, bagi tokoh-tokoh FDR tidak ada pilihan lain, kecuali mengaku terus terang. Amir mengakui bahwa ia pernah menerima uang dari van der Plass sebanyak *f* 25.000 untuk menyusun gerakan bawah tanah. Hal ini ia lakukan dalam rangka instruksi Komintern untuk melawan fasisme. Setiadjid mengakui bahwa ia bertanggung jawab terhadap ide Uni Indonesia-Belanda. Akan tetapi, hal ini terjadi karena kesalahan Partai Komunis Belanda (dan Eropa Barat lainnya).[72] Beberapa hari sebelumnya (29 Agustus), tokoh-tokoh Partai Sosialis dan Partai Buruh mengakui bahwa mereka sebenarnya anggota rahasia PKI. Amir Sjarifudin sejak 1935, sedangkan tokoh lainnya sejak masih menjadi mahasiswa di Negeri Belanda (Tan Ling Djie dan Abdulmadjid).

Apabila dahulu Sayap Kiri/FDR akan menjadi simbol kerevolusioneran, dengan serangan-serangan Murba situasi berbalik. Harian *Merdeka* mengejek dalam pojoknya sebagai berikut.

Setiadjid mengaku bahwa ia bertanggung jawab tentang

hubungan uni dan kemudian mencoba melimpahkan kesalahan itu pada Partai Komunis Belanda dan lain-lain.

Pantesin revolusi kita jalannya mundur ketika pimpinan pemerintahan dipegang oleh apa yang dinamakan Sayap Kiri, karena rupanya di antara orang-orangnya ada yang teken kontrak lebih dulu sih. Tetapi apa pemerintahan dan rakyat mau menerima kesalahan itu dengan cuma pernyataan maaf saja, tanya si Tolol. Masa rakyat mau diper-"yahudi"-kan begitu saja.[73]

Orang-orang Sayap Kiri yang menjadi arsitek Renville dan Linggajati kemudian dicap sebagai agen-agen Belanda di pemerintahan Indonesia. Dalam posisi defensif ini, tokoh-tokoh komunis masih mencoba menjalankan ofensif.

Dalam pidato di muka Kongres Sarekat Buruh Gula, Amir menyatakan bahwa sebagai seorang komunis, ia berani mengakui kesalahan-kesalahannya. Jika Rustam Effendy benar-benar seorang komunis, ia harus berani mengaku salah. Bukan saja Maruto Darusman dan Setiadjid yang menjadi anggota Vereniging Nederland-Indonesia, melainkan juga Rustam Effendy. Ketika 80% anggota CPN tewas melawan Nazi, ke mana Rustam Effendy bersembunyi?

"Orang bilang saya mesti digantung. Saya tidak takut. Saya cukup melatih diri dalam penderitaan dan siksaan. Kalau saja saya harus dihukum gantung karena kesalahan politik di zaman Republik, saya bertanya: Hu-

kuman apakah harus diberikan kepada kaum kolaborator di zaman pendudukan Jepang di sini? Kepada penjual beratus-ratus romusha seperti Komukaco Syamsu Harya Udaya?"[74]

Meskipun begitu, rencana organisasi Musso berjalan terus. Waktu itu jumlah anggota PKI kira-kira 3.000 orang. Dalam rencana akan ditambah dengan anggota Partai Sosialis dan Buruh masing-masing sekitar 30.000 orang.[75] Di kalangan Partai Sosialis dan Buruh, ide-ide peleburan relatif tidak ditentang karena elemen-elemen nonkomunis di kedua partai telah memisahkan diri dan membentuk PSI dan Partai Buruh Merdeka. Dalam hal ini, organisasi-organisasi massa PKI sedang merencanakan kongres koreksi dan merencanakan menempuh *trace* baru garis keras. Menurut rencana, pada Oktober tahap pertama peleburan akan berhasil dilaksanakan. PKI akan muncul sebagai partai yang bersih dan segar.

Kekeruhan-Kekeruhan di Solo

Sejak Kolonel Sutarto terbunuh, suasana panas meliputi daerah Solo. Ia dibunuh pada 2 Juli 1948. Penggantinya ialah Letkol Suadi, seorang perwira yang juga bersimpati kepada FDR. Di daerah Solo terdapat bermacam-macam pasukan, mulai dari laskar pro-Sayap Kiri (Pesindo) dan anti mereka (Barisan

Banteng yang pro-Tan Malaka), pasukan TLRI (Tentara Laut Republik Indonesia) di bawah Letkol Jadau, pasukan Divisi IV Panembahan Senopati, sampai pasukan Tentara Pelajar (TP) di bawah Achmadi. Dalam suasana politik yang tegang, pasukan-pasukan ini amat mudah terbawa arus politik. Di samping itu, sejak Februari 1948 datang pasukan-pasukan Siliwangi yang hijrah dari Jawa Barat.

Disiplin kelompok-kelompok bersenjata ini tidak selalu baik. Dari grup BPRI (Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia) terkenal dengan pasukan Letkol Mardjuki yang tidak berdisiplin dan anarkis. Demikian pula pasukan Siliwangi tidak selalu baik. Ada unsur-unsur yang ikut dalam arus politik, membeli barang tidak mau bayar, serta merampok.[76] Unsur-unsur kriminal ini yang kemudian dieksploitasi secara politis.

Permulaan *clash* bersenjata ditandai dengan *clash* di Tasikmadu. Saat itu Batalion Rukman diserang oleh satuan-satuan Komando Pertempuran Panembahan Senopati.[77] Sejak 20 Agustus, markas batalion seolah-olah dikepung oleh satuan-satuan tidak dikenal. Perwira-perwira batalion kemudian menghubungi Komando Daerah Militer (KDM) Karanganyar untuk membicarakan situasi ini. Dalam pembicaraan-pembicaraan, tercapai kata sepakat bahwa mereka akan bertindak terhadap gerombolan-gerombolan yang mengacau di daerah Surakarta.

Akan tetapi, dalam pembicaraan kedua, pihak KDM menuntut agar anggota-anggota Siliwangi yang terlibat penggedoran diserahkan kepada mereka. Permintaan ini ditolak karena dianggap persoalan internal dan pimpinan batalion sanggup menyelesaikannya. Kemudian, mereka menuntut agar barang-barang gedoran diserahkan dengan batas waktu. Suasana menjadi makin panas. Sebaliknya, Siliwangi meminta agar pasukan-pasukan yang mengepung batalion ditarik. Hal ini tidak dapat diluluskan segera karena pengepungan dilakukan atas perintah STC (Sub Teritorial Commando). Keadaan tegang ini pecah karena pada 23 Agustus keluar ultimatum agar Batalion I (Mayor Rukman) menyerah. Karena ditolak, pada 24 Agustus, pukul 5.30, mereka diserang dengan turut mengerahkan kekuatan rakyat. Akan tetapi, serangan ini dapat dipukul mundur. Setelah itu, tercapai persetujuan-persetujuan dan persoalan-persoalan yang timbul akan diselesaikan secara hierarki militer. Panglima Sudirman sendiri ikut campur tangan.

Di samping persoalan Tasikmadu, suasana Solo sudah tegang. Sebelumnya terjadi penyerobotan senjata-senjata polisi oleh anak buah TLRI (yang kiri). Penyelesaian secara organisasi tidak berjalan dan polisi-polisi mengancam untuk bertindak sendiri terhadap pasukan-pasukan eks-TLRI (tergabung dalam Komando Pertempuran Panembahan Senopati)

secara fisik. Polisi-polisi Jawa Timur (Mobile Brigade) telah bersiap-siap. Peristiwa lainnya terjadi ketika sebuah stan di pameran menyambut tiga tahun Indonesia merdeka dibakar (bagian pertambangan) oleh tangan-tangan jahil.[78] Kebakaran ini mengakibatkan huru-hara ribuan penonton lari menyelamatkan diri.

Di Sragen, penjara diserang oleh pasukan-pasukan liar. Perwira-perwira tawanan TP, seperti Letkol Anwar dan Letkol Gunarjo, dibebaskan. Mereka ditawan dalam rangka penumpasan terhadap unsur-unsur pengacau pasukan Letkol Mardjuki. Pada 1 November, dua orang tokoh PKI Solo, Slamet Widjaja dan Pardjio, diculik orang. Kemudian, diikuti hilangnya Letkol Suherman dari TNI Masyarakat. Pada 8 September, Letkol Sujoto (Panembahan Senopati) menugaskan Mayor Esmara Sugeng, Kapten Sutarto, Kapten Supardi, Kapten Suradi, dan Letnan Mulyono untuk mencari mereka yang diculik. Akan tetapi, kelima orang ini tidak pernah kembali. Menurut keterangan, sepeda mereka ditemukan di Srambatan (markas Kompi Lucas).[79] Mulailah tuduh-menuduh antara Siliwangi dan pasukan-pasukan Solo "asli". Pasukan yang satu menyangkal sementara pasukan yang lain menuduh. Komandan Panembahan Senopati dengan persetujuan Panglima Besar mengultimatum pasukan-pasukan penculik untuk mengembalikan perwira-perwira yang hi-

lang. Pada waktu bersamaan, Mayor Slamet Riyadi melakukan manuver bersama-sama dua batalion eks-TLRI.

Pada 13 September, ketika ultimatum habis waktunya, markas Siliwangi di Srambatan diserbu. Sejak pukul 13.00 sampai sore hari terjadi pertempuran sengit yang memakan 14 orang korban. Panglima Besar Sudirman mendesak Letkol Sadikin, Komandan Brigade II Siliwangi, untuk mengembalikan perwira-perwira yang diculik. Sadikin tetap menyangkal dan tidak tahu-menahu tentang penculikan perwira. Setelah terjadi *cease fire* (pukul 18.00) diadakan lagi perundingan yang dihadiri seluruh pihak, termasuk Letkol Sadikin dan Letkol Suadi. Komandan Panembahan Senopati mengancam akan membakar Solo jika persoalan tidak diselesaikan. Sebaliknya, Sadikin menyatakan bahwa ia bertanggung jawab, "Kami tidak akan membakar." Suasana tetap tegang walaupun pasukan-pasukan penyerang telah mengundurkan diri. Sementara itu, pasukan-pasukan Siliwangi diperintahkan untuk waspada. Perkembangan selanjutnya ialah lucut-melucuti. Seorang kurir Siliwangi dilucuti di belakang Mangkunegaran. Kemudian, sebuah kendaraan Siliwangi ditahan oleh pasukan Senopati. Sebagai balasan, Sadikin menginstruksikan agar semua kendaraan Senopati dihadang dan ditahan, termasuk mobil bekas Gubernur Wikana diserobot dan diserahkan

kepada Letkol Sadikin, sebagai ganti mobilnya yang tua dan mogok-mogok.

Panglima Sudirman memiliki ide agar pasukan-pasukan Siliwangi meninggalkan daerah Solo dan Semarang. Tanggung jawab lalu diserahkan kepada pasukan-pasukan Senopati. Letkol Abimanyu yang hadir pada saat pertemuan memperingatkan Panglima Besar bahwa jika keluar instruksi seperti itu, Siliwangi tidak akan peduli dan akan pulang ke Jawa Barat ramai-ramai. Ini berarti *clash* dengan Belanda. Kolonel Nasution mengemukakan bagaimana pedih perasaan Siliwangi, tidak memiliki asrama, keluarga telantar, serta diagitasi oposisi. Keluar dari Solo-Semarang, berarti keluar dari daerah Republik Indonesia.

Sikap itu ditegaskan pula oleh Letkol Sadikin sewaktu ia didesak Panglima Besar dan Kolonel Mustopo untuk memenuhi ultimatum Senopati. "Apakah pekerjaan saya sejak PON ini dianggap sebagai pemberontak atau sebagai pembela negara? Kalau dianggap pemberontak, maka saya tak peduli siapa lagi dan akan pulang ke Jawa Barat."

Pertengkaran politik di Solo makin menggila. Pada 1 September 1948, satuan-satuan Pesindo menculik dr. Muwardi bersama tiga pimpinan GRR. Mereka (GRR) dituduh bertanggung jawab atas penculikan-penculikan terhadap PKI.[80] Akibatnya, bentrokan-bentrokan bersenjata di antara mereka yang

pro dan anti-FDR makin menghebat. Pada 16 September, markas Pesindo di-*raid* dan terjadi pertempuran yang merambat ke seluruh kota. Demikian situasi kota Solo sejak September.

Di Yogyakarta terjadi pembicaraan antara Panglima Besar Sudirman, Kolonel Nasution, dan Kolonel Gatot Subroto (Komandan Corps Polisi Militer). Sudirman mengusulkan agar Kolonel Gatot Subroto diangkat menjadi Gubernur Militer dengan kekuasaan penuh untuk menindas kerusuhan-kerusuhan, menuntut yang bersalah di depan hakim, serta membersihkan dan mengorganisasikan semua pasukan yang kurang beres. Akan tetapi, hal itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada dasar hukum untuk mengangkat gubernur militer. Ketika usul ini dibawa ke Presiden, beliau setuju dengan syarat kabinet juga setuju. Kabinet menyetujuinya. Kemudian, Presiden mengumumkan keadaan perang di Solo dan mengangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer. Pada 18 September, Kolonel Gatot Subroto tiba di Solo untuk memulai tugasnya. Malam itu, Madiun diduduki FDR.[81]

Bab Enam

Awal dan Akhirnya

> Saya sendiri yakin bahwa anak-anak biasa, yakni prajurit-prajurit dan pemuda-pemuda yang telah gugur pada kedua pihak selama Peristiwa Madiun ini umumnya tidak tahu-menahu tentang persoalan-persoalan yang berada di belakang tragedi nasional ini. Saya yakin bahwa doa yang terakhir dari anak-anak itu semua adalah untuk kebahagiaan dan kebesaran tanah air yang satu juga.
>
> (Jenderal Mayor T.B. Simatupang)[1]

Pada 17 September, pasukan-pasukan Panembahan Senopati mencoba sekali lagi untuk mengadakan frontal terhadap kota Solo. Mereka berhasil mendobrak pertahanan Barisan Banteng di batas kota. Kemudian, mereka memasuki kota. Di tengah-tengah kota, mereka dihadang satuan-satuan Sili-

wangi. Setelah bertempur beberapa jam, mereka dipukul mundur dalam keadaan kacau balau. Tembak-menembak masih berlangsung sampai keesokan harinya.

Kolonel Gatot Subroto tiba di Solo pada 18 September. Ia segera mengeluarkan instruksi "tangan besi"-nya. Tembak-menembak harus berhenti pukul 12.00 pada 20 September. Pukul 12.00 pada 21 September, semua komandan satuan-satuan yang sedang bermusuhan harus melaporkan diri. Komandan yang tidak melaporkan diri dianggap sebagai pemberontakan.[2] Malamnya, Presiden Soekarno berpidato melalui radio Yogya kepada seluruh rakyat, terutama rakyat Solo. Beliau menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan-tindakan keras di Surakarta dan berharap bahwa segalanya dapat diselesaikan dengan baik.

Malam yang sama, radio Gelora Pemuda Madiun mengumumkan siaran yang menantang sebagai berikut.

> "Kita khawatir bahwa pemerintah kita menjadi fasis militeristis, yaitu jabatan Wakil Presiden, Perdana Menteri, dan Menteri Pertahanan. Mereka adalah pengkhianat-pengkhianat negeri yang telah mengarahkan puluhan juta teman-teman setanah air kepada Jepang yang kejam, sebagai romusha-romusha. Persatuan adalah sangat perlu, tetapi tak boleh mengakibatkan perbudakan. Kita bertanya apakah tadinya tidak diadakan perunding-

an antara pemerintah Yogya dan Belanda tentang pembasmian Sayap Kiri. Kita sekarang mengetahui bahwa Belanda bekerja sama dengan pemerintah Republik untuk menjajah rakyat. Fasis dan kolaborator Hatta kini mencoba mempergunakan Republik untuk menjajah kaum buruh dan kaum tani. Madiun telah membangun untuk membasmi semua musuh revolusi, polisi tentara dan tentara telah dilucuti senjatanya oleh rakyat. Kaum buruh dan kaum tani telah membentuk suatu *pemerintah baru*. Senjata kita akan dipergunakan terus hingga seluruh Indonesia telah dimerdekakan. Saat untuk revolusi telah tiba.[3]

Pemerintah Fron Nasional di Madiun

Tidak jelas apa yang menjadi latar belakang keputusan pimpinan FDR dan laskar-laskar bersenjata pemerintah baru di Madiun. GR (Gadis Rasjid?) menulis dalam *Siasat* bahwa kepanikan akan tindakan-tindakan tegas dan kekalahan mereka di Solo, dan juga berita-berita bahwa Siliwangi telah sampai di Sragen dan sedang menuju Madiun barangkali merupakan faktor pendorong bagi Sumarsono untuk bertindak.[4] Akan tetapi, persoalan ini pasti bukan hal yang terlalu aneh. Sejak 16 September, desa-desa di sekitar Madiun telah di-"ambil alih" pihak FDR. Tanah bengkok dihapuskan dan lurah-lurah digantikan dengan lurah yang pro-FDR.[5]

Ketegangan juga terjadi di Madiun. Pada 23 Juli, Wirosudarno, seorang buruh kereta api, ditem-

bak oleh seorang anggota tentara. Jenazahnya dimakamkan di Desa Oro-Oro Ombo, yang dihadiri wakil-wakil partai/ormas. Kemudian, terjadi pemukulan terhadap seorang buruh kantor Balai Kota Madiun oleh seorang perwira. Peristiwa-peristiwa tersebut tentu saja diprotes oleh SBKA (Serikat Buruh Kereta Api) dan Sebda (Serikat Buruh Daerah). Seiring dengan itu, hubungan antara tentara dan golongan kiri makin memburuk.[6] Ketegangan ini makin diperkuat dengan Peristiwa Solo sejak awal September.

Perebutan kekuasaan di Madiun dilakukan sejak pukul 2.00 dini hari. Sebagai inti pasukan yang merebut kekuasaan, digunakan pasukan-pasukan Letkol Dachlan. Dalam waktu beberapa jam, mereka berhasil merebut kota setelah menyergap pasukan-pasukan yang setia kepada pemerintah. Markas Staf Pertahanan Jawa Timur, markas CPM, serta tangsi polisi mereka rebut dan senjata mereka ambil. Perwira-perwira yang tidak pro-FDR mereka tangkap. Pagi-pagi pada 19 September, pemerintah RI di Madiun ditumbangkan. Seorang pemuda yang menyaksikan perebutan kekuasaan tersebut melukiskan keadaan kota sebagai berikut.

> Setelah di pelosok-pelosok dan lorong-lorong jalan penuh dengan para pemuda yang berpakaian kehitam-hitaman dengan sebagian ada yang memakai sapu tangan merah di lehernya, plakat, dan poster-poster. De-

mikian pula pengumuman-pengumuman yang di bawahnya dengan tanda dan stempel: PEMERINTAH FRON NASIONAL.
Dengan adanya pengumuman-pengumuman ini barulah saya mengerti bahwa kota Madiun yang tadinya berbentuk PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA akhirnya menjadi PEMERINTAH FRON NASIONAL, sehingga orang sambil berbisik-bisik mengatakan "Kota Madiun telah jatuh ke tangan FDR"; ada lagi yang mengatakan "PKI semalam merebut kekuasaan negara".

Setelah itu, datang petugas-petugas yang menamakan diri mereka anggota Komite Fron Nasional ke rumah-rumah penduduk. Mereka meminta penduduk agar mau menjadi anggota Fron Nasional. Setiap laki-laki dan perempuan berusia 15 tahun ke atas boleh menjadi anggota tanpa memandang aliran politik, kebangsaan, dan agama. Asalkan mereka menyetujui Program Nasional. Iuran keanggotaannya hanya Rp 0,10. Jika seseorang tidak setuju, ... "Saudara harus menanggung akibatnya." Anggota-anggota komite ini mendatangi penduduk dengan granat, karaben, dan sten.[7]

Dengan tumbangnya pemerintah Republik Indonesia di Madiun, FDR mencoba membentuk pemerintahan baru atas dasar ide Musso tentang Fron Nasional, yaitu membentuk pemerintahan dari bawah—yang menurut mereka pasti kokoh karena berakar dalam masyarakat. Pagi-pagi pada 19 Sep-

tember, Fron Nasional dibentuk oleh SOBSI, PKI, PB, PS, Pesindo, Letkol Sumantri (Wakil Komandan Teritorial), Isdarto (Wakil Presiden), serta Walikota Purbo. Sementara itu, keanggotaan sukarela/setengah paksaan dan paksaan secara individu sedang dikumpulkan. Seperti diketahui, beberapa jam sebelumnya tentara/polisi yang setia kepada Republik Indonesia telah dilucuti. Sesuai dengan teori Fron Nasional Musso, Fron Nasional membentuk pemerintah Fron Nasional sebagai berikut.[8]

Residen Madiun	:	Abdulmutalib (eks Wakil Presiden Surabaya)
Gubernur Militer	:	Sumarsono (pimpinan BKPRI)
Komandan Militer	:	Kolonel Djoko Soedjono (eks Biro Perjuangan)
Komandan Militer Kota	:	Mayor Mustofa (dari Brigade Dachlan)

Harian *Api Rakyat* diganti namanya menjadi *Front Nasional*, yang terbit sebagai corong pemerintah Fron Nasional. Pimpinannya dipegang Basuki (bekas *Penghela Rakyat*), Oei Gee Hwat (bekas *Penghela Rakyat*), serta Sofyan Hadi (redaksi semula). Jam malam berlaku mulai pukul 19.00 sampai dengan pukul 5.00.[9] Pemerintah Fron Nasional hanya berumur 12 hari dan dari segi eksekutif hampir tidak

ada yang dilakukan. Untuk memberikan "wadah kerakyatan", pemerintah Fron Nasional melarang pemakaian istilah "paduka" dan "tuan", yang diganti dengan "saudara, pak, dan bung".[10] Tindakan-tindakan lain hanya penangkapan-penangkapan terhadap lawan-lawan politik.

Ketika pemerintah Fron Nasional diproklamasikan, pimpinan-pimpinan politik FDR/PKI kebanyakan tidak berada di Madiun. Musso, Amir Sjarifudin, dan Setiadjid sedang mengadakan tur ke daerah-daerah Republik Indonesia yang dekat dengan daerah demarkasi. Pimpinan CC PKI lainnya sedang mengadakan rapat di Yogyakarta pada 17 September 1948. Waktu itu sedang diadakan pula rapat-rapat SBKA pada 18 September dan esoknya rapat CC PKI Yogya. Semuanya sedang sibuk menerapkan rencana koreksi Musso.[11] Karena itu, usaha pembersihan terhadap tokoh-tokoh PKI relatif mudah.[12] Hanya kelompok Musso, Amir Sjarifudin, dan Setiadjid yang masih sempat datang ke Madiun. Soeripno datang ke Madiun karena ia memiliki rencana berpidato di sana. Ia berangkat ke Madiun dengan kereta api pagi pada 18 September. Waktu berangkat (menurut Soeripno sendiri), ia tidak tahu apa-apa.[13]

Musso sampai 19 September pagi berada di Madiun. Di sana ia mendapati bahwa "pemerintah Fron Nasional" telah terbentuk. Senang ataupun tidak senang, ia harus menghadapinya. Ke luar ia

harus menghadapi pemerintah Republik Indonesia yang kali ini bersikap tegas dan tidak mau ditawar-tawar lagi. Ke dalam ia menghadapi sikap pemuda/pelajar yang tidak mau membantunya. Demikian pula rakyat sedikit sekali membantunya.[14]

Sikap keras pemerintah dicerminkan dalam pidato Presiden Soekarno pada 19 September malam. Presiden meminta rakyat Indonesia agar bangkit membantu pemerintah untuk menumpas pemberontakan dan menyuruh rakyat memilih ....

> "Atas nama perjuangan untuk Indonesia Merdeka aku berseru padamu:
> Pada saat begini genting, di mana engkau dan kita sekalian mengalami percobaan yang sebesar-besarnya dalam menentukan nasib kita sendiri dan adalah memilih antara dua: ikut Musso dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia Merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta yang insya Allah dengan bantuan Tuhan, akan memimpin negara Republik Indonesia yang merdeka, tidak dijajah oleh negara apa pun juga."[15]

Pidato tersebut diikuti oleh pidato Sultan Hamengkubuwono IX yang memiliki pengaruh luas di kalangan masyarakat Jawa. Sultan menyerukan agar rakyat membantu Presiden dan Wakil Presiden. Partai-partai lain, kecuali FDR (yang telah ditangkap sebelumnya), menyetujui memberikan kekuasaan penuh kepada Presiden selama tiga bulan untuk mem-

basmi pemberontakan.[16] Dengan demikian, kedudukan pemerintah amat kokoh dalam menghadapi pemberontakan karena APRI secara tegas berpihak kepada mereka.

Pada 18 September malam menjelang 19 September, pemimpin-pemimpin PKI/FDR ditangkap, termasuk Tan Ling Djie, Maruto Darusman, dan Ngadiman. Bahkan, Ny. Surjadarma dari Lembaga Persahabatan Indonesia-Uni Soviet ikut ditangkap, yang menyebabkan beberapa hal kurang enak. Koran-koran pro-FDR ditutup. SOBSI yang sedang bersidang di Tugu dengan mudah disergap.[17] Perintah operasi untuk merebut kembali Madiun dikeluarkan dan segera dijalankan.

Musso dan kawan-kawannya buru-buru mencoba melawan Republik Indonesia dengan mengobarkan emosi rakyat untuk anti kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Pidato pertama Musso di depan corong radio Madiun pada 19 September, antara lain sebagai berikut.

> "Sudah tiga tahun revolusi nasional kita berjalan di bawah pimpinannya kaum borjuis-nasional, yang bersifat goyang menghadapi imperialis umumnya dan terhadap Amerika khususnya. Inilah sebab yang terakhir, bahwa keadaan ekonomi dan politik dalam Republik semuanya menjadi terus-menerus buruk.
> Dengan begitu rakyat semuanya, kaum buruh dan tani khususnya, sama sekali tak dapat membedakan keadaan

sekarang ini daripada keadaan selama zaman Belanda dan Jepang.

Sebaliknya anasir-anasir yang memerintah telah memakai revolusi kita sebagai kuda-kudaan untuk menguntungkan diri. Mereka sewaktu pendudukan Jepang telah menjadi *quisling* budak-budak Jepang, tukang jual romusha, dan propagandis-propagandis *Heiho*. Lebih dari 2 juta wanita Indonesia telah menjadi janda, lantaran laki-lakinya menjadi romusha. Sekarang mereka akan menjual Indonesia dan rakyatnya sekali pada imperialis Amerika.

Soekarno memakai alasan-alasan palsu telah menuduh FDR dan PKI Musso sebagai tukang pengacau dan lain-lain. Lupakah Soekarno, bahwa ia di Solo telah memakai kaum pengkhianat Trotskys untuk melakukan penculikan-penculikan dan teror terhadap orang-orang komunis? Lupakah Soekarno cs. bahwa ia telah membantu dan mensahkan kejahatan-kejahatan Siliwangi dan kaum teroris itu?

Apakah maksud Soekarno cs., eks pedagang romusha, telah melepaskan penjahat-penjahat Trotskys Malaka cs. yang telah mencoba merobohkan kepresidenannya? Dalam tiga tahun ini terangkah pula bahwa Soekarno-Hatta eks romusha *verkopers quislings* telah menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda, Inggris dan sekarang juga akan menjual Indonesia dan rakyat pada imperialis Amerika. Bolehkah orang-orang semacam itu bilang bahwa mereka mempunyai hak yang sah untuk memerintah republik kita? Rakyat Indonesia tidak butuh mereka. Rakyat belum lupa semboyan-semboyan Soekarno.

Mereka mengerti, bahwa kaum dagang romusha tak becus memerintah negara. Oleh karena, rakyat Madiun

dan juga di daerah-daerah lain sekarang akan melepaskan diri dari budak imperialis itu. Soekarno dalam membudak Jepang telah bilang 'Untuk Inggris: linggis; untuk Amerika: setrika.' Rakyat belum lupa ini. Bukan Soekarno, bukan Hatta yang melawan Belanda, Inggris, dan Amerika sekarang ini, tetapi rakyat Indonesia sendiri. Berhubung dengan itu kejadian di Madiun dan lain-lain tempat untuk seluruh rakyat adalah sinyal untuk merebut kekuasaan negara dalam tangannya sendiri. Inilah jaminan satu-satunya, bahwa Republik kita akan berdaulat benar-benar dan akan cakap menghadapi serangan-serangan dari luar dan untuk selama-lamanya melepaskan diri dari bujang-bujang imperialisme itu.

Rakyat seharusnya menjawab: 'Soekarno-Hatta, budak-budak Jepang dan Amerika. Memang *ciri wanci lali ginowo mati*.' Pasti rakyat akan jawab: 'Musso selamanya menghamba rakyat Indonesia. Hidup, merdeka, Menang Perang.'"[18]

Musso pada hari-hari pertama pemerintah Fron Nasional berbicara tentang perebutan kekuasaan negara oleh "rakyat" dari tangan pemerintah Soekarno-Hatta, wakil kaum borjuis-nasional. Garis keras ini juga dijalankan PKI dalam pengumuman pada 21 September (tiga hari setelah *coup*). Isi pengumuman, antara lain "Kaum buruh harus dianjurkan untuk mogok umum dan kaum tani, pemuda, wanita dan prajurit yang progresif dan anti-imperialis harus menentang dengan senjata dalam tangan, pemerintah Soekarno-Hatta yang sudah terang-te-

rangan menjadi pengkhianat rakyat dan menjadi agen-agen kapitalisme serupa Chiang Kai Shek, dan lain-lain."

> Rakyat Indonesia seluruhnya, kaum buruh dan kaum tani, kaum pemuda dan wanita, kaum prajurit progresif; Bersatulah. Lawanlah pengkhianatannya penjual romusha Soekarno-Hatta. Perkara kita adalah perkara suci dan adil. Oleh karena itu kita rakyat harus menang. Basmilah Soekarno-Hatta dan budak-budaknya. Hanya inilah jaminan satu-satunya untuk memerdekakan dan menyelamatkan negeri dan rakyat kita. Rakyat Indonesia seluruhnya. Turutlah dan buktikan contoh-contoh yang telah dilakukan oleh rakyat di daerah Madiun. Hidup Republik Kerakyatan kita. Merdeka dan menang perang.[19]

Istilah Republik Indonesia diganti dengan Republik Kerakyatan. Hal ini dikecam oleh "opsir-opsir kolonial yang sangat reaksioner", yang sekarang sedang memimpin pasukan ekspedisi menumpas pemerintah Fron Nasional FDR. Seruan PKI tersebut bergema hanya di Madiun dan Pati. Di daerah-daerah lain tidak ada "perlawanan rakyat" dan "pemberontakan prajurit progresif". Buruh-buruh SOBSI juga tidak mogok. Partai-partai lain dengan sendirinya mengecam *coup* di Madiun. Tokoh-tokoh FDR yang ada di organisasi-organisasi pemuda/pelajar dipecat. Bahkan, organisasi-organisasi "korban rasionalisasi" tetap setia kepada pemerintah. Lebih

tragis ialah pernyataan PKI Bojonegoro, Sumatra, dan Banten yang tetap setia kepada pemerintah Soekarno-Hatta.

Pada 20 September, pemerintah Fron Nasional mengumumkan Program Nasional mereka. Pokok-pokok Program Nasional tersebut adalah berikut ini.

1. Perombakan aparat pemerintahan yang lama.
2. Perombakan ketentaraan dengan memasukkan unsur-unsur demokratis di lingkungan tentara. Tentara harus bekerja sama dengan buruh dan tani.
3. Nasionalisasi perusahaan, pabrik, bank, dan lain-lain.
4. Pembagian tanah untuk para petani penggarap.
5. Pengambilalihan semua pabrik, bank, perkebunan, dan alat-alat perhubungan musuh (Belanda) serta diadakan pengendalian harga-harga.
6. Seluruh rakyat diorganisasikan untuk melawan musuh-musuh dari dalam/luar.
7. Didirikan biro keamanan.[20]

Setelah pemerintah Fron Nasional berdiri tiga hari dan tidak ada pemberontakan massal, nada keras mulai ditinggalkan. Pada 20 September, Kolonel Djoko Soedjono berpidato menegaskan bahwa tindakan-tindakan di Madiun bukan suatu pemberontakan terhadap Soekarno-Hatta. Tindakan-tindakan

di Madiun hanya koreksi dari pemuda-pemuda revolusioner. Ia mengecam politik rasionalisasi yang menempatkan aliran-aliran reaksioner dan borjuis pada pucuk pimpinan tentara, seperti Kolonel Nasution, Kolonel Simatupang, dan Kolonel Djatikusumo.[21]

Dua hari kemudian, Djoko Soedjono mengumumkan bahwa ia selaku Komandan Daerah Militer Madiun mengundang seluruh Panglima Pertahanan Jawa Timur, Brigade Mobil, dan komandan satuan-satuan militer lainnya datang ke Balai Kota Madiun pada 24 September, pukul 12.00, untuk merundingkan keadaan. Letkol Soeharto dari Yogyakarta (mantan Presiden RI) datang di Madiun. Kepadanya dititipkan surat-surat untuk Yogya (ruparupanya ia datang atas izin). Sebaliknya, Panglima Besar Sudirman menyatakan bahwa jika ada perwira-perwira yang datang memenuhi undangan Kolonel Djoko Soedjono, mereka dianggap sebagai pemberontak.[22]

Pada 23 September, sekali lagi Amir berpidato dan menegaskan bahwa mereka tidak memberontak. UUD RI tetap UUD kita. Merah Putih tetap bendera "kita".[23]

Pemerintah Fron Nasional mencoba untuk mengontraskan mereka dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertama didukung oleh elemen-elemen progresif muda. Kedua, didukung oleh kaum borju-

is-nasional dan opsir-opsir reaksioner/kolonial. Karena itu, sokongan pelajar merupakan hal penting bagi pemerintah Fron Nasional. Celakanya, "setangan merah" (pasukan-pasukan pemerintah Fron Nasional—karena tanda mereka ialah setangan merah) sering bertingkah laku kasar. Di kalangan pelajar, cita-cita komunisme tidak mendapatkan pasaran yang luas. Sikap ini berubah menjadi sikap anti karena pada 22 September, markas TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar) diserbu. Seorang pelajar, Mulyadi, ditembak dan ditusuk dengan sangkur hingga mati. Sembilan orang ditangkap dan dua orang tetap ditahan (kemudian dibunuh mati di Dungus pada 1 Oktober). Pemakaman Mulyadi menjadi manifestasi protes para pelajar. Pada 27 September, 5.780 orang pelajar dikumpulkan di kabupaten. Ketika Residen Mutalib ingin berbicara, pelajar menjawab dengan suara "sssttttt", seperti irama kereta api ekspres, selama lima menit. Waktu ia berpidato, ia diteriaki—"*Wah lakone wiwit. Nek wonge ora sepiro, mung matane* ...." Lalu, para pelajar tertawa tergelak-gelak dan terdengar irama kereta api lagi, "sssttttttt."

Mutalib mencoba memikat pelajar-pelajar dengan mengatakan bahwa sekarang uang sekolah SR/SMP tidak perlu bayar. Mereka yang putus hubungan dengan orangtua akan dijamin. Gedung eks-CPM akan dikembalikan kepada Jawatan Pendidikan untuk universitas (lalu pelajar-pelajar menjawab, ...

"tak buuutuuuuuhh"). Acara gila pelajar tersebut mencapai puncaknya ketika mereka memasukkan seorang sinting ke muka. Orang sinting ini memberikan salam pandu dan menirukan gerak-gerik Residen Mutalib. Suasana gelak-gelak membuat keadaan tidak terkendali. Kemudian, Soeripno (yang dianggap amat berpengaruh di kalangan pelajar dan mahasiswa) mencoba berbicara, tetapi gagal. Akhirnya, rapat kacau dan pelajar-pelajar pulang dengan yel-yel ... "Mulyadi minta ganti".[24]

Untuk lebih menarik massa pembela pemerintah Fron Nasional, pajak upah dihapuskan.[25] Akan tetapi, keadaan tetap tidak tertolong. Pemerintah Fron Nasional tetap tidak populer. Sementara itu, pasukan Siliwangi dan pasukan Kolonel Soengkono menjepit Madiun dari barat dan timur.

Selain Madiun, satu-satunya tempat PKI berhasil membentuk pemerintah Fron Nasional ialah Pati.[26] Basis massa PKI di daerah ini ialah buruh-buruh minyak yang tergabung dalam Laskar Minyak di Cepu. Daerah ini sebagian berada di bawah wewenang Divisi V Ronggolawe. Di Cepu berkedudukan Letkol Sunandar. Karena pasukan-pasukannya tidak cukup kuat, akhirnya di sana ditempatkan pasukan-pasukan Letkol Sudiarto dari Komando Pertempuran Panembahan Senopati.

Beberapa hari sebelum Peristiwa Madiun meletus, Musso dan kawan-kawan mengunjungi Cepu

dan berpidato dengan nada "menghasut rakyat". Kemudian, timbul perebutan kekuasaan di Madiun, yang diikuti pidato Presiden Soekarno. Presiden menyuruh rakyat untuk memilih Soekarno-Hatta atau PKI Musso. Pada 19 September, Musso berpidato menganjurkan rakyat agar mengikuti contoh kekuasaan di Madiun. Di daerah Pati, tempat elemen-elemen FDR dan pengaruh Panembahan Senopati sangat kuat, kata-kata Musso dituruti. Di Kudus, pada 24 September, Komandan Distrik Militer Soetarno melucuti polisi dan tentara yang setia kepada Republik. Keesokan harinya menyusul Pati. Ketua Politbiro PKI, A. Hadjid, mendatangi wedana dan menyuruhnya mempersiapkan massa. Jika menolak, hukum revolusi rakyat akan berlaku. Wedana tidak mau melakukannya dan melaporkan hal itu kepada bupati.

Keesokan harinya, pasukan Letkol Sudiarto datang di Pati tanpa diikuti rakyat sehingga tidak terjadi perampokan massal. Malamnya terdengar teriakan-teriakan jihad dan takbir, tetapi tidak terjadi apa-apa. Pada 27 September, asrama Mobrig diserbu (telah kosong), tentara dan polisi dilucuti. Tokoh-tokoh PNI, Masjumi, dan pamong praja dipenjarakan. Jepara, Rembang, dan Blora dengan mudah diduduki pihak FDR/Senopati. Hanya di Cepu berkobar pertempuran karena tentara agak kuat di sana. Setelah menguasai keadaan, mereka segera membentuk pemerintah Fron Nasional dengan komposisi sebagai berikut.

Residen	:	dr. Wiroreno (Ketua PKI Kudus)
Kepala Polisi Pusat	:	Abubakar (Pesindo)
Bupati Pati	:	Sunardi (PB daerah)
Bupati Blora	:	Boedisoetjitro (PS)
Bupati Jepara (?)	:	H. Misbach (Letkol TNI Masyarakat)
Bupati Rembang	:	Harjo (Kepala TNI Masyarakat)
Bupati Kudus	:	Roesmanhadi (PKI)
Com STC Pati	:	Letkol Sudiarto
Com CPM Pati	:	Lettu Wicaksono
Asisten Wedana Kota	:	Sudardjan
Kepala Keamanan	:	Soedarsono (Pegawai Polisi PKI)
Kepala Polisi Ekonomi	:	Soekardi (idem)
Kepala Polisi Material	:	Soemitro (idem)
Kepala Dep. Buruh	:	Prajogo (Ketua SOBSI)
Kepala Dep. Pemuda	:	A. Hadjid
Kepala Dep. Agraria	:	Imam Sukardjo (BTI)
Agitasi Propaganda	:	Martosoekarjo (Ketua Pesindo)
Pemeriksa	:	Soenarjo (Kapten TNI Masyarakat)
?	:	Marhasan

Jika melihat komposisi tersebut, praktis yang disebut Fron Nasional merupakan pemerintahan

FDR. Setelah mereka berkuasa, program Fron Nasional dijalankan. Sampai 9 Oktober, pamong praja masih digunakan serta bertugas menghadiri dan mengesahkan pembagian tanah dan menjadi penasihat Komite Kesatuan Aksi (yang mempunyai kekuasaan sesungguhnya). Mereka harus berceramah tentang pemerintah Fron Nasional. Setelah itu, mereka diberhentikan dan hanya dijadikan penasihat teknis. Polisi mengalami nasib sama. Semuanya dijadikan penasihat teknis. Mereka yang dianggap berbahaya ditangkap atau dibunuh. Di desa-desa dijalankan pembagian tanah dan harus selesai dalam waktu lima belas hari. Radio yang boleh didengar rakyat hanya radio Fron Nasional. Dalam hal itu, Letkol Sudiarto menegaskan bahwa merah putih tetap bendera mereka, begitu pula Pancasila (sehubungan dengan pidato Amir Sjarifudin). Keadaan kantor dan jawatan menjadi sepi, kacau, dan pembayaran gaji tidak menentu. Harga-harga lokal (ternak, makanan) turun, tetapi harga kopi dan teh naik. Keadaan para pengungsi tidak memuaskan. Demikian pula para tawanan.

Pihak yang paling mengalami penghinaan-penghinaan ialah pamong praja. Salah seorang di antara mereka harus menyembah dan meminta maaf atas korupsi-korupsi yang dilakukan kelompok. Mereka (kata orang-orang FDR) ada yang di-"cancang", diarak di muka umum, serta dihina.

Seperti di Madiun, lawan-lawan politik FDR ditangkap. Korban utama penangkapan ialah orang

Masjumi dan PNI. Pemerintah Fron Nasional di daerah Pati berlangsung sampai pertengahan Oktober (kira-kira 20–30 hari).

Operasi-Operasi Militer Menumpas Pemerintah Fron Nasional

FDR membuat perhitungan bahwa 35% tentara berada di pihak mereka dan memiliki banyak persenjataan karena politik Amir Sjarifudin dahulu. Akan tetapi, ketika mereka melancarkan pemberontakan pada pertengahan September, perhitungan mereka banyak yang meleset. Kekuatan mereka di Madiun, terutama bersandar pada batalion-batalion Mustofa (Madiun), Mursid (Saradan), Darmintoadji (Ngawi), Panjang Djokoprojono (Ponorogo), serta Abdurrachman dan Maladi Jusuf (Ponorogo dan Sumaroto). Mereka kebanyakan berasal dari eks Pesindo yang bergabung dalam Brigade Dachlan.

Inti mereka di Jawa Tengah (Pati) ialah Komando Pertempuran Panembahan Senopati. Walaupun pengaruh FDR amat kuat di sini, ternyata Brigade V di bawah Mayor Slamet Riyadi tetap tinggal (walaupun ada batalionnya bergabung dengan pemberontak). Di tempat-tempat lain, walaupun ada pasukan-pasukan yang ikut menyatakan berpihak kepada pemerintah Fron Nasional, jumlahnya dan arti riilnya tidak besar (seperti terjadi di Parakan). Se-

baliknya, pemerintah mengalami kesulitan karena sebagian besar pasukan yang tersedia "diikat" menjaga garis demarkasi. Praktis satuan-satuan yang dapat dikerahkan terdiri dari Kesatuan Reserve Umum eks-Divisi Siliwangi yang berjumlah dua brigade (Sadikin dan Kusno Utomo). Dari Jawa Timur, pasukan-pasukan yang dapat dikerahkan dari Brigade Surachmad dengan hanya tiga batalion. Pasukan-pasukan lain harus beroperasi di tempat masing-masing.

Berhubung Panglima Besar Letjen Sudirman sakit, operasi-operasi militer menumpas pemberontakan PKI/FDR diserahkan kepada Kolonel Nasution. Ia berjanji untuk merebut Madiun dalam waktu dua minggu. Menurut perhitungan Wakil Presiden Hatta, jika "kita" tidak menumpas pemberontakan dalam waktu secepat-cepatnya, Belanda akan melakukan intervensi. Karena itu, Madiun harus direbut selekas-lekasnya.[27]

Pembersihan-pembersihan di Yogya dan Solo memakan waktu satu minggu sehingga operasi ke Madiun harus selesai dalam waktu satu minggu. Keadaan pasukan-pasukan RI memang gawat. Untuk operasi di Solo Selatan, hanya tersedia satu batalion (Mayor Nasuhi). Batalion Nasuhi perlahan-lahan membebaskan Sukoharjo, lalu menuju Wonogiri dan akhirnya ke arah Pacitan. Pasukan-pasukan yang bergerak ke utara Solo menuju Purwodadi-Pati dipim-

pin Letkol Kusno Utomo, yang terdiri dari Batalion Kemal Idris dan Kosasih.

Pada 5 Oktober, pasukan-pasukan tersebut berhasil membebaskan Purwodadi. Cepu menjadi kota perebutan antara pasukan-pasukan yang setia kepada RI melawan pasukan Laskar Minyak (SOBSI) dibantu satuan-satuan tentara yang pro-pemerintah Fron Nasional. Pasukan-pasukan Soenarto dalam keadaan terjepit melawan satuan-satuan pemberontak yang dibantu 12.000 orang "pro"-PKI.[28] Pada 28 September, Laskar Minyak mengultimatum pemerintah dan sejak itu terjadi pertempuran-pertempuran. Pertempuran di Cepu terutama pertempuran untuk menguasai pabrik minyak. Selama tujuh hari, pabrik minyak berganti tangan empat kali. Pada akhirnya, datang bantuan dari satuan-satuan Siliwangi (yang telah berhasil membebaskan Madiun) dari Ngawi dan Purwodadi. Cepu berhasil direbut "mutlak" oleh tentara yang setia kepada Republik Indonesia. Blora dibebaskan pada 13 Oktober oleh satuan-satuan TNI. Dari basis-basis ini, Kudus dibebaskan pada 21 Oktober. Keesokan harinya, Pati sebagai pusat pemerintah Fron Nasional juga dibebaskan. Residen dr. Wiroreno dari pemerintah Fron Nasional ditangkap dan dihukum mati.[29]

Gerakan militer tersulit ialah gerakan merebut Madiun, yang memiliki arti politis dan psikologis. Selama operasi militer, pemerintah Belanda mencoba

menekan RI dengan menawarkan bantuan moral kepada Hatta untuk membasmi komunis. Pemerintah menolak uluran tangan Belanda dengan tegas.

Operasi merebut Madiun dilakukan dari dua arah, dari barat dan timur. Dari Barat dikerahkan lima batalion, yaitu Batalion Daeng, Achmad, Sambas, Umar, dan Sentot. Semuanya dari Kesatuan Reserve Umum Siliwangi, ditambah dengan Batalion Sumadi dari Panembahan Senopati serta Kompi Gabungan Hizbullah dan Barisan Banteng di bawah Kapten Lucas.[30] Kepada pimpinan operasi diperintahkan untuk merebut Madiun dalam waktu tujuh hari. Keadaan pasukan-pasukan ini amat menyedihkan, dalam hal material. Batalion Sambas yang merebut Madiun pertama kali tidak memiliki alat-alat perhubungan yang diperlukan (radio, kendaraan bermotor). Komunikasi dilakukan dengan sistem *renraku*. Selama perjalanan, inisiatif komandan lebih menentukan daripada rencana semula. Bahkan, makanan tidak ada dan sistem pengangkutan dijalankan dengan memakai cikar. Persediaan amunisi juga terbatas.

Mereka berjalan beriring-iring melalui Plaosan-Gorang Gareng ke Madiun (berputar). Mereka beriring-iring sepanjang 3–5 kilometer untuk mengesankan bahwa mereka merupakan pasukan yang besar. Setelah berjalan enam hari sambil bertempur kecil-kecilan, mereka sampai di Madiun. Saat itu ko-

ta telah ditinggalkan oleh satuan-satuan pemberontak sehari sebelumnya. Di Madiun mereka mendapatkan sedikit gangguan dari penembak-penembak gelap, tetapi tidak dihiraukan. Dengan demikian, Madiun dibebaskan pada 30 September 1948 dari barat tanpa mendapatkan perlawanan berarti.[31]

Operasi dari arah timur lebih gawat. Kekuatan-kekuatan lawan relatif lebih besar daripada yang diduga. Akan tetapi, pihak lawan tidak mengetahui sikap politik Kolonel Soengkono dan Letkol Surachmad sebagai Komandan Brigade. Di daerah Madiun-Kediri terdapat dua brigade, yaitu di bawah pimpinan Letkol Dachlan yang positif memihak pemberontak dan Letkol Surachmad yang belum diketahui sikapnya.

Pihak pemberontak mencoba menarik Letkol Surachmad dan Kolonel Soengkono ke pihak mereka. Malamnya diadakan perundingan dari pukul 18.00 sampai pukul 3.00 untuk mengulur waktu agar pasukan-pasukan yang pro-pemerintah RI dapat mengkonsolidasikan diri. Setelah semua siap, pagi-pagi pihak pemberontak dikepung, dilucuti, dan tokoh-tokohnya ditangkap. Dalam sekali pukul, berhasil ditangkap Jenderal Mayor Atmadji, Letkol Kusnandar, serta Letkol Dachlan sebagai Komandan Brigade yang pro-pemerintah Fron Nasional.

Dari timur, perebutan Madiun dilakukan melalui tiga tempat.

1. Dari selatan dengan basis Trenggalek (Batalion Mudjajin, Kompi Hizbullah, dan Kompi Sumadi).
2. Dari tengah melalui Sawahan (pasukan Sabarudin, Kompi Sampurno, dan Kompi Effendi).
3. Dari utara melalui Nganjuk (Batalion Sunarjadi, Batalion Banurejo, dan Mobrig Jawa Timur).

Pihak pemberontak cepat bergerak. Trenggalek diserang dan diduduki. Tawanan-tawanan yang ada di penjara dilepas. Operasi dari Trenggalek juga sukar karena *terrain* dan pihak PKI menggunakan warok-warok berpengaruh untuk melawan pihak pemerintah RI. Pasukan dari sektor tengah agak tersesat jalan sehingga penyergapan-penyergapan terhadap pihak pemberontak berantakan.

Operasi dari timur dipimpin Kolonel Sungkono. Sebagai pelaksana operasi ditunjuk Mayor Jonosewojo. Berbeda dengan pasukan-pasukan Sambas yang datang di Madiun pada 30 September, satuan-satuan timur datang pada keesokan harinya.[32]

Setelah Madiun jatuh, pihak pemberontak merencanakan untuk melakukan perlawanan gerilya dari basis-basis yang telah mereka siapkan sebelumnya di lereng-lereng Gunung Wilis. Akan tetapi, malang bagi mereka karena pasukan-pasukan Siliwangi dan Kolonel Soengkono bergerak cepat sekali sehingga kesempatan untuk berkonsolidasi tidak ada. Basis konsolidasi mereka direncanakan di Dungus,

yang merupakan pusat amunisi dan gudang senjata yang dibina sejak Amir masih menjadi Menteri Pertahanan. Tanpa mereka duga, tiba-tiba satuan-satuan TNI datang dari atas bukit-bukit (jalan simpang). Pasukan-pasukan Mayor Sabarudin ini berhasil merebut Dungus.[33] Dengan jatuhnya Dungus, rencana pertahanan mereka yang strategis kacau balau. Sejak itu perlawanan-perlawanan teratur (kecuali di Pati) tidak ada lagi. Kisah selanjutnya ialah kisah-kisah pelarian-pelarian, kecuali serangan untuk merebut kembali Ponorogo (yang telah direbut TNI pada 2 Oktober).

Dungus merupakan titik balik untuk operasi penumpasan pemerintah Fron Nasional. Secara material, kaum pemberontak meninggalkan sebagian besar peralatan mereka, termasuk 20 buah mobil, 100 ekor kuda, 500 ekor kambing, senjata-senjata berat, amunisi, mesin tik dan stensil, serta dokumen-dokumen.[34] Di Dungus ditemukan 60 mayat berhamburan, di antaranya 4 orang pemudi. Dalam keadaan putus asa, seribu orang telah dibunuh (tentara, pelajar, lawan-lawan politik) dan beratus-ratus rumah dibakar. Terungkapnya pembunuhan terhadap tawanan-tawanan menimbulkan rasa jijik dari pihak-pihak yang sebelumnya tidak terlalu antikomunis.[35] Sejak itu, perang antara pemerintah Republik Indonesia melawan "pemerintah Fron Nasional" mengambil bentuk yang kejam. Kedua belah pihak

melakukan tindakan-tindakan kejam dan menimbulkan luka-luka nasional yang berat.[36]

Pasukan-pasukan pemberontak bertempur dengan fanatik karena mereka dibakar oleh ideologi Marxis yang kuat. Akan tetapi, disiplin dan semangat ini tidak dimanfaatkan karena mereka bergerak dalam formasi besar sehingga mobilisasi pasukan menjadi lambat. Pasukan-pasukan pemerintah RI sebaliknya (terutama dari eks-Divisi Siliwangi) kurang mengenal *terrain*, tetapi mobilitas mereka lebih besar.[37]

Selama operasi-operasi militer, dikenal kisah-kisah kepahlawanan dan kefanatikan dari kedua belah pihak. Di Madiun dikenal kisah perlawanan pelajar-pelajar Madura melawan Abdulmutalib dan Soeripno dengan satuan-satuan bawah tanahnya. Di Ngawi terkenal kisah Soemirah, seorang wanita muda yang jatuh cinta kepada seorang algojo PKI. Suaminya sendiri dimasukkan ke penjara. Ketika algojo PKI ini terbunuh, ia menggantikannya menjadi algojo.[38] Akhirnya ia masuk hutan bersama-sama pasukan pemerintah Fron Nasional. Peristiwa Madiun di samping memunculkan kisah-kisah politis, juga penuh dengan kisah-kisah kemanusiaan. Hal ini merupakan sebagian dari sejarah.

Setelah Dungus/Ponorogo jatuh, mulai kisah pengembaraan tokoh-tokoh "pemerintah Fron Nasional". Mereka bergerak dalam pasukan-pasukan besar dan mencoba menghindari pertempuran-pertempuran. Mereka percaya bahwa tenaga mereka harus dipelihara untuk "main kartu" kembali jika Belanda menyerang pemerintah RI. Kadang-kadang mereka melakukan penghadangan-penghadangan serta membunuh pejabat-pejabat pemerintah. Di antara jalan Madiun-Solo, pasukan-pasukan ini menghadang iring-iringan TNI. Bahkan, mereka menghadang bekas Gubernur Surjo dari Jawa Timur.[39]

Pengejaran-pengejaran TNI membuat pasukan-pasukan pemberontak terpecah-pecah. Pengepungan-pengepungan yang dilakukan TNI membinasakan satuan-satuan ini, kecuali pasukan-pasukan Sudiarto dan Sutoyo di daerah Pati.

Setelah pasukan-pasukan pemberontak terkepung dan terputus-putus, Musso mengembara seorang diri. Mungkin ia ingin menghilang ke tengah-tengah masyarakat ramai. Pada suatu Minggu, 31 Oktober, ketika ia sedang berjalan kaki di Desa Balong, ia dihentikan oleh dua orang petugas keamanan desa. Mereka curiga melihat badan Musso yang segar/sehat serta kakinya bersih kekuning-kuningan. Musso diminta untuk menunjukkan surat-surat

keterangan. Seorang petugas keamanan memeriksa buntelan sarung Musso yang berisi jas hujan, sedangkan seorang lagi memeriksa surat-surat yang diserahkan Musso. Tiba-tiba Musso merampas sarungnya dan menembak si pemeriksa. Musso kabur dan merebut sebuah sepeda untuk mempercepat larinya. Kemudian, ia bertemu sebuah dokar. Kusir dokar ditodong oleh Musso dan dipaksa melarikan dokarnya dengan ancaman senjata.

Petugas-petugas keamanan desa segera menelepon desa-desa di sekitarnya. Pengejaran-pengejaran pun dilakukan sementara TNI dihubungi. Dokar itu kemudian menjumpai sebuah mobil. Musso pindah dan menodong penumpang-penumpang mobil. Mereka adalah pasukan dari Batalion Sunandar. Walaupun mereka bersenjata, mereka tidak sempat bertindak. Todongan pistol Musso lebih cepat. Celaka bagi Musso rupanya belum selesai. Mobilnya tidak mau hidup ketika di-*starter*. Prajurit-prajurit yang sebelumnya diancam oleh todongan pistol, telah siap dengan senjata mereka. Salah seorang dari mereka (yang lainnya mencari bantuan), dengan sten, meminta agar Musso menyerah. "Engkau tahu siapa saya? Saya Musso. Engkau baru kemarin jadi prajurit dan berani meminta supaya saya menyerah pada engkau. Lebih baik mati daripada menyerah, walaupun bagaimana saya tetap merah putih." Karena prajurit ini tidak bermaksud menembak mati Musso,

Musso lari ke desa terdekat. Sementara itu, pasukan-pasukan bantuan di bawah Kapten Sumadi telah datang. Musso bersembunyi di sebuah kamar mandi dan tetap menolak menyerah. Akhirnya, ia ditembak mati.[40] Mayatnya dibawa ke Ponorogo, dipertontonkan, dan kemudian dibakar.

Nasib dua orang residen "pemerintah Fron Nasional" juga tidak bahagia. "Residen Madiun", Abdulmutalib tertangkap pada 4 November di Girimarto bersama dua orang pemudi yang mengiringi pembesar sipil ini. Oleh pengadilan lapangan, ia dijatuhi hukuman mati. Ia meminta ampun dan berjanji untuk memperbaiki diri serta kembali ke lingkungan pemerintah Republik Indonesia. Sebagaimana sebuah perang saudara yang banyak menimbulkan kebencian, permintaan tersebut ditolak. Sebelum menjalani hukuman, ia memohon agar salamnya disampaikan kepada istrinya, Surasih, yang dahulu berdiam di Klegen. Istrinya yang menjadi tawanan Mayor Sabarudin, akhirnya menikah dengan Mayor Jonosewojo.[41] Emosi manusia kadang-kadang mengatasi kebencian-kebencian ideologis.

Residen Pati, dr. Wiroreno, tidak melarikan diri. Ia ditangkap di Pati setelah pasukan-pasukan TNI datang. Ia menolak meminta ampun karena ia merasa bahwa ia tidak pernah bersalah terhadap bangsa dan rakyat Indonesia. Dengan tegap ia berjalan ke tengah lapangan menjalani hukuman mati. Regu

penembak yang mau menjalankan tugas menyembah dr. Wiroreno dan meminta ampun karena mereka mengenal Wiroreno sebagai dokter yang amat sosial kepada rakyat.[42]

Kelompok-kelompok Amir dapat bertahan sampai akhir November. Amir berusaha untuk memelihara semangat pasukan-pasukannya dengan memberikan harapan-harapan bahwa mereka pasti menang. Pengembaraan Amir dari Madiun mengitari Gunung Wilis dan Gunung Lawu tiba di daerah Pati dan Purwodadi. Pada 28 November, Kolonel Djoko Soedjono, Maruto Darusman, Sajogo, dan kawan-kawannya ditangkap oleh satuan-satuan TNI di Desa Peringan, dekat Purwodadi. Dalam pengakuannya, Djoko Soedjono menyatakan bahwa ia terpisah hanya 200 meter dari Amir Sjarifudin. Berdasarkan keterangan ini, pihak TNI mengambil kesimpulan bahwa rombongan Amir pasti berada di sekitar Purwodadi. Atas dasar kesimpulan ini, pengejaran-pengejaran dan patroli-patroli makin diintensifkan. Keesokan harinya, TNI dapat memastikan persembunyian Amir berada di Desa Klambu. Pengepungan-pengepungan dilakukan. Amir mencoba meloloskan diri melalui rawa-rawa dan hutan-hutan. Akhirnya, Amir menyerah kepada pasukan Kemal Idris. Keadaan Amir sudah payah, kurus, dan agak pincang. Ia menderita penyakit disentri.[43]

Tawanan-tawanan penting itu dibawa ke Ku-

dus. Dari sana diangkut dengan kereta api khusus ke Yogya. Amir meminta kepada perwira yang mengurusnya, Kapten Soeharto, untuk memberikan buku. Waktu itu, buku satu-satunya yang dimiliki Kapten Soeharto ialah *Romeo and Juliet* karangan William Shakespeare. Menurut Soeharto, Amir membaca buku ini ketika menantikan keberangkatannya ke Yogya. Amir duduk sendiri di kereta api yang sengaja dikosongkan untuknya. Ketika ia sampai di Stasiun Yogya, rakyat berjejal-jejal untuk melihat wajah bekas Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia ini. Ia kelihatan tenang melihat rakyat yang berjubel-jubel di stasiun melalui jendela kereta.[44]

Soeripno, Amir, dan Hardjono ditahan di penjara Benteng Yogyakarta. Mereka tenang-tenang saja. Ketika Jaksa Agung dan Kolonel Nasution mengunjungi mereka, Amir tetap memelihara sikap kebesarannya. Atas pendapat Jaksa Agung, tawanan-tawanan ini dikirim ke Solo untuk diperiksa oleh Gubernur Militer.[45]

Di antara para tawanan, hanya Soeripno yang meninggalkan kenang-kenangan berupa sebuah memori. Ia mencoba melihat Peristiwa Madiun dari pandangan dan pengalaman-pengalaman pribadinya. Tidak terlalu banyak hal baru dalam memori ini. Ia hanya menyesalkan ekses-ekses yang terjadi pada pihak pemberontak. Pembunuhan-pembunuhan yang sebenarnya dibakar oleh berita-berita kekejaman da-

ri pihak "sana", yang kebanyakan tidak benar atau dibesar-besarkan. Menurut Soeripno, mereka yang bertempur kadang-kadang bukan tentara melawan tentara, melainkan rakyat melawan rakyat. Ia amat menyesalkan terbunuhnya Pak Surjo oleh pasukan pemerintah Fron Nasional. Selanjutnya, ia melihat secara kritis sebab-sebab kekalahan mereka.

> "Faktor paling besar yang menyebabkan kekalahan kami ialah bahwa sokongan ada malahan boleh dikatakan besar di beberapa tempat, akan tetapi di luar Madiun sokongan kecil sekali dan beberapa kali rakyat di desa malahan disiapkan untuk menangkap kami. Apakah ini berarti bahwa politik kami salah, atau program kami salah? Tentu tidak. Kami masih yakin, bahwa politik kami benar dan program kami benar. Kesalahan ialah justru kami tidak menjalankan program dan politik kami dengan betul-betul. Seperti tersebut di atas Peristiwa Solo. Peristiwa Madiun dan sebagainya itu tidak masuk dalam rencana atau program kami. Kami malahan sedang sibuk mereorganisasikan dan menyusun partai kami (fusi), kami juga sedang sibuk memberi penerangan dan penjelasan jauh daripada selesai sehingga sebagian besar daripada rakyat belum mengerti politik dan program kami. Juga fusi jauh daripada selesai, sehingga organisasi partai kami belum bersih. Di dalam keadaan begitu terjadilah Peristiwa Madiun dengan akibat-akibatnya yang jelek buat kami itu. Timbul pertanyaan apakah di waktu itu juga kejadian di Madiun tak bisa dicegah? Pertanyaan ini sukar dijawab, sebab banyak faktor lain (sudah tersebut di atas) yang menentukan juga sikap kami pada waktu itu. Suasana yang

pada waktu itu sebagai suatu *fait accompli*, kami semua terdesak, sehingga solider dengan kawan-kawan (Kemudian terbukti bahwa banyaklah berita-berita yang tidak benar atau sangat diperbesar). Banyak lagi sebab-sebab yang mengakibatkan kekalahan kami misalnya:

1. Gagalnya rencana fusi pada waktu yang ditetapkan.
2. Tidak digantinya orang-orang dalam pimpinan yang telah menjalankan politik salah. Dengan begitu kami menyediakan bahan agitasi untuk mencurigai dan memukul partai kami (?).
3. Tempo yang begitu singkat belum cukup untuk memberikan penerangan dan propaganda tentang politik program kami, apalagi di kalangan rakyat sedang di kalangan kader partai sendiri masih banyak yang belum mengetahui soal-soal tersebut
4. Organisasi, pimpinan, keyakinan dan ideologi dalam Barisan Tentara Rakyat sangat kurang.
5. *Excessen* yang terjadi sangatlah menjauhkan kami dari simpati rakyat.
6. *Overmacht* yang kami hadapi dan sebagainya.

Tetapi pelajaran yang sangat berharga, walaupun sangat pahit buat kami dan partai kami ialah bahwa tak ada sokongan dari rakyat karena kami menyimpang dari rencana kami sendiri. Kalau kami dengan aman bisa menjalankan rencana kami. Penerangan kepada rakyat, politik program dan sebagainya, kami yakin negara kami akan diterima dan dijadikan politik negara kami dengan tiada terjadi pertumpahan darah.[46]

Pengakuan Soeripno yang jujur tersebut (tentu dalam versi komunis) menyoroti secara kritis melesetnya perhitungan organisasi PKI. Karena kekejam-

an-kekejaman mereka sendiri, rakyat tidak saja tidak menyokong, tetapi malah menentang. Revolusi tanpa rakyat ibarat ikan tanpa air. Kisah ini dilanjutkan pada 19 Desember tengah malam di Desa Ngalihan (Karanganyar, Solo). Dua puluh orang penduduk Desa Karangmojo disuruh menggali lubang sedalam 1,70 meter untuk penguburan sebelas orang tawanan politik pemerintah yang diangkut ke desa itu karena pada pagi hari Belanda melancarkan aksi militer ke-2. Amir bertanya kepada seorang kapten TNI yang memimpin di sana, mereka mau diapakan. Kapten itu hanya menjawab, "Saya tentara, tunduk perintah, disiplin." Setelah lubang selesai digali, penduduk desa disuruh pergi, kecuali empat orang yang diminta untuk menguruk lubang.

Seorang letnan menjelaskan adanya surat perintah Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto untuk menembak mati tawanan-tawanan tersebut. Amir meminta agar sebelum ditembak, para tawanan diberikan kesempatan untuk berjanji sebentar. Soeripno meminta izin untuk menulis surat kepada istrinya (ia menikah pada 1947 di London). Kemudian, para tawanan menulis surat dan satu demi satu diserahkan kepada letnan tadi. Sebelum ditembak mati, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu internasional.[47]

Pelaksanaan hukuman mati dimulai. Mereka adalah Amir Sjarifudin, bekas Menteri Pertahanan/

Perdana Menteri dan anggota Politbiro CC PKI. Ia memulai karier dalam Kongres Pemuda II (Oktober 1928), yang mencetuskan Sumpah Pemuda. Kemudian, ia menjadi pengikut Soekarno dalam Partindo dan akhirnya memimpin Gerindo. Pada zaman Jepang, ia dipenjarakan karena ikut gerakan bawah tanah. Ia seorang Islam yang menjadi Kristen. Bagi "mereka yang pernah mengenalnya dari dekat, akan tetap memelihara kenang-kenangan kepada seorang manusia yang baik dan peramah, seorang pemikir yang cepat kadang-kadang brilian, seorang orator yang dalam keulungan berpidato hanya kalah oleh Bung Karno, seorang pejuang dan pekerja yang tabah dan tidak memikirkan kepentingan sendiri."[48]

Tawanan lainnya adalah Maruto Darusman, seorang aktivis mahasiswa yang menjadi komunis dan aktif dalam gerakan bawah tanah menentang Hitler.

Sardjono, tokoh PKI sejak 1926 dan bekas ketua partai yang hidup selama berbelas-belas tahun sebagai orang buangan di Digul dan Australia.

Soeripno, seorang mahasiswa brilian dan amat jujur yang bergabung dengan gerakan komunis dan aktif bergerak di bawah tanah menentang Hitler. Dia anggota Badan Pekerja WDUY.

Hardjono, seorang idealis. Ia mengalami kehidupan politik pertama di Medan sebagai seorang buruh bengkel. Ia kembali ke Jakarta sebagai jongos

dan dikomuniskan di Jakarta oleh seorang komunis Belanda. Ia dibuang ke Digul dan menikah di penjara.[49] Jabatannya waktu itu adalah Ketua Umum SOBSI.

Oei Gee Hwat, seorang pemuda keturunan Cina yang dipengaruhi Liem Koen Hian dan Tan Ling Djie. Ia kemudian menjadi tokoh Pesindo dan pimpinan SOBSI, di samping pekerjaannya sebagai wartawan dan kolumnis.

Djoko Soedjono, pemuda yang dibesarkan oleh kursus-kursus politik Bung Karno-Hatta dan Sjahrir. Kemudian, ia menjadi seseorang yang membenci penjajah, borjuis, priyayi, dan feodalis, yang dikunyahnya sebagai dogma.[50] Pangkatnya terakhir adalah kolonel TNI.

Katamhadi, bekas Jenderal Mayor APRI. Di samping beberapa nama sebelumnya, terdapat Ronomarsono, Soekarno (pimpinan Pesindo), dan D. Mangku. Semuanya merupakan aktivis-aktivis PKI. Sementara itu, Setiadjid tidak diketahui nasibnya. Mungkin ia meninggal dunia dalam pengembaraannya di hutan-hutan sebagai pelarian.

Beberapa Pendapat

Peristiwa pertentangan politik selama revolusi, Peristiwa Solo dan Madiun, serta operasi-operasi militer penumpasan pemerintah Fron Nasional men-

jadi peristiwa-peristiwa sejarah pada masa lampau. Kelompok-kelompok yang berkepentingan mencoba untuk menjelaskan latar belakang peristiwa-peristiwa tersebut. Sebagian mencoba melihat peristiwa-peristiwa itu sebagai usaha kaum komunis untuk merebut pimpinan Republik Indonesia. Sebagian lagi melihatnya sebagai usaha kaum antikomunis untuk menjebak kaum komunis dan menumpasnya atas nama keselamatan revolusi. Akan tetapi, penyebab-penyebab pasti dan objektif, mungkin tidak pernah diketahui. Ia hilang bersama hari yang terbenam.

Teori yang dikemukakan tentang Peristiwa Madiun dari pihak yang ditumpas (PKI) ialah teori provokasi. Menurut teori ini, pada puncak-puncak pertentangan politik antara pemerintah dan FDR, pihak Amerika Serikat mengadakan pendekatan kepada Soekarno-Hatta dan mengusulkan agar pemerintah membasmi komunis Indonesia. Mereka mencoba meyakinkan pemerintah bahwa Amerika Serikat menekan Belanda dalam persengketaan Indonesia-Belanda.

Katanya, suatu malam diadakan pembicaraan-pembicaraan di Sarangan antara Gerald Hopkins, Cuchrane (keduanya dari AS), Soekarno-Hatta, Natsir-Soekiman, Soekanto, dan Mohamad Roem. Dalam pembicaraan ini, Soekarno meminta agar AS mendukung Indonesia karena cita-cita Indonesia se-

suai dengan cita-cita *Declaration of Independence, Dafayette,* Pernyataan Hak-Hak Asasi Manusia dari Revolusi Prancis, serta Pakta Atlantik (*Atlantic Charter*). Hatta meminta hal yang sama dan memperlihatkan betapa kayanya Indonesia dengan bahan-bahan mentah yang diperlukan dunia Anglo Saxon.

Amerika Serikat sebenarnya meminta Indonesia agar *repture axec Lonfres* dan membasmi kaum komunis. Roger Villand melukiskan pembicaraan-pembicaraan tersebut sebagai berikut.

> Mais gu'e entendaient les Americans par "elimination" des elements communisants? Las communistes seraint bien plus troublants en liberte que dans 1'armee dont ils acceptaient la disipline.
> "Que fait on d'un soldant qui se mutine devant l'enemi? "On le fusille"
> "On L'elmine"
> "Les communites ne se mutineront pas. Ils sont restes jusqu'ici strictement fideles a la pplace de Fron national pour 1'independence". "C'est que votre police connati mal son metier."
> Les Americans accorderent aux Indonesiens jusqu'au lendemain matin pour "reflechir"[51]

Kisah tersebut dilanjutkan oleh D.N. Aidit. Pemerintah menerima desakan "imperialisme" Amerika Serikat dalam rangka mendapatkan dukungan menghadapi Belanda. Lagi pula, ketegangan-ketegangan dengan pihak FDR cukup besar. Karena itu,

mulailah usaha-usaha sistematis untuk menjebak PKI. Setelah terjadi pembunuhan Kolonel Sutarto, Slamet Widjaja dan Pardjio (aktivis PKI) dijebak oleh seorang agen tentara bernama Alip Hartojo. Alip mendekati mereka dan memberitahukan bahwa pemerintah akan membasmi PKI secara sistematis. Kepada kedua orang ini akan diberitahukan rencana-rencana detail jika mereka mau pergi ke Kampung Sudiroprajan. Mereka pergi ke sana, tetapi di tengah jalan mereka diculik dan diinterogasi tentang kegiatan/susunan FDR Solo. Mereka dipukuli dan setelah itu dibawa ke kamp resmi di Danurejan bersama Letkol Suharman dan Prodjosudodo. Mereka tidak diculik oleh alat-alat liar, tetapi oleh alat-alat negara. Kemudian, Alip dengan bantuan sepasukan tentara yang bermarkas di Srambatan (Siliwangi), menculik dan membunuh lima orang perwira lainnya. Dari sini bermula Peristiwa Solo. Letkol Suadi yang mendapatkan izin dari Panglima Besar untuk bertindak terhadap penculik-penculik ini (penyerbuan markas Srambatan oleh pasukan-pasukan Senopati), akhirnya dituduh memberontak. Kaum komunis telah terpancing oleh provokasi Hatta.[52]

Menurut PKI, di Madiun tidak terjadi *coup* atau pembentukan pemerintahan Soviet. Peristiwa yang terjadi di Madiun ialah insiden pelucutan senjata di antara pasukan-pasukan resmi, diikuti dengan pengangkatan Kepala Pemerintahan Daerah Madiun se-

mentara yang tetap mengakui kepemimpinan pemerintah pusat di Yogyakarta. Pembesar-pembesar militer dan sipil di Madiun menyetujui hal itu.

Pembelaan rakyat dan tentara terjadi setelah pidato Presiden Soekarno pada 19 September, yang memerintahkan serangan umum. Pembelaan diri ini diperkuat dengan disusunnya pemerintah Fron Nasional. Untuk membuktikan bahwa PKI tidak mempunyai rencana tersebut, disodorkan beberapa fakta. Kongres PBI pada 19 September di Kediri, Musso cs. berada di Purwodadi dan menuju Banyumas/Kedu pada waktu terjadi Peristiwa Madiun, pimpinan CC dalam rapat pada 17 September tidak menyinggung persoalan ini, rapat CC PKI Yogyakarta pada 19 September, serta Konferensi SBKA pada 18 September masih datang sebagaimana biasa.[53] Soeripno, yang dinilai sebagai intelektual jujur, menganggap bahwa *Madiun Affair* merupakan suatu *fait accompli* bagi mereka.

T.B. Simatupang, seorang teman pribadi yang menghormati Amir Sjarifudin, secara jujur menyatakan bahwa ia tidak memercayai teori provokasi. Ia hadir dalam sidang kabinet malam itu. Ia menyatakan ... "Kalau sekiranya 'teori provokasi' tadi benar, maka suasana dalam sidang itu seharusnyalah diliputi rasa lega, sebab dalam hal ini orang-orang akan berkata: 'Syukur mereka telah masuk perangkap provokasi kita.' Tetapi suasana waktu itu adalah

kebalikan dari itu. Bung Karno masih bertanya pada saya dalam pembicaraan di luar sidang: 'Amir itu maunya apa? *What will die Amir touch*?' Dan Bung Hatta berkata waktu itu: 'Sekarang soalnya adalah soal hidup atau mati. *Er op or er onder*.' Ini bukannya ucapan-ucapan dari seseorang yang merasa lega bahwa lawannya telah masuk perangkap 'provokasi' yang telah mereka pasang dengan lincah, seperti dikatakan 'teori provokasi' tadi."[54]

Sebaliknya, golongan anti-FDR menunjukkan bahwa PKI telah merencanakan untuk merebut kekuasaan negara. Mereka mencoba merebut kekuasaan negara melalui cara-cara parlementaris dan kalau perlu dengan kekerasan. Usaha kedua dilancarkan melalui fase rapat-rapat umum antipemerintahan, pemogokan-pemogokan, usaha-usaha menimbulkan kekacauan, dan akhirnya perebutan kekuasaan. Persoalan ini dihubungkan dengan garis keras Zhdanov setelah akhir 1947 serta pemberontakan-pemberontakan di Burma (sekarang Myanmar—*peny.*), Malaya (sekarang Malaysia—*peny.*), Filipina, dan Madiun. Hanya karena kecerobohan (Musso), kaum komunis pada akhirnya menghancurkan rencana-rencana mereka sendiri.

Kedua teori sebelumnya memiliki alasan-alasan yang masuk akal. Pembunuhan Kolonel Sutarto serta penculikan lima orang perwira Panembahan Senopati bukan aksi kriminal dan aksi individu be-

laka. Persoalannya harus dilihat dari kacamata politik yang ada waktu itu. Akan tetapi, untuk menghubungkan semuanya dengan usaha-usaha membasmi komunis merupakan sesuatu yang tidak tepat dan sangat tidak cukup bukti. Demikian pula culik-menculik antara Pesindo dan GRR (dr. Muwardi) tempat unsur-unsur Siliwangi di Srambatan terlibat,[55] bukan suatu hal sederhana untuk dijelaskan. Sampai batas-batas tertentu, keterangan CC PKI bahwa mereka tidak tahu-menahu perebutan kekuasaan di Madiun dapat diterima akal sehat. Apalagi sebagian besar pimpinan mereka berada di Yogyakarta dan dengan mudah digulung pemerintah.

Teori provokasi banyak kelemahannya karena TNI sama tidak siapnya menghadapi mereka. Hal ini dapat dilihat dari rencana Letjen Sudirman untuk mengosongkan Solo dari pasukan-pasukan Siliwangi. Jika memang pemerintah mau melakukan provokasi, pasti persediaan-persediaannya lebih sempurna. Demikian pula penjelasan Kolonel Simatupang, teman pribadi Amir yang hormat kepadanya, menunjukkan bahwa pemerintah tidak bersuka ria atas "provokasi"-nya.

Mencari sebab-sebab sejarah melalui fakta-fakta telanjang tidak mungkin. Persoalan "provokasi", "*fait accompli*", "rencana pemberontakan", dan lain-lain tidak menjawab persoalan-persoalan yang lebih fundamental. Persoalan ini hendaknya dilihat dari

persoalan-persoalan ketegangan masyarakat Indonesia (di Jawa) dalam revolusi nasional. Harapan-harapan yang tidak terpenuhi dan tekanan-tekanan ekonomi membawa frustrasi-frustrasi mendalam di seluruh lapisan masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, tendensi radikalisme segala pihak akan bertambah, lebih-lebih penyaluran-penyaluran politik dan ekonomi tidak (atau kurang) diberikan waktu itu. Radikalisme seperti perlombaan mobil di lereng gunung yang makin lama makin menyempit. Pasti suatu hari roda-roda berputar ini akan bersinggungan. Dari percikan-percikan api ini, semuanya akan dibakar. Akhirnya, hanya satu kelompok yang akan muncul. Setelah pemerintah menumpas FDR pada September/Oktober/November, tubrukan terjadi dengan grup GRR.

Persoalan akan lebih jelas setelah kita mempelajari periode sejarah ini dari aspek-aspek lain: sosial (perubahan-perubahan masyarakat setelah 1942), ekonomi (kehancuran dan perkembangan ekonomi Indonesia setelah perang), kebudayaan (pertentangan-pertentangan Islam-nasionalis, Sunda melawan Jawa), serta politis. Dari segi ini, kita harus memulainya kembali.

Daftar Pustaka

Koran dan Majalah

Bintang Merah

15 Desember 1950, 15 Februari 1951, September–Oktober 1953

Boeroeh

11 Desember 1945, 13 Desember 1945, 2 Januari 1946, 7 Januari 1946, 10 Januari 1946, 15 Januari 1946, 16 Januari 1946, 1 Februari 1947, 2 Januari 1947, 3 Januari 1947, 8 Januari 1947, 11 Februari 1947, 1 Maret 1947, 11 Maret 1947, 13 Maret 1947, 15 Maret 1947, 24 Maret 1947, 27 Maret 1947, 5 April 1947, 10 April 1947, 11 April 1947, 12 April 1947, 14 April 1947, 15 April 1947, 16 April 1947, 19 April 1947, 2 Mei 1947, 3 Mei

1947, 6 Mei 1947, 6 Juni 1947, 16 Juni 1947, 26 Juni 1947, 1 Juli 1947, 2 Ju1i 1947, 3 Juli 1947, 5 Juli 1947, 7 Juli 1947, 15 Juli 1947

Indonesia

1960, Agustus 1965, April 1968

Merdeka

22 November 1945

Nasional

16 Februari 1947, 17 Januari 1948, 31 Januari 1948, 6 Februari 1948, 11 Februari 1948, 16 Februari 1948, 17 Februari 1948, 24 Februari 1948, 26 Februari 1948, 20 Maret 1948, 15 April 1948, 18 Mei 1948, 15 Juli 1948, 16 Juli 1948, 10 September 1948, 16 September 1948, 23 September 1948, 18 Oktober 1948, 21 Oktober 1948, 26 Oktober 1948

Penghela Rakyat

5 Maret 1947, 13 Maret 1947, 24 Maret 1947, 31 Maret 1947, 1 April 1947, 11 April 1947, 30 April 1947, 2 Juni 1947, 10 Juli 1947

Revolusioner

13 Januari 1946, 19 Januari 1946, 26 Januari 1946, 2 Februari 1946, 9 Maret 1946, 30 Maret 1946, 1 Juni 1946, 20 Juli 1946, 19 Agustus 1948

Siasat

11 Juni 1948, 13 Juni 1948, 20 Juni 1948, 4 Juli 1948, 26 September 1948, 24 Oktober 1948

Sin Tit Po
1931–1942

Soeara Boeroeh
Januari 1947, 12 Juli 1947

Suara Ibukota
14 Agustus 1948

Buku

———. 1920. *These and the Statutes of the Third (Communist) International*. Diadopsi dari Kongres ke-2 pada 17 Juli 1920. Moskow: Publishing Office of Communist International.

———. 1968. *Siliwangi dari Masa ke Masa.* Jakarta: Fakta Mahjuma.

A. Brackman. tt. *Indonesian Communism.* London: Preager.

A.H. Nasution. 1963. *TNI.* Bandung: Ganaco.

A.M. Sipahoetar. tt. *Siapa-Siapa Loekisan tentang Pemimpin-Pemimpin.* Sukabumi: Tujuan Rakyat.

Benedict Anderson. 1952. "Pemuda Revolution". *Disertasi.* Ithaca, New York: Cornell University Press.

———. 1968. "Our Struggle". *Modern Indonesian Project.* Ithaca, New York: Cornell University Press.

Biro Pemuda Departemen PDK. 1965. *Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

D.N. Aidit. 1959. "Menggugat Peristiwa Madiun". Dalam *Pilihan Tulisan I.* Jakarta: Pembaharuan.

Derita Sp. 1949. *Lima Minggu Sebelum Madiun Affair.* Medan: Sarkawi.

Djamal Marsudi. 1966. "Menyingkap Pemberontakan PKI dalam Peristiwa Madiun". Jakarta: Merdeka Press.

F. Borkenau. tt. *World Communism, A History of the Communist International.* The University of Michigan Press.

George Mc. T. Kahin. 1952. *Nationalism and Revolution in Indonesia.* Ithaca, New York: Cornell University Press.

Harry J. Benda. 1966. "Reflections on Asian Communism". *The Yale Review*, Oktober 1966.

Kementerian Penerangan RI. 1951. *Kepartaian di Indonesia.* Jakarta.

Lembaga Sejarah PKI. 1960. *40 Tahun PKI.* Jakarta: Yayasan Pembaharuan.

———. 1961. *Pemberontakan Nasional Pertama di Indonesia (1926).* Jakarta: Yayasan Pembaharuan.

Mohamad Hatta. 1953. "Budak Stalin Mencari Trotsky ke Indonesia". *Kumpulan Karangan.* Jakarta, Amsterdam, Surabaya: Penerbit dan Balai Buku Indonesia.

Musso. 1953. *Jalan Baru untuk Republik Indonesia.* Jakarta: Yayasan Pembaharuan.

Notosoetarjo. 1966. *Peristiwa Madiun.* Jakarta: Endang Pemuda-Api Islam.

Parada Harahap. 1951. *Saat Bersejarah.* Jakarta: Gapura.

Parlaungan. 1956. *Tokoh-Tokoh Parlemen.* Jakarta: Gita.

Pinardi. 1967. *Peristiwa Coup Berdarah PKI September 1948 di Madiun.* Jakarta: Inkopak-Hazera.

Pramoedya A. Toer. 1950. "Kenangan pada Seorang Kawan". Dalam *Percikan Revolusi.* Jakarta: Gapura.

———. 1952. "Dia yang Menyerah". Dalam *Cerita dari Blora.* Jakarta: Balai Pustaka.

Robert C. North. 1963. "The Revolution in Asia: M.N. Roy". Dalam Leopold Labeldz. *Revisionism, Essay on History of Marxist Ideas.* London: Preager.

Roger Villand. 1915. *Boroboudour — Voyage a Bali, Java et autres ilen.* Italia: Correa.

Ruth T. McVey. 1954. "The Development of the Indonesian Communist Party". *Centre for International Studies,* M.I.9. Cambridge, Massachusset.

———. 1960. *The Communist Uprising of 1926–1927 in Indonesia: Key Documents.* Ithaca, New York: Modern Indonesia Project, Cornell University Press.

———. 1965. *The Rise of Indonesian Communism.* Ithaca, New York: Cornell University Press.

Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro. tt. *Sejarah Tentara Nasional Indonesia Komando Daerah Militer VII Diponegoro (Jawa Tengah).* tp.

Sekretariat Dewan Partai Sosialis Indonesia. 1956. *Politik dan Diplomasi.* Seri Didikan Politik. Jakarta.

Sidik Kertapati. 1964. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945.* Jakarta: Yayasan Pembaharuan.

Soedjono Djojoprajitno. 1962. *PKI Sibar Contra Tan Malaka.* Jakarta: Yayasan Masa.

Soetan Sjahrir. 1949. *Out of Exile.* New York: John Day.

———. 1950. *Renungan Indonesia.* Penerjemah H.B. Jassin. Jakarta: Pustaka Rakyat.

———. 1966. *Indonesische Overpeanzingen.* Amsterdam.

T.B. Simatupang. 1961. *Laporan dari Banaran.* Jakarta: Pembangunan.

Tan Malaka. 1960. *Pokok-Pokok Ajaran Tan Malaka (Murbaisme).* Seri Konsolidasi Partai. Jakarta.

———. tt. *Dari Penjara ke Penjara I.* Jakarta: Wijaya.

———. tt. *Dari Penjara ke Penjara III.* tp.



Catatan

Bab Satu

1. Biografi Mas Marco dan suasana waktu itu saya tuliskan pada waktu membuat skripsi sarjana muda saya, *Di Bawah Lentera Merah*, Universitas Indonesia, 1964. Dalam bentuk lebih sederhana lihat Soe Hok Gie, "Mas Marco Kartodikromo", *Indonesia*, Tahun XV, No. 2, Agustus 1965. Lihat pula untuk suasana zaman itu, Sartono Kartodirdjo, "Peristiwa dan Tokoh dari Sejarah Pergerakan Nasional", *Indonesia*, Tahun XI, 1960, hlm. 14–26 dan 130–138.
2. Lihat kata pendahuluan dari Harry J. Benda dalam Ruth T. McVey, *The Communist Uprising of 1926–1927 in Indonesia: Key Documents* (Ithaca, New York: Modern Indonesia Project, Cornell University Press, 1960).
3. *Ibid.*, hlm. xxi.

4. Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara I* (Jakarta: Wijaya, tt.), hlm. 86.
5. Istilah "amuk-amukan" merupakan istilah Darsono, kawan pribadi Musso yang dinyatakan kepada penulis dalam wawancara pada 1964.
6. Ruth T. McVey, *The Rise of Indonesian Communism* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1965), hlm. 168–169.
7. *Ibid.*, hlm. 167–168.
8. *Ibid.*, hlm. 460.
9. Lembaga Sejarah PKI, *Pemberontakan Nasional Pertama di Indonesia, 1926* (Jakarta: Yayasan Pembaharuan, 1961), hlm. 53.
10. Untuk membuat bagian ini, saya mempergunakan dua sumber yang bertentangan satu dengan yang lain. Dari pihak grup Tan Malaka lihat buku Soedjono Djojoprajitno, *PKI Sibar Contra Tan Malaka* (Jakarta: Yayasan Masa, 1962(?)). Tentang sikap resmi PKI, *Pemberontakan* .... Tentang sikap resmi tidak resmi tokoh-tokoh Komintern, lihat Ruth T. McVey, *The Rise* ..., hlm. 330.
11. Ruth T. McVey, *The Rise* ..., hlm. 330.
12. *Ibid.*, hlm. 334–340.
13. *Ibid.*, hlm. 347.
14. *Ibid.*, hlm. 348–349.
15. Wawancara dengan Hatta, 25 September 1967.
16. Lembaga Sejarah PKI, *Pemberontakan* ..., hlm. 126.
17. *Ibid.*, hlm. 128.
18. Wawancara dengan Hatta, 25 September 1967.
19. Ruth T. McVey, *The Rise* ..., hlm. 59.
20. *These and the Statutes of the Third (Communist) International*, diadopsi dari Kongres ke-2 pada 17 Juli 1920 (Moskow: Publishing Office of Communist International, 1920), dicetak ulang oleh United

Communist Party of America (tanpa penerbit, tt.), hlm 75. Tentang pertentangan-pertentangan Roy-Lenin, lihat Robert C. North, "The Revolution in Asia: M.N. Roy"; dalam buku Leopold Labeldz, *Revisionism, Essay on History of Marxist Ideas* (London: Preager, 1963).

21. F. Borkenau, *World Communism, a History of the Communist International* (The University of Michigan Press), hlm. 382–385.
22. CC PKI, "Perjuangan Putera Indonesia di Australia", *Penghela Rakyat*, 11 April 1947.
23. Lihat misalnya tulisan Moh. Hatta, "Budak Stalin Mencari Trotsky ke Indonesia", *Kumpulan Karangan* (Jakarta, Amsterdam, Surabaya: Penerbit dan Balai Buku Indonesia, 1953), hlm. 137–140.
24. Tuntutan 18 pasal ini dimuat dalam buku *40 Tahun PKI* (Jakarta: Yayasan Pembaharuan, 1960), hlm. 34–35.
25. Soedjono Djojoprajitno, *PKI Sibar ...*, hlm. 17.
26. Penulis berpendapat bahwa kedatangan Musso merupakan sesuatu yang masuk akal jika melihat cara-cara bertanya pada 1948.
27. *40 Tahun PKI*, hlm. 48. Keterangan tentang Achmad Sumadi lihat Parlaungan, *Tokoh-Tokoh Parlemen* (Jakarta: Gita, 1956), hlm. 273.
28. Benedict Anderson, "Pemuda Revolution", *Disertasi* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1952), hlm. 272–273.
29. George Mc. T. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1952), hlm. 272–273.
30. Soedjono Djojoprajitno, *PKI ...*, hlm. 75.
31. George Mc. T. Kahin, *Nationalism ...*, hlm. 112.

32. Keterangan mengenai grup *Sin Tit Po* penulis dapatkan selama bekerja sebagai asisten Marry Sommers dan membaca koran *Sin Tit Po* 1931–1942.
33. Untuk biografi Tjugito dan Sudisman, lihat Parlaungan, *Tokoh-Tokoh* ..., hlm. 292 dan 308.
34. Wawancara dengan Soebadio Sastrosatomo di Jakarta, 22 Maret 1968.
35. Biro Pemuda Departemen PDK, *Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1965), hlm. 187.
36. Aktif di Gerindo sejak 1940. Lihat Parlaungan, *Tokoh-Tokoh* ..., hlm. 268.
37. *Ibid.*, hlm. 271, sejak 1937.
38. *Ibid.*, hlm. 283, sejak 1937.
39. *Ibid.*, hlm. 287, sejak 1941.
40. *Ibid.*, hlm. 290, sejak ....
41. *Ibid.*, hlm. 295, sejak 1939.
42. *Ibid.*, hlm. 297, sejak 1937.
43. *Ibid.*, hlm. 308, sejak 1941.
44. Benedict Anderson, *Pemuda* ..., hlm. 235.
45. Wawancara dengan Soebadio Sastrosatomo di Jakarta, 22 Maret 1968.
46. Wawancara dengan Sumitro Djojohadikusumo (selanjutnya disebut Sumitro) di Jakarta, 15 Januari 1968.
47. *Ibid.*
48. Wawancara dengan Hatta di Jakarta (25 September 1967) dan Sumitro (15 Januari 1968).
49. Wawancara dengan Hatta di Jakarta, 25 September 1967.
50. Wawancara dengan Sumitro di Jakarta, 15 Januari 1968.
51. Kemudian ia menikah dengan Sundari—seorang temannya dalam gerakan bawah tanah. Setelah

Maruto ditembak mati di Ngalihan, Ny. Maruto menikah dengan Jusuf Muda Dalam—seorang rekan komunis mereka. Tragis sekali karena Jusuf juga dijatuhi hukuman mati pada 1966.

52. Wawancara dengan Sumitro di Jakarta, 15 Januari 1968.
53. *Ibid.*
54. *Ibid.*
55. Soeripno, "Gerakan Bawah Tanah Indonesia terhadap Fasis", *Boeroeh*, 8 Januari 1947.
56. Wawancara dengan Sumitro di Jakarta, 15 Januari 1968.
57. Soeripno, "Gerakan ...".
58. Benedict Anderson, *Pemuda* ..., hlm. 308.
59. Suasana perpecahan di Digul dapat dilihat dalam Soedjono Djojoprajitno, *PKI* ..., hlm. 69–99.
60. Lembaga Sejarah PKI, *Pemberontakan* ... (Jakarta: Yayasan Pembaharuan, 1961), hlm. 92.
61. Untuk menulis bagian ini, saya mempergunakan "pembelaan" PKI terhadap Sibar yang dimuat dalam harian *Penghela Rakyat*. Tulisan ini merupakan penjelasan resmi CC PKI, "Perjuangan Putera Indonesia di Australia," dimuat pada 2–3, 5–6, 9–12 1957.
62. Menurut saya, kebenaran soal ini terdapat di tengah. Di kalangan Komite Antifasis terdapat orang-orang yang motifnya jujur antifasis dan melihat bahwa kerja sama dengan Belanda sebagai suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Sebaliknya, golongan-golongan oportunis yang ingin dibebaskan hendak menggunakan kesempatan ini tanpa kehilangan muka. Perpecahan PKI-Murba yang dimulai sejak 1926 diperhebat dengan adanya garis baru Komintern.

63. Soedjono Djojoprajitno, *PKI ...*, hlm. 77–78.
64. Sajak ini merupakan sajak Henriëtte Roland Holst, seorang penyair wanita Belanda. Sewaktu Ali Archam meninggal dunia, semua orang dewasa "diguyur" air dingin sebagai penghormatan terhadap sikap pribadi Ali Archam yang kuat dan pantang menyerah. Baik PKI maupun Murba menghormatinya sampai sekarang. Sajak ini dikutip dari *Pemberontakan ...*, hlm. 95.

Bab Dua

1. Benedict Anderson, *Pemuda ...*, hlm. 139.
2. A. Brackman, *Indonesian Communism* (New York-London: Preager), hlm. 35.
3. Wawancara dengan Soebadio Sastrosatomo (selanjutnya disebut Soebadio), Jakarta, 1966.
4. Soetan Sjahrir, *Out of Exile* (New York: John Day, 1949).
5. Sidik Kertapati, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945* (Jakarta: Yayasan Pembaharuan, 1964), hlm. 25–26. Tidak jelas apakah Geraf merupakan organisasi yang dibuat oleh Amir Sjarifudin ataukah hanya salah satu sel/kelompok yang dibinanya. Sampai seberapa jauh kebenaran aktivitas Geraf juga tidak dapat dicek karena sumber tentang Geraf hanya dari Sidik Kertapati. Penulisannya lebih bersifat propaganda politis daripada sebuah usaha untuk menuliskan sejarah. Hatta sendiri (wawancara 15 September 1967, Jakarta) tidak pernah mendengar tentang Geraf dan tidak percaya jika dr. Tjipto yang dikenalnya secara baik mau bergabung dalam gerakan komunis.

6. *Ibid.*, hlm. 28.
7. A. Brackman, *Indonesian ...*, hlm. 35.
8. Sidik Kertapati, *Sekitar ...*, hlm. 29.
9. Wawancara dengan Hatta di Jakarta, 15 September 1967.
10. A. Brackman, *Indonesian ...*, hlm. 35. Tokoh-tokoh pemuda yang penulis tanya tentang Widarta, semuanya menjawab tidak kenal (Soebadio, Hatta, Dr. Soedarsono). Mereka hanya pernah mendengar namanya.
11. Untuk biografi singkat lihat A.M. Sipahoetar, *Siapa-Siapa Loekisan tentang Pemimpin-Pemimpin* (Sukabumi: Tujuan Rakyat, tt.), hlm. 52–57.
12. Sidik Kertapati, *Sekitar ...*, hlm. 69.
13. *Ibid.*, hlm. 31.
14. Benedict Anderson, *Pemuda ...*, hlm. 235.
15. Sidik Kertapati, *Sekitar ...*, hlm. 27.
16. Sidik Kertapati, *Sekitar ...*, hlm. 64–65.
17. Biro Pemuda Departemen PDK, *Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1965), hlm. 115.
18. Sidik Kertapati, *Sekitar ...*, hlm. 60–61.
19. Wawancara dengan Mr. Soebardjo di Jakarta, 23 Desember 1967.
20. *Ibid.*, hlm. 66–67.
21. A. Brackman, *Indonesian ...*, hlm. 35.
22. Saya tidak membicarakan jalannya peristiwa di sekitar proklamasi karena cukup banyak yang diketahui mengenai liku-liku proklamasi. Sjahrir menulis dalam *Out of Exile* (New York: John Day, 1949). Moh. Hatta menulis dalam "Legende dan Realitet Sekitar Proklamasi 17 Agustus", dalam Osman Ralib, *Documenta Historica*. Lampiran Soekarno dalam autobiografinya, *Soekarno as Told to*

Cindy Adams. Demikian pula Sidik Kertapati dalam *Sekitar Proklamasi 17 Agustus* serta Adam Malik dalam *Di Sekitar Peristiwa Proklamasi*.

23. Raden Gatot Mangoenpradja, "The Peta and My Relations with the Japanese", *Indonesia*, No. 5, April 1968, hlm. 125.
24. Sidik Kertapati, *Sekitar ...*, hlm. 24 dan 70.
25. *Ibid.*, hlm. 31.
26. Menurut Soebadio (wawancara 22 Maret 1968), ia pernah menerima siaran Menara Merah dari Ir. Sakirman. Bandingkan *silent protest* ini dengan penulisan-penulisan naskah sastra bawah tanah Idrus.
27. Jusuf Muda Dalam adalah pemegang senapan mesin yang menembak konvoi tentara Jerman. Pekerjaan ini berbahaya sekali (wawancara dengan Sumitro, 15 Januari 1968).
28. Keterangan Nugroho Notosusanto yang hadir ketika rapat umum Ikada kepada penulis pada 1968.
29. Biro Pemuda Departemen PDK, *Sejarah ...*, hlm. 159.
30. Benedict Anderson, *Pemuda ...*, hlm. 333.
31. Tentang riwayat Aidit dan Lukman pada minggu-minggu pertama proklamasi, lihat *Bintang Merah*, No. 9–10, September–Oktober 1953, hlm. 479–482.
32. *Merdeka*, 22 November 1945; lihat pula Ruth T. McVey, "The Development of the Indonesian Communist Party", Centre for International Studies, M.I.9. (Cambridge Massachusset, 1954), hlm. 26.
33. Berita tentang berdirinya Laskar Merah, lihat *Boeroeh*, 2 Januari 1946.
34. Soal PKI Jusuf dan Peristiwa Cirebon, lihat Benedict Anderson, *Pemuda ...*, hlm. 627–637. Lihat juga

Siliwangi dari Masa ke Masa (Jakarta: Fakta Mahjuma, 1968(c)), hlm. 99–103.

35. Soal teoretis *home grown communist* dibicarakan juga oleh Harry J. Benda dalam "Reflections on Asian Communism", *The Yale Review*, Oktober 1966, hlm. 1–16. Benda menyatakan bahwa *home grown communist* selalu lebih berhasil karena mereka berakar pada situasi sosial masyarakat.
36. A. Brackman, *Indonesian ...*, hlm. 55. Bandingkan dengan *40 Tahun PKI* (Jakarta: Yayasan Pembaharuan, 1960), hlm. 49. Jusuf adalah seorang komunis yang baik, tetapi kacau dengan politik PKI selama Revolusi Agustus. Ia tidak dapat memahami mengapa PKI tidak muncul memimpin revolusi. Ia mengorganisasikan partai menyimpang dari pimpinan partai. Partai tidak memiliki pilihan lain, kecuali mengutuknya.
37. Wawancara dengan Soebadio, Jakarta, 21 Maret 1968.
38. Ruth T. McVey, " The Development ...", hlm. 32.
39. Soedjono Djojoprajitno, *PKI SIBAR ...*, hlm. 20–21 (keterangan Djamaludin Tamin).
40. Benedict Anderson, *Pemuda ...*, hlm. 631.
41. Teksnya dimuat di *Merdeka*, 11 Mei 1946. Saya mengutip dari Ruth T. McVey, "The Development ...", hlm. 33.

Bab Tiga

1. Soetan Sjahrir, *Indonesische overpeanzingen* (Amsterdam, 1966 (*raerde druk*)), melukiskan pandangan-pandangan hidup Sjahrir. Lihat pula *Renungan Indonesia* yang diterjemahkan H.B. Jassin (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1950).

2. Semua ide Sjahrir saya singkatkan serara bebas dari bukunya *Perjoeangan Kita* (tp., tt). Menurut George Mc T. Kahin, *Nationalism* ..., hlm. 166, kata "anjing" dibuang dalam edisi-edisi berikutnya. Lihat pula terjemahan Inggrisnya oleh Benedict Anderson, "Our Struggle", *Modern Indonesian Project* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1968).
3. Keterangan Soebadio Sastrosatomo, 22 Maret 1968. Lihat juga Sekretariat Dewan Partai Sosialis Indonesia, *Politik dan Diplomasi*, Seri Didikan Politik (Jakarta, 1956), hlm. 12–18.
4. Agak sulit mensistematiskan pokok-pokok pikiran Tan Malaka. Buku yang saya gunakan adalah *Dari Penjara ke Penjara III*, stensilan (tp., tt.) dan *Pokok-Pokok Ajaran Tan Malaka*, seri konsolidasi partai (Jakarta—*SHG*), 1960.
5. Wawancara dengan Suharto di Jakarta (sekarang menetap di Semarang) pada 1967. Mungkin sekali perwira-perwira tersebut dari grup Kaigun yang pro-Indonesia. Mereka datang dengan sarung dan peci.
6. Wawancara dengan Semaoen di Jakarta, 1964.
7. Wawancara dengan Dr. Soedarsono di Jakarta, 22 September 1967. Lihat pula George Mc T. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, hlm. 148–149.
8. Wawancara dengan Hatta di Jakarta, 25 September 1967. Bandingkan dengan versi Kahin (seperti sebelumnya) yang agak berbeda. Bandingkan dengan versi Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara III*, stensilan (tp., tt.), hlm. 63.
9. Tan Malaka, *Pokok-Pokok Ajaran Tan Malaka* (*Murbaisme*), seri konsolidasi partai (Jakarta, 1960), hlm. 16–17.

10. Wawancara dengan Mr. Soebardjo di Jakarta, 23 Desember 1967.
11. George Mc T. Kahin, *Nationalism ...*, hlm. 158.
12. Wawancara dengan Soebadio Sastrosatomo di Jakarta, 22 Maret 1968.
13. Harian *Boeroeh.*, 22 Desember 1945.
14. Menurut pembagian Benedict Anderson, *Pemuda ...*, hlm. 305–306, ditambah dengan keterangan-keterangan Soebadio Sastrosatomo.
15. Benedict Anderson, *Pemuda ...*, hlm. 334.
16. SOBSI bagian penerangan, "Perjuangan Buruh di Indonesia", *Penghela Rakyat*, 30 April 1947.
17. *Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia*, hlm. 168.
18. Benedict Anderson, *Pemuda ...*, hlm. 373–376.
19. *Ibid.*, hlm. 373–374. Lihat pula *Sejarah ...*, hlm. 168.
20. *Ibid.*, hlm. 375.
21. *Boeroeh*, 11 Desember 1945.
22. Pidato Alimin di muka Barisan Tani Indonesia (BTI), *Boeroeh*, 2 Januari 1947. Alimin lebih mengetahui problem mekanisasi pertanian di Rusia daripada persoalan-persoalan pertanian di Indonesia.
23. Misalnya, keputusan BTI tentang rencana mekanisasi pertanian di Indonesia pada 1947. Lihat pula Bab Empat.
24. SOBSI bagian penerangan, "Perjuangan Buruh di Indonesia", *Penghela Rakyat*, 30 April 1947.
25. Pada 1949, basis-basis ini telah berakar di kalangan buruh Jakarta. Sjam waktu itu berhasil menolong Aidit yang baru pulang dari luar negeri dan masuk menyelundup ke Indonesia melalui Tanjung Priok. Aidit diselundupkan oleh buruh-buruh komunis (keterangan wartawan *Sinar Harapan* yang mewawancarai tim Kalong kepada penulis (Jakarta, 1967).

26. Komposisi SB SOBSI kongres (lihat *Soeara Boeroeh*, 12 Juli 1947) adalah sebagai berikut.

Sentral Biro	:	Hardjono (Ketua Umum), Setiadjid (Wakil), Nyono (Sekretaris Umum), S. Widjodinoto (Wakil), Hartono (Bendahara), Soekirno (Wakil Bendahara, mencakup pembelaan)
Organisasi	:	Soerjosoepadmo (Ketua), Oemar Said (Wakil), Sardjoe, Moh. Sastradiredja
Sosial	:	Affandi (Ketua), Koeshartini (Wakil), J. Soedjaprawira, Soenarjo Mangoenpoespito
Ekonomi	:	E. Coerdian (Ketua), Soedjoko (Wakil), Hadipranoto, Sabariman
Penerangan	:	Oei Gee Hwat (Ketua), Wahjono (Wakil), Boejoeng Saleh, Islan
Pendidikan	:	Djohan Sjahroesah (Ketua), Achmad Sumadi (Wakil), Gondopratomo, Siti Karlinah
Wanita	:	Soeparmi (Ketua), Arsiah (Wakil), Ny. Soemadi
Luar Negeri	:	Hardjono (Ketua), Soehadinoto, Setiadi, Handojo, Maruto Darusman, Bambang Susilo, Achmad Sumadi
Perencanaan	:	Asrarodin (Ketua), Djoko Soedjono (Wakil), Danuhusodo, Harjadi, Maruto Darusman, K. Werdojo, Koernan, Mr. Dr.

Soeripto, Hardjono,
S.K. Trimurti

27. Wawancara dengan Soebadio Sastrosatomo di Jakarta, 22 Maret 1967.
28. *Boeroeh*, 10 April 1947.
29. *Boeroeh*, 16 Juni 1947.
30. A.D. Noesantara, "Interviu Kilat dengan Saudara Alimin", *Revolusioner*, 17 September 1947.
31. *Penghela Rakyat*, 13 Maret 1947.
32. S. Soegijono, "Tentara dan Revolusi", *Boeroeh*, 1 Maret 1947. Setiap Minggu Soegijono menulis rubrik tentara dan masyarakat. Diusahakan agar publik (termasuk tentara) setuju dengan ide-idenya.
33. S. Soegijono, "Isi, Jiwa dan Tradisi Tentara", *Boeroeh*, 15 Maret 1947.
34. Martono Tirtonegoro, "Tentara Tetap dan Seleksi", *Boeroeh*, 14 April 1947.
35. *Boeroeh*, 2 Mei 1947.
36. Penjelasan Mosi Sayap Kiri, *Boeroeh*, 15 April 1947.
37. Kolonel A.H. Nasution, *TNI* (Bandung: Ganaco, 1963), hlm. 269.
38. *Ibid.*, hlm. 238–275.
39. *Ibid.*, hlm. 270.
40. Wawancara dengan Hatta di Jakarta, 25 September 1967. Ide dualisme dalam tentara bukan ide komunis. Dalam pimpinan ketentaraan komunis, badan perlawanan rakyat selalu dipegang oleh satu komando. Di Indonesia, kaum komunis mencoba membangun TNI Masyarakat karena tidak berhasil menguasai tentara. Bandingkan dengan ide Angkatan ke-5 dalam 1965.
41. Pada naskah asli tidak terbaca (*ed.*).
42. Bedanya, kaum komunis Vietnam tidak dikuasai

oleh agen-agen Komintern, tetapi oleh *home grown* komunis. Di samping berunding tentang uni Prancis-Vietnam, mereka mempersiapkan tentara yang kuat.

43. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia VIII*, hlm. 175. Dalam naskah tidak terdapat nama pengarang. Dari penelitian redaksional maupun keterangan-keterangan lain dapat dipastikan bahwa penulisnya adalah A.H. Nasution, selanjutnya disebut tanpa nama pengarang.
44. Penjelasan Mosi Sayap Kiri, *Boeroeh*, 3 Januari 1947.
45. Hardjono, anggota SB SOBSI, "Sikap Boeroeh terhadap Naskah", 7–8 Januari 1947.
46. *Boeroeh*, 1 Februari 1947.
47. George Mc T. Kahin, *Nationalism* ..., hlm. 155.
48. Benedict Anderson, *Pemuda* ..., hlm. 411.
49. Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara III*, stensilan (tp., tt.), hlm. 56.
50. *Boeroeh*, 16 Januari 1946.
51. Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara III* (tp., tt.), hlm. 56.
52. *Ibid*.
53. *Boeroeh*, 7 Januari 1946.
54. Benedict Anderson, *Pemuda* ..., hlm. 463.
55. Tan Malaka, *Dari Penjara* ..., hlm. 63.
56. Pesindo keluar pada 14 Maret 1946, *Revolusioner*, 9 Maret 1946.
57. Tan Malaka, *Dari Penjara* ..., hlm. 95.
58. Benedict Anderson, *Pemuda* ..., hlm. 491.
59. Tan Malaka, *Dari Penjara* ..., hlm. 95. Ironis sekali bahwa Tan Malaka ditangkap oleh pemerintahan Sjahrir dan tidak pernah diadili karena ia melakukan oposisi terhadap garis politik Sayap Kiri.

Lima belas tahun kemudian, Sjahrir yang ditangkap karena oposisinya. Seperti juga Tan Malaka, Sjahrir tidak pernah diadili. Seolah-olah sejarahnya berulang sendiri.

60. Benedict Anderson, *Pemuda ...*, hlm. 491.
61. *Ibid.*, hlm. 549.
62. *Boeroeh*, 3 Mei 1947.
63. Keterangan D.N. Aidit, *Boeroeh*, 19 April 1947.
64. Ruth. T. McVey, *The Development ...*, hlm. 421.
65. *Ibid.*, hlm. 40.
66. Lihat *Soeara Boeroeh*, Januari 1947.
67. SM. Ali, "Mau Dibawa ke Mana?", *Boeroeh*, 12 April 1947.
68. Pidato Hardjono (Ketua SOBSI) pada 1947 di Alun-Alun Yogya, *Boeroeh*, 2 Mei 1947.
69. *Boeroeh*, 11 Februari 1947.
70. *Boeroeh*, 6 Juni 1947.
71. *Penghela Rakyat*, 1 April 1947.
72. *Boeroeh*, 13 Maret 1947.
73. Siaran Kilat CC PKI, *Boeroeh*, 27 Maret 1947.
74. Keterangan pendek dari PKI (Merah), *Boeroeh*, 5 April 1947.
75. *Boeroeh*, 11 April 1947.
76. *Penghela Rakyat*, 31 Maret 1947.
77. Ruth T. McVey, *The Development ...*, catatan no. 67.
78. Hardjono, "Perjuangan Buruh dan Parlementarisme", *Boeroeh*, 11 Maret 1947. Ucapan Ketua SOBSI ini sangat menarik karena sikap reformis PKI waktu itu. Padahal, fungsi parlemen sebagai lembaga borjuis bagi komunis merupakan mimbar agitasi. "Each Communist member must agreements with the other legislator, but an agitator of the party, detailed into enemy's camp in order to carry out

the orders of the Party there", *Thesis and Statues of the Third (Communist) International*, hlm. 52.

79. Dalam naskah asli tidak tertulis (*ed.*).
80. Parada Harahap, *Saat Bersejarah* (Jakarta: Gapura, 1951), hlm. 28. Singkatan-singkatan pidato wakil-wakil partai/golongan terdapat di sana.
81. *Ibid.*, hlm. 42. Lihat George Mc T. Kahin, *Nationalism ...*, hlm. 203.
82. Dalam naskah asli tidak tertulis (*ed.*).
83. *Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia*, hlm. 178.
84. *Boeroeh*, 24 Maret 1947.
85. *Boeroeh*, 3 Juli 1947.
86. George Mc T. Kahin, *Nationalism ...*, hlm. 207–208.
87. Ruth T. McVey, *The Development ...*, hlm. 47. Dari peristiwa jatuhnya Sjahrir terlihat bahwa di dalam PKI cukup banyak golongan yang ingin mengambil sikap keras terhadap Belanda. Golongan Surabaya terutama merupakan golongan yang paling curiga terhadap Sjahrir dan "bensin" untuk perpecahan di dalam PS. Jika mereka lepas dari kontrol disiplin, dapat ditegakkan kembali oleh "Setiadjid" yang berpengaruh. Mereka patuh kepada garis "Komintern" bukan karena yakin.
88. D.N. Aidit, "Tengkolak Rakyat", *Boeroeh*, 1 Juli 1947.
89. Hasnan, "Sabotase dalam Pembentukan Kabinet", *Boeroeh*, 2 Ju1i 1947.
90. Hasnan, "Tolol dan Curang", *Boeroeh*, 7 Juli 1947.
91. Nyoto, "Aktivieteit Promotor Imperialis", *Boeroeh*, 2 Juli 1947.
92. *Boeroeh*, 15 Juli 1947.
93. *Boeroeh*, 5 Juli 1947.
94. *Penghela Rakyat*, 10 Juli 1947.
95. *Boeroeh*, 5 Juli 1947.

96. *Sejarah Tentara Nasional Indonesia Kodam VII Diponegoro, Jawa Tengah* (tp., tt.), hlm. 137–138.
97. George Mc T. Kahin, *Nationalism* ..., hlm. 221.
98. George Mc T. Kahin, *Nationalism* ..., hlm. 224–229.
99. Jenderal Mayor. T.B. Simatupang, *Laporan dari Banaran* (Jakarta: Pembangunan, 1961), hlm. 96.

Bab Empat

1. Sjahrir, kata pengantar *Perjoeangan Kita* (tp., tt.).
2. Pramoedya Ananta Toer, "Dia yang Menyerah", dalam *Cerita dari Blora* (Jakarta: Balai Pustaka, 1952), hlm. 279–280.
3. *Boeroeh*, 13 Desember 1945.
4. Jika kita membaca novel-novel dari zaman revolusi, terdapat pelukisan suasana tersebut. Idrus dalam "Surabaya" misalnya, menceritakan orang yang memakai merah-putih-biru (baju, kaos, dan warna sandal) dapat dibunuh. Pramoedya Ananta Toer juga melukiskan "histeris" massa berkaitan demam mata-mata Belanda, di dalam buku *Subuh*.
5. *Revolusioner*, Tahun I, ?, 13 Januari 1946.
6. Keterangan Drs. Nugroho Notosusanto, Februari 1968.
7. Disalin menurut versi harian *Boeroeh*, 10 Januari 1946.
8. *Revolusioner*, Tahun I, No. 5, 2 Februari 1946.
9. Wawancara dengan Mochtar Lubis di Jakarta, September 1967.
10. *Revolusioner*, Tahun I, No. 26, 20 Juli 1946.
11. *Ibid.*, Th. I, No. 13, 30 Maret 1946.
12. *Boeroeh*, 16 Juni 1947.
13. Wawancara dengan Mochtar Lubis, September 1968.

14. *Revolusioner*, Tahun I, No. 13 (30 Maret 1946) dan No. 18 (1 Juni 1946).
15. Di dalam Revolusi Rusia, ide-ide yang menganggap bahwa institusi kekeluargaan merupakan sisa borjuis pernah muncul, kemudian dikecam oleh Lenin.
16. D.N. Aidit, "Pembangunan Revolusioner Mesti Dimulai dari Desa", *Boeroeh*, 6 Mei 1947.
17. D.N. Aidit, "Takhyul dan Teknifikasi", *Boeroeh*, 15 Maret 1947.
18. Suasana "lampu Aladin" digambarkan oleh Nasution secara tajam dan luas di dalam buku *TNI*.
19. Menarik sekali bagaimana sekolah pada 1966, tahun dimulainya suatu orde yang baru di Indonesia. Demam modernisasi dan pembaruan juga melanda Indonesia.
20. Sjahrir, *Perjoeangan* ..., hlm. 29–30.
21. George Mc T. Kahin, *Nationalism* ..., hlm. 164–167.
22. Istilah Benedict Anderson; *bucho* istilah bahasa Jepang yang berarti kepala kantor.
23. Benedict Anderson, *Pemuda* ..., hlm. 167.
24. Tajuk Rencana *Boeroeh*, 15 Januari 1946; lihat juga Benedict Anderson, *ibid.*, hlm. 508.
25. *Boeroeh*, 16 April 1947.
26. Peristiwa Tiga Daerah terjadi pada Desember 1945. Perkaranya mulai diperiksa kira-kira Mei 1947.
27. *Boeroeh*, 10 Januari 1946.
28. Benedict Anderson, *Pemuda* ..., hlm. 300.
29. *Penghela Rakyat*, 2 Juni 1947.
30. *Revolusioner*, Tahun I, No. 4, 26 Januari 1946.
31. Nasution, *TNI* ..., hlm. ?.
32. George Mc T. Kahin, *Nationalism* ..., hlm. 252.
33. *Revolusioner*, Tahun I, No. 3, 19 Januari 1946.
34. *Penghela Rakyat*, 10 Juli 1947.

35. Oei Gee Hwat, "Haya Tjikowa", *Penghela Rakyat*, 24 Maret 1947.
36. *Penghela Rakyat*, 2 Juni 1947.
37. Wawancara dengan Ny. Wiroreno, 17 Maret 1968.
38. Wawancara dengan Soebadio Sastrosatomo di Jakarta, 22 Maret 1968.
39. Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *Sejarah Tentara Nasional Indonesia Komando Daerah Militer VII Diponegoro, Jawa Tengah* (tp., tt.), hlm. 116.
40. *Ibid.*, hlm. 256–257.
41. D.N. Aidit, "Bahaya *American Minded*", *Boeroeh*, 26 Juni 1947.
42. Penulis menilai Aidit waktu itu sebagai *the angry and frustrated young man* dan sikapnya merupakan sikap umum pemuda revolusioner.
43. D.N. Aidit, "Bahaya *American Minded*", *Boeroeh*, 26 Juni 1947.
44. D.N. Aidit, "Kaum Kerja dan Parlementerisme", *Penghela Rakyat*, 5 Maret 1947.
45. *Siasat*, 13 Juni 1948.
46. George Mc T. Kahin, *Nationalism* ..., hlm. 261.
47. *Nasional*, 6 Februari 1948.
48. *Nasional*, 11 Februari 1948.
49. A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 192.
50. A.H. Nasution, *Sekitar* ..., hlm. 284.
51. Dalam Mei 1947, SOBSI menuntut rasionalisasi, *Nasional*, 16 Februari 1947.
52. *Ibid.*
53. *Siasat*, 20 Juni 1948.
54. Soal Dr. Nainggolan, lihat George Mc T. Kahin, *Nationalism* ..., hlm. 180.
55. Wawancara dengan Ny. Wiroreno, 17 Maret 1968.

56. A.H. Nasution, *Sekitar ...*, hlm. 277–278.
57. *Ibid.*

Bab Lima

1. Wawancara dengan Hatta di Jakarta, 25 September 1967.
2. *Nasional*, 17 Januari 1948.
3. A. Brackman, *Indonesian ...*, hlm. 68.
4. Wawancara dengan Hatta di Jakarta, 25 September 1967.
5. Djamal Marsudi, *Menyingkap Pemberontakan PKI dalam Peristiwa Madiun* (Jakarta: Merdeka Press, 1966), hlm. 35.
6. *Nasional*, 17 Januari 1948.
7. *Nasional*, 17 Januari 1948.
8. Ruth T. McVey, *The Soviet View of the Indonesian Revolution*, hlm. 47.
9. Konferensi ini mula-mula direncanakan di Indonesia pada November 1947. Ketika wakil-wakil World Federation of Democratic Youth (berafiliasi dengan kaum komunis) datang ke Indonesia, mereka amat puas dengan situasi Indonesia. Kota Madiun dipilih menjadi tempat pertemuan festival pemuda. Akan tetapi, karena serangan Belanda pada Juli 1947, keputusan tersebut diubah karena Indonesia dianggap tidak aman. Akhirnya, pertemuan dipindahkan ke Calcuta dan dilaksanakan pada Februari 1948. Lihat Ruth T. McVey, *The Soviet ...*, hlm. 38–46.
10. Ruth T. McVey, *The Soviet ....*
11. Wawancara dengan Soebadio Sastrosatomo di Jakarta, 22 Maret 1968.
12. Penjelasan keadaan politik dari Dewan Harian

Bersama Menteri Sayap Kiri dimuat dalam buku Djamal Marsudi, *Menyingkap ...*, hlm. 32–35. Alasan-alasan formal berdirinya Partai Sosialis Indonesia lihat *Kepartaian di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Penerangan RI, 1951), hlm. 298–299.

13. Susunan pengurus PSI lihat *Nasional*, 16 Februari 1948. Pendiri-pendirinya lihat *Kepartaian di Indonesia*, hlm. 299.
14. Tentang sikap terhadap Hatta dalam masalah Sumatra dan Jawa lihat "Keadaan Kehidupan Politik Indonesia" (lihat catatan kaki No. 17, Bab Satu).
15. A. Brackman, *Indonesian ...*, hlm. 71.
16. Sampai 1952, aktivitas-aktivitas lapangan (BTI) memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh PSI. Bahkan, tokoh seperti Sjam (saya mendengar dari orang-orang yang dekat dengan Tim Operasi Kalong) masih menaruh hormat kepada beberapa pimpinan PSI. Namun, karena pimpinan-pimpinannya terlalu berpolitik "rem", akhirnya mereka lari.
17. Di Universitas Cornell, saya menemukan stensilan "Keadaan Kehidupan Politik di Indonesia". Menurut Dr. Benedict Anderson, brosur itu ditulis oleh Mr. A.K. Pringgodigdo atas permintaan Perdana Menteri Hatta sebagai evaluasinya terhadap politik di Indonesia. Walaupun analisisnya kasar, isinya cukup tajam.
18. Lihat kritik Musso dalam *Jalan Baru untuk Republik Indonesia*, hlm. 19.
19. Politik partai yang tidak prinsipal diperlihatkan terus dalam sejarah Republik Indonesia.
20. *Nasional*, 31 Januari 1948.
21. *Nasional*, 17 Februari 1948.
22. Keputusan Konferensi PS lihat *Nasional*, 24 Februari 1948.

23. *Nasional*, 26 Februari 1948.
24. *Nasional*, 16 Februari 1948.
25. George Mc T. Kahin, *Nationalism* ..., hlm. 262.
26. Wawancara dengan Hatta di Jakarta, 25 September 1967.
27. *Nasional*, 20 Maret 1948.
28. Lihat *Nasional*, 15 April 1948. Lihat pula untuk perbandingan umum tentang situasi waktu itu dari versi FDR, Derita Sp., *Lima Minggu Sebelum Madiun Affair* (Medan: Toko Buku Sarkawi, 1949(?)), hlm. 7.
29. *Nasional*, 18 Mei 1948.
30. A. Brackman, *Indonesian* ..., hlm. 74.
31. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VII*, hlm. 20.
32. Teks lengkap dimuat dalam *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VII*, hlm. 25–31.
33. *Ibid.*, hlm. 33.
34. *Ibid.*, hlm. 34–35.
35. George Mc T. Kahin, *Nationalism* ..., hlm. 270–271. Persoalan ini menimbulkan masalah yang sulit dalam menilai apakah dokumen ini tidak dipalsukan oleh pihak lawan politik FDR. Dalam sejarah Indonesia, kisah-kisah dokumen ternyata sering palsu atau harus dicek kembali. Ingat Dokumen 11 Pasal (lihat sebelumnya), dokumen *Meningkatkan Perjuangan Militer Baru*, dokumen apa yang disebut Dokumen Palsu PKI (1964), Dokumen Gilchrist (1965), bahkan *tape* Dewan Jenderal (1965). Walaupun kita belum dapat menilai dokumen-dokumen ini, hendaknya dipelajari dalam konteks politiknya.
36. Wawancara dengan Hatta di Jakarta, 25 September 1967.

37. St. M., "FDR Beroposisi", *Siasat*, 4 Juli 1948.
38. *Siasat*, 11 Juni 1948.
39. Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *Sejarah Tentara Nasional Indonesia Komando Daerah Militer VII Diponegoro, Jawa Tengah* (tp., tt.), hlm. 171.
40. Jenderal Sudirman menjadi Letnan Jenderal, Jenderal Mayor Nasution menjadi Kolonel, dan seterusnya.
41. *Sejarah TNI Kodam VII Diponegoro*, hlm. 172–177.
42. Perdana Menteri Hatta di muka sidang KNIP, 2 September 1948.
43. George Mc T. Kahin, *Nationalism ...*, hlm. 265.
44. *Sejarah TNI Kodam VII Diponegoro*, hlm. 170.
45. *Ibid.*, hlm. 175–176.
46. Tidak terdapat catatan dalam edisi sebelumnya.
47. Lihat D.N. Aidit, *Pilihan Tulisan I*, dalam artikel "Menggugat Peristiwa Madiun" (Jakarta: Yayasan Pembaharuan, 1959), hlm. 328.
48. Lihat misalnya cerita pendek Pramoedya Ananta Toer, "Kenangan pada Seorang Kawan", *Percikan Revolusi* (Jakarta: Gapura, 1950).
49. *Siasat*, 20 Juni 1948.
50. *Siasat*, dalam "Rasionalisasi Angkatan Perang", 1 Agustus 1948.
51. Lihat Djamal Marsudi, *Menyingkap ...*, hlm. 45.
52. Pidato Tjugito di BP KNIP, lihat *Nasional*, 10 September 1948.
53. Jika tidak disebutkan sumber lain, dikutip dari *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 36–60, *pasim*.
54. Lihat misalnya Tajuk Rencana harian *Nasional*, 15 Juli 1948.
55. *Ibid.*
56. Wawancara Letjen Sudirman, *Nasional*, 16 Juli 1948.

57. Wawancara dengan Hatta di Jakarta, 25 September 1967.
58. Ruth T. McVey, *The Soviet ...*, hlm. 47–49. Bandingkan dengan *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VII*, hlm. 157–159.
59. *Ibid.*, hlm. 50. Waktu itu Belanda sangat bergantung pada Amerika Serikat, yang banyak memberikan bantuan ekonomi. Jika Amerika Serikat menekan Belanda, Belanda mau tidak mau harus patuh kepada Washington.
60. *Suara Ibukota*, 14 Agustus 1948, dimuat dalam Derita Sp., *Lima ...*, hlm. 32–33.
61. *Ibid.*, hlm. 30.
62. Misalnya rapat di Alun-Alun Yogyakarta, 22 Agustus 1948, lihat *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 163.
63. *Ibid.*, hlm. 158–159.
64. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 108–109 (teks pidato lengkap Hatta di muka BP KNIP, 2 September 1948).
65. *Revolusioner*, 19 Agustus 1948, dimuat dalam Derita Sp., *Lima ...*, hlm. 16–18.
66. *Jalan Baru untuk Republik Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pembaharuan, 1953).
67. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 156–163.
68. Pengakuan Soeripno sebelum ditembak mati, dimuat dalam Djamal Marsudi, *Menyingkap ...*, hlm. 79.
69. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 173.
70. *Nasional*, 16 September 1948.
71. George Mc T. Kahin, *Nationalism ...*, hlm. 276.

72. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 169.
73. *Pojok Merdeka*, 13 September 1948, dimuat dalam *Sekitar Perang ...*, hlm. 171.
74. Derita Sp., *Lima ...*, hlm. 37. Menarik sekali pengucapan istilah kolaborator yang dapat dihubungkan dengan Soekarno-Hatta.
75. George Mc T. Kahin, *Nationalism ...*, hlm. 277.
76. Diceritakan oleh eks-Kapten Soeharto dari Divisi V kepada penulis, 1967. Dalam buku *Siliwangi dari Masa ke Masa*, hlm. 224, disinggung pula secara umum oknum-oknum Siliwangi yang kasar dan jago selama hijrah di Jawa Tengah. Sumber-sumber resmi Siliwangi menyatakan bahwa keadaan ekonomi prajurit-prajurit Siliwangi amat buruk. Waktu itu lebaran hampir tiba. Mungkin karena kesulitan-kesulitan ini timbul ide di sebagian kelompok Siliwangi untuk "mendaulat" barang-barang persediaan yang tersimpan di Rumah Penjara Solo untuk kemudian dibagi-bagikan kepada kawan-kawan dan sanak keluarga sekadar hadiah lebaran di pengembaraan. Perbuatan ini diketahui Tentara Pelajar dan anggota-anggota Batalion Singowareng. Mereka menegur secara spontan. Teguran/ejekan tersebut dijawab secara kasar. Perselisihan lalu dibesar-besarkan. Akhirnya, timbul *clash* bersenjata. Markas Batalion Rukman diserbu Tentara Pelajar dan Batalion Singowareng. Lihat *Siliwangi dari Masa ke Masa*, hlm. 227–228. Karena tindakan-tindakan Batalion Rukman yang kurang disiplin, batalion ini dikembalikan ke Jawa Barat untuk menyusup di sana. Pada 30 Agustus, mereka keluar dari Solo dan menyamar sebagai pasukan liar melintasi garis demarkasi sebagai gerom-

bolan Kesatuan Gerakan Rakyat Merdeka. Dalam penyusupan ini, berulang kembali penyerobotan-penyerobotan terhadap milik rakyat. Akibatnya, rakyat bersikap anti kepada mereka. Lihat *Siliwangi dari Masa ke Masa*, hlm. 287–292.

77. Kecuali disebutkan sumber lain. Bagian ini disusun atas dasar naskah buku *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 186–207.
78. *Sejarah TNI Kodam VII Diponegoro*, hlm. 178.
79. "PKI Menggugat Peristiwa Madiun", dalam D.N. Aidit, *Pilihan Tulisan I*, hlm. 378–381.
80. George Mc T. Kahin, *Nationalism ...*, hlm. 288–289.
81. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 201.

Bab Enam

1. T.B. Simatupang, *Laporan dari Banaran*, hlm. 98.
2. Lihat Pinardi, *Peristiwa Coup Berdarah PKI September 1948 di Madiun* (Jakarta: Inkopak-Hazera, 1967). Juga *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 207.
3. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 803.
4. G.R., "Tangan Besi", *Siasat*, 26 September 1948.
5. *Ibid*.
6. D.N. Aidit, "PKI Menggugat Peristiwa Madiun", *Pilihan Tulisan I*, hlm. 383–384.
7. Djamal Marsudi, *Menyingkap ...*, hlm. 27–28.
8. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 210 dan 224.
9. *Nasional*, 23 September 1948.
10. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 228.

11. Situasi ini memudahkan pemerintah untuk mengadakan penangkapan besar-besaran terhadap tokoh PKI. Banyak di antara mereka yang tidak mengetahui sebab mereka ditangkap. Mereka mengetahui *coup* setelah mereka ditangkap.
12. Lihat "Tulisan Soeripno dalam Penjara", dimuat dalam Djamal Marsudi, hlm. 77–94.
13. "Keterangan CC PKI tentang Peristiwa Madiun", 6 Februari 1951, dimuat dalam *Bintang Merah*, 15 Februari 1951.
14. Hal ini diakui dalam "Tulisan Soeripno dalam Penjara", Djamal Marsudi, hlm. 91.
15. Teks pidato dimuat lengkap dalam Notosoetarjo, *Peristiwa Madiun* (Jakarta: Endang Pemuda-Api Islam, 1966), hlm. 128–131.
16. "UU tentang Pemberian Kekuasaan Penuh kepada Presiden dalam Keadaan Bahaya", Yogyakarta, 20 September 1948.
17. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 108–109.
18. *Ibid.*, hlm. 215–216.
19. *Ibid.*, hlm. 226–227.
20. *Ibid.*, hlm. 296–297.
21. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 225–226.
22. *Ibid.*, hlm. 226–227.
23. *Ibid.*, hlm. 227.
24. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 228.
25. Untuk menyusun kisah pemerintah Fron Nasional di Pati, saya menggunakan naskah ketikan laporan Mohamad Hoesein, Asisten Wedana Kota Pati, yang ditulis pada 18 Oktober di Magelang. Aslinya berada di Universitas Cornell.

26. *Ibid.*
27. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 445.
28. Sebelum terjadi proklamasi pemerintahan Fron Nasional, Cepu dipersiapkan oleh FDR untuk antipemerintah. Guru-guru diorganisasikan untuk mogok karena catu beras Januari–Februari belum datang (masih masa pemerintahan Amir, *sic.*) dan diikuti buruh-buruh lain. Kemudian, Musso datang dan berpidato antipemerintah. Jadi, ia memang sudah antipemerintah. Lihat reportase Gadis Rasjid dalam *Siasat*, 24 Oktober 1948.
29. Reportase Gadis Rasjid, *Siasat*, 24 Oktober 1948. *Nasional*, 18 Oktober 1948 dan *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 527–528.
30. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 239.
31. Lihat catatan Letkol Sambas, dimuat dalam buku *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 466–473.
32. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 461–464.
33. Pinardi, *Peristiwa ...*, hlm. 127.
34. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 496–497.
35. Harian *Nasional* yang beraliran tengah, setelah Peristiwa Dungus mulai mengubah sikap. Lihat tulisan MS, "Kejam", *Nasional*, 4 Oktober 1948. Di samping di Dungus, terjadi pembunuhan massal di Tirtomoyo. Penanggung jawabnya, Letkol Yusuf Basri, ditembak mati, *Nasional*, 26 Oktober 1948.
36. Menarik sekali pendapat Simatupang dalam *Laporan dari Banaran*, hlm. 98. "Sejak di sekolah militer, telah saya pelajari bahwa perang saudara se-

lalu membangkitkan emosi-emosi dan kebencian-kebencian yang jauh lebih mendalam daripada dalam perang yang biasa. Sekarang bangsaku telah mengalami kebenaran dari pendapat demikian saya berkata kepada diri saya setelah saya mendengar dan melihat sendiri kejadian-kejadian sekitar Pemberontakan Madiun ini."

37. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 489. Pinardi dalam bukunya *Peristiwa ...*, hlm. 101–103, mengisahkan dengan penuh rasa sedih dan kagum bagaimana dua orang pasukan TRIP, Alex Legowo dan Soenarjo, yang ikut PKI dihukum mati oleh teman-teman sendiri. Mereka tenang sekali menitipkan pesan untuk ibu mereka bahwa ia (Alex) rela mati untuk cita-citanya. Ia merangkul teman-temannya dan menyanyikan Mars TP ketika menuju tempat eksekusi.
38. *Nasional*, 21 Oktober 1948.
39. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 511.
40. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 465. "Laporan tentang penangkapan pemimpin Musso", dimuat dalam Djamal Marsudi, *Menyingkap ...*, hlm. 102–106.
41. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 509 dan harian *Nasional*, 9 November 1948.
42. Wawancara dengan Ny. Wiroreno, 17 Maret 1966. Saya tidak berhasil mendapatkan sumber lain untuk mengadakan *checking* atas sumber subjektif ini.
43. Wawancara televisi 18 September di Jakarta dengan Mayjen Kemal Idris.
44. Wawancara dengan eks Kapten Soeharto, Jakarta, 1967. Penulis melihat foto-foto koleksi Djamal Marsudi waktu itu.

45. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid VIII*, hlm. 531.
46. Pengakuan (memori Soeripno) ini dimuat dalam buku Djamal Marsudi, *Menyingkap ...*, hlm. 77–94. Bandingkan dengan otokritik Sudisman (Oktober 1967) yang juga amat kritis dan jujur dalam membahas kelemahan-kelemahan PKI.
47. Tentang peristiwa di Ngalihan, lihat D.N. Aidit, "PKI Menggugat Peristiwa Madiun", *Pilihan Tulisan I*, hlm. 391–392. Juga lihat laporan tentang pemakaman tokoh-tokoh PKI, *Bintang Merah*, 15 Desember 1950.
48. T.B. Simatupang, *Laporan ...*, hlm. 97–98.
49. Wawancara dengan Soebadio Sastrosatomo di Jakarta, 22 Maret 1968.
50. T.B. Simatupang, *Laporan ...*, hlm. 90–91.
51. Roger Villand, Boroboudour—*Voyage a Bali, Java et autres ilen* (Italia: Correa, 1915), hlm. 154–156. Terjemahannya: Apakah yang dimaksud oleh orang-orang Amerika dengan penghancuran unsur-unsur komunis? Dalam keadaan merdeka, orang-orang komunis lebih berbahaya daripada di dalam tentara tempat mereka menerima disiplin.
"Apakah yang akan kita perbuat terhadap seorang prajurit yang memberontak di hadapan musuh?"
"Kita akan menembaknya."
"Mereka harus dihancurkan."
"Orang komunis tidak akan berontak. Sampai sekarang mereka tetap setia di tempatnya, yaitu Fron Nasional untuk kemerdekaan."
"Itu karena polisi saudara kurang baik mengenal cara-cara kerja mereka."
Orang-orang Amerika menyetujui agar orang-orang Indonesia berpikir sampai keesokan harinya.

52. D.N. Aidit, "PKI Menggugat Peristiwa Madiun", dimuat dalam *Pilihan Tulisan I*, hlm. 368–399.
53. "Keterangan CC PKI tentang Peristiwa Madiun", *Bintang Merah*, 15 Februari 1951.
54. T.B. Simatupang, *Laporan ...*, hlm. 95.
55. Pemerintah mencoba mendukung teori ini dengan mengumumkan dokumen-dokumen rahasia FDR (dua buah) setelah pemberontakan meletus. Lihat juga naskah pidato Presiden Soekarno pada 19 September dan pidato Wakil Presiden Hatta di muka BP KNIP pada 20 September 1948. Tentang ketergesa-gesaan PKI berasal dari wawancara pribadi dengan Hatta pada 25 September 1967. Menurut Sjahrir (melalui wawancara dengan Soebadio pada 22 Maret 1968), usaha-usaha untuk membina Fron Nasional harus dilakukan seorang politikus ulung. Sayangnya, orang yang dikirim adalah Kopral Musso, yang pekerjaannya terburu-buru terus.